



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021 – 2026





**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2026**

Menimbang

Mengingat



- ...Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cipta Kerja perlu diubah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026;
- ...Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ...Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- ...Undang-Undang Nomor 3851);
- ...Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik



PARAF KOORDINASI	
KABAG	A
OPD	2

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengamanan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);
13. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



PARAF KOORDINASI	
KABAG.	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kajian Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2026.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Visi adalah rumusan mudiim mudiim keadaban yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan mudiim mudiim menggerakkan masyarakat yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan diciptakan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
14. Strategi adalah langkah, kebijakan, program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran schubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya,

PARAF KOORDINASI	
KABAG	R
OPD	1

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- menetapkan Visi, Misi dan Program Pembangunan jangka menengah Daerah;
- menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana strategis PD, rencana kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD dan perencanaan penganggaran; dan
- mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan daerah lain yang memiliki batas-batas yang sama.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- kedudukan RPJMD;
- sistematika RPJMD;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
- ketentuan penutup.



- RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD.
- RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.
- RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - PD dalam menyusun rencana kerja PD;
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
 - BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB IX Penutup.
- Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan RPJMD; dan
 - b. Pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

Peraturan Daerah

Agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Diundangkan di Bula
pada tanggal 24 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, A.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 200.a

PARAF KOORDINASI	
KABAG	R
OPD	9

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu landasan hukum perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan pedoman strategis dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari pembangunan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk mencapai tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi satuan kerja didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

PRARAF KOORDINASI	
KABAG	R
OPD	2

- Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

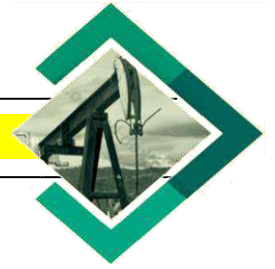
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 155.a



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>R</i>
OPD	<i>g</i>



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidaya-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan

RPJMD merupakan dokumen awal penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, serta mengacu kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2026. Selain itu penyusunan dokumen ini juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi guna sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi

Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pihak, lembaga pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan menyertai segala tugas dan pengabdian kita terhadap nusa bangsa dan khususnya bagi daerah tercinta yang bertajuk ***Ita Wotu Nusa*** dan bersama sama mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur lima tahun kedepan, yakni "**TERWUJUDNYA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING, BERBASIS SUMBER DAYALOKAL**"

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDUL MUKTI KELIOBAS



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Hubungan RPJMD dan Dokumen Lainnya.....	I-6
1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024	I-23
1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	I-25
1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025	I-26
1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur	I-27
1. Analisis Eksternal dan Internal Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur	I-27
2. Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur	I-27
A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	I-30
B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	I-30
C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	I-31
D. Pusat Pelayanan Lingkungan(PPL)	I-32
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	I-32
1.4. Maksud dan Tujuan	I-43
1.5. Sistematika	I-44
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-46
2.1. ASPEK DEMOGRAFI DAN GEOGRAFIS	II-46
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Administratif.....	II-47
A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administratif	II-47
B. Kondisi Topografi	II-49
C. Kondisi Hidrologi	II-50
D. Kondisi Klimatologi	II-51
E. Penggunaan Lahan.....	II-54
F. Potensi Pengembangan Wilayah	II-58
G. Kawasan Rawan Bencana	II-62
H. Demografi	II-74
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-76
2.2.1. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur	II-76
1. Pertumbuhan PDRB (Pengeluaran)	II-76
1.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	II-82
1.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	II-85
1.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	II-86
1.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	II-88
1.5. Perubahan Inventori	II-89



1.6. Ekspor Barang dan Jasa.....	II-90
1.7. Import Barang dan Jasa.....	II-90
2. Kemiskinan	II-92
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	II-95
1. Bidang Pendidikan	II-95
2. Bidang Kesehatan	II-96
3. Bidang Pertanian.....	II-101
4. Bidang Ketenagakerjaan.....	II-101
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-102
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-102
1. Urusan Pendidikan	II-102
1.1. Pendidikan Dasar	II-102
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-102
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Murid Usia Sekolah	II-103
c. Rasio Guru Per Murid	II-105
2. Urusan Kesehatan	II-105
2.1.1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita	II-105
2.1.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu	II-106
2.1.3. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	II-107
2.1.4. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	II-108
2.1.5. Cakupan Balita Yang Pernah Mendapatkan Vaksinasi	II-108
2.1.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	II-109
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-110
3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	II-110
3.1.2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	II-112
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-112
4.1.1. Cakupan Rumah Layak Huni	II-113
4.1.2. Prasarana dan Sarana Umum	II-114
a. Air Bersih	II-114
b. Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Lainnya	II-115
c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	II-115
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-116
5.1. Satuan Polisi Pamong Praja	II-116
5.2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-117
6. Urusan Sosial	II-118
6.1. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	II-118
6.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	II-118
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-119
1. Urusan Tenaga Kerja.....	II-119
2. Pemberdayaan Perempuan dan Anak	II-120
3. Urusan Ketahanan Pangan	II-120
4. Lingkungan Hidup	II-121
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-122
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-122
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-123



8. Urusan Perhubungan	II-124
9. Urusan Komunikasi dan Informatika	II-127
a. Jumlah Jaringan Komunikasi	II-127
b. Jumlah Wartel/Warnet	II-127
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-128
11. Urusan Penanaman Modal	II-128
12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-129
13. Urusan Statistik	II-130
14. Urusan Kebudayaan	II-130
15. Urusan Perpustakaan	II-131
16. Urusan Kearsipan	II-132
17. Urusan Perencanaan Pembangunan	II-132
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-133
2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-133
1. Ketersediaan Ketersediaan Unsur Hara di sekitar Perairan Pulau Keffing, Seram Bagian Timur	II-135
2. Plankton di Pulau Kefin, Seram Bagian Timur	II-136
3. Mangrove	II-137
4. Ekosistem Lamun	II-138
5. Terumbu Karang	II-139
2.3.3.2. Urusan Pariwisata.....	II-143
2.3.3.3. Urusan Pertanian.....	II-145
2.3.3.4. Urusan Kehutanan.....	II-146
2.3.3.5. Urusan Energi Sumberdaya Mineral	II-149
2.3.3.6. Urusan Perdagangan.....	II-150
2.3.3.7. Urusan Perindustrian.....	II-151
2.3.3.8. Urusan Transmigrasi	II-152
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-153
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-153
1) Otonomi Daerah	II-153
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-153
b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-153
2) Pertanian	II-154
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-154
1) Perhubungan	II-154
2) Fasilitas Bank dan Non Bank	II-155
a. Hotel Berbintang	II-155
b. Hotel Melati	II-155
3) Lingkungan Hidup	II-156
4) Komunikasi dan Informatika	II-156
2.4.3. Fokus Iklim Investasi	II-156
1) Keamanan dan Keterlibatan	II-156
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-157
1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)	II-158
2) Tingkat Ketergantungan	II-158
3) Indeks Pembangunan Manusia	II-160
2.4.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020	II-162



BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-249
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III-250
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-252
1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah.....	III-252
A. Pendapatan Daerah.....	III-253
B. Penerimaan Pembiayaan	III-255
3.1.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah.....	III-255
3.1.2.1 Kinerja Realisasi Belanja Daerah	III-255
3.1.2.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	III-257
3.1.2.3. Neraca Daerah	III-257
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIMASA LALU.....	III-258
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-259
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-259
3.3. KERANGKA PENDANAAN.....	III-259
3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu	III-259
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-269
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-273
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-273
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dan Kesejahteraan Masyarakat	IV-280
1. Pendidikan	IV-280
2. Kesehatan.....	IV-281
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV-282
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-282
5. Sosial.....	IV-282
4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-283
1. Tenaga kerja	IV-283
2. Penanaman Modal.....	IV-283
3. Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-283
4. Kebudayaan	IV-283
5. Perpustakaan.....	IV-284
6. Kearsipan.....	IV-284
7. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.....	IV-284
8. Statistik.....	IV-284
9. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	IV-285
10. Pangan	IV-285
11. Pertanahan.....	IV-285
12. Lingkungan hidup	IV-285
13. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	IV-286
14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	IV-286
15. Perhubungan	IV-286
16. Komunikasi Informatika Dan Persandian.....	IV-286
4.1.3. Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar.....	IV-287
1. Pariwisata	IV-287
2. Perdagangan	IV-287
3. Kelautan dan Perikanan	IV-287
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV-288
5. Pertanian.....	IV-289



4.1.4. Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar.....	IV-290
1. Kebijakan, Pelayanan Publik Dan Koordinasi Perangkat Daerah.....	IV-290
2. Keuangan	IV-290
3. Pengawasan	IV-290
4. Perencanaan Serta Penelitian Dan Pengembangan.....	IV-291
4.1.5. Penunjang Urusan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar	IV-291
1. Sarana Dan Prasarana Perkantoran	IV-291
2. Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	IV-291
4.2. ISU-ISU STRATEGIS	IV-292
4.2.1. Isu Strategis Nasional	IV-292
1. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-292
a. Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	IV-295
b. Penyusunan TPB/SDGs Tingkat Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	IV-299
c. Langkah-Langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs.....	IV-300
d. Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB.SDGs.....	IV-301
2. Kesadaran Aksi Global Terkait Climate Action (Aksi Iklim)	IV-321
3. Kesenjangan Global Dalam Pembangunan Manusia (<i>Global Inequality Human Development</i>)	IV-322
4. Revolusi Industri 4.0	IV-323
5. Konflik Regional	IV-325
4.2.2. Isu Kebijakan Nasional.....	IV-327
1. RPJMN Tahun 2020-2024.....	IV-327
2. Kebijakan Nasional Tentang Lumbung Ikan Nasional	IV-329
3. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Tentang Normal Baru (<i>New Normal</i>)	IV-331
4.2.3. Isu atau Kebijakan Provinsi Maluku.....	IV-334
1. RPJMD Provinsi Maluku	IV-334
4.2.4. Isu-isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur	IV-339
1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	IV-339
2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKM dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	IV-341
3. Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektivitas Antar Wilayah	IV-343
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	IV-345
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	IV-345
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-349
5.1. Visi.....	V-350
5.2. Misi.....	V-358
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-365
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-370
6.1. Strategi.....	VI-370



6.2. Arah Kebijakan	VI-381
1. Arah Kebijakan Tahun 2021	VI-382
2. Arah Kebijakan Tahun 2022	VI-382
3. Arah Kebijakan Tahun 2023	VI-383
4. Arah Kebijakan Tahun 2024	VI-383
5. Arah Kebijakan Tahun 2025	VI-383
6. Arah Kebijakan Tahun 2026	VI-384

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-388

7.1. Kerangka Pendanaan	VII-388
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-419
7.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	VII-420
1. Urusan Pendidikan	VII-420
2. Urusan Kesehatan	VII-420
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VII-420
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	VII-420
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	VII-420
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	VII-421
7.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	VII-421
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	VII-421
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	VII-421
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	VII-421
4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	VII-421
5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil.....	VII-421
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	VII-421
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	VII-422
8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	VII-422
9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.....	VII-422
10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	VII-422
11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	VII-422
12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	VII-422
13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	VII-422
14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	VII-423
15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	VII-423
16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.....	VII-423
17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....	VII-423
7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	VII-423
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	VII-423
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	VII-423
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	VII-423
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	VII-423
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	VII-424
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.....	VII-424
7.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	VII-424
1. Sekretariat Daerah	VII-424
2. Sekretariat DPRD	VII-424



7.2.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	VII-424
1.	Perencanaan	VII-424
2.	Keuangan	VII-424
3.	Kepegawaian	VII-424
4.	Pendidikan dan Pelatihan	VII-424
5.	Penelitian dan Pengembangan	VII-424
7.2.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	VII-425
1.	Inspektorat Daerah	VII-425
7.2.7	Unsur Kewilayahan	VII-425
1.	Kecamatan	VII-425
7.2.8	Unsur Pemerintahan Umum	VII-425
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	VII-425
7.3.	Penyusunan Alternatif Program	VII-425
a.	Kriteria Penyusunan Alternatif Program	VII-425
b.	Alternatif Program	VII-426
1.	Alternatif Program Terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	VII-426
2.	Alternatif Program Indikator TPB/SDGs Belum Tercapai	VII-427
3.	Alternatif Program Kebutuhan Daerah	VII-428
7.4.	Program Unggulan Daerah	VII-428
1.	Satu Data, SBT Membangun	VII-429
2.	SBT Sehat	VII-429
3.	SBT Unggul, Unggul, Maju, Berbudaya dan Berinovasi	VII-430
4.	SBT Melayani	VII-430
5.	SBT Terakses dan Terlayani	VII-430
BAB VIII, KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII-433
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-438
2.	Aspek Pelayanan Umum	VIII-438
3.	Aspek Daya Saing Daerah	VIII-438
BAB IX. PENUTUP		IX-486
9.1.	Pedoman Transisi	IX-486
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-487
9.3.	Penutup	IX-487



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-10
Table I.2. Indikator TPB Kabupaten Seram Bagian Timur.....	I-33
Tabel I.3. Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Seram Bagian Timur	I-34
Tabel I.4. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-35
Tabel II.1 Presentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-47
Tabel II.2 Luas Daerah dan Presentase Terhadap Luas di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-49
Tabel II.3 Data Topologi Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-49
Tabel II.4 Nama Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-51
Tabel II.5 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020	II-55
Tabel II.6 Luas Wilayah Menurut Status Penggunaan Lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Ha), Tahun 2020	II-55
Tabel II.7. Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020	II-55
Tabel II.8. Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020	II-56
Tabel II.9 Lahan Kritis di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-57
Tabel II.10. Pengembangan Kawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-59
Tabel II.11. Luas Area Rawan Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur	II-65
Tabel II.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	II-76
Tabel II.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)	II-77
Tabel II.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah).....	II-78
Tabel II.15 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-79
Tabel II.16 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-81
Tabel II.17 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-82
Tabel II.18 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-82
Tabel II.19 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-83
Tabel II.20 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-84
Tabel II.21 Pertumbuhan Implisit (indeks harga) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)	II-85



Tabel II.22 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-85
Tabel II.23 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-86
Tabel II.24 Perkembangan dan struktur PMTB Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 ..	II-88
Tabel II.25 Perkembangan dan struktur perubahan inventori Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-89
Tabel II.26 Perkembangan Ekspor Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-90
Tabel II.27 Perkembangan Import Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-91
Tabel II.28 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2020	II-93
Tabel II.29 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-94
Tabel II.30 Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-94
Tabel II.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2020	II-94
Tabel II.32 Data Bidang Pendidikan, 2020.....	II-96
Tabel II.33. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan, Tahun 2018-2020	II-97
Tabel II.34. Keluarga dan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021	II-98
Tabel II.35 Data Petugas Sanitasi Per Puskesmas Tahun 2021 Dinas Kesehatan.....	II-100
Tabel II.36 Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020	II-102
Tabel II.37 Data APS, APM dan APK Formal dan Non Formal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020	II-102
Tabel II.38 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD, di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2019/2020 dan 2020/2021	II-103
Tabel II.39 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP, di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021	II-103
Tabel II.40 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas, (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021	II-104
Tabel II.41 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021	II-104
Tabel II.42 Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020	II-105
Tabel II.43 Jumlah RSUD, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan PolinDes, Menurut Kecamatan, 2019 dan 2020.....	II-106
Tabel II.44 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020	II-107
Tabel II.45 Angka Kesakitan menurut Karakteristik	II-108



Tabel II.46 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat imunisasi menurut karakteristik dan jenis imunisasi, 2020	II-109
Tabel II.47 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 18-49 Tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan menurut karakteristik, 2020	II-109
Tabel II.48 Panjang Jalan Menurut Penanganan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2021 (km)	II-111
Tabel II.49 Jalan Menurut Penanganan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2021 (km).....	II-111
Tabel II.50 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-112
Tabel II.51 Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-113
Tabel II.52 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Daya Utama yang digunakan Rumah Tangga	II-115
Tabel II.53 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-116
Tabel II.54 Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-117
Tabel II.55 Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-117
Tabel II.56 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial (Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-118
Tabel II.57 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan.....	II-118
Tabel II.58 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-119
Tabel II.59 Perkembangan urusan Tenaga Kerja berdasarkan angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-119
Tabel II.60 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan	II-120
Tabel II.61 Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-121
Tabel II.62 Ketersediaan Jenis Air Minum di Kab. Seram Bagian Timur	II-121
Tabel II.63 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-122
Tabel II.64 Jumlah kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-123
Tabel II.65 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-123
Tabel II.66 Perkembangan Penyelenggaraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-124
Tabel II.67 Nama Pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-125
Tabel II.68 Jumlah Sistem Informasi dan Ekspansi Informasi Data di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-127
Tabel II.69 Jumlah Koperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-128
Tabel II.70 Jumlah PMDN/PMA di kabupaten Seram Bagian Timur	II-129
Tabel II.71 Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-129



Tabel II.72 Ketersediaan Informasi Manual Book di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-130
Tabel II.73 Perkembangan Pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-131
Tabel II.74 Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-131
Tabel II.75 Jumlah SDM dan Pengelola Arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-132
Tabel II.76 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-132
Tabel II.77 Luas Kawasan Hutan dan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (hektar), 2020	II-147
Tabel II.78 Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-150
Tabel II.79 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah sampai dengan Tahun 2020	II-162
Tabel III.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020	III-253
Tabel III.2 Rincian Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2020	III-254
Tabel III.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016-2020	III-257
Tabel III.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	III-267
Tabel III.5 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	III-271
Tabel III.6 Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	III-272
Tabel IV.1. Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs)	IV-301
Tabel IV.2 Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur	IV-302
Tabel IV.3 Kategori Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan TPB	IV-303
Tabel IV.4 Kategori Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Pilar	IV-303
Tabel IV.5 Kategori Capaian TPB Berdasarkan Urusan/Dinas/OPD di Kabupaten Seram Bagian Timur	IV-306
Tabel IV.6 Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Sosial)	IV-307
Tabel IV.7 Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Lingkungan)	IV-316
Tabel IV.8 Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Ekonomi)	IV-317
Tabel IV.9 Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola)	IV-319
Tabel V.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Beserta Target Capaian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	V-353
Tabel V.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	V-366
Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026	VI-375
Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Seram Bagian Timur 2021-2026	VI-385
Tabel VII.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026	VII-389



Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	VIII-471

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-8
Gambar I.2. Alur Sistem Penyusunan Rencana Pembangunan	I-9
Gambar I.3. Visi, Misi, Arah dan Tujuan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	I-24
Gambar I.4. Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 terhadap Dokumen Perencanaan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Maluku	I-25
Gambar I.5. Peta Analisis Eksternal dan Internal Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur ..	I-27
Gambar I.6 Konsep Struktur Ruang Kota Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur	I-28
Gambar I.7 Peta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	I-29
Gambar I.8 Diagram Persentase Capaian Indikator TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur, Terhadap Target Nasional	I-33
Gambar II.1 Bagan Alur Pikir Potensi Pengembangan Wilayah	II-46
Gambar II.2 Peta Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-48
Gambar II.3 Peta Elevasi Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-50
Gambar II.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Seram Bagian Timur.....	II-58
Gambar II.5 Peta Multi Risiko Bencana di Kabupaten Seram Bagian Timur	II-62
Gambar II.6 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-74
Gambar II.7 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SP 2020).....	II-75
Gambar II.8 Peta Hutan Produksi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020	II-148
Gambar IV.1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	IV-295
Gambar IV.2 Diagram Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur	IV-302
Gambar IV.3 Dampak Covid-19 Terhadap Berbagai Sektor.....	IV-332
Gambar IV.4 Sebaran Prakiraan Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Akibat Covid-19.....	IV-333



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)	II-78
Grafik II.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)	II-79
Grafik II.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-79
Grafik II.4. Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (triliun rupiah)	II-80
Grafik II.5. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020	II-81
Grafik II.6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (persen)	II-92
Grafik II.7. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (ribu)	II-93
Grafik II.8. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur 2016 sampai dengan 2020	II-150
Grafik IV.1. Kategori Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kategori Capaian	IV-304
Grafik IV.2. Pengangguran Menurut Kelompok Usia dan Pendidikan Tahun 2019	IV-342



BAB I. PENDAHULUAN



Bagian ini akan menguraikan dan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan tahun 2020 telah berada dalam tahapan ketiga dari pembangunan jangka menengah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025. Dalam kurun waktu 20 Tahun perencanaan jangka panjang yang telah tersusun tersebut untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, telah terjadi berbagai perubahan dan dinamika pembangunan baik pembangunan daerah provinsi, nasional maupun global yang turut mempengaruhi arah kebijakan dan strategi pembangunan termasuk hasil dan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 138) akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2016-2021. Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 atas nama Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumlatur, SE

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dengan demikian, Penyusunan



RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi dan misi dan disisi lain, melalui RPJMD tersebut juga akan menjadi dasar dalam perumusan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Seram Bagian Timur

Dalam sistim perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 didalamnya harus memperhatikan dan/atau mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur terurama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 perlu juga memperhatikan dan mempedomani tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Lebih lanjut penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 juga perlu memperhatikan komitmen nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pada bagian lain kondisi objektif akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aspek kesehatan, aspek ekonomi dan fiskal juga perlu mendapatkan perhatian serius seiring dengan kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan menuju tatanan norma baru (*new normal*) serta kebijakan pemulihan ekonomi daerah termasuk kebijakan refocusing yang berdampak pada aspek tatakelola dan strategi pembiayaan daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing



- Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);



16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perubahan dan Kawasan Permukiman;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
42. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 176).

1.3. HUBUNGAN RPJMD DAN DOKUMEN LAINNYA

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun

dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

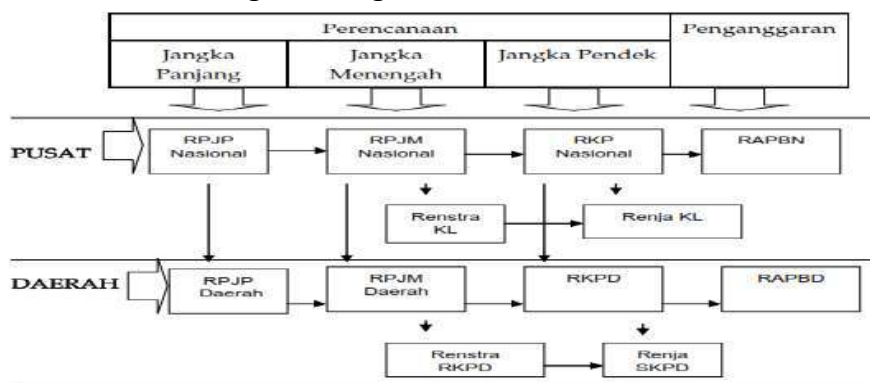
Kesesuaian antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS dengan APBD sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Mengingat RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka penganggaran juga harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Perencanaan memiliki peran yang penting dalam organisasi karena dengan melakukan perencanaan strategik dapat mengatasi masalah dalam penganggaran seperti beban kerja anggaran yang terlalu berat (budget workload) dan adanya alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa datang yang penuh dengan ketidakpastian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tujuan perencanaan pembangunan ialah: Mendukung koordinasi antarpelaku;

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antara daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, maupun antara pusat dan daerah;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat dilihat pada Gambar I.1. sebagai berikut:

Gambar I.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004



Berdasarkan gambar tersebut diatas, dapat dijelaskan antara lain bahwa:

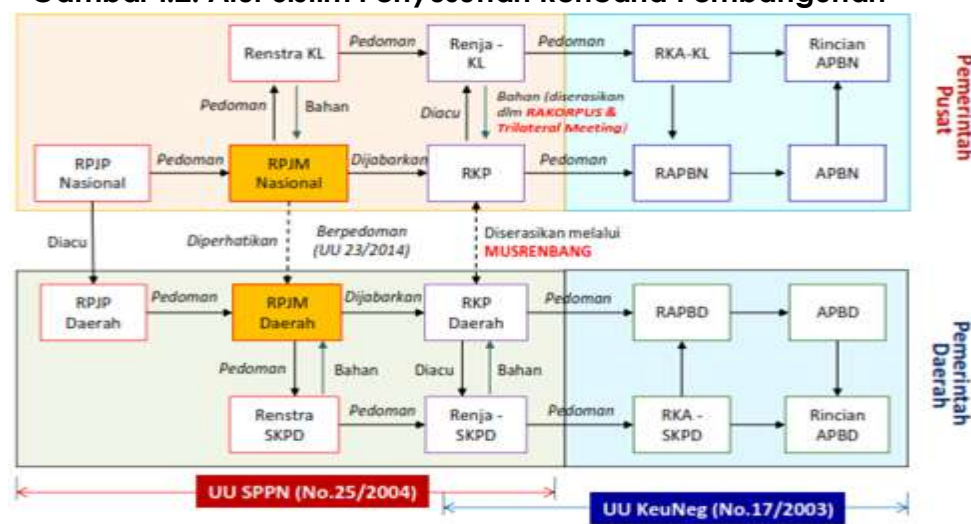
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP Daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah atau "GBHN-nya" daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP Daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pimpinan daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah maka nasib dokumen RPJP Daerah itu mungkin tidak berbedadengan RPJP Daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Prosedur itu memungkinkan terjadi ketidaksinkronan antara RPJM Daerah dengan RPJM Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sedangkan RPJM Nasional adalah penjabaran visi, misi dan Program Presiden terpilih. Misalnya, Presiden terpilih dari partai A dengan ideologi X, sementara di daerah tertentu Kepala Daerah terpilih dari partai B dengan ideologi Y, sehingga akibatnya RPJM nasional dapat saja berbeda jauh dengan RPJM Daerah tertentu tersebut.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kritikan

dalam penyusunan RKPD dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah yang berjangka panjang dan menengah saja diatur supaya melibatkan masyarakat secara aktif. Penyusunan RKPD yang berjangka waktu tahunan dan produk perencanaan yang paling *up to date* serta langsung dapat dirasakan masyarakat, penyusunannya justru tidak diatur harus melibatkan masyarakat. Demikian pula dengan kekuatan hukum bagi RKPD itu yang dapat ditetapkan hanya dengan Peraturan Kepala Daerah, padahal dokumen RKPD itu menjadi acuan bagi penyusunan RAPBD dan RAPBD memiliki kekuatan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- d. Penganggaran program atau kegiatan di daerah dalam undang undang ini tercermin dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RAPBD dalam peraturan perundangan ini mengacu pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 harus diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Maluku, serta RTRW Daerah lain. Gambaran umum tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana terlihat pada Gambar I.2. berikut ini :

Gambar I.2. Alur Sistim Penyusunan Rencana Pembangunan





Tabel I.1 Matriks Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu dua puluh tahun (Tahun 2005 – 2025) : <i>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan"</i> Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan. Lima Tahun Tahap Keempat Tahun 2020 – 2025. Pelaksanaan pembangunan pada tahapan ini, dibagi dalam 2 (dua) periodisasi pembangunan yaitu periode 2 (dua) tahun pertama dan periode 3 (tiga) tahun kedua. Dalam periode pertama proses pembangunan diorientasikan untuk penciptaan daya saing Kabupaten yang maju dan mandiri dalam dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sedangkan pada periode kedua proses pembangunan diarahkan dalam kerangka memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai sejak tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. 1. Bidang Sosial Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya pada tahap ini, dilaksanakan untuk	Visi : Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, Berbasis Sumber Daya Lokal Misi : 10. Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi; 11. Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat; 12. Mendorong Peningkatan SDM Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif, Berkarakter, serta Berdaya Saing; 13. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal (Keuangan) Daerah; 14. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah; 15. Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat.	Visi : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan	1. Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota; 2. Koordinasi provinsi dan kabupaten/ kota berbasis e government; 3. Integrasi e planning dan e budgeting; 4. Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (coffee morning); 5. Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi; 6. Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; 7. Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal; 8. Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen; 9. Revitalisasi BUMD; 10. Satu produk satu desa; 11. Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah; 12. Revitalisasi tanaman	Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
terus memelihara dan mengembangkan kualitas infrastruktur, kelembagaan sosial budaya dan dinamika interaksi sosial yang menghargai perbedaan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai budaya lokal yang positif, melalui peran institusi-institusi budaya dan keagamaan secara berkelanjutan. 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem, kelembagaan, konsolidasi institusi maupun prakarsa dan peran serta masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. 3. Bidang Sumberdaya Manusia Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia pada tahap ini, dilaksanakan terus memelihara dan mengembangkan kualitas infrastruktur dan kelembagaan pendidikan dan kesehatan maupun sumberdaya manusia yang mampu berperan aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. 4. Bidang Politik dan Pemerintahan a. Bidang Politik Pembangunan Bidang Politik pada tahap ini,			rempah (pala dan cengkih); 13. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan; 14. Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang); 15. Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata; 16. Festival budaya tahunan; 17. Pekan pemuda kreatif; 18. Pekan olah raga unggulan pemuda.	Terpercaya; 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
dilaksanakan untuk memelihara dan mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan politik, sarana dan prasarana, pendidikan politik multi kultural serta mekanisme dan komunikasi politik secara berkelanjutan. b. Bidang Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan pada tahap ini, dilaksanakan untuk memelihara dan mengembangkan kualitas kelembagaan Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Negeri, kapasitas aparatur serta rekrutmen yang demokratis secara berkelanjutan. 5. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pembangunan Bidang Hukum dan HAM pada tahap ini, dilakukan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas kelembagaan hukum dan HAM, tata hukum daerah serta kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum secara berkelanjutan. 6. Bidang Infrastruktur Pembangunan Bidang infrastruktur dalam tahapan ini, untuk memelihara dan terus mempertahankan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi wilayah; infrastruktur ekonomi, sosial-budaya dan utilitas; infrastruktur dan					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
sistem keairan; infrastruktur dan sistem distribusi energi serta infrastruktur dan sistem pos dan telematika, sehingga tercipta kemajuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. 7. Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang ekonomi pada tahap ini, dilaksanakan melalui upaya untuk terus menjaga dan memelihara kualitas hubungan antar pelaku ekonomi sehingga memungkinkan berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusinya, berkembangnya mutu sumber daya manusia serta institusi-institusi ekonomi secara rukun dan aman serta berkelanjutan. 8. Bidang Tata Ruang Pembangunan Bidang Tata Ruang pada tahap ini, dilaksanakan untuk memelihara dan mengembangkan kualitas penataan ruang wilayah berbasis kelestarian fungsi ekosistem kepulauan dan mitigasi rawan bencana serta terus menjaga kualitas sistem, kelembagaan dan regulasi yang partisipatif secara berkelanjutan. 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
memelihara dan mengembangkan kualitas infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bertumpu pada karakteristik dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan. Lima Tahun Tahap Keempat – Tahun 2020 – 2025. Pelaksanaan pembangunan pada tahapan ini, dibagi dalam 2 (dua) periodisasi pembangunan yaitu periode 2 (dua) tahun pertama dan periode 3 (tiga) tahun kedua. Dalam periode pertama proses pembangunan diorientasikan untuk penciptaan daya saing Kabupaten yang maju dan mandiri dalam dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sedangkan pada periode kedua proses pembangunan diarahkan dalam kerangka memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai sejak tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. 1. Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang ekonomi pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem, peran pelaku-pelaku ekonomi, aktivitas perekonomian masyarakat, prasarana dan sarana					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat dan distribusinya serta mutu sumber daya manusia dan institusi-institusi ekonomi secara tepat sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Bidang Infrastruktur Pembangunan Bidang Infrastruktur pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi wilayah; infrastruktur ekonomi, sosial-budaya dan utilitas; infrastruktur dan sistem keairan, infrastruktur dan sistem distribusi energi serta infrastruktur dan sistem pos dan telematika secara berkualitas, merata dan berkeadilan secara berkelanjutan. 3. Bidang Tata Ruang Pembangunan Bidang Tata ruang pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat serta peran aktif segenap komponen masyarakat, bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara berkelanjutan. 4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara rasional sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal, kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan IPTEKS dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pola kemitraan secara berkelanjutan. 5. Bidang Sosial Budaya Pembangunan Bidang Sosial budaya pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem nilai budaya lokal yang positif, interaksi sosial dan ekonomi yang harmonis serta menghargai kemajemukan dan kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. 6. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem keamanan wilayah dan ketertiban masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berperan serta melindungi sumberdaya alam secara merata dan berkualitas, maupun					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara berkelanjutan. 7. Bidang Sumberdaya Manusia Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketenagakerjaan, sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan, sumberdaya manusia yang maju dan mandiri maupun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara berkelanjutan. 8. Bidang Politik dan Pemerintahan a. Bidang Politik Pembangunan Bidang Politik pada tahap ini, dilaksanakan melalui untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem politik yang bertumpu pada kearifan lokal didukung, institusi politik, mekanisme dan komunikasi politik yang menciptakan budaya politik partisipatif, maupun stabilitas politik untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. b. Bidang Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas peran kelembagaan					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, peran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara memadai dan berkualitas maupun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan. Lima Tahun Tahap Keempat – Tahun 2020 – 2025 Pelaksanaan pembangunan pada tahapan ini, dibagi dalam 2 (dua) periodisasi pembangunan yaitu periode 2 (dua) tahun pertama dan periode 3 (tiga) tahun kedua. Dalam periode pertama proses pembangunan diorientasikan untuk penciptaan daya saing Kabupaten yang maju dan mandiri dalam dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Sedangkan pada periode kedua proses pembangunan diarahkan dalam kerangka memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai sejak tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. 1. Bidang Sumberdaya Manusia Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam memanfaatkan sumberdaya kepulauan secara optimal sebagai ciri masyarakat yang maju dan mandiri secara berkelanjutan. 2. Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem, peran pelaku-pelaku ekonomi, aktivitas perekonomian, prasarana dan sarana ekonomi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, berkembangnya mutu sumber daya manusia serta institusi-institusi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maju dan mandiri secara berkelanjutan. 3. Bidang Infrastruktur Pembangunan Bidang Infrastruktur pada tahap ini, dilakukan untuk terus memelihara dan mempertahankan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi wilayah; infrastruktur ekonomi, sosial-budaya dan utilitas; infrastruktur dan sistem keairan, infrastruktur dan sistem distribusi energi serta infrastruktur dan sistem pos dan telematika secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan. 4. Bidang Tata Ruang					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
Pembangunan Bidang Tata Ruang pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas pemanfaatan ruang sesuai fungsinya, dinamika sosial dan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan serta pembangunan kawasan strategis secara berkelanjutan. 5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal, sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal secara berkelanjutan. 6. Bidang Sosial Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya pada tahap ini dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem nilai budaya lokal yang positif, interaksi sosial dan ekonomi yang harmonis dan menghormati kemajemukan masyarakat secara berkelanjutan. 7. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
kualitas sistem keamanan wilayah dan ketertiban masyarakat, kesadaran masyarakat untuk secara mandiri berperanserta melindungi sumberdaya alam secara berkelanjutan. 8. Bidang Politik dan Pemerintahan a. Bidang Politik Pembangunan Bidang Politik pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan politik yang bertumpuh pada kearifan lokal, mekanisme dan komunikasi politik serta budaya politik yang partisipatif dan demokratis secara berkelanjutan. b. Bidang Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas sistem dan kelembagaan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Negeri yang baik, bersih dan berwibawa, aparatur pemerintahan yang maju dan mandiri secara berkelanjutan. 9. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahap ini, dilaksanakan untuk terus memelihara dan mengembangkan kualitas peran institusi, supremasi hukum dan HAM, tata hukum daerah					



RPJMD Tahap IV (RPJPD Kab. Seram Bagian Timur)	Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		RPJMN Nasional 2020-2024	
		Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi Misi RPJMN	Agenda Pembangunan
yang responsif, penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegakan hukum secara berkelanjutan.					

1.3.1. AMANAT RPJMN TAHUN 2020-2024

Sebagaimana diketahui RPJMD mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama 5 (lima) tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPD. Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. Selain dua Undang-undang di atas, untuk perencanaan di tingkat daerah juga diatur dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu ditelaah Visi, Misi, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagaimana terlihat

dalam Gambar 1.3 Visi, Misi, Arah dan Tujuan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, sebagai acuan dalam merumuskan Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021-2025

Gambar 1.3 Visi, Misi, Arah dan Tujuan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Terdapat 4 (empat) Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut :

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut, kelima agenda prioritas Presiden ini diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yang mencakup antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

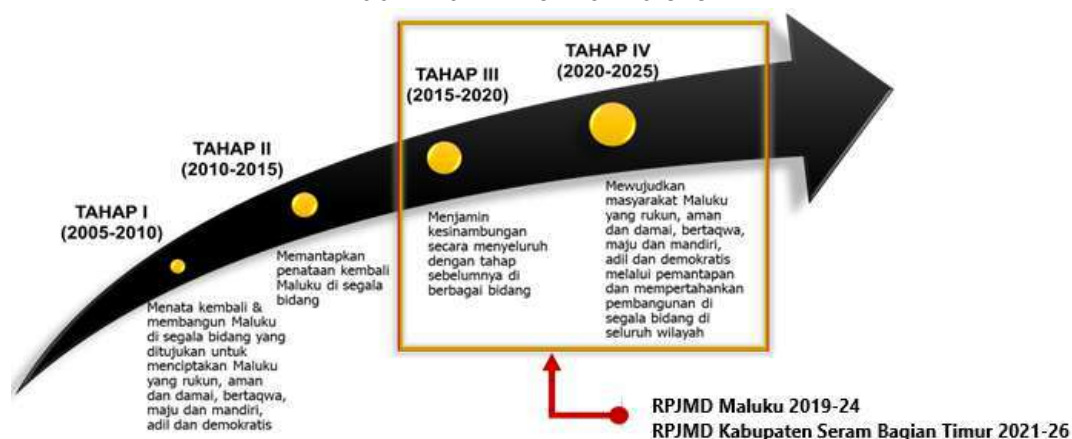
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

1.3.2. AMANAT RPJMD PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 selain memuat Visi Misi dan Program Prioritas dan/atau Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2019, namun demikian dari aspek teknokratif juga perlu memperhatikan substansi dari arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang termuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 terhadap dokumen perencanaan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Maluku masuk atau berada pada tahapan keempat atau terakhir sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Gambar I.4 Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 terhadap dokumen perencanaan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Maluku



Lebih lanjut dalam dokumen RPJMD Maluku 2019-2024, diarahkan untuk mewujudkan Visi “*Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi Maluku menetapkan 6 (enam) misi antara lain (i) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; (ii) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau; (iii) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (iv) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; (v) Meningkatkan

suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; dan (vi) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Dengan mengacu pada rumusan visi dan misi pembangunan Maluku Tahun 2019-2024, maka periode Tahun 2020-2024 diarahkan pada aspek kesinambungan pemantapan dan mempertahankan pembangunan di segala bidang dan wilayah dalam Provinsi Maluku. Arah ini bermakna perlu adanya peningkatan capaian kinerja pembangunan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.3.3. AMANAT RPJPD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2005-2025

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 telah memasuki atau berada pada tahapan keempat atau terakhir dalam RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 yakni "*Seram Bagian Timur Maju, Mandiri, dan Sejahtera*" yang akan ditempuh dengan atau melalui 5 (lima) pendekatan atau misi antara lain :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
- 2) Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- 4) Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal daerah yang berkelanjutan



Dengan mengacu pada rumusan arah dan kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur 2005-2025, maka arah kebijakan pembangunan yang tergambar dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 diarahkan tujuan kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur.

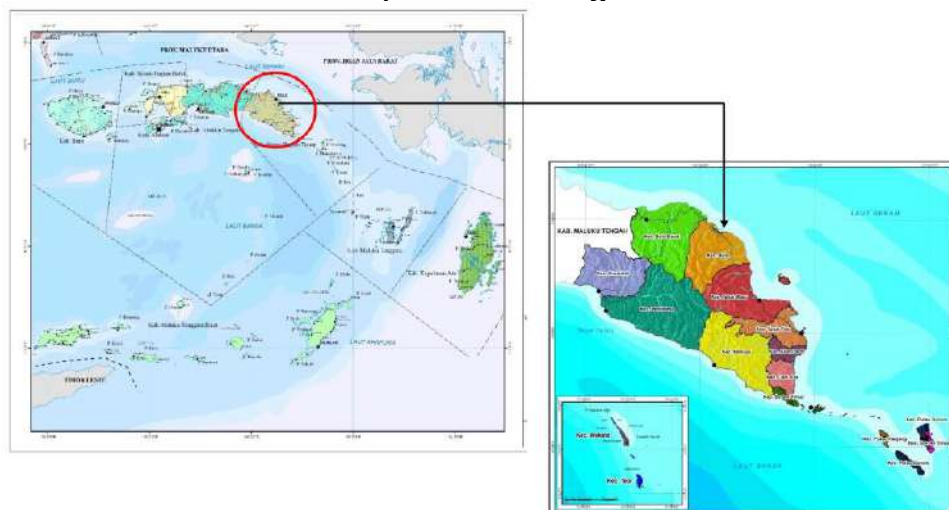
1.3.4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 tentunya perlu memperhatikan aspek perencanaan tata ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2030 terutama menyangkut penetapan pola dan struktur ruang serta penetapan kawasan strategis yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 5 (lima) tahun kedepan terkait dengan penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan serta prioritas pembangunan dan/atau pengembangan wilayah yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

1. Analisis Eksternal dan Internal Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Analisis eksternal wilayah dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah sekitar Kabupaten Seram Bagian Timur dalam skala antar kabupaten maupun dalam lingkup provinsi Maluku dan keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan memperhatikan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur secara umum akan menjadi bahan kajian dasar untuk pembahasan kondisi wilayah selanjutnya dan sebagai bahan masukan untuk analisis kemampuan/potensi dan hambatan dari segenap unsur-unsur pembentuk pembangunan wilayah (*regional development system*) Kabupaten Seram Bagian Timur di masa datang.

Gambar I.5 Peta Analisis Eksternal dan Internal Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur



Selanjutnya analisis internal wilayah dilakukan untuk mengetahui aspek fisik dasar wilayah yang didalamnya terkait dengan aspek potensi unggulan daerah dan potensi sumber daya alam serta keterkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka pembangunan daerah.

2. Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur

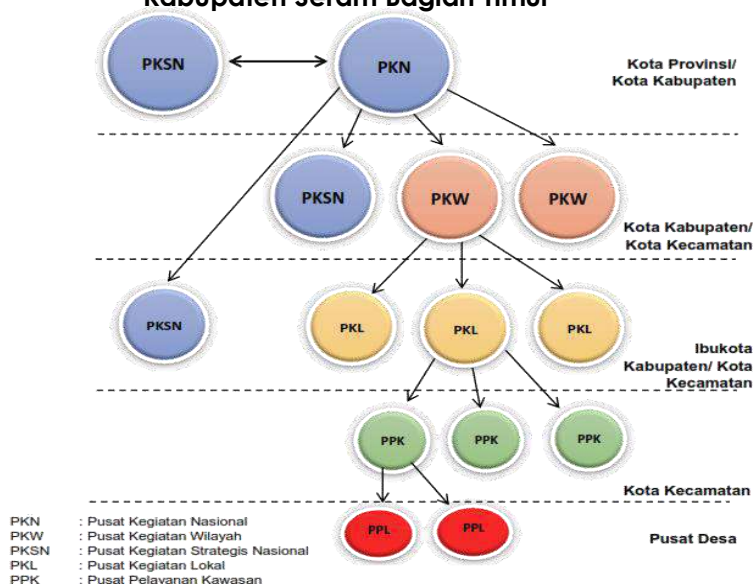
Analisis pemanfaatan ruang wilayah mencakup analisis **struktur ruang** yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk

mengarahkan dan/atau membentuk tata jenjang pusat pelayanan wilayah dan jaringan transportasi serta jaringan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat pelayanan tersebut, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap kabupaten lain di Provinsi Maluku. Analisis struktur ruang mengacu pada dua azas penataan ruang yaitu demokrasi ruang dan sinergi wilayah.

Karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kesulitan geografis sebagai akibat dari aspek geografis berupa pulau pulau sehingga memberikan pengaruh pemanfaatan dan peruntukan kawasan melalui rencana struktur dan pola ruang yang tentunya berkaitan dengan upaya percepatan pengembangan wilayah yang ditetapkan melalui kawasan strategis dengan memperhatikan pula pengaruhnya terhadap lingkup wilayah dan memberikan nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah gambaran susunan unsur unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarki dan berhubungan satu sama lain. Penentuan hirarki kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Konsep struktur ruang kota untuk Kabupaten Seram Bagian Timur akan terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang dijelaskan hubungannya sebagai berikut:

Gambar I.6 Konsep Struktur Ruang Kota Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur



Analisis pemanfaatan ruang wilayah mencakup analisis **sistim pusat pelayanan** yang dimaksudkan untuk menata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam wilayah yang ditinjau. Dengan perangkat analisis ini, dapat diketahui tingkat pelayanan sosial dan ekonomi atau dengan

kata lain dapat menentukan bagian-bagian wilayah yang kurang memperoleh pelayanan. Untuk mengetahui tata jenjang dan distribusi pusat pelayanan, maka digunakan analisis skelogram yang pada akhirnya menghasilkan hirarki pusat pelayanan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam hal ini, tata cara menilai struktur pusat pelayanan adalah dengan menggunakan perbandingan antara sarana eksisting secara total di dalam kabupaten untuk dibandingkan dengan tingkat ketersediaan sarana tersebut di masing-masing kecamatan. Dengan menggunakan hal tersebut, maka akan dapat diketahui wilayah kecamatan yang paling berperan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dari penentuan pusat kegiatan dan daerah-daerah pendukung Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar I.7 Peta Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku



Berdasarkan hasil analisis, yang termasuk dalam hirarki I ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kecamatan Bula dan Kecamatan Werinama. Kecamatan Werinama berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas tergolong dalam hirarki III, namun berdasarkan analisis skelogram masuk dalam hirarki II dan dalam RTRW Nasional ditetapkan sebagai PKW. Sedangkan untuk kecamatan lainnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan masing-masing peran dan fungsi dari pusat pelayanan tersebut.

A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Dalam struktur ruang secara nasional dan regional (RTRWN dan RTRWP Provinsi Maluku), Kecamatan Bula dan Werinama ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Maluku. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa fungsi Kota Bula dan Werinama, selain sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur juga memberikan fungsi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya, ataupun mampu saling berinteraksi dalam sistem pelayanan yang saling terkait terhadap beberapa wilayah sekitar. Adapun berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas ditetapkan 2 (dua) kecamatan dengan fungsi sebagai PKW yaitu Kecamatan Bula dan Werinama. Kedua kecamatan ini diharapkan dapat melayani kecamatan yang bersangkutan dan Kabupaten Seram Bagian Timur serta wilayah di sekitarnya.

Sedangkan dalam sistem kewilayahan, diharapkan fungsi keempat kecamatan ini dapat mendorong pertumbuhan wilayah sekitar. Dengan demikian, setidaknya mampu memberikan interaksi dalam sistem perdagangan dan sistem transportasi sehingga pemenuhan kebutuhan dapat terwujud dalam system desentralisasi yang sesuai dengan fungsi ruang kawasan perkotaan sebagai PKW. Kecamatan yang nantinya ditetapkan sebagai PKW, memiliki peran dan fungsi yang diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah, yang meliputi (i) Sistem transportasi regional terpadu (darat dan laut); (ii) Pusat pelayanan pemerintahan dan pendidikan; (iii) Pelayanan jasa sosial, ekonomi dan pemasaran; (iv) Pusat pelayanan perhubungan dan komunikasi; (v) Pusat pelayanan jasa kepariwisataan; (vi) Pusat permukiman; (vii) Pusat kegiatan industri terpadu; dan (viii) Pusat kawasan agropolitan.

B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Selain fungsi kawasan perkotaan sebagai PKW, sistem perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur juga terdapat beberapa fungsi kawasan perkotaan dalam hirarki yang lebih rendah yaitu PKL, PPK dan PPL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), pada dasarnya ditetapkan secara nasional (RTRWN dan RTRWP Maluku). Namun demikian, terdapat kawasan perkotaan yang secara fungsional dan system pelayanan yang ada, dapat diarahkan sebagai PKL, sehingga dalam RTRW ini ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat kegiatan lokal ini nantinya dalam perkembangannya dapat di promosikan menjadi PKW.

Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKL adalah Geser (Kecamatan Seram Timur) dan Kataloka (Kecamatan Pulau Gorom) yang memiliki fungsi pelayanan terhadap beberapa kawasan disekitarnya. Peran dan fungsi PKL antara lain:

- 1) Pusat pemerintahan kecamatan dan kawasan sekitarnya;
- 2) Pusat pelayanan sosial dan ekonomi kecamatan;
- 3) Transportasi antar kawasan dan luar kawasan;

- 4) Jasa kepariwisataan;
- 5) Permukiman;
- 6) Pusat kawasan perikanan dan kelautan terpadu; dan
- 7) Pusat kawasan agropolitan.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun yang termasuk dalam PPK berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas adalah Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela), Miran (Kecamatan Gorom Timur), Air Kasar (Kecamatan Tutuk Tolu), Aitihu (Kecamatan Siwalalat), dan Waiketam (Kecamatan Bula Barat). Peran dan fungsi kawasan perkotaan PPK di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pengembangannya dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Pusat pelayanan kecamatan;
- 2) Sistem transportasi regional terpadu (darat, laut, dan udara);
- 3) Pusat kegiatan industri kecil rakyat;
- 4) Jasa kepariwisataan;
- 5) Permukiman;
- 6) Pusat kawasan perikanan dan kelautan terpadu.

D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Adapun yang termasuk dalam PPL berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas adalah Wermaf Kampung Tengah (Kecamatan Teor), Pulau Panjang (Kecamatan Pulau Panjang), Kilimury (Kecamatan Kilimury), Watu-Watu (Kecamatan Kian Darat), Keta Rumadan (Kecamatan Siritaun Wida Timur), dan Waru (Kecamatan Teluk Waru). Peran dan fungsi kawasan perkotaan PPL di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pengembangannya dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Pusat pelayanan kecamatan;
- 2) Pusat kegiatan industri kecil rakyat;
- 3) Jasa kepariwisataan;
- 4) Permukiman;
- 5) Pusat kawasan perikanan dan kelautan terpadu

Analisis pemanfaatan ruang wilayah mencakup analisis **pola ruang** yang merupakan kajian terhadap karakteristik, dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal-hal yang perlu diuraikan dalam analisis pemanfaatan ruang terkait dengan alokasi pemanfaatan ruang adalah kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. Dasar pertimbangan menentukan pola pemanfaatan adalah karakteristik fisik lahan yang dilakukan analisis *overlay* peta untuk memperoleh kesesuaian dan kemampuan lahan, sehingga akan

memudahkan dalam menentukan arahan pengembangan fisik lahan dalam bentuk pola pemanfaatan ruang wilayah.

Sebagai catatan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan penghapusan terhadap ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS) Kabupaten, yang dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih rencana tata ruang. Oleh karena itu, selanjutnya KS tersebut akan diintegrasikan kedalam RTRW Kabupaten.



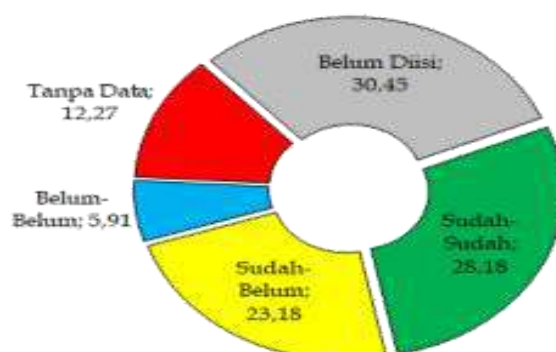
1.3.5. HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2021-2026 DENGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Untuk menganalisis capaian indikator TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur, capaian indikator TPB tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : (1) indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional (Sudah-Sudah); (2) indikator TPB yang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai indikator nasional (Sudah-Belum); (3) indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional (Belum-Belum); serta (4) indikator TPB yang belum ada datanya (Tanpa Data).

Tabel I.2. Indikator TPB Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator TPB	Kategori capaian					Jumlah
	Sudah - Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tanpa Data	Belum Diisi	
Jumlah	62	51	13	27	67	220

Jumlah capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah) sebanyak 62 indikator (28,18 persen) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Jumlah capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target nasional (Sudah-Belum) sebanyak 51 indikator (23,18 persen). Jumlah capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Belum-Belum) sebanyak 13 indikator (5,91 persen) serta indikator TPB yang belum adadatanya (Tanpa Data), sebanyak 27 indikator (12,27 persen), serta indikator yang belum diisi sebanyak 67 (30,45 persen).

Gambar I.8 Diagram Persentase capaian indikator TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur, Terhadap Target Nasional


Bila dikategorikan berdasarkan pilar, maka dari 96 indikator pada pilar sosial, yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah) sebanyak 35 indikator (36,46 persen), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Sudah-Belum) sebanyak 32 indikator (33,33 persen), yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Belum-Belum) sebanyak 4 indikator (4,17 persen), indikator yang belum ada datanya (Tanpa Data) sebanyak 17 indikator (17,71 persen), serta indikator yang belum diisi sebanyak 8 indikator (8,33 persen).

1. Dari 42 indikator pada pilar lingkungan, yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah) sebanyak 10 indikator (23,81 persen), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Sudah-Belum) sebanyak 7 indikator (16,67 persen), yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Belum-Belum) sebanyak 0 indikator (0,00 persen), indikator yang belum ada datanya (Tanpa Data)

- sebanyak 1 (satu) indikator (2,38 persen) serta indikator yang belum diisi sebanyak 24 indikator (57,14 persen).
2. Dari 61 indikator pada pilar ekonomi, yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah) sebanyak 15 indikator (24,56 persen), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Sudah-Belum) sebanyak 8 indikator (13,11 persen), yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Belum-Belum) sebanyak 7 indikator (11,48 persen), indikator yang belum ada datanya (Tanpa Data) sebanyak 6 indikator (9,84 persen), serta indikator yang belum diisi sebanyak 25 indikator (40,98 persen).
 3. Dari 21 indikator pada pilar hukum dan tata kelola, yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Sudah-Sudah) sebanyak 2 indikator (9,52 persen), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Sudah-Belum) sebanyak 4 indikator (19,05 persen), yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (Belum-Belum) sebanyak 2 indikator (9,52 persen), indikator yang belum ada datanya (Tanpa Data) sebanyak 3 indikator (14,29 persen), serta indikator yang belum diisi sebanyak 10 indikator (47,62 persen).

**Tabel I.3 Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar
Di Kabupaten Seram Bagian Timur**

No.	Pilar	Jumlah indikator TPB	Kategori capaian				
			Sudah-Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tanpa Data	Belum Diisi
1.	Sosial	96	35	32	4	17	8
2.	Lingkungan	42	10	7	0	1	24
3.	Ekonomi	61	15	8	7	6	25
4.	Hukum Tata Kelola	21	2	4	2	3	10
Jumlah		220	62	51	13	27	67

Berikut identifikasi hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Strategis (KHLs), sebagaimana tergambar pada tabel 1.4.



Tabel I.4. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2036 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
1	Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan			
	Pada tahun 2021/2022 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2 (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3 2. Menerapkan prinsip industri bersih (<i>Clean production</i>) 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan 4. Menerapkan konsep 5 R <i>Rethink, Re-use, Reduction, Recovery, dan Recycle</i> pada industri.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program pengelolaan persampahan. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
	Mendorong perusahaan, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Pendataan rutin pada perusahaan.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1 (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Pembuatan program berupa sistem registrasi untuk produk ramah lingkungan.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
2	Tujuan 5 Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa,	5.3.1* Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan	Meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan;	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Perlindungan



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
	sertasunat perempuan	umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Melakukan inovasi-inovasi pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas seperti deteksi dini faktor resiko pada ibu sampai jempit ibu bersalin untuk melakukan persalinan di Puskesmas; Meningkatkan kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan; Meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita; dan Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan	Perempuan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil Review dari konferensi – konferensi tersebut	5.6.1*Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Pembentukan Pembina Perempuan; Pembentukan Pembina Pembantu KB; Melakukan pembinaan keluarga Sejahtera; Perbaikan ekonomi keluarga; dan Mendirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		5.6.1 (a) <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)		Program Pembinaan Keluarga Berencana
		5.6.1 (b) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		Program Pembinaan Keluarga Berencana
3	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan			
	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung /folder; Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ; Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga; Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air; Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air; Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air; Meningkatkan efisiensi kebutuhan air domestik dan non domestic; Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM; Pengawasan pembuatan/exploitasi air tanah; Pengembangan SPAM non PDAM/ Swasta; dan Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku	



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
		6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/folder; Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ; Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemaran pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga; Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air; Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air; Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan efisiensi kebutuhan air domestik dan non domestik 8. Pengawasan kualitas air minum PDAM/Non PDAM 9. Pengawasan pembuatan/ eksploitasi air tanah	



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			10. Pengembangan SPAM non PDAM/Swasta 11. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku	
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi Layak 6.2.1 (f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah Terpusat	Peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat(persampahan, limbah dan jaringan darinase); Sosialisasi dan pendampingan program animas; Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah secara terpadu; Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan saranadasar perkotaan; dan Pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Tujuan 4 Menjamin Kualtias Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat			
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan tenaga pendidik; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat sesuai target nasional; Peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT; Peningkatan kapasitas	Program Pengelolaan Pendidikan



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi; Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu; Pengembangan sarana dan prasana pendidikan non formal	
5	Tujuan 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosisten daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
	Pada tahun 2026, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	15.9.1 (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Perlu disusun dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
6	Tujuan 17 Meningkatkan sarana pelaksanaan dan merivitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
	Meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya untuk pengembangan investasi daerah	17.6.2 (b) Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan	Pendataan dan Peningkatan jaringan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif,	17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama	Pendataan dan Pengalokasian dana yang terstruktur dan sistematis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
	berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		
7	Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Pendataan dan Pengalokasian dana yang terstruktur dan sistematis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8	Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua			
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak,	8.3.1 (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Pendataan dan Program peningkatan Kerjasama	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9	Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan			
	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan; Peningkatan bangunan rumah tidak layak huni melalui bedah rumah; Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami); Pengembangan jaringan masyarakat dalam	Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Rekomendasi	RPJMD
			pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman; Penyediaan rumah bagi MBR; dan Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	
	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.	Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti-diskriminasi Sara, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal ; dan Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban	Pendekatan sosial melalui sosialisasi, edukasi dan pengembangan pelibatan partisipasi masyarakat; Sistem keamanan berbasis masyarakat; dan Pelatihan sistem evakuasi bencana/ mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana; Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll; dan Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid	Penyediaan fasilitas/sarana prasarana pencegahan dan penanganan bencana	

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk memberikan arah atau petunjuk terhadap kebijakan fiskal daerah (keuangan daerah), strategi pembangunan daerah dan program kewilayaan. Selain itu juga memuat rencana rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan kata lain RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman semua dokumen operasional termasuk dokumen perencanaan tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD) di dalam perencanaan periode Tahun 2021-2026 di Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar para penentu dan penyelenggara kebijakan mempunyai acuan yang jelas dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun **Maksud** Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi lebih fokus dan mampu menyiapkan parameter perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
2. Menyiapkan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Menyediakan pedoman bagi OPD dalam penyusunan Renstra dan sistem akuntabilitas publik OPD;
4. Menjadi dokumen pembentukan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
5. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Adapun **Tujuan** dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan sasaran dari penyusunan RPJMD ini adalah:

1. Tersedianya arah kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
2. Tersedianya rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
3. Terwujudnya komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.5. SISTIMATIKA

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bagian bab berisi gambaran umum kondisi Provinsi Maluku meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Pada bagian bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bagian bab ini akan menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing

dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bagian bab ini akan diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bagian bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



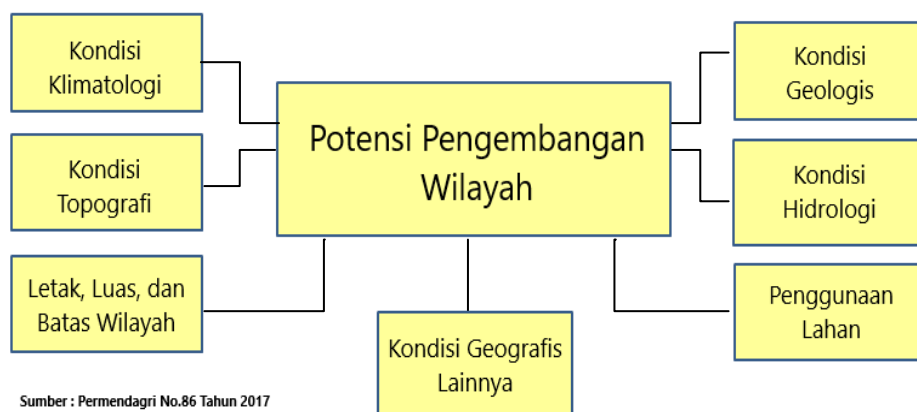
Pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dan kajian mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai masukan bagi perumusan permasalahan dan isu strategis daerah. Gambaran umum kondisi daerah dalam bab ini hanya menampilkan informasi yang relevan dan yang perlu mendapatkan fokus perhatian pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

2.1. ASPEK DEMOGRAFI DAN GEOGRAFIS

2.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Gambaran umum mengenai kondisi daerah sangat penting sebagai dasar dalam pengembangan suatu wilayah. Aspek geografis dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi dasar wilayah. Dengan mengetahui aspek geografis dan demografis wilayah, maka tentunya akan membantu pemangku kebijakan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar II.1. Bagan Alur Pikir
Potensi Pengembangan Wilayah**



Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Maluku Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Ibukota kabupaten ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 terletak di Dataran Hunimua, dan saat ini pusat kegiatan pemerintahan sementara berlangsung di Bula.

A. Luas Wilayah Dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian Timur dan selatan Pulau Seram Provinsi Maluku, dimana secara geografis berada pada 128°20′-130°10′ BT dan 02°50′ – 04°40′ LS. Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki luas 20.656,894 km² dengan tiga dimensi kewilayahan yang meliputi dataran rendah, dataran tinggi dan laut. wilayah daratan tinggi dan rendah memiliki luas 5.779,123 km², sedangkan wilayah lautan memiliki luas 14.877,771 km². Sementara itu, wilayah daratan terdiri dari Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Kilmury, Werinama dan Siwalalat yang berada di Pulau Seram dan pulau-pulau terpisah sebanyak 62 pulau. Wilayah Seram Bagian Timur mempunyai 132 aliran sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun batas wilayah kabupaten dapat dilihat sebagai berikut yakni Sebelah Utara dengan Laut Seram, Sebelah Selatan dengan Laut Banda Sebelah Timur dengan Laut Seram dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah dan Laut Banda.

Tabel II.1. Presentase Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Pulau
Pulau Gorom	Kataloka	1,58	11
Kesui Watubela	Tamher Timur	0,65	5
Teor	Wermaf Kampung Tengah	0,41	2
Gorom Timor	Miran	0,51	2
Pulau Panjang	Pulau Panjang	0,36	1
Seram Timur	Geser	1,27	27
Tutuk Tolu	Air Kasar	5,71	2
Kilmury	Kilmury	14,49	2
Werinama	Werinama	17,20	1
Siwalalat	Atiahu	14,66	1
Bula	Bula	11,13	1
Bula Barat	Waiketam	15,23	2
Kian Darat	Watu Watu	2,24	2
Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	2,98	1
Teluk Waru	Waru	11,59	2
Seram Bagian Timur		100,00	62

Sumber BPS, Seram Timur Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Werinama dengan luas 993,84 km² atau 17,20% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pulau Panjang dengan luas 20,53 km² atau 0,36 dari luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar II.2. Peta Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur

Sementara itu, jumlah pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 62 pulau, dimana terdapat 10 pulau besar yaitu Pulau Seram 554.737,325 Ha, Pulau Gorom 6.852,661 Ha, Pulau Manawoka 5.099,812 Ha, Pulau Kesui 3.014,497 Ha, Pulau Teor/Wanin 2.328,542 Ha, Pulau Panjang 2.052,636 Ha, Pulau parang 1.235,226 Ha, Pulau Seram Laut 939,683 Ha, Pulau Merwaru 411,301 Ha, Pulau Watubela 406,652 Ha.

Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dikelompokkan kedalam beberapa satuan geografis yaitu (1) Satuan geografis Pegunungan yang menempati bagian tengah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan kelurusan Timur-Barat, dan puncak tertinggi adalah Gunung Hatu Balimakiam (896 m) dan Gunung Hatu Abalwan (875 m); (2) Satuan Geografis perbukitan merupakan lereng pegunungan dengan tonjolan tonjolan bukit, yang menempati lereng Utara dan Selatan pada sepanjang Timur Barat Kabupaten Seram Bagian Timur; Satuan Geografis Dataran Tinggi dan Lembah Bantaran Sungai yang membelah bagian tengah agak ke selatan dan memanjang Timur Barat Kabupaten Seram Bagian Timur; (3) Satuan geografis Dataran Pantai dan Delta, terdapat meluas di sepanjang timur barat Pantai Utara dan relatif menyempit di Pantai Selatan, serta Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur; dan (4) Satuan Geografis Pulau-pulau berupa Kepulauan Geser dan Watubela, yang terdapat di bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kondisi geografis yang sangat bervariasi tersebut diatas mengakibatkan Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki wilayah yang sulit

diakses dengan jalan darat antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, baik yang menghubungkan wilayah bagian utara dan selatannya, maupun wilayah timur dan baratnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi pegunungan dan perbukitannya yang mempunyai lereng yang terjal dan curam, dengan kondisi iklim yang memiliki curah hujan sangat tinggi, sehingga sungai-sungai besar sering terjadi banjir.

Tabel II.2 Luas Daerah dan Presentase Terhadap Luas Di Kabupaten Bagian Timur

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area (km ² /sq.km)
1	Pulau Gorom	Kataloka	91,303
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58
3	Teor	Wermaf Kampung Tengah	23,41
4	Gorom Timor	Miran	29,29
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53
6	Seram Timur	Geser	73,35
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09
8	Kilmury	Kilmury	837,62
9	Werinama	Werinama	993,84
10	Siwalalat	Atiahu	847,19
11	Bula	Bula	643,36
12	Bula Barat	Waiketam	880,29
13	Kian Darat	Watu Watu	129,23
14	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37
15	Teluk Waru	Waru	669,67
Seram Bagian Timur			5779,123

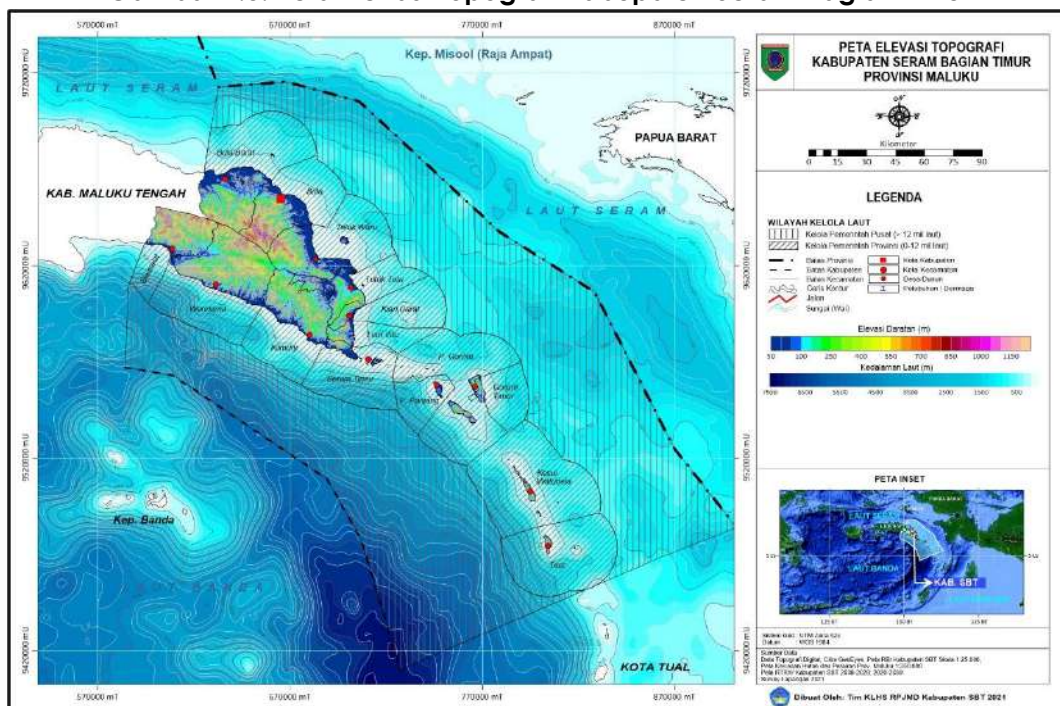
Sumber BPS, Seram Timur Dalam Angka, Tahun 2021

B. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada ketinggian rata-rata antara 0-500 m s.d 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15%, 30 s/d 50 % dan > 50 %. Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3. Data Topologi Kabupaten Seram Bagian Timur

1	Kemiringan Lahan	Rata rata antara 0 s/d 3% 8 s/d 15% 30 s/d 50% 50%
2	Ketinggian Lahan	Rata rata antara 0 -500 m dan antara 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl)

Gambar II.3. Peta Elevasi Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

C. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari air laut, air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau, sungai dan kali, seperti Sungai Arewan, Kian, Kilaba, Aruan, Masiwang, Kadar, Bitorik, Bemo, Bobot, Kian Laut, Tunsai, Salas, Balifar dan Sungai Bulawa, serta Sungai Waimiran.

Sungai di Kabupaten SBT terdiri atas sungai perenial (mengalir sepanjang musim) dan sungai intermiten (sungai musiman). Sungai-sungai perenial pada Tabel II.4 merupakan sungai-sungai utama di SBT yang mengalir sepanjang musim dengan debit yang bervariasi. Adanya variasi debit aliran disebabkan pengurangan jumlah pasokan debit air ke sungai utama akibat perubahan penggunaan lahan pada wilayah DAS.

Tabel II.4.
Nama Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2021

Kecamatan	Nama Sungai	Jumlah
P. Gorom dan sekitarnya	Sungai Nama	1
Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Lian Vitu dan Seram Timur	Sungai Masiwang, Dawang, Naken, Kasar	4
Bula, Bula Barat	Sungai Salas, Nif, Bolilar, Lola Besar, Tufa, Bubu, Kakabo, Boti, Kakipana.	9
Werinama, Kilmury dan Siwalalat	Sungai Dalo, Bemo, Boboi, Boda-boda, Suara, Tunsu, Pupuya, Pilo, Oson, Pananakan, Popusi, Kaba, Tian, Daut, Tala.	15

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Seram Bagian Timur, 2005; Data dan Informasi Perikanan dan Kelautan SBT 2005, SBT dalam angka 2021.

29 buah sungai yang tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih maupun sebagai pengairan lahan pertanian. Jumlah sungai yang paling banyak ditemukan di pulau Seram, terutama di bagian selatan Pulau Seram yang meliputi Kecamatan Werinama, Kilmury dan Siwalalat dengan 15 buah sungai dan bagian utara Pulau Seram termasuk dalam wilayah Bula dan sekitarnya dengan 9 buah sungai. Bentuk alur sungai utama di wilayah utara dan seram umumnya berbentuk V. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan masa air tawar yang memasuki wilayah lembah sungai ini memiliki lingkungan sekitar dengan tutupan lahan bergetasi hutan, sehingga fungsi tangkapan air masih tetap berlangsung secara baik. Walaupun demikian, telah banyak lahan hutan mengalami pembukaan, terutama untuk aktifitas HPH. Akitivitas HPH berpotensi merusak sistem aliran pada wilayah DAS jika tidak dikelola secara baik.

D. Kondisi Klimatologi

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seirama dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-

beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman. **Distribusi** iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasion pengamatan iklim.

1. Wilayah kecamatan Pulau-Pulau Gorom termasuk dalam zona Iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah Pulau Panjang, Pulau Amaskaru dan Pulau Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi Pulau Garogos, Pulau Koon, bagian Tengah dan Selatan Pulau Gorom, Pulau Kesui, Kepulauan Watubela dan Pulau Teor.
2. Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur di yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.
3. Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3 ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.
4. Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagian di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas,

sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman.

Distribusi iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasion pengamatan iklim. Berdasarkan pada asumsi yang mengklasifikasikan data klimatologi spasial oleh Oldeman(1980), maka pengelompokan wilayah curah hujan dalam bentuk zona Agroklimat untuk Kabupaten Seram Timur sebagai berikut :

Zona I.3 : Curah hujan tahunan 2000 – 4000 mm,

Zona II. 6 : Curah hujan Tahunan 2500-4000 mm, tercakup di dalamnya zona B2 (7-9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman.

Zona III.1 : Curah hujan tahunan 2000-2500 mm, tercakup di dalamnya zona C2 (5-6 B, 2-3 BK) menurut Oldeman. Termasuk zona ini adalah sebagian wilayah Kecamatan Werinama.

Zona III.2 : Curah hujan tahunan 2000-3000 mm, tercakup di dalamnya zona C1 (5-6 BB dan < 2 BK) menurut Oldeman. Puncak curah hujan pada bulan Juni-Juli atau Juli-Agustus.

Zona IV.1 : Curah hujan tahunan 3000-4000 mm, tercakup di dalamnya zona A2 (>9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman.

Wilayah kecamatan Pulau-Pulau Gorom termasuk dalam zona Iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah Pulau Panjang, Pulau Amaskaru dan Pulau Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi Pulau Garogos, Pulau Koon, bagian Tengah dan Selatan Pulau Gorom, Pulau Kesui, Kepulauan Watubela dan Pulau. Teor.

Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3

ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.

Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagian di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

E. Penggunaan Lahan

Pada dasarnya penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai organisasi tata ruang maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur terbagi menjadi 9 (Sembilan) jenis dengan total luas penggunaan lahan sebesar 1.116.230,8 ha. Adapun penggunaan lahan tersebut terdiri dari air danau/situ, air tawar sungai, hutan rimba, bukit pasir darat, bukit pasir laut, perkebunan, permukiman/tempat kegiatan, semak belukar/alang-alang, dan tegalan/ladang. Penggunaan lahan yang paling dominan di Kabupaten Seram Bagian Timur yakni hutan sebesar 953.428,77 Ha dengan persentase sebesar 85,42%. Secara rinci luas masing masing jenis penggunaan lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat pada Tabel berikut.

Tabel II.5.
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)							
		Air Danau	Air Tawar	Hutan	Bukit Pasir Darat	Bukit Pasir Laut	Kebun	Permukiman	Semak Belukar
1	Pulau Gorom	-	-	8086,50	-	447,00	-	89,96	-
2	Wakate	-	-	3169,34	-	343,61	-	7,46	84,92
3	Teor	-	-	2156,54	-	184,82	-	-	-
4	Gorom Timur	-	-	2193,65	-	34,29	-	30,36	-
5	Pulau Panjang	-	-	1351,57	-	47,18	-	-	88,58
6	Seram Timur	0,76	14,16	8761,41	-	18,23	4,64	122,74	2770,24
7	Tutuk Tolu	0,19	295,04	60813,09	105,12	48,83	-	146,43	3989,56
8	Kilmury	-	761,32	153586,02	107,35	0,06	88,37	166,03	11635,46
9	Werinama	-	1204,14	215270,89	800,47	-	525,97	53,50	21010,14
10	Siwalalat	-	1099,98	111758,93	169,91	-	1971,75	36,85	8343,36
11	Bula	-	794,60	75952,22	174,10	0,56	-	170,61	47071,20
12	Bula Barat	-	985,48	141846,26	214,95	3,15	3129,72	118,80	24199,60
No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)							
		Air Danau	Air Tawar	Hutan	Bukit Pasir Darat	Bukit Pasir Laut	Kebun	Permukiman	Semak Belukar
13	Kian Darat	-	69,05	24895,90	-	-	-	85,08	635,34
14	Lian Vitu	-	80,89	36232,38	-	-	-	59,31	368,48
15	Teluk Waru	-	530,42	107353,86	496,32	2,88	-	55,74	23507,20
Jumlah		0,95	5836,63	953428,77	2068,24	1130,62	5720,45	1142,88	143704,29
Persentase (%)		0	0,52	85,42	0,19	0,10	0,51	0,10	12,87

Tabel II.6 Luas Wilayah Menurut Status Penggunaan Lahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Ha), Tahun 2020

Uraian	Dalam Setahun Ditanami Padi			Tidak Ditanami	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
	3 x	2 x	1 x			
Sawah		1.429			811	2.240
Irigasi Teknis		913				913
Tadah Hujan		516			811	1.327
Bukan Sawah						42
Kebun						42
Jumlah/Total						2.282

Sumber ; BPS, 2021, Kabupaten SBT Dalam Angka

Tabel II.7 Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020

Jenis Tanaman	Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
Padi	Kesui Watubela	5	5	15
	Seram Timur	28	16	48
	Bula	38	37	111
	Bula Barat	2.858.	3.325	13.300
		2.933	3.383	13.474
Jagung	Werinama	163	50	200
	Siwalalat	160	70	280
	Bula	355	197	788
	Bula Barat	1.333	940	3.760
	Teluk Waru	91	40	160
Jumlah/Total		2.102	1.297	5.188

Sumber ; BPS, 2021, Kabupaten SBT Dalam Angka

Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa dari 4 (empat) kecamatan dengan total luas tanaman padi sebesar 2.933 Ha dan jagung sebesar 2.102 Ha, produksi terbesar berada pada Kecamatan Bula Barat yakni untuk padi sebesar 13.474 ton sementara jagung sebesar 5.188 ton. Selanjutnya untuk jenis tanaman masing masing ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah dan talas yang terbesar pada 15 (lima) belas kecamatan di Seram Bagian Timur selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.8 Luas Tanaman, Luas Panen dan Produksi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2020

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
Ketela Pohon	108	55	2.475
Ketela Rambat	138	112	3.360
Kacang Tanah	133	126	189
Talas	38	29	377
Total	417	322	6.401

Sumber ; BPS, 2021, Kabupaten SBT Dalam Angka, diolah (2021)

Dari total luas tanaman sebesar 417 Ha untuk jenis tanaman ketela pohon terbesar berada pada kecamatan Bula Barat sebesar 20 Ha dengan luas lahan sebesar 9 Ha dan jumlah produksi sebesar 405 ton. Selanjutnya ada di kecamatan Siwalalat dengan jumlah produksi sebesar 360 ton dengan luas tanaman 7 Ha dan luas lahan 8 Ha berbeda dengan kecamatan Bula yang walaupun luas tanamannya lebih besar yakni 17 Ha namun hanya mampu memproduksi sebesar 315 ton sama halnya dengan kecamatan Pulau Gorom, Pulau Panjang, Seram Timur, Kilmury, dan Kian Darat.

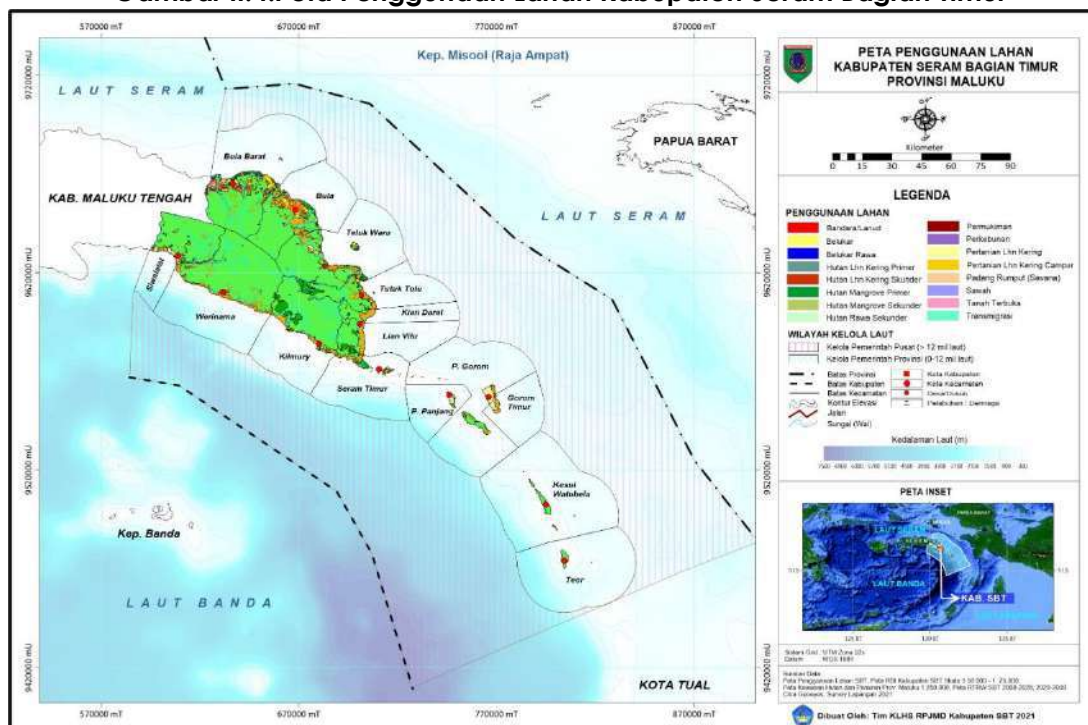
Untuk jenis tanaman ketela rambat produksi terbesar berada di Kecamatan Bula Barat yakni 600 ton, kedua Kecamatan Bula sebesar 480 ton dan Kecamatan Werinama sebesar 360 ton. Selanjutnya untuk jenis kacang tanah produksi terbesar ada di Kecamatan Bula Barat sebesar 34,5 ton diikuti oleh Kecamatan Teluk Waru sebesar 19,5 ton dan posisi ketiga ada di Kecamatan Bula dan Kecamatan Kesui Watubela yakni sebesar 13,5 ton dan posisi ketiga ada di kecamatan dan terakhir dengan jumlah produksi sebesar 10,5 ton masing masing ada di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Kilmury, dan Kecamatan Siwalalat.



Tabel II.9 Lahan Kritis di Kabupaten Seram Bagian Timur

No.	Tipe Kegiatan	Pendamping / Pengendali Teknis	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat	Tahun Tanam
					Kabupaten	Kecamatan	Desa / Dusun			
17	HUTAN KOTA				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	BULA	2,620727	130°26'21.306"E 3°3'41.282"S	2012
18	HUTAN KOTA				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	BULA	1,232697	130°28'35.058"E 3°5'46.246"S	2012
30	KBR				SERAM BAGIAN TIMUR	TUTUK TOLU	GAH	47,262608	130°48'17.582"E 3°31'1.353"S	2013
38	HUTAN KOTA				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	BULA	11,045256	130°29'1.824"E 3°6'27.085"S	2014
53	HUTAN KOTA				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	BULA	12,046213	130°31'0.346"E 3°8'0.67"S	2015
59	KBR				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	BULA	26,373768	130°32'32.953"E 3°9'15.969"S	2016
60	MANGROVE				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	WARU	12,117567	130°41'54.817"E 3°23'57.024"S	2017
72	MANGROVE				SERAM BAGIAN TIMUR	SERAM TIMUR	URUNG	13,612648	130°47'14.352"E 3°51'5.834"S	2019
73	KBR				SERAM BAGIAN TIMUR	BULA	HOTE	27,199663	130°23'41.585"E 3°2'23.514"S	2019
76	RHL				SERAM BAGIAN TIMUR	SERAM TIMUR	KILWARU	163,30482	130°55'51.284"E 3°53'18.496"S	2020
78	MANGROVE				SERAM BAGIAN TIMUR	SERAM TIMUR	KELLU	10	130°51'44.152"E 3°52'28.748"S	2020
Total								326,81596		

Gambar II.4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Seram Bagian Timur



F. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang sebagian besar wilayahnya perairan, maka memiliki 2 (dua) aspek yang satu dengan yang lain saling memiliki peluang, tantangan dan ancaman. Pada satu sisi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur banyak terkendala oleh kondisi geografi, demografi dan kondisi keterbatasan infrastruktur, terutama infrastruktur laut. Pada sisi lain, memiliki potensi unggulan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah jika dikelola secara profesional, seperti potensi wisata laut dan potensi wilayah daratan dengan pemandangan yang indah. Oleh karena itu, dalam mendorong terwujudnya percepatan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pendekatan terkait dengan pengembangan wilayah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat dipertimbangkan dengan mendorong berbagai kawasan untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan kawasan-kawasan dimaksud, antara lain terdiri dari:

1. Kawasan untuk pengembangan pertanian;
2. Kawasan untuk pengembangan perikanan;
3. Kawasan untuk pengembangan peternakan;
4. Kawasan untuk pengembangan perkebunan;
5. Kawasan untuk pengembangan industri;
6. Kawasan untuk pengembangan pariwisata;

7. Kawasan untuk permukiman; dan
8. Kawasan untuk pengembangan aktivitas lainnya.

Tabel II.10 Pengembangan Kawasan di Kabupaten Seram Bagian Timur

NO	PENGEMBANGAN KAWASAN	WILAYAH PENGEMBANGAN (KECAMATAN)
1	Kawasan Pertanian	Bula, Bula Barat, Werinama, Seram Timur, Siwalalat, Siritaun Wida Timur, Teluk Waru, Kesui Watubela
2	Kawasan Perikanan	Seram Timur, P. Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Kesui Watubela, Teor
3	Kawasan Peternakan	Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Utuk Tolu, Werinama, Siwalalat, Gorom, Gorom Timur, Seram Timur
4	Kawasan Perkebunan	Bula, Bula Barat, Werinama, Seram Timur, P. Gorom, Gorom Timur, Kilmuri, Siwalalat, Pulau Panjang, Teluk Waru, Utuk Tolu, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Kesui Watubela, Teor
5	Kawasan Pariwisata	Bula, Bula Barat, Werinama, Seram Timur, P. Gorom, Gorom Timur, Kilmuri, Siwalalat, Pulau Panjang, Teluk Waru, Utuk Tolu, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Kesui Watubela, Teor
6	Kawasan Pengembangan Industri	Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Kian Darat, Kilmuri, Siwalalat, Werinama, P. Gorom, Gorom Timur
7	Kawasan Permukiman	Bula, Bula Barat, Werinama, Seram Timur, P. Gorom, Gorom Timur, Kilmuri, Siwalalat, Pulau Panjang, Teluk Waru, Utuk Tolu, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Kesui Watubela, Teor
8	Pengembangan Kawasan Lainnya	Bula, Bula Barat, Werinama, Seram Timur, P. Gorom, Gorom Timur, Kilmuri, Siwalalat, Pulau Panjang, Teluk Waru, Utuk Tolu, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Kesui Watubela, Teor

Penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, karena memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

Ad.1. Kawasan Pertanian

Pengembangan pertanian diarahkan dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan khususnya, umumnya mewujudkan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku. Dalam 5 (lima) tahun kedepan lahan yang disiapkan untuk penanaman padi dan palawija agar diupayakan tersedia lahan persawahan yang relatif luas sesuai kebutuhan.

Ad.2. Kawasan Perikanan

Pengembangan bidang perikanan terfokus pada pengembangan ikan laut. Namun demikian potensi perikanan air tawar juga dipertimbangkan tetap dapat dikembangkan. Berdasarkan analisis data 5 (lima) tahun yang lalu, maka untuk mendorong terwujudnya

potensi perikanan laut yang melimpah, maka perlu untuk dipertimbangkan berbagai langkah kebijakan, antara lain sarana/prasarana dan infrastruktur kelautan yang memadai, pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan, dan mendekatkan serta memudahkan akses pada permodalan, informasi dan pasar.

Ad.3. Kawasan Peternakan

Pengembangan peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang untuk terus dikembangkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dari pengembangan bidang peternakan adalah agar peningkatan tambahan pendapatan masyarakat, terutama para petani mengingat jenis ternak yang ditenak dan dikembangkan berasal dari jenis ternak yang terbiasa dipelihara seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan bebek.

Ad.4. Kawasan Perkebunan

Memperhatikan data dan informasi perkembangan bidang urusan perkebunan periode 5 (lima) tahun yang lalu, maka pengelolaan bidang urusan perkebunan untuk 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi salah satu fokus yang akan didorong untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan terus mendorong mewujudkan bidang ini yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, lahan yang disiapkan untuk kegiatan dimaksud relatif cukup luas. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat terpacu untuk mengembangkan bidang urusan perkebunan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Ad.4. Kawasan Perindustrian

Bidang industri, merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukkan, bahwa kontribusi berbagai bidang perindustrian terhadap kesejahteraan masyarakat relatif cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk pengembangan industri kedepan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, supaya mempertimbangkan kiranya dapat menyiapkan lahan yang sesuai dengan kebutuhan.

Ad.5. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Dari data yang ada diketahui, bahwa pengelolaan potensi pariwisata dalam 5 (lima) tahun yang lalu belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan,

padahal potensi dan jenis wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara (wisnus), maupun wisatawan mancanegara (wisman) sangat potensial. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong potensi pariwisata sebagai salah satu unggulan yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pengelolaan pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu didukung dengan berbagai regulasi dan penganggaran yang memadai.

Ad.6. Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Timur, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur per September 2020 adalah 137,972 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 3,26% dan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,72% serta penduduk dengan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 3,65%. Selanjutnya rasio jenis kelamin tercatat sebanyak 104 dan sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bula yakni sebanyak 26,023 jiwa atau 18,86% dan yang paling kecil berada di Kecamatan Pulau Panjang yakni sebanyak 2.692 jiwa atau 1,95% dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pertumbuhan pendudukan yang relatif cepat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (2010-2020) dapat dimaknai sebagai bonus demografi yang jika dikelola dengan baik akan mampu menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan daerah, sebaliknya tingkat pertumbuhan dan laju perumbuhan yang cepat itu juga dapat menimbulkan permasalahan yang terkait langsung dengan ruang lingkup sosial, ekonomi dan politik pada satu sisi. Pada sisi lain pertumbuhan penduduk juga secara paralel memerlukan tersedianya lahan yang memadai untuk berbagai aktivitas, seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, pasar, rumah sakit dan terminal.

Ad.7. Kawasan Untuk Pengembangan Aktifitas Lainnya

Untuk memenuhi berbagai aktivitas diluar aktivitas sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 diatas, maka dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, supaya juga dipertimbangkan untuk menambah luasan lahan yang akan diperuntukan bagi permukiman penduduk dan berbagai aktivitas lainnya, antara lain (i) kawasan untuk perdagangan dan jasa; (ii) kawasan untuk rumah

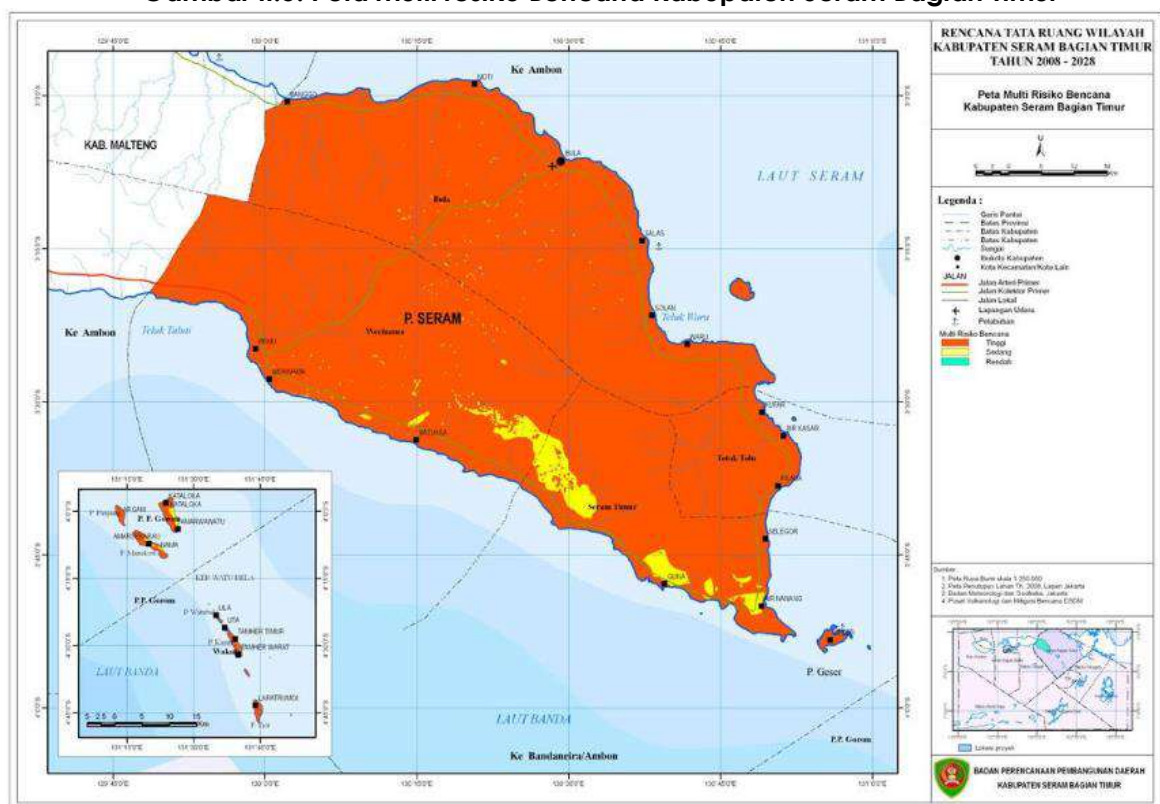
sakit, pendidikan dan ruang terbuka hijau; dan (iii) kawasan untuk fasilitas terminal, pelabuhan dan bandara.

G. Kawasan Rawan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan ruang lingkup rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Dengan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai wilayah perairan yang kelilingi oleh laut, maka ada beberapa kawasan yang kadangkala terjadi bencana walaupun dalam skala yang relatif kecil. Bencana alam dan jenis bencana alam yang kadang terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, antara lain banjir, angin puting beliung, kebakaran dan gelombang pasang yang sangat berpengaruh pada aktivitas nelayan dan penangkapan ikan laut.

Gambar II.5. Peta Multi resiko Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur





2. Infrastruktur Talud/Tanggul

NO.	DUSUN/NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF	RUSAK TANGGUL/TALUD/ABRASI			
		VOLUME PANJANG	RUSAK RING AN	RUSAK SEDA NG	RUSAK BERAT
1.	Keliur Negeri Adm. Kildor	200 M	-	-	✓
2.	Rumadurun	100 M	-	-	✓
3.	Otodeman	300 M	-	-	✓
4.	Tanah Baru	300 M	-	-	✓
5.	Ilili	200 M	-	-	✓
6.	Utta	100 M	-	-	✓
7.	Tamher Timur	200 M	-	-	✓
TOTAL		1.450 M	-	-	-
TOTAL KERUGIAN DITAKSIR MENCAPI : RP. 4. 785. 000.000,-					

3. Jembatan Penyeberangan

NO.	DUSUN/NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF	RUSAK JEMBATAN			
		VOLUME PANJANG	RUSAK RING AN	RUSAK SEDA NG	RUSAK BERAT
1	Otodeman	15 M	-	-	✓
TOTAL		15 M	-	-	-
TOTAL KERUGIAN DITAKSIR MENCAPI : 75. 000. 000,-					

Upaya yang dilakukan

- Melaksanakan pendataan Penilaian dampak Kerusakan dan kerugian dilokasi – lokasi terdampak bersama aparat Desa, Babinsa, dibantu masyarakat setempat
- Berkoordinasi dengan Camat dan Para Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terdampak untuk langkah penanganan selanjutnyaMengusulkan Kepada BNPB untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2021.



|Data Kejadian Bencana di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021

**2 Jenis Bencana : Putting Beliung**

Waktu Kejadian : Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 16. 00 WIT
Lokasi : Negeri Administratif Kilfura Kecamatan Seram Timur
Kronologis Kejadian : Pada Pukul 14 .15 WIT terjadi Angin kencang disertai hujan deras dan putting beliung yang datang dari arah utara kemudian memasuki wilayah pemukiman pada pukul 16. 00 WIT

Korban :
Luka berat : Nihil
Luka Ringan : Nihil
Meninggal : Nihil
Mengungsi : Nihil

Dampak Kerusakan : **Rumah Rusak**

NO.	DUSUN/NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF	RUMAH RUSAK		
		RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
	Kilfura			1
	TOTAL			1
TOTAL KERUGIAN DITAKSIR MENCAPI : 50.000. 000,-				

Upaya yang dilakukan :

- Melaksanakan pendataan Penilaian dampak Kerusakan dan kerugian dilokasi – lokasi terdampak bersama aparat Desa, Babinsa, dibantu masyarakat setempat
- Berkoordinasi dengan Camat dan Para Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terdampak untuk langkah penanganan selanjutnya

DOKUMENTASI KEJADIAN



Tabelll.11. Luas Area Rawan Bencana Kabupaten Seram Bagian Timur

No	NAMA DESA	POTENSI RAWAN BENCANA	LUAS AREA TERDAMPAK	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK
I	KECAMATAN BULA			
1	Desa Bula	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	250,8412	(±) 2954
2	Neg. Adm Salas	Banjir, Tanah Longsor	403,6083	(±) 81
3	Neg. Adm Englas	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	69,8755	(±) 154,2
4	Neg. Adm Bula Air	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	368,0899	(±) 136,6
5	Neg. Adm Sesar	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	352,9035	(±) 340,8
6	Neg. Ad. Tansi Ambon	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	165,8063	(±) 186
7	Neg. Ad. Kampung Wauilola	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	165,8053	(±) 457,8
8	Neg. Adm. Kampung Gorom	Banjir,	947,4644	(±) 90,4
9	Neg. Adm Limumir	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	16,58063	(±) 288,8
	Neg. Adm Fatolo	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir, Abrasi	16,58063	(±) 325
II	KECAMATAN SERAM TIMUR			
1	Desa Geser	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,106855	(±) 515,8
2	Desa Kiltay	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,198446	(±) 145
3	Desa Kilwaru	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,946434	(±) 502
4	Desa Kellu	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,963231	(±) 173
5	Desa Kefing	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,03053	(±) 123
6	Desa Urung	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	11,29615	(±) 494
7	Desa Kilbon Kway	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	10,76486	(±) 91
8	Neg. Adm. Kilfura	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,050231	(±) 134
9	Neg. Adm.Kwamor Kecil Mata Ata	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	6,5	(±) 48
10	Neg. Adm Kwamor Kecil Mata Wawa	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	5,5	(±) 78



11	Neg. Adm Kwamor Besar Ena	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,2	(±) 18
12	Neg. Adm Kwamor Besar Witau	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,3	(±) 61
13	Neg. Adm Guli-guli	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	7,5	(±) 104
14	Neg. Adm. Manggis	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	5,1	(±) 33
15	Neg. Adm Ainena	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,6	(±) 57
16	Neg. Adm Mungsinis	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,5	(±) 14
17	Nrg. Adm. Akatfadedo	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,2	(±) 9
III	KECAMATAN WERINAMA			
1	Neg. Adm. Batuasa	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	9521109	(±) 158
2	Neg. Adm Hatumeteng	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	300,8413	(±) 63
3	Neg. Weinama	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,53983	(±) 430
4	Neg. Adm Bemo	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	16,88442	(±) 154
5	Neg. Adm. Ati Ahu	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	461,2644	(±) 311,8
6	Neg. Adm Tum	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	350,45	(±) 101,8
7	Neg. Adm Gusalaut	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	94,84489	(±) 90
8	Neg. Adm Osong	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	51,26751	(±) 47
9	Neg. Adm Tobo	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	214,2249	(±) 59,6
10	Neg. Adm Bemo Perik	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	8,698634	(±) 83,2
11	Neg. Adm Funaibaya	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	134,0706	(±) 34,8
IV	KECAMATAN PULAU GOROM			
1	Negeri Kataloka	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	18,17	(±) 896,6
2	Negeri Amarsikaeru	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	64,72133	(±) 1435,8
3	Negeri Ondor	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,992229	(±) 246,2
4	Negeri Day	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2,549983	(±) 300,2
5	Neg. Adm Mida	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,949101	(±) 93,2



6	Neg. Adm Loko	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,900248	(±) 47
7	Neg. Adm Sera	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	10,22719	(±) 167
8	Neg. Adm Kulugowa	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,990913	(±) 148,8
9	Neg. Adm Rumeon	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	9,909132	(±) 170,4
10	Neg. Adm Kelibingan		1,207887	(±) 155,8
11	Neg. Adm Ilili	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,921984	(±) 59
12	Neg. Adm Miran Gota	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	15,52007	(±) 61,6
13	Neg. Adm Namalean	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	13,21218	(±) 151,6
14	Neg. Adm. Dulak	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,992229	(±) 87,8
15	Neg. Kilalir Kilwouw	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,549983	(±) 11,8
16	Neg. Adm. Kilotak	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2,549983	(±) 42,8
17	Neg. Adm. Kilean	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2,549983	(±) 27,8
18	Neg. Adm Kaforing	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2,549983	(±) 15,8
19	Neg. Adm Arewan	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,949101	(±) 18,8
20	Neg. Adm Usun	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	5,8	(±) 75,4
21	Neg. Adm. Buan	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	4,5	(±) 39,8
22	Neg. Adm. Rumanama	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	5,5	(±) 49,2
23	Neg. Adm. Sikaru	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	5,35	(±) 38,2
24	Neg. Adm Aroa	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	5,57	(±) 75,4
25	Neg. Adm. Dada		3,5	(±) 18,2
V	KECAMATAN KESUI	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi		
1	Neg. Adm Ilili	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,167916	(±) 10,4
2	Neg. Adm Efa	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,259506	(±) 99
3	Neg. Adm Lahema	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,213711	(±) 187,6
4	Negeri Uta	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,625888	(±) 119,2
5	Neg. Adm. Kelangan	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,610603	(±) 198,8



6	Neg. Adm Amarlaut	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	6,235316	(±) 194
7	Negeri Tamher Warat	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,334799	(±) 85,4
8	Negeri Tamher Timur	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	6,925039	(±) 152,2
9	Neg. Wunin Eldedora	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,154457	(±) 52
10	Neg. Adm. Kildor	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	1,333392	(±) 145,8
11	Neg. Adm. Tanah Baru	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,667839	(±) 180,2
12	Neg. Adm Guliar	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,05	(±) 123
13	Neg. Adm. Karlomin	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	1,778559	(±) 88
15	Neg. Adm. Otademan	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	1,555239	(±) 667
16	Neg. Adm. Kurwara	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,25	(±) 31,2
17	Neg. Adm Kelbutak	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,4	(±) 49,2
18	Neg. Adm. Rumah Durun	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	3,334799	(±) 35,2
19	Neg. Adm. Tana Soa	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	0,610603	(±) 15
VI	KECAMATAN TUTUK TOLU			
1	Negeri Danama	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	24,15496	(±) 243,8
2	Negeri Kilmoy	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,028577	(±) 118,8
3	Negeri Kilbat	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	3,129338	(±) 175,4
4	Neg. Adm. Sesar	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	2,747712	(±) 90
5	Negeri Airkasar	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	1,564669	(±) 57,6
6	Negeri Waras-waras	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	3,388844	(±) 193,2
7	Negeri Gah	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	3,327631	(±) 195
8	Neg. Adm Walang Tengah	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	1,147361	(±) 109,8
9	Neg. Adm Bati Kilwaouw		6,827166	(±) 31,6
10	Neg. Adm. Taruay	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2,68724	(±) 103,4
11	Neg. Adm Kufar	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	3,327631	(±) 1194,3



VII	KECAMATN SIWALALAT	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi		
1	Neg. Adm. Dihil	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	91,60771	(±) 89,4
2	Neg. Adm. Liliama	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1154678	(±) 74,2
3	Neg. Adm. Naivel Ahinulin	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	99,01487	(±) 83,8
4	Neg. Adm. Polin	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9,021653	(±) 155,6
5	Neg. Adm. Tunsai	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	6,860869	(±) 147,4
6	Neg. Adm. Lapela	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9890883	(±) 77,4
7	Neg. Adm. Nayet	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	107,4611	(±) 43,2
8	Neg. Adm. Elnusa	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	8,121014	(±) 141,4
9	Neg. Adm. Sabuai	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	104,7505	(±) 62,4
10	Neg. Adm. Abulete	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	103,2411	(±) 57
11	Neg. Ad. Adabai	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	176,5966	(±) 46,6
VIII	KECAMATAN KILMURI			
1	Neg. Adm. Selor	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	7,442842	(±) 91
2	Neg. Adm. Nekan	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	14,35315	(±) 51,4
3	Neg. Adm. Afang Kota	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9,940695	(±) 45,2
4	Neg. Adm. Afang Defol	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	6,669395	(±) 78,2
5	Neg. Adm. Kumelang	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	4,98	(±) 63,8
6	Neg. Adm. Undur	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	7,201932	(±) 82,2
7	Neg. Adm. Kamar	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	6,149537	(±) 177
8	Neg. Adm. Gunak	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9,261363	(±) 116,6
9	Neg. Adm. Sumbawa	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	5,75	(±) 53,6
10	Negeri Kilmuri	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	6,834228	(±) 246,4
11	Neg. Adm. Mising	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	5,794512	(±) 94,4
12	Neg. Adm. Taa	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	3	(±) 44,4
13	Neg. Adm. Bitorik	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	5,8	(±) 45



IX	KECAMATAN PULAU PANJANG			
1	Negeri Pulau Panjang	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	10,39341	(±) 188,4
2	Neg. Adm. Argam	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	7,336524	(±) 81,4
3	Neg. Adm. Lalasa	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	6,725147	(±) 175,2
4	Neg. Adm Magat	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	1,375598	(±) 25,4
5	Neg. Adm. Ruku-rukuy	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,292664	(±) 39,2
6	Neg. Adm. Perik Basaranggih	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	3,209729	(±) 23,6
X	KECAMATAN TEOR			
1	Negeri Teor	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	4,595133	(±) 101,2
2	Neg. Adm. Kaertutin	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,027264	(±) 27
3	Neg. Ad. Ka-kar	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	3,649076	(±) 51,6
4	Negeri Duryar Rumuy	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	3,919378	(±) 95
5	Neg. Adm. Lapang Kamp. Jawa	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	4,595133	(±) 28,6
6	Neg. Adm Kamp. Tengah Wermat	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	3,784227	(±) 30,4
7	Neg. Adm. Kamp. Baru	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,83817	(±) 30,6
8	Neg. Adm. Mamur	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,027264	(±) 47,2
9	Neg. Adm. Kilwouw	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	6,216944	(±) 129,8
10	Neg. Adm. Karlokin	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	1,892113	(±) 32,2
XI	KECAMATAN GOROM TIMUR			
1	Desa Kilkoda	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,93	(±) 146
2	Desa Miran	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	5	(±) 107,4
3	Neg. Adm. Kota siri	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,366362	(±) 201
4	Negeri Amarwawatu	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	5,380749	(±) 158,2
5	Neg. Adm. Aran	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,562309	(±) 87,6
6	Neg. Adm. Tuha	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,546876	(±) 48



7	Neg. Adm. Bas	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,632598	(±) 113
8	Neg. Adm. Tunas Ilur	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,391444	(±) 32,259,6
9	Neg. Ad. Sagey	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	1,793583	(±) 32,2102,8
10	Neg. Adm. Armada	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,597861	(±) 45,2
11	Neg. Adm. Waisalan	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	1,195722	(±) 46,8
12	Neg. Adm. Basarin	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,391444	(±) 32,281
13	Neg. Adm. Goha	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	1,793583	(±) 34
14	Negeri Rarat	Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Abrasi	2,01763	(±) 63,6
15	Neg. Adm. Adar	Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Abrasi	0,086358	(±) 4,8
16	Neg. Adm. Tinarin	Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Abrasi	0,225053	(±) 81
18	Neg. Adm. Etaralu	Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Abrasi	2,60068	(±) 34
19	Neg. Adm. Kiltufa	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	0,366362	(±) 111,6
20	Neg. Adm. Miran Kilian	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	3,5	(±) 56,4
21	Neg. Adm. Miran Keledar	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,53	(±) 78,4
22	Neg. Adm. Mieran Manaban	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,52	(±) 36,2
23	Neg. Adm. Miran Rumuar	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	2,53	(±) 18
XII	KECAMATAN BULA BARAT			
1	Neg. Adm. Hote	Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Abrasi	396,9581	(±) 146
2	Neg. Ad. Banggoi	Banjir	10,6367	(±) 103
3	Neg. Adm. Waimatakabu	Banjir	1,602832	(±) 1845,4
4	Neg. Adm. Waiketam Baru	Banjir	1,068555	(±) 223
5	Neg. Adm. Waisamet	Banjir	1,228606	(±) 174
6	Neg. Adm. Akijaya	Banjir	0,798594	(±) 156,2
7	Neg. Adm. Jakarta Baru	Banjir	1,17541	(±) 222,2
8	Neg. Adm. Silohan	Tsunami, Gelombang Pasang, Abrasi	16,754	(±) 64,8
9	Neg. Adm. Sumber Agung	Banjir	0,812101	(±) 146,6



10	Neg. Adm. Rukun Jaya	Banjir	0,809048	(±) 82,4
11	Neg.Adm. Jembatan Basah		0,625668	(±) 138,8
12	Neg. Adm. Dremland Hills	Banjir	1,17541	(±) 59,6
13	Neg. Adm Banggoi Pancoran	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	6	(±) 32,8
XIII	KECAMATAN KIAN DARAT			
1	Neg. Adm. Kian Darat	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1024256414	(±) 216,8
2	Neg.Adm. Artafela	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	8,778340694	(±) 103,6
3	Neg.Adm. Angar	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1024256414	(±) 101,4
4	Neg.Adm. Watu-watu	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2063145063	(±) 50
5	Neg.Adm. Kelaba	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,526760442	(±) 135,2
6	Neg.Adm. Kilga Kilwouw	Tsunami,Gelombang Pasang, Abrasi	26,33802208	(±) 130,6
7	Neg.Adm. Kilga Watubauw	Tsunami,Gelombang Pasang, Abrasi	2063145063	(±) 182,2
8	Neg. Adm Rumfakar	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	2063145063	(±) 172,6
9	Neg. Adm Kleser	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	0,643818318	(±) 83,6
10	Neg. Adm. Rumoga	Longsor	14,53223449	(±) 54,6
XIV	KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR			
1	Desa Kian Laut	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9540657104	(±) 157
2	Neg.Adm.Kuwaos	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1684216294	(±) 181,2
3	Neg. Adm. Salagor Air	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	8787447332	(±) 118,8
4	Neg.Adm. Salagor Kota	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	928958718	(±) 124
5	Neg. Adm. Aruan Gaur	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1397622576	(±) 115,8
6	Neg. Adm. Keta Manaban	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1012848893	(±) 70,8
7	Neg. Adm. Lian Tasik	Tsunami,Gelombang Pasang	9575239946	(±) 127,6
8	Neg. Adm.Keta	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	6236497756	(±) 68,6
9	Neg. Adm. Airnanang	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	1008819912	(±) 125,6

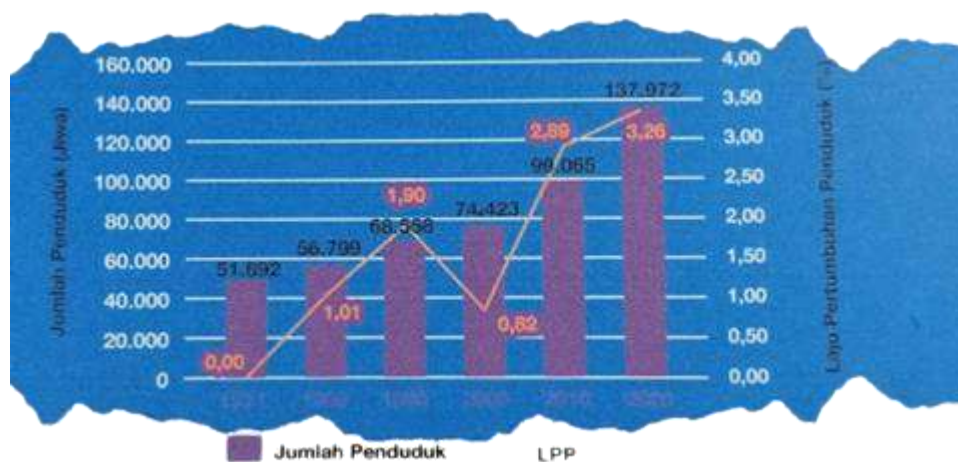


10	Neg. Adm. Suru	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	9062280669	(±) 262,2
XV	KECAMATAN TELUK WARU			
1	Desa Waru	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	25	(±) 307,2
2	Desa Bellis	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	11,4945935	(±) 142,4
3	Neg. Adm. Dawang	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	341,5206998	(±) 108,6
4	Neg. Adm Solang	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	248,2099473	(±) 86
5	Neg. Adm. Karay	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	245,6260536	(±) 148,2
6	Neg. Adm. Nama Lena	Tsunami,Gelombang Pasang, Abrasi	7,238488809	(±) 38,8
7	Neg. Adm. Nama Andan	Tsunami,Gelombang Pasang,Abrasi	7,238488809	(±) 61,6
8	Neg.Adm. Tubir Masiwang	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	33,77961444	(±) 24,4
9	Neg.Adm Kampung Baru	Tsunami,Gelombang Pasang,Banjir,Abrasi	6,852341488	(±) 53
10	Neg. Adm. Bonfia	Banjir	248,2099473	(±) 44,8
11	Neg. Adm Madak	Banjir	15	(±) 5031,6
JUMLAH SELURUH DESA			JUMLAH KESELURUHAN LUAS AREA TERDAMPAK	PERKIRAAN JUMLAH RUMAH TERDAMPAK
198			72.278.495.817	(±) 962,439

H. Demografi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diatas, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 137,972 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, pendudukan Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil sensus tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 99.065 jiwa. Artinya dalam jangka 10 (sepuluh) tahunsejak tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami penambahan sebanyak 38.907 jiwa. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020) adalah sebesar 3,26 persen.

Gambar II.6. Laju Pertumbuhan Penduduk



Lebih lanjut mengenai struktur penduduk menurut generasi, SPP2020 mencatat penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur didominasi oleh penduduk Generasi Z dan Generasi Y atau Milenial. Proporsi Generasi Z (lahir tahun 2018 dst dan diperkirakan sekarang s.d 7 tahun) sebanyak 46,140 jiwa atau 33,44 persen dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, Generasi Y atau Melinial (lahir tahun 1981-1996, perkiraan usia sekarang 24-39 tahun) sebanyak 35,600 atau 25,80 persen dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kedua generasi ini termasuk penduduk usia produktif dan penduduk usia muda yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang

Selanjutnya, dari 15 (lima belas) kecamatan dan 198 (seratus Sembilan puluh delapan) Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang jika dibandingkan dengan luas wilayah maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 24 jiwa per km². SP2020 mencatat

sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bula yakni sebanyak 26,023 jiwa atau 18,86 persen dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya Kecamatan Pulau Gorom sebanyak 22,156 jiwa atau 16,06 persen dan Kecamatan Seram Timur sebanyak 12,181 jiwa atau 8,83 persen. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Pulau Panjang yakni sebanyak 2,961 jiwa atau 1,95 persen dari total penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur

Gambar II.7. Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SP 2020)



Dari hasil SP2020, diketahui piramida penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur termasuk tipe ekspansif. Hal tersebut terlihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda, serta meruncing di bagian atas yang merupakan pendudukan usia tua. SP 2020, mencatat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 49,88 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung 50 orang penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)

Dari 137,972 jiwa penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat 129,971 jiwa atau 94,20 persen penduduk yang berdomisili sesuai dengan KK/KTP, sementara sebesar 5,80 persen atau sebanyak 8,001 jiwa penduduk berdomisili tidak sesuai dengan KK/KTP.

Jumlah ini merupakan indikasi banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya dimana KK/KTP terdaftar, namun belum melakukan perbaikan alamat domisili di KK/KTP.

Tabel II.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
Pulau Gorom	11,260	10,896	22,156
Kesui Watubela	4,786	4,535	9,321
Teor	1,600	1,600	3,200
Gorom Timur	4,794	4,626	9,420
Pulau Panjang	1,364	1,327	2,691
Seram Timur	6,092	6,089	12,181
Tutuk Tolu	3,704	3,462	7,166
Kilmury	3,339	3,179	6,518
Siritaun Wida Timur	3,411	3,278	6,689
Kian Darat	3,204	3,093	6,297
Werinama	3,178	2,987	6,165
Siwalat	3,375	3,210	6,585
Bula	13,089	12,943	26,023
Bula Barat	4,337	3,944	8,281
Teluk Waru	2,718	2,561	5,279
Seram Bagian Timur	70,251	67,721	137,972

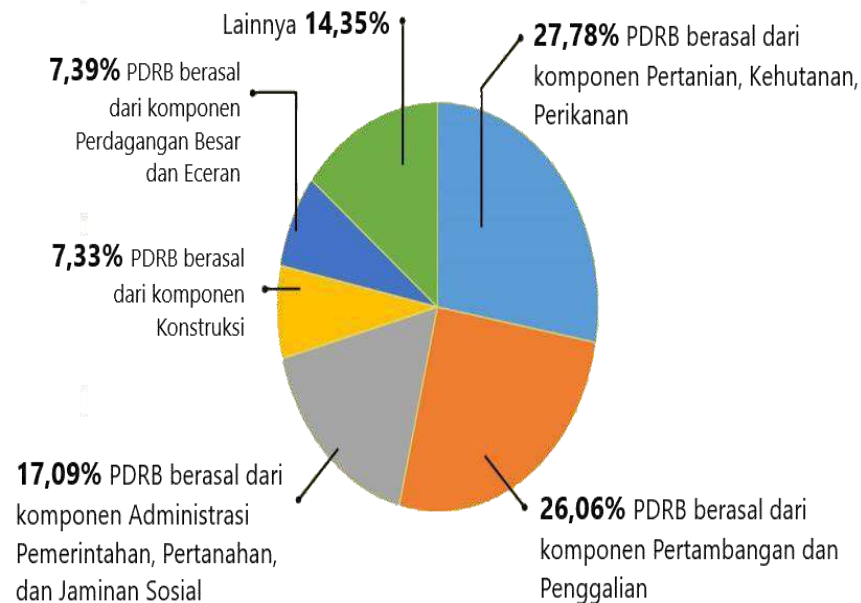
Sumber SP2020, BPS, Tahun 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTARAAN MASYARAKAT

2.2.1. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1. PERTUMBUHAN PDRB (PENGELUARAN)

Secara keseluruhan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontradiksi ekonomi dibanding tahun sebelumnya. Secara total, PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2020 mengalami peningkatan 0,33 persen. Nilai PDRB yakni dari 2.904,40 miliar rupiah (2019) menjadi 2.914,08 miliar rupiah di tahun 2020. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, PDRB Seram Bagian Timur tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai PDRB sebesar 1.935,79 miliar rupiah (2020) menjadi 1.936,88 miliar rupiah (2019). Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan, perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2016-2020 justru cenderung melemah yakni sebesar 5,03 persen; 3,34 persen; 0,38 persen dan 1,00 persen dan mengalami kontraksi sebesar -0,06 persen di tahun 2020 karena adanya **pandemic Covid-19**.



Menurunnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya penurunan produksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang hampir dari separuh total PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pada periode tahun 2016-2020 PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur ADHB meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 2.240,22 miliar rupiah (2016); 2.521,15 miliar rupiah (2017); 2.850,26 miliar rupiah (2018); 2.904,55 miliar rupiah (2019) dan 2.914,08 miliar rupiah (2020). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.13 dan Grafik II.1 berikut ini:

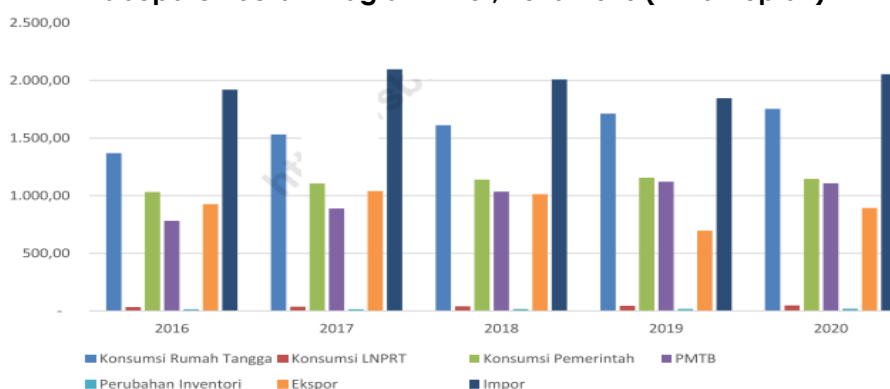
Tabel II.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.368,60	1.531,18	1.612,12	1.712,71	1.753,02
2. Konsumsi LNPRT	34,53	36,38	40,58	44,23	47,95
3. Konsumsi Pemerintah	1.032,27	1.105,62	1.138,94	1.156,98	1.146,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	782,35	889,06	1.035,50	1.122,01	1.107,32
5. Perubahan Inventori	14,84	15,63	17,07	18,33	19,31
6. Ekspor	927,42	1.039,38	1.014,05	697,03	893,83
7. Impor	1.919,79	2.096,08	2.008,02	1.846,90	2.053,53
P D R B	2.240,23	2.521,15	2.850,26	2.904,40	2.914,08

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik II.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)



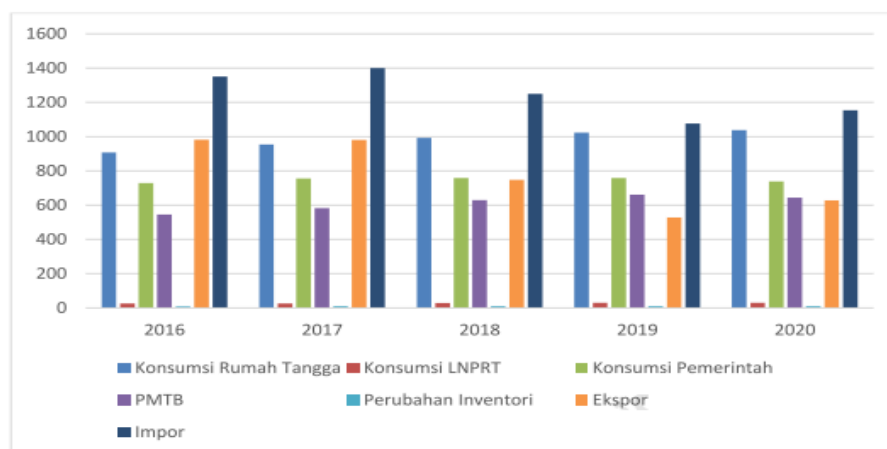
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan tahun 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel II.14 dan Gambar II.2

Dari Tabel II.14 terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2016 – 2020 meningkat dari tahun ke tahun dan mengalami kontraksi di tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahun 2020 Kabupaten Seram Bagian Timur juga terkena dampak pandemi **Covid-19**.

Tabel II.14 PDRB atas harga konstan menurut pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6
1. Konsumsi Rumah Tangga	907,19	954,38	992,97	1.023,82	1.038,40
2. Konsumsi LNPRT	26,41	26,78	28,73	29,89	30,41
3. Konsumsi Pemerintah	729,01	755,73	757,94	758,53	738,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	545,52	582,55	629,47	661,56	643,60
5. Perubahan Inventori	9,60	9,72	10,64	10,68	10,80
6. Ekspor	982,30	980,90	747,43	528,60	627,82
7. Impor	1.351,39	1.399,66	1.249,49	1.076,20	1.153,42
P D R B	1.848,63	1.910,39	1.917,69	1.936,88	1.935,79

Grafik II.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (miliar rupiah)



Grafik II.3 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020



Dari Gambar terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan.

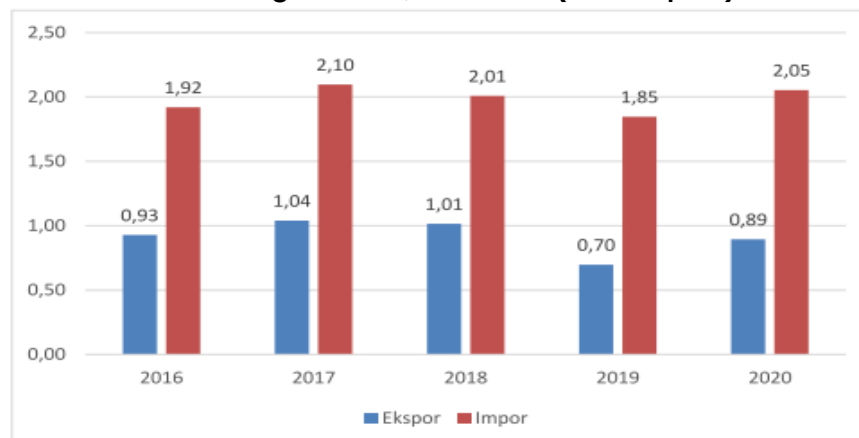
Tabel II.15 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	61,09	60,73	56,56	58,97	60,16
2. Konsumsi LNPRT	1,54	1,44	1,42	1,52	1,65
3. Konsumsi Pemerintah	46,08	43,85	39,96	39,84	39,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,92	35,26	36,33	38,63	38,00
5. Perubahan Inventori	0,66	0,62	0,60	0,63	0,66
6. Ekspor	41,40	41,23	35,58	24,00	30,67
7. Impor	85,70	83,14	70,45	63,59	70,47
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Dari Tabel II.15 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relative besar, yakni sekitar 34,92 sampai dengan 38,63 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 24,00 sampai dengan 41,40 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 63,59 sampai dengan 85,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik II.4 Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (triliun rupiah)



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 39,33 sampai dengan 46,08 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup besar. Di sisi lain, pada tahun 2016-2020 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi "defisit" atau merugi). Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel II.16, selama periode tahun

2016 sampai dengan 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,03 persen (2016); 3,34 persen (2017); 0,38 persen (2018); dan 1,00 persen (2019); dan 0,06 persen (2020). Sedangkan dari Gambar 5 akan terlihat pertumbuhan beberapa komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel II.16 Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga	5,18	5,20	4,04	3,11	1,42
Konsumsi LNPR	4,62	1,38	7,29	4,06	1,71
Konsumsi Pemerintah	2,19	3,67	0,29	0,08	-2,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,87	6,79	8,06	5,10	-2,72
Perubahan Inventori	18,05	1,33	9,39	0,40	1,12
Ekspor	4,65	-0,14	-23,80	-29,28	18,77
Impor	4,10	3,57	-10,73	-13,87	7,18
PDRB	5,03	3,34	0,38	1,00	-0,06

Grafik II.5 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020



Indeks Implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPR, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel II.17 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel II.17 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)**

Indeks Implisit	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga	150,86	160,44	162,35	167,29	168,82
Konsumsi LNPRT	130,73	135,86	141,26	147,97	157,69
Konsumsi Pemerintah	141,60	146,30	150,27	152,53	155,27
Pembentukan Modal Tetap Bruto	143,41	152,62	164,50	169,60	172,05
Perubahan Inventori	154,63	160,69	160,49	171,61	178,76
Ekspor	94,41	105,96	135,67	131,86	142,37
Impor	142,06	149,76	160,71	171,61	178,04
PDRB	121,18	131,97	148,63	149,95	150,54

**Tabel II.18 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Rumah Tangga	2,54	2,55	2,02	1,61	0,75
Konsumsi LNPRT	0,07	0,02	0,10	0,06	0,03
Konsumsi Pemerintah	0,89	1,45	0,12	0,03	-1,05
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,99	2,00	2,46	1,67	-0,93
Perubahan Inventori	0,08	0,01	0,05	0,00	0,01
Ekspor	2,48	-0,08	-12,22	-11,41	5,12
Impor	3,02	2,61	-7,86	-9,04	3,99
PDRB	5,03	3,34	0,38	1,00	-0,06

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data **empiris** menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasifisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori.

Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode 2016–2020.

1.1. Komsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Seram Bagian Timur, ternyata hampir sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Seram Bagian

Timur maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016–2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tabel II.19 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	1.368,60	1.531,18	1.612,12	1.712,71	1.753,02
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	907,19	954,38	992,97	1.023,82	1.038,40
Proporsi terhadap total PDRB (persen)	61,09	60,73	56,56	58,97	60,16
Rata-rata konsumsi per kapita (juta rupiah)					
a. ADHB	12,44	13,72	14,24	14,93	15,08
b. ADHK 2010	8,25	8,55	8,77	8,93	8,94
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	5,18	5,20	4,04	3,11	1,42
b. Per kapita	3,64	3,64	2,57	1,82	0,11
Jumlah Penduduk (ribu orang)	110,02	111,57	113,18	114,68	116,21

Selama periode 2016–2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 61,09 persen (2016); 60,73 persen (2017); 56,56 persen (2018); 58,97 persen (2019); dan 60,16 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 61,10 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 56,85 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pada tahun 2016, untuk konsumsi setiap

rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Timur menghabiskan dana sekitar 12,44 juta rupiah, 13,72 juta rupiah (2017), 14,24 juta rupiah (2018) 14,93 juta rupiah (2019) dan 15,08 juta rupiah di tahun 2020.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan perlambatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk mulai menurun, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” mengalami perlambatan dari 3,64 persen pada tahun 2015 menjadi 0,11 persen di tahun 2020. **Pandemi Covid-19** merupakan salah satu faktor penyebab terjadi perlambatan yang signifikan, hal tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.20 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	70,24	70,61	70,25	70,47	71,43
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	3,40	3,57	3,61	3,13
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,53	8,40	8,36	8,22	7,92
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,93	7,68	7,81	7,83	7,97
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,45	5,49	5,54	5,43	5,26
f. Hotel dan Restoran	1,71	1,74	1,81	1,81	1,74
g. Lainnya	2,72	2,67	2,67	2,62	2,53
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2020, sebagian besar konsumsi rumah tangga di Kabupaten Seram Bagian Timur masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari, yakni sebesar 71,43 persen dari total konsumsi. Sedangkan hanya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dibandingkan kelompok pengeluaran lain yang berfluktuasi selama tahun 2016-2020.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel II.21, menunjukkan perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 6,35 persen.

Tabel II.21 Pertumbuhan Implisit (indeks harga) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020 (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,46	6,72	0,16	3,03	0,64
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,04	5,38	4,57	4,82	4,08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,06	4,45	4,48	3,04	0,19
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,88	5,27	3,01	2,51	0,08
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,32	6,79	1,88	2,59	3,62
f. Hotel dan Restoran	6,57	8,05	4,68	3,19	1,03
g. Lainnya	3,84	4,55	4,02	2,32	0,18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,61	6,35	2,32	1,90	0,92

1.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel II.22 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	34,58	36,37	40,58	44,23	47,95
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	26,41	26,78	28,73	29,89	30,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,54	1,44	1,42	1,52	1,65
Pertumbuhan (ADHK 2010)	4,62	1,38	7,29	4,06	1,71

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan baik ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT sebesar 34,53 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 36,38 miliar rupiah (2017), 40,58 miliar rupiah (2018), 44,23 miliar rupiah (2019) dan 47,95 miliar rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT berdasarkan ADHK 2010 juga berturut-turut adalah 4,62 persen (2016), 1,38 persen (2017), 7,29 persen (2018), 4,06 persen (2019) dan 1,71 persen (2020). Walaupun pada tahun 2020 ada Pilkada namun pengeluaran LNPRT tetap rendah dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

1.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimanaciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan disekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Nonrivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 2.23 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.032,27	1.105,62	1.138,94	1.156,98	1.146,19
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	729,01	755,73	757,94	758,53	738,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	46,08	43,85	39,96	39,84	39,33
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	9,38	9,91	10,06	10,09	9,86
b. ADHK 2010	6,63	6,77	6,70	6,61	6,35
Konsumsi Pemerintah per-pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	274,61	322,81	336,86	324,99	333,39
b. ADHK 2010	193,94	220,65	224,18	213,07	214,71
Pertumbuhan ^{9*}					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,19	3,67	0,29	0,08	-2,68
b. Konsumsi Perkapita	0,70	2,23	-1,13	-1,23	-3,96
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹⁰	3.759	3.425	3.381	3.560	3.438
Jumlah Penduduk (000 Orang)	110,02	111,57	113,18	114,68	116,21

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020, baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.032,27 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.175,62 miliar rupiah (2017), 1.138,94 miliar rupiah (2018) 1.156,98 miliar rupiah (2019) dan 1.146,19 miliar rupiah (2020). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami penurunan hanya di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas sebagai akibat dari dampak Covid-19.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020. Sepanjang periode 2016-2020, proporsi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 39,33 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 46,08 persen. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Namun pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku 9,38 juta rupiah (2016); 9,91 juta rupiah (2017); 10,06 juta rupiah (2018); 10,09 juta rupiah (2019) dan mengalami penurunan 9,86 juta rupiah pada tahun 2020. Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan hingga tahun 2019 kemudian kembali menurun di tahun 2020, dengan masing-masing senilai 6,63 juta rupiah (2016); 6,77 juta rupiah (2017); 6,70 juta rupiah (2018) 6,61 juta rupiah (2019) dan 6,35 juta rupiah di tahun 2020.

Hal ini menunjukkan penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar -2,68 persen (2020) dari 0,08 persen di tahun 2019. Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 274,61 juta rupiah 2016; 322,81 juta rupiah

(2017); 336,86 juta rupiah (2018); 324,99 juta rupiah(2019) dan 333,39 juta rupiah di tahun 2020 .

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumberdaya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 2,23 persen, yang kemudian melambat menjadi -3,96 persen di tahun 2020.

1.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015–2019 berfluktuasi dari 6,87 persen (2016) menjadi -2,72 persen (2020), sementara di tahun lainnya masing-masing 6,79 persen (2017); 8,06 persen (2018); dan 5,10 persen (2020).

**Tabel II.24 Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	782,35	889,06	1.035,50	1.122,01	1.107,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	545,52	582,55	629,47	661,56	643,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	34,92	35,26	36,33	38,63	38,00
Struktur PMTB ¹³					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	519,69	588,15	694,43	753,22	730,88
(%)	66,43	66,15	67,06	67,13	66,00
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	262,66	300,91	341,08	368,79	376,44
(%)	33,57	33,85	32,94	32,87	34,00
Total PMTB					
(Miliar Rp)	782,35	889,06	1.035,50	1.122,01	1.107,32
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Bangunan	7,79	6,16	7,96	4,51	-4,21
b. Non Bangunan	5,38	7,83	8,22	6,06	-0,30
Total PMTB	6,87	6,79	8,06	5,10	-2,72

1.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi atau pun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel II.25 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	14,84	15,63	17,07	18,33	19,31
b. ADHK (Miliar Rp)	9,60	9,72	10,64	10,68	10,80
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,66	0,62	0,60	0,63	0,66

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Perubahan inventori Kabupaten Seram Bagian Timur selama periode 2016-2020 mengalami perubahan yang berfluktuatif.

Pada tahun 2016 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 14,84 miliar rupiah; 15,63 miliar rupiah (2017); 17,07 miliar rupiah (2018); 18,33 miliar rupiah (2019) dan 19,31 miliar rupiah di tahun 2020. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Seram Bagian Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, proporsi perubahan inventori adalah 0,66 persen, selanjutnya 0,62 persen (2017), 0,60 persen (2018), 0,63 persen (2019), dan 0,66 persen (2020).

1.6. Eksport Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk puladalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel II.26 Perkembangan Ekspor
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	927,42	1.039,38	1.014,05	697,03	893,83
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	982,30	980,90	747,43	528,60	627,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	41,40	41,23	35,58	24,00	30,67
Pertumbuhan ¹² (%)	4,65	-0,14	-23,80	-29,28	18,77

Secara total, dalam kurun waktu 2016-2020 nilai ekspor barang dan jasa fluktuatif. Pada tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 927,42 menjadi 1.039,38 miliar rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018-2020 nilai ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar 1.014,05 miliar rupiah; 697,03 miliar rupiah dan 893,83 miliar rupiah. Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2020 yang mencapai 18,77 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing masing tahun adalah sebesar 4,65 persen (2016); -0,14 persen (2017); -23,80 persen (2018); dan -29,28 di tahun 2019.

1.7. Import Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Seram Bagian Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seram Bagian Timur meningkat. Pada tahun 2016 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 1.919,79 miliar rupiah; 2.096,08 miliar rupiah pada tahun 2017; 2.008,02 miliar rupiah pada tahun 2018; 1.846,90 miliar rupiah pada tahun 2019 dan 2.053,53 ditahun 2020. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2016 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 85,70 persen kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 83,14 persen. Di tahun 2018 kontribusi Impor terhadap PDRB menurun menjadi 70,45 persen dan 63,59 persen di tahun 2019. Kemudian meningkat lagi hingga 70,47 persen di tahun 2020.

**Tabel II.27 Perkembangan Import
Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.919,79	2.096,08	2.008,02	1.846,90	2.053,53
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.351,39	1.399,66	1.249,49	1.076,20	1.153,42
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	85,70	83,14	70,45	63,59	70,47
Pertumbuhan ¹² (%)	4,10	3,57	-10,73	-13,87	7,18

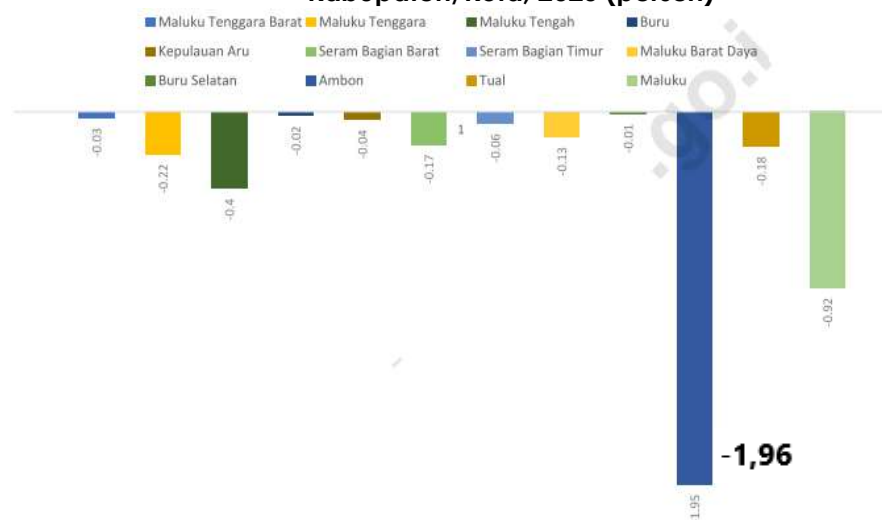
Beranjak dari pemaparan perkembangan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB

pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Kemiskinan

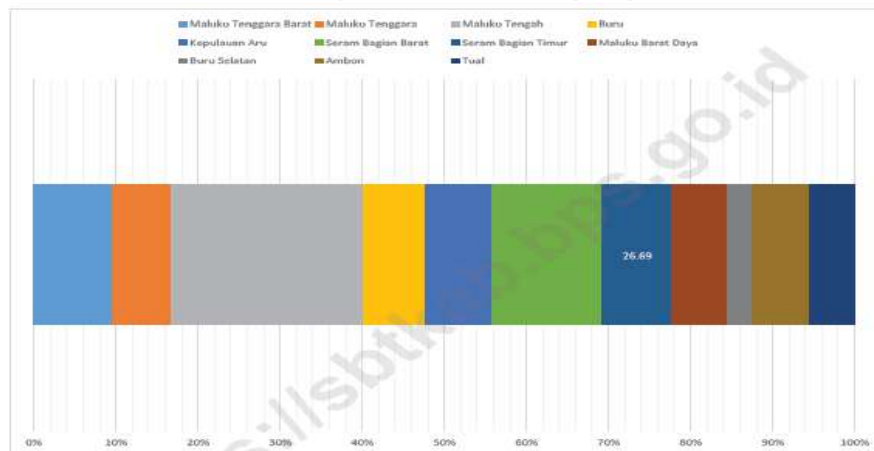
Secara konseptual penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku, maka jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada urutan keempat dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 137.972 jiwa. Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontradiksi ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur secara regional masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara keseluruhan” yakni sebesar -1,95. Keadaan ini salah satunya dipengaruhi tergoncangnya ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Grafik II.6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (persen)



Secara keseluruhan “Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun”

Grafik II.7 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (ribu)



Tabel II.28. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Tanimbar	31,53	30,67	31,53	30,76	30,74
Maluku Tenggara	24,56	23,69	23,16	22,69	22,59
Maluku Tengah	80,28	78,72	74,85	74,80	74,18
Buru	23,53	23,44	23,62	23,89	24,42
Kepulauan Aru	26,48	25,37	25,68	25,62	25,45
Seram Bagian Barat	45,03	43,44	43,77	43,14	43,15
Seram Bagian Timur	26,89	26,23	26,64	26,44	26,69
Maluku Barat Daya	22,53	21,94	21,98	21,49	21,37
Buru Selatan	10,13	10,28	10,12	10,17	10,07
Ambon	19,64	19,64	21,61	21,66	22,15
Tual	17,12	19,09	17,13	17,03	17,30
Maluku	237,72	320,51	320,08	317,69	318,18

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, terlihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 adalah sebanyak 26,69 (ribu) dari total penduduk sebanyak 137,972 jiwa atau naik sebesar 2,5 dari 26,44 di tahun 2019. Lebih Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.29 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	GK (Rp/kapita/bln)	Jml Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2015	311, 770	27,440	25,37
2016	319, 266	26,890	24,53
2017	334, 645	26,230	23,59
2018	341, 261	26,640	23,62
2019	375, 261	26,440	23,13
2020	398, 430	26,690	23,0

Sementara itu mengenai Indek Kedalam Kemiskinan (IKK) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2013 – 2020 yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel II.30 Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2013	3,47	0,77
2014	3,52	0,87
2015	3,47	0,69
2016	4,26	1,20
2017	4,87	1,57
2018	3,92	0,98
2019	4,35	1,18
2020	4,44	1,22

Tabel II.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Kabupaten Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Tanimbar	61,12	61,64	62,39	62,86	62,86
Maluku Tenggara	64,2	64,94	65,53	65,85	66,2
Maluku Tengah	69,54	70,09	70,6	71,25	71,25
Buru	65,82	66,03	66,16	66,32	66,41
Kepulauan Aru	62,16	62,34	62,52	62,73	62,87
Seram Bagian Barat	60,72	60,96	61,2	61,48	61,69
Seram Bagian Timur	58,32	58,56	58,84	59,16	59,41
Maluku Barat Daya	61,37	61,62	61,87	62,16	62,38
Buru Selatan	65,6	65,74	65,92	66,13	66,27
Ambon	69,74	69,92	70,12	70,35	70,52
Tual	66,33	64,61	64,89	62,61	65,47
Maluku	65,35	65,4	65,59	65,82	65,98

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan daerah, terutama karena pengaruhnya yang sangat berarti bagi peningkatan daya dukung penduduk selaku subyek pembangunan, dan bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Menyadari akan hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui peningkatan sarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

Kondisi pendidikan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut yakni :

- 1.1. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tahun Ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 129 dan SD Swasta sebanyak 21 sekolah dengan jumlah Murid total sebanyak 17,614 siswa (murid) dan jumlah Guru sebanyak X orang. Selanjutnya, jumlah



Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Tahun Ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 3 sekolah dengan total jumlah murid sebanyak 633 orang serta Guru sebanyak 43 orang, sedangkan untuk MIS sebanyak 14 sekolah dengan total jumlah murid sebanyak 1.386 dan 111 Guru;

- 1.2. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tercatat sebanyak 47 dan Swasta sebanyak 7 sekolah dengan total jumlah siswa sebanyak 5.875 orang serta Guru sebanyak X orang. Selanjutnya, Jumlah Sekolah Mts Negeri Tahun Ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 6 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 1,075 serta Guru sebanyak 117 orang. Sedangkan Mts Swasta ada 15 sekolah dengan jumlah total murid sebanyak 810 siswa dan 178 Guru;
- 1.3. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat pada Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 15 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta dengan total jumlah murid sebanyak 4.217 orang serta Guru sebanyak 213 orang. Selanjutnya, jumlah MA Negeri yang tercatat Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 3 sekolah dengan total jumlah murid sebanyak 517 orang dan Guru sebanyak 60 orang. Selanjutnya untuk MA Swasta terdapat 6 sekolah dengan murid sebanyak 471 orang dan 85 Guru.

Target dalam MGD"s berkaitan dengan capaian Pendidikan Dasar untuk semua adalah menjamin bahwa semua anak dimanapun baik laki laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan berdasarkan data bidang pendidikan tahun 2019/2020 di Kabupaten Seram Bagian Timur, APK untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II.32 Data Bidang Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	4.99	19.58	5.53	7.70	62.19	100.00
Perempuan	6.74	19.23	5.88	7.63	60.52	100.00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	6.23	22.95	6.89	7.26	56.67	100.00
40 Persen Tengah	5.54	18.81	5.76	9.12	60.77	100.00
20 Persen Teratas	5.74	13.83	3.29	5.46	71.68	100.00
Seram Bagian Timur	5.85	19.41	5.70	7.67	61.37	100.00

2. Bidang Kesehatan

Kesehatan seperti halnya pendidikan, merupakan salah satu aspek penting yang sangat diperhitungkan dalam pembangunan manusia. Sasaran utama dari pembangunan kesehatan tidak lain adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang secara umum diukur dengan tingkat usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah dan atau daerah tertentu.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi

penyediaan sarana kesehatan misalnya, jumlah sarana utama kesehatan sampai akhir 2017 sebanyak 307 unit. Dari segi ketersediaan Tenaga Medis yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 adalah sebanyak 308.

Pada tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 1.229 orang yang terdiri dari 45 orang tenaga Dokter, 633 Perawat, 245 Bidan, 57 sanitasi dan 240 lainnya. Sementara itu, jumlah fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan yakni 2 Rumah Sakit, 22 Puskesmas, 3 Klinik atau Balai Pengobatan, 230 Posyandu dan 3 unit Poliklinik Desa

Tabel II.33. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan, Tahun 2018-2020

Kecamatan	RUMAH SAKIT			POLIKLINIK		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pulau Gorom	1	1	1	1	1	1
Bula			1	1	1	
					1	
Jumlah	1	1	2	2	3	1

Untuk fasilitas Rumah Sakit berjumlah 2 (dua) yakni berada pada Kecamatan Pulau Gorom dan di Kecamatan Bula (Pusat Ibukota sementara Kabupaten Seram Bagian Timur), sementara Poliklinik berjumlah 6 yang berada di kecamatan Seram Timur, Tutuk Tolu, Bula dan Teluk Waru.



**Tabel II.34 Keluarga dan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak
Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	NAMA PKM	DESA	KELUARGA DGN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YG LAYAK(JAMBA SEHAT)	JUMLAH RT PENGGUNA SARANA AIR BERSIH	JUMLAH RT PENGGUNA SARANA AIR MINUM YG
1	KECAMATAN SIWALALAT	PKM ATIAHU	DESA			
			TOTAL	615	414	465
2	KECAMATAN TEOR	PKM TEOR	DESA			
			TOTAL	670	576	674
3	KECAMATAN KIAN DARAT	PKM KILGA	DESA			
			TOTAL	1.264	567	781
4	KECAMATAN TUTUKTOLU	PKM AIRKASAR	DESA			
			TOTAL	492	742	984
5	KECAMATAN BULA BARAT	NAMA PKM	DESA			
		PKM	DESA	1.063	756	917
			TOTAL	596	604	654
6	KECAMATAN KILMURY	NAMA PKM	DESA			
		PKM	DESA	165	303	363
			TOTAL	438	437	205
7	KECAMATAN WERINAMA	NAMA PKM	DESA			
		PKM	DESA	705	394	537
			TOTAL	428	389	437
8	KECAMATAN BULA	NAMA PKM	DESA			
			TOTAL	2.821	2.904	1.611
9	KECAMATAN TELUK WARU	NAMA PKM	DESA			
			TOTAL	581	490	655



10	KECAMATAN SERAM TIMUR	NAMA PKM	DESA			
TOTAL				691	1085	1246
	KECAMATAN SERAM TIMUR	NAMA PKM				
TOTAL				425	635	627
11	KECAMATAN P GOROM	NAMA PKM	DESA			
TOTAL		PKM	DESA	1891	1892	1970
TOTAL		PKM	DESA	522	511	535
TOTAL				5701	6163	5347
12	KECAMATAN KESUI WATUBELA	PKM	DESA			
TOTAL				941	1050	1128
13	KECAMATAN SIRITAUN WIDATIMUR	PKM	DESA			
TOTAL				925	1391	839
14	KECAMATAN PULAU PANJANG	PKM	DESA			
TOTAL				80	436	459
15	KECAMATAN GOROMTIMUR	PKM	DESA			
TOTAL	15 KECAMATAN	22 PKM	198 DESA	19305	22060	19839



Tabel II.35 Data Petugas Sanitasi Per Puskesmas Tahun 2021
Dinas Kesehatan

No	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH PETUGAS SATNITASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1	Siwalalat	Atiahu	1	D3 KESLING	PNS
		Polin	1	D3 KESLING	PNS
2	Teor	Teor	1	SKM	PNS
3	Kian Darat	Kilga	1	D3 KESLING	PNS
4	Tutuk Tolu	Air Kasar	1	D3 KESLING	PNS
5	Bula Barat	Jakarta Baru	1	D3 KESLING	NON PNS
		Banggoi	1	S1 KESLING	NON PNS
6	Kilmury	Kilmury	1	D3 KESLING	PNS
		Afang	1	D3 KESLING	NON PNS
7	werinama	Werinama	1	D3 KESLING	PNS
		Batuasa	1	D3 KESLING	PNS
8	Bula	Bula	3	D3 KESLING	PNS
				D3 KESLING	PNS
				D3 KESLING	NON PNS
9	Teluk Waru	Waru	1	D3 KESLING	NON PNS
10	Seram Timur	Geser	1	D3 KESLING	PNS
		Ukar Sengan	1	D3 KESLING	NON PNS
11	Pulau Gorom	Kataloka	1	D3 KESLING	PNS
		Day	1	D3 KESLING	PNS
		Amarsekaru	1	D3 KESLING	NON PNS
12	Kesui Watubela	Tamher Timur	1	S1 KESLING	PNS
13	Siritaun Wida Timur	Nama	1	D3 KESLING	NON PNS
14	Pulau Panjang	Pulau Panjang	1	D3 KESLING	PNS
15	Gorom Timur	Miran	1	D3 KESLING	NON PNS
Jumlah			24		

3. Bidang Pertanahan

Kepemilikan tanah oleh masyarakat maupun non masyarakat, baik tanah tersebut untuk kegiatan perdagangan, jasa, industri, maupun untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), harus dibuktikan kepemilikannya dengan sertifikat tanah, sebagai dasar kepemilikan.

Pada tahun 2020, Kementrian ART/BPN kembali membagikan Sertifikat Tanah untuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun total sertifikat tanah yang siap dibagikan ke warga Kabupaten Seram bagian Timur dan Kabupaten Buru di Provinsi Maluku adalah sebanyak 2.971 sertifikat untuk 11 desa dalam 1 kecamatan di Kabupaten Seram bagian Timur sisanya untuk Kabupaten Buru. Sertifikat dibagikan terpisah, sebanyak 2.020 sertifikat tanah disiapkan untuk warga Kabupaten Seram bagian Timur, sedangkan 951 sertifikat tanah sisanya untuk Kabupaten Buru.

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanahan adalah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di suatu daerah ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk yang bersedia menawarkan jasa kerjanya pada tingkat upah dan kondisi perekonomian pada periode tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja daerah ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. Deviasi antara kedua indikator tersebut menghasilkan angka pengangguran terbuka yang tidak lain adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Jumlah pendaftaran dan penerimaan tenaga kerja menurut jenis kelamin pada Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel II.36 Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020

Tahun	Pendaftaran		Jumlah	Penerimaan		Jumlah
	L	P		L	P	
2017	42	54	96	1	30	31
2018	28	47	75	1	30	31
2019	28	47	75	1	30	31
2020	18	4	12	-	-	-

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Seram Bagian Timur

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

1.1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekola (APS)

Salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7 – 12 tahun, 13 -15 tahun dan 16 – 18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel II.37 Data APS, APM dan APK Formal dan Non Formal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2020

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	100.00	99.18	99.60
13 – 15 tahun	96.01	98.10	97.11
16 – 18 tahun	77.44	91.12	82.94
APM			
SD	98.15	98.70	98.42
SMP	69.77	73.08	71.51
SMA	58.24	73.84	64.50
APK			
SD	110.64	108.60	109.64
SMP	94.88	87.35	90.91
SMA	76.68	102.90	87.21

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Murid Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Pemahaman Jumlah ketersediaan sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data Jumlah ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel II.38 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD, di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	SEKOLAH SD					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020
Pulau Gorom	20	20	-	-	20	20
Kesui Watubela	11	11	5	5	16	16
Teor	1	1	3	3	4	4
Gorom Timur	9	9	-	-	9	9
Pulau Panjang	3	3	-	-	3	3
Seram Timur	13	13	3	3	16	16
Tutuk Tolu	5	5	1	1	6	6
Kilmury	10	10	2	2	12	12
Siritaun Wida Timur	6	6	-	-	6	6
Kian Darat	5	5	-	-	5	5
Werinama	10	10	1	1	11	11
Siwalalat	8	8	2	2	10	10
Bula	9	9	1	1	10	10
Bula Barat	11	11	1	1	12	12
Teluk Waru	8	8	2	2	10	10
Jumlah	129	129	21	21	150	150

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel II.39 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP, di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	SEKOLAH SMP					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020
Pulau Gorom	10	10	1	1	11	11
Kesui Watubela	5	5	2	2	7	7
Teor	2	2	-	-	2	2
Gorom Timur	3	3	-	-	3	3

Kecamatan	SEKOLAH SMP					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020
Pulau Panjang	1	1	-	-	1	1
Seram Timur	4	4	-	-	4	4
Tutuk Tolu	2	2	-	-	2	2
Kilmury	3	3	1	1	4	4
Siritaun Wida Timur	3	3	-	-	3	3
Kian Darat	1	1	1	1	2	2
Werinama	3	3	-	-	3	3
Siwalalat	3	3	1	1	4	4
Bula	3	3	-	-	3	3
Bula Barat	2	2	-	-	2	2
Teluk Waru	2	2	1	1	3	3
Jumlah	47	47	7	7	54	54

Tabel II.40 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas, (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	SEKOLAH SMA					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	201/ 2020	2019/ 2020	201/ 2020
Pulau Gorom	2		1		3	
Kesui Watubela	1		2		3	
Teor	1		-		1	
Gorom Timur	2		1		3	
Pulau Panjang	1		-		1	
Seram Timur	1		1		2	
Tutuk Tolu	1		-		1	
Kilmury	1		-		1	
Siritaun Wida Timur	-		1		1	
Kian Darat	1		-		1	
Werinama	1		-		1	
Siwalalat	1		1		2	
Bula	1		-		1	
Bula Barat	1		-		1	
Teluk Waru	-		-		-	
Jumlah	47	47	7	7	54	54

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel II.41 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	SEKOLAH SMK					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020
Pulau Gorom	1				1	
Kesui Watubela	1				1	

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing

Kecamatan	SEKOLAH SMK					
	Negeri		Swasta		Jlm/Total	
	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020	2019/ 2020
Teor	-				-	
Gorom Timur	1				1	
Pulau Panjang	-				-	
Seram Timur	-				-	
Tutuk Tolu	-				-	
Kilmury	-				-	
Siritaun Wida Timur	1				1	
Kian Darat	-				-	
Werinama	1				1	
Siwalalat	-				-	
Bula	2				2	
Bula Barat	-				-	
Teluk Waru	1				1	
Jumlah	8				8	

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

c. Rasio Guru Permuid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satu guru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah murid, guru dan rasio murid terhadap guru di setiap jenjang pendidikan.

Tabel II.42 Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020

Jenjang Pendidikan		Tahun 2020		
		Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
1	SD/MI	19,446	1,073	18
2	SMP/MTs	5,830	461	13
3	SMA/MA	4,173	308	14
4	SMK	1,170	97	12
Total/Rata Rata		30,619	1,939	16

2. Urusan Kesehatan

2.1.1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat

dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia sejak dini. Tujuan diselenggarakannya posyandu:

- a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- b) Membudayakan NKKBS.
- c) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- d) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pada implementasinya posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Perkembangan posyandu di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

2.1.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang sering dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu). Perkembangan puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.43 Jumlah RSUD, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan PolinDes, Menurut Kecamatan, 2019 dan 2020

Kecamatan	RSU		Puskesmas		Posyandu		Polindes	
Pulau Gorom	1	1	3	3	39	39		
Kesui Watubela			1	1	21	21		
Teor			1	1	10	10		
Gorom Timur			1	1	18	18		

Kecamatan	RSU		Puskesmas		Posyandu		Polindes	
Pulau Panjang			1	1	6	6		
Seram Timur			2	2	23	23		
Tutuk Tolu			1	1	12	12		
Kilmury			2	2	8	8		
Lian Vitu			1	1	11	11		
Kian Darat			1	1	9	10		
Werinama			2	2	16	16		
Siwalalat			2	2	14	14		
Bula			1	1	17	17	1	1
Bula Barat			2	2	13	13	2	2
Teluk Waru			1	1	12	12		
Total/Rata Rata	1	1	22	22	229	230	3	3

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.3.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter dan tenaga melayani 2.500 penduduk. Data tentang Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis di KabupatenSeram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.44 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020

Kecamatan	TENAGA KESEHATAN				
	Dokter	Perawat	Bidan	Sanitasi	Lainnya
Pulau Gorom	7	66	54	9	22
Kesui Watubela		27	10	1	8
Teor		13	9	2	9
Gorom Timur	1	21	6	2	6
Pulau Panjang	1	11	3	2	4
Seram Timur	2	29	14	12	11
Tutuk Tolu	1	14	16	2	7
Kilmury		19	8	3	11
Siritaun Wida Timur		13	6	2	7
Kian Darat	1	15	7	1	4
Werinama	1	35	10	6	15
Siwalalat	2	30	16	4	12
Bula	25	292	75	17	109
Bula Barat	2	37	15	3	12
Teluk Waru	2	11	5	1	3
Total/Rata Rata	45	633	254	57	240

Sumber : BPS,2020. SBT Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.4. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular seperti diare, TB dan Malaria merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dan lingkungan tempat tinggal. Penyakit Diare, TB dan Malaria dapat menyerang pada siapa saja tanpa terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja. Data tentang cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare, TB dan Malaria Tahun 2020 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.45 Angka Kesakitan menurut Karakteristik

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	13.15
Perempuan	15.77
Kuintil Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	15.89
40 Persen Tengah	12.78
20 Persen Teratas	14.84
Seram Bagian Timur	14.44

2.1.5. Cakupan Balita Yang Pernah Mendapatkan Vaksinasi

Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam memberikan pelayanan terhadap balita gizi buruk dari waktu ke waktu terus di tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal tersebut sejalan dengan sasaran indikator visi dan misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong terwujudnya target indikator sasaran dimaksud, maka alokasi Pagu anggaran untuk bidang kesehatan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Perkembangan mengenai balita gizi buruk selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.46 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang pernah mendapat imunisasi menurut karakteristik dan jenis imunisasi, 2020

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	Polio	DPT	Hepatitis B	Campak/MMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	86.22	89.00	79.35	84.61	76.46
Perempuan	88.36	92.69	81.16	76.77	76.48
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	83.28	87.61	74.67	74.15	73.68
40 Persen Tengah	94.76	96.26	88.08	86.92	83.57
20 Persen Teratas	86.17	90.90	82.69	88.04	72.70
Pendidikan Tertinggi					
SD ke bawah	86.17	89.53	77.76	78.28	74.81
SMP ke atas	88.31	92.06	82.54	82.87	77.98
Seram Bagian Timur	87.29	90.85	80.26	80.68	76.47

2.1.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sepanjang kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.47 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 18-49 Tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan menurut karakteristik. 2020

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
(1)	(2)
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	N/A
40 Persen Tengah	27.11
20 Persen Teratas	17.29
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	0.00
SMP ke atas	17.20
Seram Bagian Timur	13.57



3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan, merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai mantap sempurna, mantap marginal dan tidak mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis ("engineering criteria") yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- Mantap sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/ kapasitas;
- Mantap marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/ kapasitas atau sebaliknya; dan
- Tidak mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Berikut ini data jalan dan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Timur : Salah satu perkembangan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah dapat dilihat dari pembangunan dan kondisi jalan di wilayah tersebut. Pada tabel di atas, dapat dilihat panjang jalan menurut jenis

permukaan terdiri dari jalan yang diaspal, kerikil/sertu dan tanah. Pada Tahun 2017 di Kabupaten Seram Bagian Timur, jalan yang sudah diaspal memiliki panjang 270,16,4 Km. Panjang jalan dengan permukaan kerikil/sertu sepanjang 154,96 Km. sedangkan untuk permukaan tanah sepanjang 222,43 Km.

Jika dilihat menurut kondisi jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pada tahun 2017 panjang jalan dengan kondisi baik adalah sepanjang 324,63 km, jalan dengan kondisi sedang sepanjang 4,19 km, jalan dengan kondisi rusak memiliki panjang 112.54. jalan dengan kondisi rusak berat memiliki panjang 206,18 km

Tabel II.48 Panjang Jalan Menurut Penanganan dan Jenis Permukaan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2021 (km)

Jenis Jalan	Tahun 2020 Kategori Jalan			Total
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Diaspal	83,00	38,82	148,335	270,16
Kerikil/Sertu	7,00	-	148,0	154,96
Tanah	-	114,58	107,85	222,43
Tidak Dirinci	-	-	-	-
Total	90.00	153,40	404,14	647,54

Sumber Data : Dinas PUPR Kab.Seram Bagian Timur

Tabel II.49 Jalan Menurut Penanganan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tahun 2021 (km)

Kondisi Jalan	Tahun 2020 Kategori Jalan			Total
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	81,20	32,71	210,72	324,63
Sedang	-	-	4,19	4,19
Rusak	8,80	19,41	84,33	112,54
Rusak Berat	-	101,28	104,90	206,18
Total	90.00	153,40	404,14	647,54

Sumber Data : Dinas PUPR Kab.Seram Bagian Timur

Dinas Pekerjaan Umum juga melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dalam hal Penataan Ruang yaitu melakukan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dengan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

Dokumen	Jumlah	Keterangan
RTRW	1	Ada
RDTRK	3	Ada

Dokumen	Jumlah	Keterangan
RTBL	2	Ada
Dokumen Lainnya	2	Ada

3.1.2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sarana dan prasarana ibadah bagi setiap pemeluk agama apapun, merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar yang dibutuhkan dan harus tersedia pada setiap permukiman penduduk. Demikian pentingnya sarana dan prasarana ibadah, maka salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah seberapa banyak tersedianya sarana dan prasarana ibadah pada suatu komunitas masyarakat. Data dan informasi tentang sarana dan prasarana ibadah di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 50 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupten Seram Bagian Timur

Tahun	Jumlah Sarana Ibadah/Tahun				
	Mesjid	Mushola	Gereja	Wihara	Pura
2016	248	20	6	-	1
2017	248	22	6	-	1
2018	248	25	6	-	1
2019	248	27	6	-	1
2020	260	35	6	-	1

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk serta faktor lainnya, seperti kebijakan kota, perkembangan ekonomi wilayah dan kota, baik internal maupun eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati rumah tersebut, Data jumlah rumah perlu digunakan untuk menganalisis ketersediaan rumah saat ini terhadap kebutuhan rumah oleh penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Data jumlah rumah yang digunakan diperoleh dari data digitasi dari peta citra Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020. Adapun jumlah rumah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.51 Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Seram Bagian

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Eksisting (unit)	Backlog
1	Pulau Gorom	21.827	4.365	4.065	300
2	Wakate	9.879	1.976	1.753	223
3	Teor	2.845	569	528	41
4	Gorom Timur	8.334	1.667	1.706	-39
5	Pulau Panjang	2.422	484	460	24
6	Seram Timur	12.06	2.412	2.613	-201
7	Tutuk Tolu	7.702	1.54	1.205	335
8	Kilmury	5.449	1.09	1.543	-453
9	Werinama	7.027	1.405	1.329	76
10	Siwalalat	7.246	1.449	1.822	-373
11	Bula	23.244	4.649	4.232	417
12	Bula Barat	7.451	1.49	1.131	359
13	Kian Darat	5.742	1.148	1.179	-31
14	Lian Vitu	5.677	1.135	1.139	-4
15	Teluk Waru	4.802	960	439	521
Seram Bagian Timur		131.707	26.341	25.141	1.195

Sumber Data : Dinas PKP Kab Seram Bagian Timur

Sedangkan pada eksisting *backlog* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah. Data *backlog* ini dilakukan dengan membandingkan antara kebutuhan rumah dan rumah yang tersedia. Sesuai ketentuan dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, untuk mengetahui kebutuhan rumah yakni digunakan asumsi jumlah penghuni 1 rumah yakni sebanyak 5 orang, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa 1 Rumah Tangga beranggotakan 5 orang. Asumsi ini digunakan dalam penentuan Jumlah rumah tangga Kabupaten seram Bagian Timur Tahun 2020

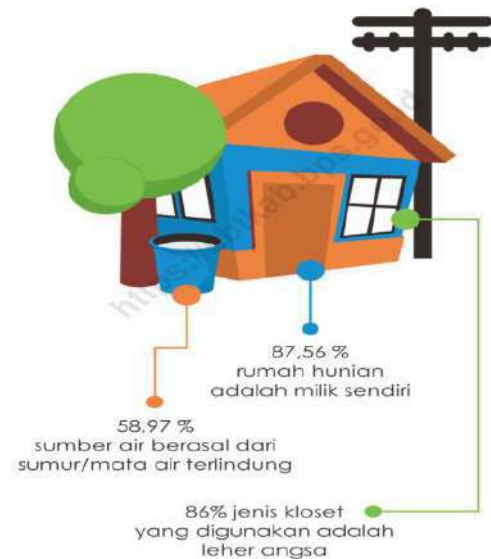
4.1.1. Cakupan Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur rumah layak huni, antara lain adalah jenis atap rumah, dinding rumah dan lantai rumah, serta luas lantai. Pertumbuhan prosentase rumah layak huni di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dibawah ini.

Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2020

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	88.94	11.06	100.00
Perempuan	78.66	21.34	100.00
Kuintil Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	91.64	8.36	100.00
40 Persen Tengah	90.08	9.92	100.00
20 Persen Teratas	79.52	20.48	100.00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	93.90	6.10	100.00
SMP ke atas	80.87	19.13	100.00
Seram Bagian Timur	87.56	12.44	100.00

*) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll



4.1.2. Prasarana dan Sarana Umum

a. Air Bersih

Penyediaan air bersih layak minum merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang terhadap ketersediaan air bersih harus segera diwujudkan sehingga dibutuhkan lembaga (PDAM) yang akan dalam mengelola air bersih yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Seram Bagian Timur, masyarakat memperoleh air bersih dari sumur galian dan sumur bor. Pada mulanya, sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya yakni berasal dari sumur galian yang terletak di tengah-tengah lingkungan permukiman masyarakat. Setelah itu sebagian masyarakat kemudian beralih menggunakan sumur bor yang dilengkapi dengan bak penampungan air. Air bersih yang berasal dari sumur galian dan sumur bor tersebut kemudian didistribusikan ke setiap rumah-rumah yang membutuhkan dengan menggunakan sistem perpipaan.

Tabel II.52 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Daya Utama yang digunakan Rumah Tangga

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Memasak/ Mandi/Cuci/dll					
	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin KRT						
Laki-laki	-	-	50.04	9.82	17.39	47.38
Perempuan	-	-	58.31	12.15	26.63	59.22
Kuintil Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	-	-	74.96	9.91	22.56	61.69
40 Persen Tengah	-	-	71.02	10.77	16.49	50.29
20 Persen Teratas	-	-	44.20	16.64	28.15	47.56
Pendidikan Tertinggi KRT						
SD ke bawah	-	-	59.42	9.52	18.15	43.09
SMP ke atas	-	-	53.24	12.06	20.38	49.86
Seram Bagian Timur	-	-	48.00	9.38	16.77	46.91

*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

b. Prasarana dan Sarana Umum (PSU) lainnya

Dalam pemenuhan kawasan rumah yang layak huni maka dibutuhkan utilitas pendukung lainnya seperti Pembangunan/ peningkatan Jalan lingkungan, Pembangunan/Peningkatan Drainase, Pembangunan Talud, Pengelolaan air limbah dan Persampahan

c. Penanganan kawasan permukiman kumuh

Keberadaan beberapa kawasan permukiman kumuh (terutama kumuh berat) merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya, dalam hal ini pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil. Masa depan suatu wilayah sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan masyarakat yang berimbang, kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan suatu wilayah yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan perintisan pembentukan jaringan kemitraan yang saling mendukung.

Tabel II.53 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Topografi Kawasan	Kategori	Pola Penanganan	Prioritas Penanganan
1	Kecamatan Teor	19,24	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
2	Kecamatan Kilmury	94,63	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
3	Kecamatan Bula	22,90	Permukiman Kumuh di atas Air dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
4	Kecamatan Teluk Waru	66,91	Permukiman Kumuh di dataran rendah dan kawasan perbukitan	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
5	Kecamatan Bula Barat	27,20	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
6	Kecamatan Pulau Gorom	37,54	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
7	Kecamatan Gorom Timur	23,81	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
8	Kecamatan Lian Vitu	91,75	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
9	Kecamatan Siwalalat	32,94	permukiman kumuh tepi patai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	sedang
10	Kecamatan Werinama	17,06	Permukiman kumuh di tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
11	Kecamatan Kian Darat	36,41	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah serta perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
12	Kecamatan Tutuk Tolu	35,05	Permukiman Kumuh di atas air, dataran rendah, dan perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
13	Kecamatan Seram Timur	24,50	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
14	Kecamata Pulau Panjang	14,89	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Berat
15	Kecamatan Kesui Watubela	20,14	Permukiman Kumuh ditepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur dengan indikator antara lain meliputi

- Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa dan jumlah linmas per 10.000 penduduk
- Sedangkan pencapaian target indikator cakupan patroli petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan

yang baik, system informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat.

Tabel II.54 Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan PERDA	5	17	27	30	30
Jumlah Petugas Sat Pol PP	100	150	200	235	275
Penyelesaian Sengketa K3	-	-	-	-	-
Jumlah Petugas Linmas	75	75	35	35	35
Sistim Informasi Manejemen Pemda	1	1	1	1	1
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	-	-

5.2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur dengan indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 -2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.55 Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	5	5	5	5
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	10	9	8	8

6. Urusan Sosial

6.1. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Keberhasilan pencapaian target indikator panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada urusan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.56 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial
(Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Tahun	Jumlah Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rahabilitasi (unit)
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

6.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Keberhasilan pencapaian target indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2016 sampai dengantahun 20 20, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.57 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Sosial
berdasarkan Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan**

Tahun	Jumlah PMKS (Org)	Mendapat Bantuan	
		Jumlah Orang	Rasio (%)
2016	0	0	0
2017	2078	80	3,85
2018	2046	80	3,91
2019	2036	110	5,40
2020	1989	0	0

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Keberhasilan target capaian indikator penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.58 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-	-	-
Tamat Sekolah Dasar	-	20.362	21.050	21.147	19.564
SLTP	-	8.542	8.778	10.620	10.355
SLTA	-	9.466	10.322	11.308	15.450
D-I/II/III, S1/S2/S3	-	6.241	6.158	7.913	7.820

Sedangkan pencapaian target indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.59 Perkembangan Urusan Tenaga Kerja berdasarkan angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Pengangguran Terbuka	-	4.149	2.310	1.715	1.919
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	40.462	43.998	49.273	51.270
Jumlah	-	44.611	46.308	50.988	53.189

2. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur antara lain, yakni prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.60 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	-	-	-	-	-
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

3. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak azasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.61 Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
Ketersediaan Pangan Utama (ton)	-	-	-	-	-

4. Lingkungan Hidup

Bidang urusan lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terkait dengan uraian diatas, maka dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan berbagai langkah kebijakan sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan, maka indikator capaian target pengelolaan bidang lingkungan hidup yang dapat dijadikan tolok ukur, diantaranya persentase penduduk berakses air minum. Pertumbuhan persentase penduduk berakses air minum sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.62 Ketersediaan Jenis Air Minum di Kab. Seram Bagian Timur

Jenis Air Minum	Tahun/Presentasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Air Dalam Kemasan	-	-	-	-	-
Air PDAM	-	-	-	Ada	Ada
Air Sumur Terlindung	-	-	-	-	-
Air Sumur Tak Terlindung	-	-	-	-	-

Jenis Air Minum	Tahun/Presentasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mata Air Lindung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mata Air Tak Terlindung	-	-	-	-	-
Air Sungai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Perkembangan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.63 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Surat	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kartu Keluarga	20.999	11.125	19.613	27.707	30.826
KTP-el	36.409	10.550	49.135	71.338	74.218
Akte Kelahiran 0-18 Tahun	11.934	21.360	21.417	40.706	41.317
Akte Perkawinan	786	489	813	5.964	6.635
Akte Kematian	320	87	525	1.101	1.112

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan kapasitas para kader pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program

dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.64 Jumlah kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata Rata Jumlah Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	10	10	15	20	20
Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan PPK	5	5	10	15	15
Jumlah PPK Aktif	25	25	75	105	250
Jumlah Posyandu Aktif	10	10	15	35	50
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan	-	-	-	-	-

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pencapaian target indikator penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, diantaranya cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan penyelenggaraan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.65 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB di Kabupaten Seram Bagian Timur

TAHUN	Peserta KB						
	MOW	IUD	MOP	Kondom	Implan	Suntik	Pil
2016	-	3	4	84	92	4.416	611
2017	3	7	1	97	121	6.864	1.082
2018	7	10	1	110	152	6.976	1.854
2019	6	6	-	118	176	7.127	1.619
2020	52	41	-	881	386	9.531	1.545
Jumlah	68	67	6	1.290	927	34.914	6.711

Sedangkan Perkembangan penyelenggaraan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.66 Perkembangan Penyelenggaraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Seram Bagian Timur

TAHUN	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera			
		I	II	III	III+
2016	8.763	5.539	3.089	530	140
2017	8.763	5.539	3.089	533	132
2018	8.763	6.766	3.660	845	150
2019	8.763	6.766	3.660	845	150
2020	8.763	6.766	3.660	845	150

8. Urusan Perhubungan

Salah satu indikator pengukuran capaian target urusan perhubungan adalah banyak Bandara, Pelabuhan laut dan Terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/ bandara biasa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Moda transportasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah transportasi jenis pelayaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Saat ini pelayaran yang sedang dikelola oleh swasta adalah pelayaran untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gorom – Kesui Watubela - Teor sebanyak 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Sedangkan pelayaran yang dikelola oleh pemerintah untuk rute Geser – Bula untuk sementara 1 kali pelayaran dalam seminggu. Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pertumbuhan pelabuhan laut dan bandara di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.67 Nama Pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Nama Pelabuhan <i>Name of Harbor</i>	Bahan Konstruksi Dermaga <i>Material Construction of Pier</i>	Ukuran <i>Size</i>	Kedalaman <i>Depth</i>	
				Pasang <i>Tide</i>	Surut <i>Subsided</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bula	Pelabuhan Sesar	Beton	50 m	8 m	1 m
Seram Timur	Pelabuhan Geser	Beton	50 m	10 m	1 m
	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Beton	50 m	11 m	2 m
Tutuk Tolu	Pelabuhan Air Kasar	Beton	250 m	7 m	1 m
Kesul Watubela	Pelabuhan Kesul	Beton	50	9 m	1 m
Pulau Gorom	Pelabuhan Namalua	Beton	100 m	10 m	1 m
Gorom Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kota Sini	Beton	60 m	10 m	1 m
Werinama	Pelabuhan Bemo	Beton	100 m	8 m	1 m
Lian Vitu	Pelabuhan Air Nanang				
Teor	Pelabuhan Teor				

**JUMLAH PELABUHAN PENYEBRANGAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

No	NAMA DERMAGA	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	KETERANGAN
1	PELABUHAN PENYEBRANGAN AIRNANANG	KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	BERTAHAP
2	PELABUHAN PENYEBRANGAN GESER	KEC. SERAM TIMUR	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	BERTAHAP
3	PELABUHAN PENYEBRANGAN KAILAKAT	KEC. GOROM	2014, 2015	BERTAHAP
4	PELABUHAN PENYEBRANGAN KESUI	KEC. KESUI	2014, 2015	BERTAHAP
5	PELABUHAN PENYEBRANGAN TEOR	KEC. TEOR	2014, 2015	BERTAHAP

JUMLAH DERMAGA/PELABUHAN STRATEGIS DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	BAHAN KONSTRUKSI DERMAGA	UKURAN	KEDALAMAN (M)	
					PASANG	SURUT
1	PELABUHAN SESAR	KEC. BULA	BETON	50 m	5 m	3 m
2	PELABUHAN GESER	KEC. SERAM TIMUR	BETON	50 m	7,15	3,19
3	PELABUHAN ONDOR	KEC. P. GOROM	BETON	100 m	4,5	3
4	PELABUHAN BEMO	KEC. WERINAMA	BETON	100 m	7	3
5	PELABUHAN KESUI	KEC. WAKATE	BETON	50 m	4	2,5

JUMLAH BANDAR UDARA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	BANDARA LAPANGAN TERBANG	KELAS	KAPASITAS	UKURAN		KONSTRUKSI
				PANJANG	LEBAR	
1	BANDARA KUFAR	LAPTER PEMERINTAH/GOVERNMENT AIRPORT	46	1400 m	30 m	HOTMIX

FREKUENSI PENERBANGAN TERATUR (SKED) MENURUT RUTE PENERBANGAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	RUTE PENERBANGAN	FREKUENSI PENERBANGAN (Per Minggu)	JENIS PESAWAT	MASKAPAI PENERBANGAN
1	KUFAR – AMBON	4 KALI	ATR - 42	TRIGANA AIR
2	AMBON – KUFAR	4 KALI	ATR - 42	TRIGANA AIR

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi.

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki 1 (satu) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya 1 (satu) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

b. Jumlah Wartel/Warnet

Jumlah wartel/warnet, adalah ketersediaan wartel/ warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel (warung telekomunikasi), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet (warung internet), yaitu tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Terkait dengan hal tersebut, maka jaringan stasiun telepon seluler yang telah beroperasi telah ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Pulau Gorom. Sementara itu, untuk pelayanan kantor pos dan giro telah ada sebanyak 3 unit. Namun yang dapat beroperasi secara penuh baru 2 kantor, yaitu Kantor Pos di Kecamatan Bula dan Kantor Pos di kecamatan Seram Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah jaringan komunikasi; (ii) jumlah warnet/wartel; (iii) jumlah web site milik pemda; dan (iv) pameran/expo per tahun, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.68 Jumlah Sistem informasi dan Ekspo Informasi Data di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jaringan Komunikasi	1	1	1	1	1
Warnet/Wartel	1	1	1	5	5
Website	1	1	1	1	1
Pameran/Ekspo Per Tahun	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-

Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi, maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sementara itu, Semakin besar jumlah wartel/warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Perkembangan jenis berdasarkan jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihatsebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.69 Jumlah Koperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur

JENIS KOPERASI	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
KSU	91	91	86	86	86
KUD	20	20	15	15	15
KOPLAN	2	2	2	2	2
KOPHUT	1	1	1	1	1
KOPERIK	6	6	6	6	6
KOPAD	2	2	2	2	2
KOP.NELAYAN	2	2	2	2	2
KSP	4	4	4	4	4
KPN	7	7	7	7	7
KOP.ANGKUTAN DARAT	2	2	1	1	1
KOP. PASAR	2	2	2	2	2
KOP. WANITA	2	2	2	2	2
KOP. PERMAS	1	1	1	1	1
KOP. KARYAWAN	3	3	2	2	2
KOP. TKBM	2	2	2	2	2
KOP. PESANTREN	1	1	1	1	1
KOPERASI	33	33	27	27	27
KOPTAN	1	1	1	1	1
KOPERASI JASA	-	-	1	1	1
JUMLAH	182	182	165	165	165

11. Urusan Penanaman Modal

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/ kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.70 Jumlah PMDN/PMA di kabupaten Seram Bagian Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Jumlah Nilai Investasi PMDN / PMA	50
2	Jumlah Izin yang diterbitkan	800
3	Indek Kepuasan Masyarakat	75

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator antara lain :

- jumlah organisasi pemuda;
- jumlah organisasi olahraga;
- jumlah kegiatan kepemudaan;
- jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemuda; dan
- jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.71 Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	12	12	12	13	13
Jumlah Organisasi Olahraga	11	11	11	11	11
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	2	2	1
Jumlah Kegiatan Olahraga	1	1	2	2	1
Jumlah Gelangan/Balai Remaja/Pemuda	-	-	-	-	-
Jumlah Lapangan Olahraga	26	26	26	26	26

13. Urusan Statistik

Urusan statistik daerah, mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, sertadata terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik, dapat diukur melalui indikator :

- a. tersedianya buku “ Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka”; dan
- b. tersedianya buku “PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur”, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.72 Ketersediaan Informasi Manual Book di
Kabupaten Seram Bagian Timur**

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kabupaten Menurut Pengeluaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kabupaten Dalam Angka Untuk Kepentingan Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Konstruksi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Statistik Kesejahteraan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

14. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua)sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu:

- a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,beretika, berbudaya dan beradab; dan
- b. mewujudkan bangsa yang berdayasaing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data tentang perkembangan

pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.73 perkembangan pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Nama Situs Bangunan Bersejarah	Lokasi Situs Bangunan Bersejarah			Pengelola
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Monumen Tulabeal Gorun Riun	SBT	P. Gorom	Kataloka	Polsek
Makam Pahlawan Mayor Abdullah	SBT	Seram Timur	Geser	
Masjid Tua Giro Gaja	SBT	Gorom	Ondor	
Kapal Tua Bakoka		Seram Timur	Guli Guli	
Masjid Tua Kilbaren	SBT	Teluk Waru	Waru	
Nakara	SBT	P. Gorom	Kataloka	

15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dapat diukur antara lain dengan pencapaian target indikator

- jumlah perpustakaan;
- jumlah koleksi buku perpustakaan; dan
- jumlah pengunjung perpustakaan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.74 Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
Jumlah Koleksi Buku	-	-	-	-	-
Jumlah Pengunjung	-	-	-	-	-

16. Urusan Kearsipan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (a) pengelolaan arsip secara terpadu; dan (b) peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.75 Jumlah SDM dan Pengelola Arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan Arsip Secara Terpadu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Peningkatan Sumber Daya Pengelola Arsip	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

17. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJP, IIII/.mD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Data tentang ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Bupati dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel II.76 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

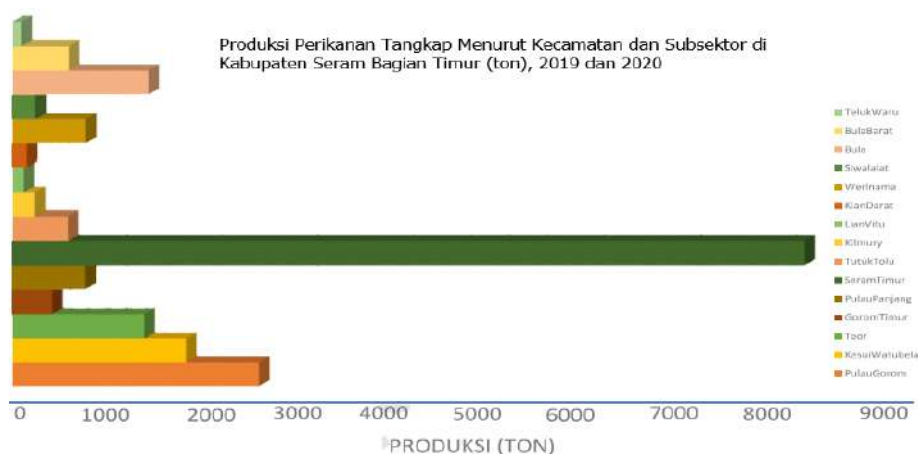
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

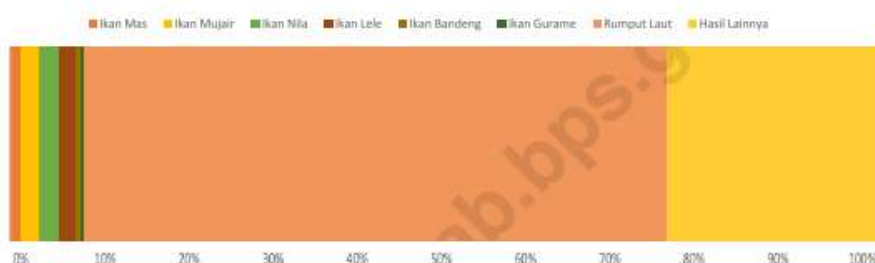
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan kabupaten bahari dengan 72% wilayahnya adalah lautan. Wilayah ini berada pada lintang tropis serta berbatasan dengan Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafuru. Hal ini menyebabkan Kabupaten SBT kaya akan potensi sumber daya alam. Penghasil produk perikanan terbesar di Kabupaten SBT berasal dari Kecamatan Seram Timur dengan jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Budidaya laut sebesar 84,4, dimana kecamatan Pulau Gorom sebesar 83,6 dan Bula Barat sebesar 0,8
- b. Tambak sebesar 2,64, dimana kecamatan Bula sebesar 1,42 dan Bula Barat sebesar 1,26.
- c. Kolam sebesar 13,26, dimana Kecamatan Werinama 0,53, Bula 0,66 dan Bula Barat 12,07
- d. Jaring Apung sebesar 26,23, dimana kecamatan Pulau Gorom sebesar 3,4, Teor sebesar 4,72, Pulau Panjang 4,2, Seram Timur 7,27, dan Teluk Waru sebesar 7,44

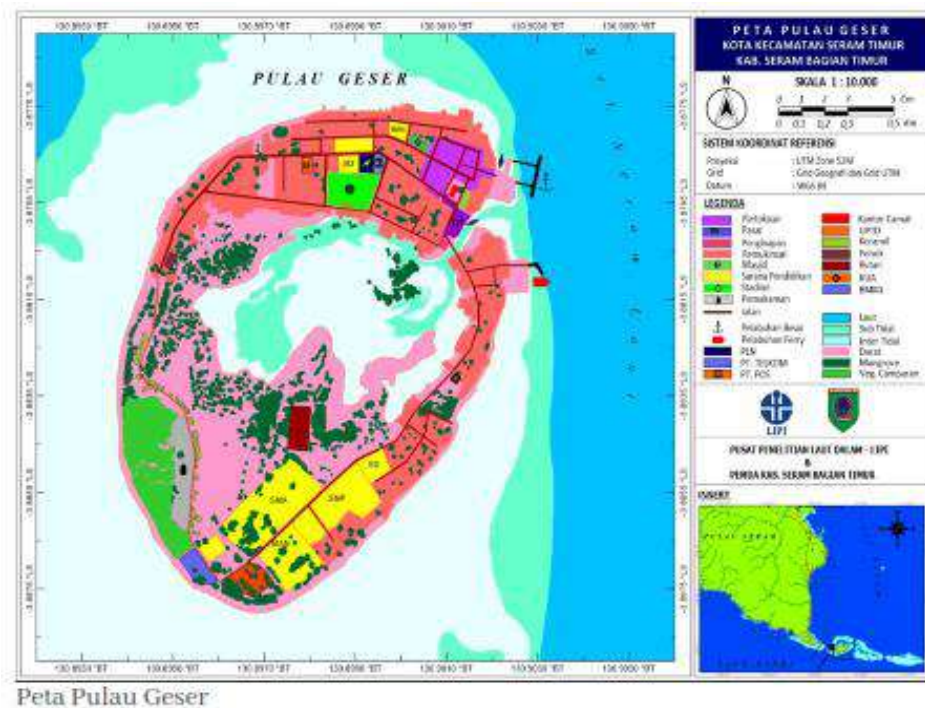
Sementara itu, untuk produksi dan nilai produksi Perikanan Budidaya menurut jenis ikan dan rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Timur, tahun 2020 untuk produksi adalah sebesar 126,5 ton dan total nilai produksi adalah 4.096 979. Jumlah RTP tangkap tahun 2020 sebanyak 7.356 rumah tangga dengan total produksi 19.549 ton ikan. Sedangkan untuk sektor perikanan budidaya dibedakan menjadi budidaya laut, tambak, kolam, dan jaring apung. RTP budidaya laut sebanyak 306 rumah tangga dengan produksi sebesar 84,4 ton. RTP budidaya tambak sebanyak 24 rumah tangga (adadi Kecamatan Bula dan Bula Barat) dengan produksi sebesar 2,68 ton. RTP budidaya kolam ada sebanyak 107 rumah tangga dengan total produksi 13,26 ton. dan yang terakhir RTP budidaya jaring apung sebanyak 109 rumah tangga dengan produksi 26,23.



Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Rumput Laut di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020



Potensi sumberdaya perikanan yang kaya terdiri atas sumberdaya ikan pelagis, ikan demersal, ekinodermata (Teripang, bulu, babi) moluska ekonomis penting seperti lola dan batu laga, polikeit terutama laor, rumput laut dan biota laut lainnya lainnya. Kekayaan laut pada perairan sekitar Kecamatan Seram Timur, didukung oleh adanya ekosistem pesisir yang masih tergolong baik sehingga mampu mendukung kehidupan biota laut pada perairan tersebut. Terdapat 3 ekosistem pesisir utama pada Kecamatan Seram Timur, yakni Mangrove dengan luas 3600 Ha, padang Lamun 876.51 Ha Karang.



1. Ketersediaan Unsur Hara di sekitar Perairan Pulau Keffing, Seram Bagian Timur.

Secara geografis ekosistem perairan Pulau Keffing Kecamatan Seram Timur , Kabupaten Seram Bagian Timur dipengaruhi oleh arus Laut Banda dibagian Barat dan Selat Laut Seram di sebelah Utara serta Laut Aru disebelah selatan. Pemanfaatan sumberdaya yang optimal dari perairan ini sangat membutuhkan kondisi lingkungan perairan yang baik, diantaranya mengenai fungsi ekosistem di perairan tersebut. Interaksi antar komponen penyusun ekosistem akan berpengaruh terhadap keberadaan zat hara perairan.

Zat hara yang merupakan bahanmakanan bagi fitoplankton umumnya diperoleh dari daratan sekitarnya dan berasal dari berbagai limbah rumah tangga dan industri. Fitoplankton merupakan komponen utama rantai makanan bagi biota laut sehingga keberadaan zat hara dan fitoplankton merupakan salah satu indikator kesuburan perairan.

Beberapa lokasi disepanjang perairan Pulau Geser merupakan tempat bertelur (Spawning), mencari makan (Grazing) dan lokasi tangkapan perikanan. Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia di daerah itu, berbagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi kondisi perairan ini, perubahan musim dan berbagai limbah masyarakat. Fungsi perairan sering berubah akibat perubahan struktur dan kuantitas plankton yang meliputi fungsi dan tingkat kemampuan perairan sebagai pendukung kehidupan organisme

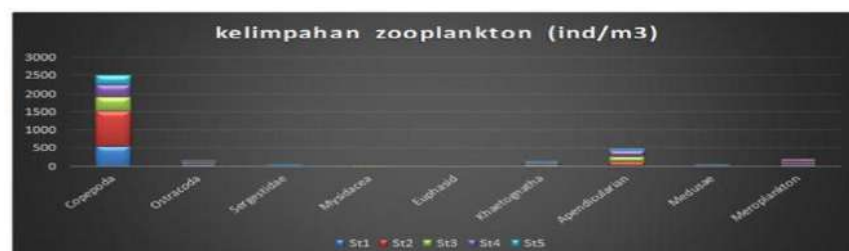
Jenis-jenis mangrove di Pulau Keffing dan sekitarnya

No	Jenis	Nama Lokal	Pulau Keffing	Pulau Kwamor	Pulau Geser
Mangrove Sejati					
1	<i>Rhizophora stylosa</i>	Akat gain	+	+	+
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	Akat gain	-	+	-
3	<i>Rhizophora apiculata</i>	Akat sasadil	-	+	-
4	<i>Ceriops tagal</i>	Akat barun	-	+	+
5	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	Akat wawina	-	+	-
6	<i>Bruguiera cylindrica</i>	-	-	+	-
7	<i>Avicennia officinalis</i>	Solturun	-	+	+
8	<i>Sonneratia alba</i>	Farotas	+	+	+
9	<i>Pemphis acidula</i>	Timemu	-	+	+
10	<i>Xylocarpus granatum</i>	Malar	-	+	+
11	<i>Xylocarpus moluccensis</i>	Malar	-	+	-
12	<i>Aegiceras corniculatum</i>	Fundi-fundi	-	+	-
13	<i>Osbornia octodonta</i>	-	-	-	+
14	<i>Excoecaria agallocha</i>	Matauli	-	-	+
Mangrove Asosiasi					
15	<i>Clerodendrum inerme</i>	-	-	-	+
16	<i>Ipomea pes-caprae</i>	-	-	-	+
17	<i>Pongamia pinnata</i>	-	+	+	+
18	<i>Casuarina equisetifolia</i>	-	+	-	+
19	<i>Pandanus tectorius</i>	-	-	-	+
20	<i>Morinda citrifolia</i>	-	-	-	+
21	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	-	-	-	+
22	<i>Barringtonia asiatica</i>	-	-	-	+
23	<i>Terminallia catappa</i>	-	+	+	+
24	<i>Ricinus communis</i>	-	+	-	+
25	<i>Lantana camara</i>	-	+	-	+
26	<i>Cocos nucifera</i>	Kelapa	+	-	+
Jumlah			6	15	20



2. Plankton di Pulau Kefin, Seram Bagian Timur

Fitoplankton yang lebih dikenal sebagai produsen dan zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama mempunyai peranan penting dalam mendukung biota laut pada tingkat tropic yang lebih tinggi. Bagi ikan-ikan herbivore (pemakan plankton), keberadaan plankton disuatu perairan merupakan potensialitas pakanalami.



Kelimpahan Zooplankton

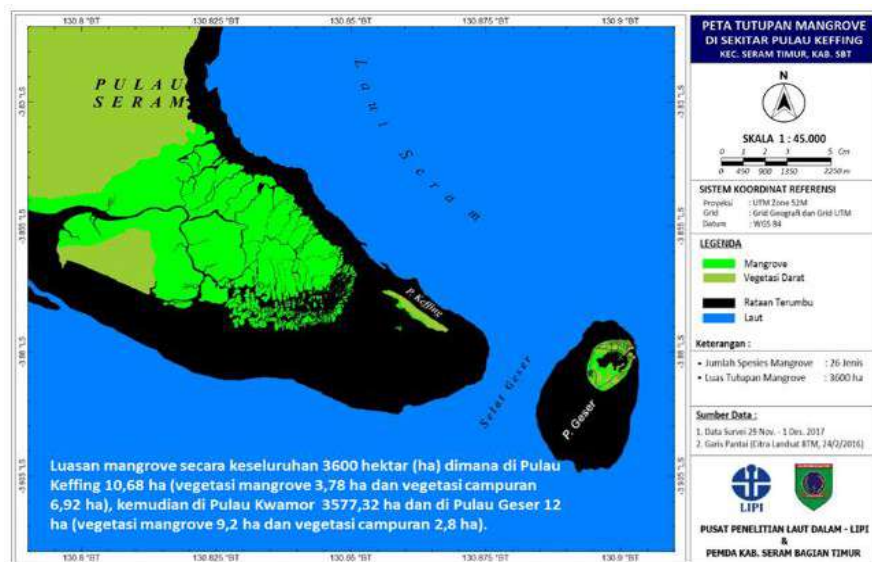
Kelimpahan zooplankton secara total berkisar antara $3,5 \times 10^2$ ind/m³ sampai 11,9 x Pada tingkatan jenis, copepod *Oncaea* sp menjadi jenis zoo plankton yang paling melimpah di semua lokasi penelitian. Kelimpahan Copepoda berkisar antara



" COPEPODA JENIS
ONCAEA SP,
MENJADI
ZOOPLANKTON YANG
PALING MELIMPAH
DI PULAU KEFFING
-SBT"

3. Mangrove

Pulau Keffing 10,68 hektar (ha) (vegetasi mangrove 3,78 ha dan vegetasi campuran 6,92 ha), kemudian di Pulau Kwamor 3975,5 ha dan di Pulau Geser 11,8 ha (vegetasi mangrove 9,2 ha dan vegetasi campuran 2,6 ha). Masyarakat Seram Timur mengenal mangrove dengan nama "Akat". Menurut masyarakat, akat biasanya disebutkan untuk mangrove jenis *Rhizophora*. Dari hasil Penelitian LIPPI dan koleksi bebas pada ke tiga pulau tersebut, ditemukan 26 mangrove yang terdiri dari 14 mangrove sejati dan 12 mangrove asosiasi. Di Pulau Keffing ditemukan 6 jenis mangrove, di Pulau Kwamor 15 jenis, dan Pulau Geser 20 jenis (Tabel).



Jenis-Jenis Mangrove yang ditemukan



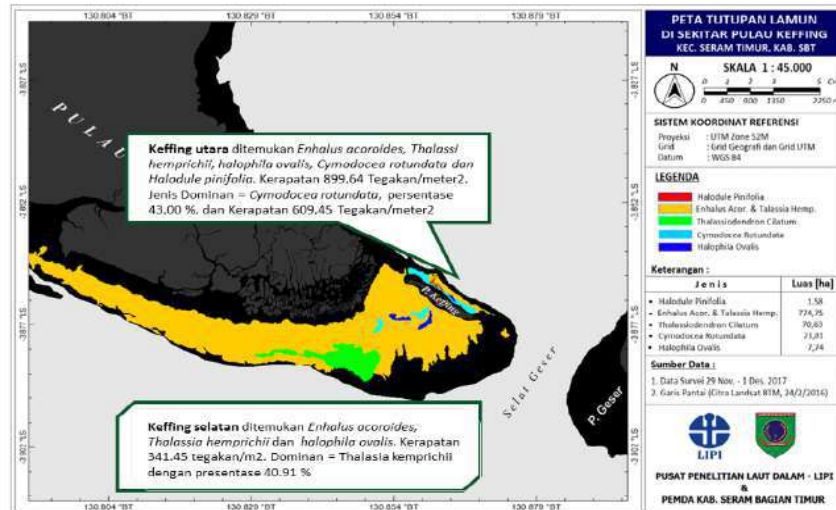
4. Ekosistem Lamun

Lamun (seagrass) atau dalam bahasa lokal Pulau Keffing disebut "keor" merupakan tumbuhan laut yang sangat produktif, dan mempunyai peran yang penting bagi organisme laut di ekosistem wilayah pesisir. Peran dan fungsi lamun tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1. Pada saat masih hidup fungsinya sebagai tempat memijah, merawat, tempat mencari makan dan tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan/udang. Sebagai makanan bagi beberapa jenis hewan laut seperti dugong (ikan duyung) penyu serta beberapa jenis ikan seperti ikan Siganus sp (samandar). Menjadi tempat melekat epifit yang juga merupakan makanan bagi beberapa jenis ikan. Akarnya mengikat sedimen sehingga berfungsi sebagai penahan erosi atau stabilisator sedimen. 2.

Apa bila yang sudah mati maka ditritusnya merupakan nutrient bagi organisme bentik yang hidup disekitarnya. Lamun di Pulau Keffing Kecamatan Geser Kabupaten Seram Bagian Timur ini, kondisi lamun berada pada kategori tutupan padat dengan nilai rata-rata 67.27%. Padang lamun di kedua area tersebut dibentuk oleh lima jenis lamun yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Halophila ovalis* dan *Halodule pinifolia*. Jenis lamun yang

dominan adalah *Thalassia hemprichii* dengan nilai rata-rata tutupan 22.59%.

Tutupan Lamun di sekitar Pulau Keffing



5. Terumbu Karang

Terumbu karang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia, karena ± 30 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hayati laut. Di samping itu juga terumbu karang mempunyai arti yang penting sebagai aset nasional untuk menarik wisatawan karena memiliki nilai estetikanya serta mempunyai nilai ilmiah bagi dunia pendidikan dan penelitian.

Persentase tutupan komponen karang hidup tertinggi ditemukan pada St.1 (Utara P. Keffing) sebesar 83,62 %, dan yang terendah adalah pada St.4 (Timur Pulau Keffing) dengan tutupan 10,76 %. Sedangkan untuk St.2 (Keffing Utara) diperoleh persentase tutupan karang hidup adalah sebesar 79.12 % (Tabel 1), dan pada St.3, tidak dilakukan transek, hanya dilakukan pengamatan visual dan pengambilan gambar dan video. Kondisi karang batu berdasarkan hasil analisa dari data transek yang dilakukan di kedalaman 5 m, diperoleh hasil persen penutupan untuk komponen karang hidup adalah 83,62%, yang terdiri dari karang hidup kelompok *Acropora* 9,02 % dan kelompok Non-*Acropora* 4,60 %.

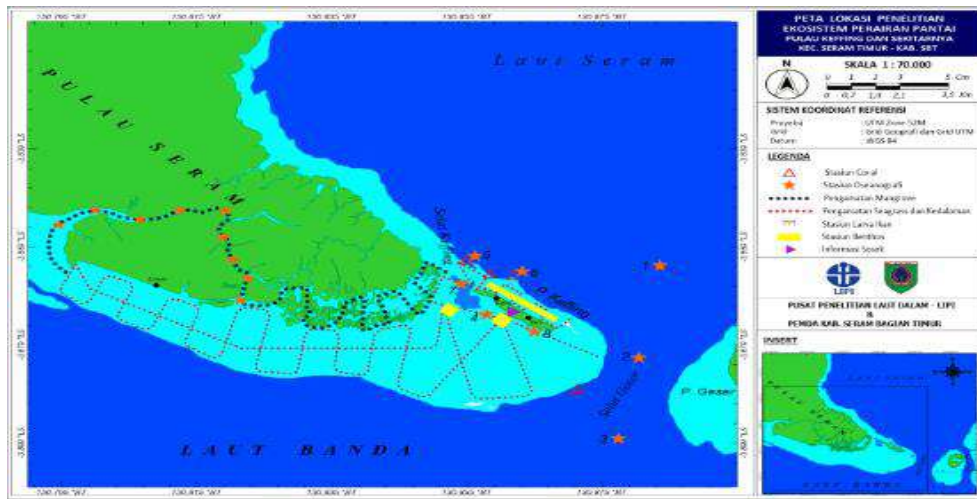
Kelompok karang hidup *Acropora* yang memberikan kontribusi nilai tertinggi adalah dari bentuk pertumbuhan ACB (*Acropora Bercabang/bercabang*) dengan nilai 76,04%, yaitu dari jenis karang hidup *Acropora nobilis*, *Acropora microphthalma*, *Acropora parilis* dan *Acropora gomezi* (Gambar 2), keempat jenis karang hidup inilah yang

tumbuh mendominasi perairan Stasiun 1. Selain karang hidup yang juga dijumpai komponen dasar perairan yang menonjol yaitu dari komponen DCA (Karang mati yang ditumbuhi algae) dengan nilai tutupan 12,84 % (Tabel 1), hal ini menunjukkan bahwa walau kondisi karang hidup dalam kondisi baik, namun pada wilayah ini ada terjadi kerusakan karang.

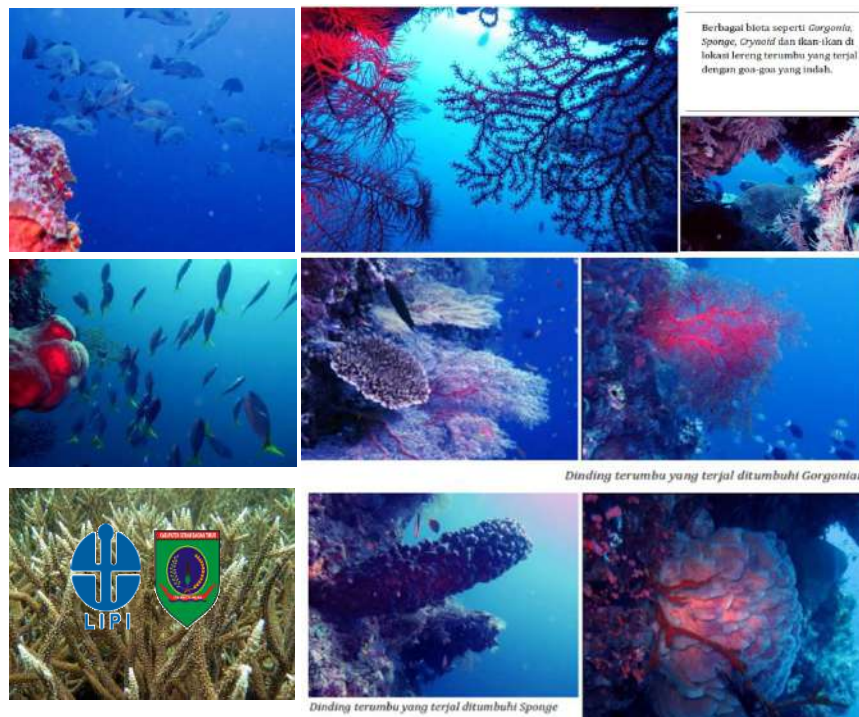
Dari persentase penutupan komponen karang hidup yang diperoleh pada stasiun ini (83,62%), maka berdasarkan kriteria penilaian karang hidup suatu wilayah yang dikemukakan oleh Wilkinson *et al*, 1994, dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu lokasi ini berada pada kategori "**Sangat Baik**". Berdasarkan persentase penutupan komponen karang hidup yang diperoleh pada stasiun ini (79,12 %), maka dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu stasiun 2 (dua) berada pada kategori "**Sangat Baik**". Pada stasiun 3 (tiga) tidak dilakukan transek, hanya dilakukan pengamatan secara visual serta pemotretan dan pembuatan video. Pengambilan data pada stasiun ini tepat pada posisi 130.86174° BT dan - 3.86487° LS, yang letaknya $\pm$ 400 dari pesisir pantai. Stasiun ini memiliki daerah lereng terumbu yang terjal dengan kemiringan $\pm$ 90°. Pada lereng terumbu yang terjal dijumpai goa-goa dengan ukuran kecil dan besar. Lereng terumbu dan goa-goa tersebut ditumbuhi bermacam biota yang sangat menarik seperti *Gorgonian*, *Sponge*, *Crynoid*, *Tunicate* dan karang hidup dari jenis *Tubastrea foulnari* dengan berbagai macam bentuk dan warna, bergelantungan pada dinding-dinding goa dan lereng terumbu sehingga memberikan suatu kesan artistik serta sangat potensial untuk dijadikan spot selam



Dinding terumbu yang terjal dihiasi oleh *Crynoid*



Peta stasiun penelitian karang di perairan Pulau Kepping, Seram Bagian Timur.



Lebih lanjut pada stasiun 4 (empat) tepat pada posisi 130.87126° BT dan -3.88779° LS. Wilayah ini memiliki profil pesisir pantai dengan hamparan pasir putih dan pada bagian daratan ditumbuhi vegetasi pohon kelapa dan pepohonan pantai. Rataan terumbu (reef flat) dari pesisir pantai ke arah laut sangat landai dan sangat luas yaitu ± 800 m. Komponen abiotik penyusun substrat dasar yang mendominasi areal tempat tumbuhnya pasir dan karang mati. Dari hasil pengamatan secara visual terlihat jelas bahwa pada daerah rata-rata terumbu

pertumbuhan karang batu sangat jarang, dan didominasi oleh SC (soft coral/karang lunak).

Kondisi karang batu berdasarkan hasil analisa dari data transek yang dilakukan di kedalaman 5 m, diperoleh persen penutupan untuk komponen karang hidup ahanya 13,60 % saja, yang terdiri dari karang hidup kelompok *Acropora* 4,72 % dan kelompok Non-*Acropora* 8,88 % (Tabel 1). Hasil ini menunjukkan jelas bahwa karang batu dari kelompok Non-*Acropora* yang mendominasi pertumbuhan karang hidup pada stasiun ini. Kelompok karang hidup Non-*Acropora* yang memberikan kontribusi nilai tertinggi adalah dari bentuk pertumbuhan CM (Coral massive/karang otak) dengan nilai 4,08 %, yaitu dari jenis karang hidup *Porites lutea* (Gambar 5), jenis karang hidup inilah yang tumbuh mendominasi perairan Stasiun 3 (tiga). Pada stasiun ini yang memiliki nilai persentase tutupan dari komponen SC (soft coral/karang lunak) dengan tutupan 46,52 % (Tabel 1), ini berarti secara keseluruhan komponen karang lunaklah yang tumbuh mendominasi perairan stasiun 3 (Gambar 6). Dari persentase penutupan komponen karang hidup yang diperoleh pada stasiun ini (13,60 %), maka berdasarkan kriteria penilaian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi karang batu lokasi ini berada pada kategori "Sangat rusak".

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode LIT dan koleksi jenis secara bebas disekitar areal penelitian pada 3 (tiga) stasiun transek, ditemukan jumlah total arang hidup adalah sebanyak 102 jenis (species), yang termasuk dalam 40 marga (genera) dari 15 suku (family) yang menempati wilayah terumbu karang tepi Pulau Keffing. Jumlah distribusi karang hidup untuk masing-masing stasiun adalah sebagai berikut, Stasiun 1 dengan 15 suku, 36 marga, dan 83 jenis, dan untuk Stasiun 2 dengan 15 suku, 38 marga dan 81 jenis, dan Stasiun 3 dengan 9 suku, 19 marga, dan 39 jenis (Tabel 2).



Komponen Dasar Perairan	Stasiun 1	Lokasi Penelitian Stasiun 2	Stasiun 3
Hard Coral :			
Acropora			
~Branching (ACB)	76,04	55,60	2,82
~Tabulate (ACT)	0,60	0,68	1,90
~Digitata (ACS)	2,38	0,00	0,00
Jumlah	79,02	56,18	4,72
Non-Acropora			
~Branching (CB)	0,88	0,36	0,00
~Massive (CM)	2,10	1,36	4,08
~Encrusting (CE)	0,22	0,00	1,74
~Submassive CS)	1,16	0,88	0,68
~Foliose (CF)	0,00	20,34	0,00
~Mushroom (CMR)	0,24	0,00	0,00
~Millepora (CME)	0,00	0,00	2,38
Jumlah	17,40	22,94	8,88
Dead Scleractinia			
~With Algae (DCA)	12,84	8,82	7,82
Jumlah	12,84	8,82	7,82
Algae			
~Macro (MA)	0,00	1,76	0,00
~Halimeda (HA)	0,00	1,52	0,00
Jumlah	0,00	3,28	0,00
Other Fauna			
~Soft Coral (SC)	0,68	0,00	46,52
~Spogne (SP)	1,16	0,00	0,00
~Others (OT)	1,70	6,48	0,00
Jumlah	3,53	6,48	46,52
Abiotic			
~Sand (S)	0,00	2,30	20,16
~Rock (RCK)	0,00	0,00	11,90
Jumlah	0,00	2,30	32,06
Jumlah Total	100 %	100 %	100 %

Stasiun Penelitian	Jumlah Suku	Jumlah Marga	Jumlah Jenis
St.1 (Keffing Utara 1)	15	36	83
St.2 (Keffing Utara 2)	15	38	81
St.3 (Keffing Timur)	9	19	39

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan tahun 2020 belum memiliki Hotel Berbintang. Jumlah restoran/rumah makan tercatat sebanyak 73 restoran dan tidak semua kecamatan memiliki. Jumlah objek wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur paling banyak yaitu objek wisata historis/sejarah dan hampir 50% terdapat di Kecamatan Pulau Gorom. Namun demikian masih belum dikelola dengan optimal. Sementara itu untuk wisata alam di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat sebanyak 34 namun sebagian besar belum ada pengelolanya.

Jumlah obyek wisata di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2020 yang tersebar di 15 kecamatan tercatat masing masing wisata alam sebanyak 34, wisata sejarah sebanyak 39, wisata bahari sebanyak 14, wisata budaya sebanyak 4 dan wisata pantai sebanyak 23. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni

tahun 2019 yang hanya sebesar 26 untuk wisata alam, kemudian 13 untuk wisata bahari dan wisata pantai sebanyak 18.

Selanjutnya nama nama objek wisata berdasarkan klasifikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tahun 2020 antara lain :

1. Kecamatan Bula, yakni Wisata Pantai Gumumae yang berada di Desa Sesar, Pantai Englas yang berada di Desa Englas, dan Pantai Wai Hul di Desa Bula Air;
2. Kecamatan Bula Barat, yakni Wisata Pantai Bays di Desa Hote, dan Pantai Banggoi di Desa Banggoi;
3. Kecamatan Teluk Watu, yakni Wisata Alam Air Panas Nif di Desa Dawang, Wisata Bahari Pulau Parang di Desa Namalena, Wisata Alam Air Terjun Teluk Waru di Desa Belis;
4. Kecamatan Tutuk Tolu, yakni Wisata Bahari Pulau Akat di Desa Kilbat, Wisata Alam Goa Air Kian di Desa Kian;
5. Kecamatan Werinama, yakni Wisata Alam Air Terjun Walteba di Desa Werinama, Wisata Pantai Tanjung Tobo di Desa Tobo, Wisata Pantai Kaki Air Bobot di Desa Bemo, Wisata Alam Goa Marsego di Desa Hatumeten, Wisata Alam Danau Hatumeten di Desa Hatumeten, Wisata Alam Air Terjun Sakai di Desa Batuasa, Wisata Pantai Waihanun Sutra di Desa Werinama, Wisata Alam Danau Waitok dan Waikaba Batu Kristal masing masing berada di Desa Werinama;
6. Kecamatan Siwalalat, yakni Wisata Alam Kapal Pica di Desa Atiahu, Wisata Pantai Sarwa di Desa Atiahu, Wisata Alam air Terjun Waituhut di Desa Atiahu, dan Wisata Alam Air Terjun Waiwas di Desa Atiahu;
7. Kecamatan Kian Darat, yakni Wisata Alam Danau Samos di Desa Kian Darat, Wisata Alam Gunung Bati di Desa Kian Darat, Wisata Bahari Pulau Madoran di Desa Kian Darat;
8. Kecamatan Siritaun Wida Timur, yakni Wisata Alam Goa Marsegu di Desa Kwaos, Wisata Alam Danau Tiunggodasari di Desa Suru, dan Wisata Alam Gunung Samin di Desa Suru;
9. Kecamatan Seram Timur, yakni Wisata Bahari Pulau Nukus di Desa Kiltai, Wisata Bahari Pulau Gofa di Desa Urung, Wisata Pantai Tanusang Bass di Desa Geser, Wisata Bahari Pulau Neden di Desa Kilwaru, Wisata Alam Gunung Booy di Desa Urung, dan Wisata Alam Air Terjun di Desa Kwamor;

10. Kecamatan Kilmury, yakni Wisata Pantai Sumbawa di Desa Sumbawa, Wisata Alam Air Terjun Bitorik di Desa Bitorik, Wisata Pantai Batu Kapal di Desa Kamar, Wisata Alam Batu/Liang Goa di Desa Kumelan, Wisata Pantai Tanjung Adomama di Desa Kilbon, Wisata Pantai Undur di Desa Undur, Wisata Alam Danau Afang di Desa Undur dan Wisata Alam Batu Meja/Air Terjun di Desa Affang;
11. Kecamatan Pulau Gorom, yakni Wisata Bahari Pulau Koon di Desa Kataloka, Wisata Pantai Suar Lean di Desa Amarsekaru, Wisata Alam Danau Sole di Desa Amarsekaru, Wisata Pantai Suar Namalean di Desa Namalean, Wisata Alam Goa Arseol di Desa Amarsekaru, Wisata Pantai Keter di Desa Kataloka, Wisata Alam Danau Agar Agar di Desa Wawasa, Wisata Pantai Hea di Desa Kataloka, Wisata Alam Gioa Arunin di Desa Amarsekaru, Wisata Pantai Tauri di Desa Amarsekaru, Wisata Alam Tanjung Nama di Desa Sera, dan Wisata Pantai Ehus di Desa Loko,
12. Kecamatan Pulau Panjang, yakni Wisata Pantai Pasir Panjang di Desa Wisalean;
13. Kecamatan Gorom Tlmur, yakni Wisata Pantai Tanjung Oan di Desa Kilkoda dan Wisata Bahari Pulau Olerang di Desa Tinaru;
14. Kecamatan Kesui Watubela, yakni Wisata Bahari Pulau Igar di Desa Lahema, Wisata Bahari Pulau Baam di Desa Tamher Warat, Wisata Bahari Pulau Kurkaf di Desa Tamher Timur, Wisata Alam Danau Owan Uttawarat di Desa Utta;
15. Kecamatan Teor, yakni Wisata Bahari Pulau Uran di Desa Teor.

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Jumlah luas lahan potensial pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur 131.364 ha, terdiri dari (i) lahan tanaman pangan hortikultura seluas 27.096 ha atau 20,62%. Namun hingga saat ini yang baru dapat dikelola seluas 9.500 ha atau 35,06%, dengan jenis komoditas tanaman berupa : padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur mayur dan buah-buahan; (ii) lahan untuk perkebunan seluas 99.212 ha 75,51%. Namun hingga saat ini yang baru dikelola seluas 34,013 ha, dengan jenis tanaman berupa : kelapa, cengkeh,

coklat, kopi dan jambu mete. Namun demikian, pada tahun 2020, hampir semua tanaman memiliki luas tanam dan produksi yang menurun akibat pandemic Covid-19 yang mempengaruhi pasar. Sementara itu, luas lahan pada sawah pada tahun 2020 seluas 2.230 hektar, terdiri dari lahan sawah irigasi teknik dan lahan sawah tadah hujan. Produksi padi tahun 2020 sebanyak 13.300 ton yang semuanya berasal dari kecamatan Bula Barat. Sedangkan untuk usaha peternakan, menurut kecamatan dan jenis ternak di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 adalah untuk jenis sapi potong sebanyak 7.839 ekor sedangkan kambing sebanyak 12.847 ekor dan kuda sebanyak 10 ekor. Sementara itu, untuk populasi unggas jenis ayam kampung sebanyak 23.389 ekor dan ayam petelur sebanyak 380 ekor serta itik/itik manila sebanyak 3.236 ekor.

2.3.3.4. Urusan Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Berdasarkan data statistik tahun 2021, 45,19% wilayah hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur difungsikan menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sebesar 20,6% sebagai Hutan Produksi yang di Konversi (HPK). Sementara itu, 18,67% sebagai Hutan Lindung (HL) serta sisanya adalah area danau, HP, KPA/KSA dan APL. Selanjutnya keberhasilan pencapaian target indikator urusan kehutanan yang meliputi (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Tabel II.77 Luas Kawasan Hutan dan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (hektar), 2020

Kecamatan Subdistrict	APL*	Fungsi Penggunaan						Jumlah
		Danau	HL*	HP*	HPK*	HPT*	KSA/ KPA*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pulau Gorom	1 069	-	1 243	-	3 099	-	-	4 342
Kesui Watubela	2 227	-	1 437	-	-	-	-	1 437
Teor	1 075	-	1 151	-	-	-	-	1 151
Gorom Timur	332	-	2 132	-	3 704	-	-	5 836
Pulau Panjang	267	-	436	-	1 294	-	-	1 730
Seram Timur	289	-	2 188	11	68 535	-	-	70 734
Tutuk Tolu	282	-	457	547	12	1 040	-	2 056
Kilmury	13 983	-	12 785	400	-	-	-	13 185
Lian Vitu	-	-	3 646	-	-	-	-	3 646
Kian Darat	7 829	-	-	316	6	-	-	322
Werinama	2 898	-	-	-	-	-	-	-
Siwalalat	4 638	-	11 492	-	-	1 368	-	12 860
Bula	15 296	-	67 063	14 830	4 959	251 848	1 216	339 916
Bula Barat	10 898	-	2 066	11 059	10 351	-	-	23 476
Teluk Waru	3 396	15	1 784	-	23 909	6 812	-	32 520
Seram Bagian Timur	64 479	15	107 880	27 163	115 869	261 068	1 216	513 211

Catatan/Note: * APL = Areal Penggunaan lain

HL = Hutan Lindung

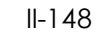
HP = Hutan Produksi

HPT = Hutan Produksi Terbatas

HPK = Hutan Produksi yang dapat dikonversi

KPA/KSA = Kawasan Konservasi, Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam

Sumber/Source: UPTD. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku/ Forestry Official of Maluku Province in Seram Bagian Timur Regency



2.3.3.5. Urusan Energi Sumberdaya Mineral

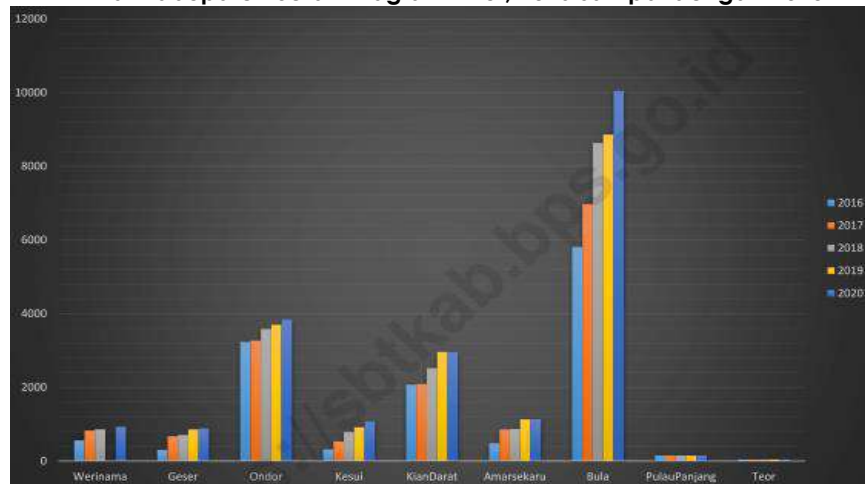
Jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi : batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, besi, magnesium, mangan dan zirkonium. Sedangkan jenis pertambangan migas terdiri dari : minyak bumi dan nafta. Selain jenis pertambangan dimaksud, masih terdapat potensi pertambangan bahan galian C, dengan total produksi sampai akhir tahun 2013 sebanyak 237.723,399 M3.

Untuk Tahun 2020, daya terpasang adalah sebesar 9.380.000 KW lebih kecil dibanding tahun 2019 sebesar 9.839.400 KW, kemudian tahun 2018 sebesar 9.834.000 KW, tahun 2017 sebesar 8.019.000 KW dan tahun 2016 sebesar 7.819.000 KW. Sementara itu, untuk produksi listrik elektrik, untuk tahun 2020 adalah sebesar 22.544.361 KWh dan terbesar dibanding tahun 2019 hanya sebesar 20.444.461 KWh dan tahun 2018 sebesar 17.880.722 KWh. Tahun 2017 hanya sebesar 16.838.100 KWh dan tahun 2016 sebesar 14.449.563 KWh. Untuk listrik terjual di tahun 2020 sebesar 20.912.001 KWh dan tahun 2019 hanya sebesar 18.491.893 KWh, tahun 2018 17.880.722 KWh, tahun 2017 sebesar 16.838.100 KWh dan tahun 2016 sebesar 14.449.563 KWh.

Demikian juga sarana dan prasarana jaringan listrik bagi masyarakat yang berasal dari PT. PLN yang disalurkan melalui unit-unit pembangkit tenaga diesel yang terdapat di Werinama, Bula, Geser, Gorom, Tutuk Tolu. Pelayanan listrik kepada masyarakat masih sangat terbatas, baru dapat diberikan penerangan listrik diwaktu malam hari saja. Berbeda dengan di Kota Bula pelayanan penerangannya dapat diberikan selama 24 jam.).

Tahun 2020, produksi listrik sebesar 22.554.361 kWh dan terjual sebanyak 92,72% untuk 20.914 pelanggan Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 sebanyak 20.914 pelanggan. Kecamatan yang memiliki pelanggan terbanyak adalah Kecamatan Bula yaitu 10.049 pelanggan atau 48,05% dari total keseluruhan pelanggan yang tercatat.

Grafik II.8 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2016 sampai dengan 2020



2.3.3.6. Urusan Perdagangan

Keberhasilan pencapaian target indikator (i) Jumlah Perusahaan; dan (ii) Perkembangan Penerbitan SIUP, (iii). Perkembangan Penerbitan TDP, (iv) Jumlah Sarana Perdagangan, (v) Jumlah Pedagang Menurut Skala, (vi) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada urusan perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.78 Penyelenggara Urusan Perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perusahaan	-	-	-	-	-
Perkembangan Penerbitan SIUP	-	-	-	-	-
Perkembangan Penerbitan TDP	-	-	-	-	-
Jumlah Sarana Perdagangan	-	-	-	-	-
Jumlah Pedagang Menurut Skala	-	-	-	-	-
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	-	-	-	-	-

2.3.3.7. Urusan Perindustrian

Kemajuan sektor industri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan salah satu perhatian pemerintah yang utama. Sektor industri di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur. Sesuai data yang telah di publikasikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 45 (empat puluh lima) perusahaan yang bergerak dibidang usaha makanan dan minuman, serta 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dibidang pakaian jadi.

Tercatat ada 22 (dua puluh dua) pencari kerja terdaftar yang terdiri dari 18 (delapan belas) pendaftar laki laki dan 4 (empat) pendatar perempuan. Masing-masing latar pendidikan pendaftar yaitu 1 (satu) orang pendaftar lulusan SD, 2 (dua) orang lulusan SLTP sederajat, 9 (sembilan) orang lulusan SMA/MA, 3 (tiga) orang lulusan SMK, 1 orang lulusan Sarjana Muda, dan 6 (enam) orang lulusan Sarjana. Namun pada tahun 2020 tidak terdapat penerimaan tenaga kerja.

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	32255	20934	53189
1. Bekerja/Working	31482	19788	51270
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	773	1146	1919
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	7618	17278	24896
1. Sekolah/Attending School	3139	3244	6383
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	1322	13247	14569
3. Lainnya/Others	3157	787	3944
Jumlah/Total	39873	38212	78085

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ Educational Attainment ¹	Angkatan Kerja/Economically Active			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Economically Active
	Bekerja Working	Pengangguran ² Unemployment ²	Jumlah Angkatan Kerja Total of Economically Active	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	19 369	195	19 564	99,00
1	10 040	315	10 355	96,96
2	14 734	716	15 450	95,37
3	7 127	693	7 820	91,14
Jumlah/Total	51 270	1 919	53 189	

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	13 055	8 436	21 491
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	4 572	3 002	7 574
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	308	69	377
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	8 545	4 247	12 792
Pekerja bebas Casual worker	1 851	371	2 222
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	3 151	3 663	6 814
Jumlah/Total	31 482	19 788	51 270

Bulan Month	Pendaftaran Registration		Penerimaan Acception	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari / January	4	-	-	-
Februari / February	2	-	-	-
Maret / March	-	-	-	-
April / April	-	-	-	-
Mei / May	-	-	-	-
Juni / June	-	-	-	-
Juli / July	1	-	-	-
Agustus / August	2	2	-	-
September / September	3	-	-	-
Oktober / October	-	-	-	-
November / November	3	-	-	-
Desember / December	3	-	-	-
2020	18	4	-	-
2019	176	178	65	155

2.3.2.8. Urusan Transmigrasi

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi, Kab. Seram Bagian Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi penempatan transmigran di Indonesia. Lokasi pengembangan permukiman transmigran tersebut semua nya terletak di Kecamatan Bula, namun terbagi menjadi menjadi 6 titik kawasan yang disebut dengan istilah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Adapun uraian rincian gambaran umum tiap lokasi permukiman transmigrasi berada pada lokasi sebagai berikut :

1. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) R
2. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) T
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) U
4. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) X
5. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Y
6. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Z

Dan saat ini Pemerintah Daerah akan merencanakan membangun Unit Permukiman Transmigrasi baru pada Kecamatan Tutuk Tolu sebagai daerah penyanggah **pembangunan Ibu Kota Kabupaten Definitif yang akan terletak di Dataran Hunimua**

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian kinerja aspek daya saing daerah, dapat diukur melalui indikator kinerja antara lain

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya Tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.

Indikator otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga perkapita, yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan dan sekolah.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (prosentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan perkapita) dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan.

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

2) Pertanian.

Untuk mengetahui capaian target sektor pertanian terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, maka tolok ukur yang dapat dijadikan acuan terhadap capaian dimaksud adalah tingkat kesejahteraan masyarakat petani pada umumnya. Tingkat kesejahteraan dimaksud dapat dihitung dengan menganalisis data dan informasi tentang NilaiTukar Petani (NTP) yang didapat oleh setiap petani.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijualpetani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untukproses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebihkecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yangditerima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Keberhasilan terhadap penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1) Perhubungan.

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator perhubungan, antara lain rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

2) Fasilitas Bank dan Non Bank.

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator fasilitas bank dan non bank, antara lain (i) jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya; dan (ii) jenis dan jumlah perusahaan asuransi.

3) Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan.

Ketersediaan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/penginapan. Dalam konteks uraian jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan, maka hotel/penginapan dapat dikelompokkan pada 2 kelas, yaitu :

a. Hotel Berbintang

Hotel berbintang, adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI; dan

b. Hotel Melati

Hotel Melati, adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

4) Lingkungan Hidup.

Salah satu indikator penyelenggaraan lingkungan hidup adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (clean water) yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water), adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Berdasarkan sumbernya, air bersih dapat dibedakan, yaitu Air Hujan, Air Sungai dan Danau, Mata Air, Air Sumur Dangkal, Air Sumur.

5) Komunikasi dan Informatika.

Salah satu tolok ukur untuk melihat pencapaian target indikator komunikasi dan informatika adalah jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon dalam 1 (satu) tahun tertentu. Hal ini penting mengingat peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone(HP) maupun telepon rumah biasa.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1) Keamanan dan ketertiban.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Gambaran terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Tahun 2020 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran KUHP sebanyak 32 orang, dimana laki laki sebanyak 31 orang dan perempuan 1 orang sementara pelanggaran ekonomi sebanyak 21 orang yang jenis kelamin laki laki;
- 2) Narapida, untuk kasus kejahatan sebanyak 32 orang;
- 3) Jenis Perkara yang diterima sebanyak 44 kasus yang terdiri dari cerai talak sebanyak 30 kasus dan diputus sebanyak 10 kasus, cerai gugat sebanyak 30 kasus dan diputus sebanyak 25 kasus dan harta bersama 1 kasus dan telag di putus;
- 4) Jumlah diproses (diterima) sebanyak 62 kasus, yang tidak diterima 1 kasus, kemudia gugur 1 kasus dan masuh tersisa 2 kasus. Sementara itu yang melakukan banding sebanyak 4 orang dan kasasi sebanyak 2 orang
- 5) Jumlah Perkara dan Terdakawa/Tertuduh yang diselesaikan menurut jenis penyelesaian sebanyak 53 kasus yang terdiri dari laki laki 50 orang dan perempuan 3 orang
- 6) Banyak terdakwa yang dipidana atau dihukum sebanyak 77 orang dimana Pidana Penjara sebanyak 53 orang, untuk Pidana Bersyarat sebanyak 4 orang, untuk Pidana Tambahan 12 orang, dan untuk Pidana Khusus 8 orang;
- 7) Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada Polres Seram Bagian Timur untuk kasus penganiayaan sebanyak 27 kasus, pembubuhan sebanyak 2 kasus, perzinaan 2 kasus, penipuan 3 kasus, pengrusakan 3 kasus, pengroyokan 15 kasus dan percobaan pelaksanaan kejahatan 2 kasus. Sementara untuk kasus perkosaan dan pencurian di tahun 2020 tidak ada
- 8) Jumlah kecelakaan lalu lintas untuk tahun 2020 sebanyak 27 kasus, dimana 9 orang meninggal dunia, luka berat 21 orang dan luka ringan 19 orang.
- 9) Jumlah tahanan pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur untuk tahun 2020 untuk Perkara Pidana Biasa yang masuk sebanyak 1 kasus, Perkara Korupsi yang masuk sebanyak 39 kasus

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari, olehkarena manusia sebagai subyek dan obyek

dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dikelompokkan kedalam 2(dua) indikator, yaitu sebagai berikut :

1) Kualitas tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

2) Tingkat ketergantungan

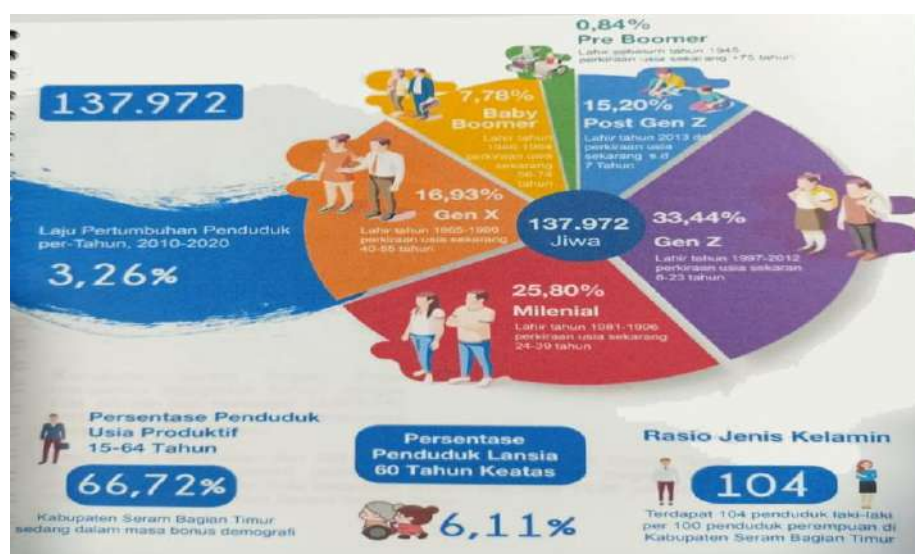
Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya bebanyang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktutahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada diagram berikut :

Merujuk pada diagram Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), dapat diketahui bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami bonus demografi khususnya untuk penduduk dengan kategori Generasi Gen X sebesar 16,93% dengan usia 40 – 55 tahun dan Generasi Gen Z sebesar 33,44% dengan usia 8 -23 serta Generasi Milenial sebesar 25,80% dengan usia 24 – 39 tahun. Lebih lanjut presentase usia produktif sebesar 66,72% dengan usia 15 – 64 tahun.



Dengan komposisi penduduk yang demikian maka tentunya menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pembangunan di daerah khususnya untuk sektor produktif.

3) Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Tanimbar	61,12	61,64	62,39	62,86	62,86
Maluku Tenggara	64,2	64,94	65,53	65,85	66,2
Maluku Tengah	69,54	70,09	70,6	71,25	71,25
Buru	66,63	67,61	68,25	68,91	68,95
Kepulauan Aru	61,32	62,13	63,12	63,64	63,71
Seram Bagian Barat	63,76	64,34	65,14	65,49	65,62
Seram Bagian Timur	61,15	62,06	62,98	63,74	64,12
Maluku Barat Daya	59,43	60,16	60,64	61,55	61,9
Buru Selatan	62,19	62,75	63,62	64,42	64,69
Ambon	79,55	79,82	80,24	80,81	80,84
Tual	65,64	66,25	67,21	67,74	67,96
Maluku	67,6	68,19	68,87	69,45	69,49

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2020 berada pada indeks 64,12 dimana angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang berada pada angka 65,49. Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik dibawah ini.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM kearah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih

dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seram Bagian Timur	58,32	58,56	58,84	59,16	59,41

Dari sajian data sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan angka harapan hidup masih berada pada 59,41 tahun dengan presentase penduduk Lansia 60 tahun keatas sebesar 6,11%. Sementara itu, untuk indikator Angka Harapan Hidup dari tahun ke tahun berkembang meningkat. Dimana pada tahun 2010 angka harapan hidup masih 65,86 tahun, maka sampai dengan akhir tahun 2013 sudah berada pada 66,51 tahun.

Sedangkan untuk indikator Pengeluaran Perkapita/bulan, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 545.659 untuk makanan dan Rp. 379.423 untuk non makanan. Pengeluaran terbesar makanan adalah kelompok makanan dan minuman sebesar 11,29% dan yang terendah adalah kelompok kacang kacangan yakni sebesar 0,37%. Sementara itu, untuk pengeluaran terbesar non makanan adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 24,67% dan yang terendah adalah keperluan pesta dan upacara sebesar 0,52%

Berdasarkan data IPM sebagaimana dikemukakan diatas, maka tantangan terberat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, adalah pembangunan dalam kelompok pelayanan dasar masyarakat, yakni pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Jika ketiga bidang dimaksud dapat didorong lebih cepat, maka diharapkan akan berdampak positif pada terdongkraknya peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur yang lebih baik lagi dibandingkan kabupaten/kota se Provinsi Maluku dan itu maknanya, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan tercapai.



2.4.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Tabel II.79 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PENDIDIKAN				68.880			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar		1,298			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	150		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	160			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan	Bula	214			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		pemerintahan yang baik dan benar					
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	150			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	90			APBD
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	15			APBD
Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Dalam dan Luar Daerah	519			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung		460			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar					
Keg. Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Tersebar	200		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	150			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	35			APBD
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	75			APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar		150			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		benar					
Keg. Peningkatan Manajemen Data Pegawai PAK/DUPAK Bagi PTK	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	150		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar		65			
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	15		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar	Bula	50			APBD
Prog. Pendidikan Anak Usia ini		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah		2.258			
Keg. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	200		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pengembangan Koordinasi dan Kerja Sama Pendidikan Anak Usia Dini		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	200			APBD
Keg. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Bula	1.858			APBD
Prog. Pengembangan Data/ Informasi		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah		400			
Keg. Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Bula	400		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Prog. Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah		62.384			
Keg. Pembangunan Gedung Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	200		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Keg. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	2.000			APBD
Keg. Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	2.518			APBD
Keg. Pengadaan Pakaian Seragam		Meningkatnya mutu	Tersebar	900			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Sekolah		pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah					
Keg. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	2.852			APBD
Keg. Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	200			APBD
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	300			APBD
Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Tersebar	50			APBD
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafia dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	21.708			APBD
Kegiatan Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	497			APBD
Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	500			APBD
Kegiatan Penyediaan Beasiswa Retrival Untuk Anak Putus Sekolah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya	Tersebar	350			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		meningkatkan daya saing pemerintah daerah Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah	Tersebar	30.306			DAK
Program Pendidikan Menengah		Meningkatnya mutu pendidikan dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah		590			
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Bula	404			APBD
Kegiatan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Bula	185		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur		190			
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengawas Pendidik		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Bula	190		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Program Manajemen Pendidikan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur		608			
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Tersebar	376			APBD
Kegiatan Penyediaan Soal Ujian Akhir Sekolah/Nasional		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seram Bagian Timur	Tersebar	232		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				150			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Kegiatan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda			Tersebar	150		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				100			
Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi			Tersebar	50		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Tersebar	50		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengelola kekayaan dan budaya		225			
Kegiatan Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengelola kekayaan dan budaya	Tersebar	150		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengelola kekayaan dan budaya	Tersebar	75		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	APBD
				70.074			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			910			
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50		DINAS KESEHATAN	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			78			APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			147			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			85			APBD
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			140			APBD
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Rapat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			95			APBD
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	360			APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.961			
Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	1.578		DINAS KESEHATAN	DAK
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	293			APBD
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	90			APBD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			522			
Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersebar	365		DINAS KESEHATAN	APBD
Kegiatan Peningkatan Manajemen Implementasi Data Pegawai	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersebar	157			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Program Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan				6.168			
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	6.098		DINAS KESEHATAN	DAK
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	70			APBD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat				34.802			
Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	2.711		DINAS KESEHATAN	DAK
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	253			APBD
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	70			APBD
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	4.500			APBD
Program Pengawasan Obat dan Makanan				70			
Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar	Tersebar	70		DINAS KESEHATAN	DAK



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		masyarakat dibidang kesehatan					
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				500			
Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		Meningkatkannya promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	Tersebar	500		DINAS KESEHATAN	APBD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat				762			
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi		Meningkatkannya promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	Tersebar	762		DINAS KESEHATAN	DAK
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				1.511			
Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	1.211		DINAS KESEHATAN	DAK
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	100			APBD
Kegiatan Peningkatan Imunisasi		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	50			APBD
Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penganggulan Wabah		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	100			APBD
Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (ide)		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan	Tersebar	50			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Pencegahan dan Pemerantasan Penyakit		pemberantasan penyakit menular di masyarakat					
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		.		442			
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	191		DINAS KESEHATAN	APBD
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	101			APBD
Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	150			APBD
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				175			
Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal		Terfasilitasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di masyarakat	Tersebar	175		DINAS KESEHATAN	APBD
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				3.890			
Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	2.200		DINAS KESEHATAN	DAK
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang	Tersebar	423			DAK



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		kesehatan					
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	100			APBD
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	1.166			DAK
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				2.047			
Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dan Keluarga Kurang Mampu		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	2.047		DINAS KESEHATAN	DAK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.048			
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	1		RSUD BULA	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	450			APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	747			APBD
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	100			APBD
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD
Kegiatan Makanan dan Minuman Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	350			APBD
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	300			APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			657			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	80		RSUD BULA	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	40			APBD
Kegiatan Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	249			APBD
Kegiatan Penyediaan Kendaraan Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	288			APBD
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			283			
Kegiatan Peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	283		RSUD BULA	APBD
Prog. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-				6.760			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Paru/Rumah Sakit Mata							
Keg. Belanja Bahan Obat-obatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	1.832		RSUD BULA	APBD
Keg. Pengembangan Tipe Rumah Sakit		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	360			APBD
Keg. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Tersebar	4.568			DAK
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				130			
Keg. Belanja Jasa Service Peralatan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Bula	130		RSUD BULA	APBD
Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				5.500			
Keg. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat		Meningkatkanya promosi kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	Bula	5.200		RSUD BULA	APBD
Keg. Pengolahan Limbah Rumah Sakit		Berkurangnya lingkungan kumuh tidak sehat	Bula	300			APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			930			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan		Bula	15		RSU PRATAMA PULAU	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan					GOROM	
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	270			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	20			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	35			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	30			APBD
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	125			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	95			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			213			
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	60		RSU PRATAMA PULAU GOROM	APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	75			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala	Peningkatan Pelayanan		Bula	38			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Kendaraan Dinas/ Operasional	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	40			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				77			
Keg. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Bula	39		RSU PRATAMA PULAU GOROM	APBD
Keg. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dibidang kesehatan	Bula	38			APBD
				25.122			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.148			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	170		DINAS PUPR	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	100			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	70			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	70			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	145			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	543			APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			100			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	100		DINAS PUPR	APBD
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			500			
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	300			APBD
Keg. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	200		DINAS PUPR	APBD
Prog. Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata			9.479			
Keg. Peningkatan Jalan Ruas A Sampai Z	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya fungsi jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas perekonomian makro daerah	Tersebar	332			APBD
Peningkatan Jalan Ruas A Sampai Z		Meningkatnya fungsi jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas perekonomian makro daerah	Tersebar	9.146		DINAS PUPR	DAK
Prog. Pembangunan Saluran Drainase/	Peningkatan Infrastruktur dan			740			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Gorong-Gorong	Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata						
Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	740		DINAS PUPR	APBD
Prog. Tarup/Talud/ Bronjong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			2.970			
Keg. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	2.970		DINAS PUPR	APBD
Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			5.710			
Keg. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	265		DINAS PUPR	APBD
Keg. Pembangunan Saluran/Jaringan Irigasi	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	265			APBD
Keg. Pembangunan Saluran/Jaringan	Peningkatan Infrastruktur dan	Meningkatnya kuantitas dan	Tersebar	3.528			DAK



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Irigasi	Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah					
Keg. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	1.686			DAK
Prog. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			4.473			
Keg. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	220		DINAS PUPR	APBD
Keg.Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Bertambahnya infrastruktur dalam upaya mendukung daya saing Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	Tersebar	600			APBD
Keg.Pembangunan MCK	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	253			APBD
Keg.Pembangunan MCK	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur	Tersebar	3.400			DAK



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Secara Merata	daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah					
				10.335			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			435			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50		DPKP	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	22			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	70			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	30			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	262			APBD
Prog. Pengembangan Perumahan				2.849			
Keg. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	120		DPKP	DAK
Keg. Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata		Tersebar	2.379			DAJ
Keg. Penataan dan Identifikasi Profil Perumahan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata		Tersebar	35			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog. Lingkungan Perumahan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			954			
Keg. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata		Tersebar	169		DPKP	APBD
Keg. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata		Tersebar	705			APBD
Keg. Survey dan Identifikasi Kawasan Pemukiman	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata		Tersebar	70			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	5			APBD
Keg. Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD
Prog. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			274			
Keg. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah	Tersebar	274		DPKP	APBD
Prog. Pembangunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			2.088			
Keg. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur daerah dalam upaya	Tersebar	2.088		DPKP	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
		meningkatkan pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal daerah					
Prog Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata			2.773			
Keg. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Gugus Pulau Secara Merata	Bertambahnya infrastruktur dalam upaya mendukung daya saing Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	Tersebar	2.773		DPKP	APBD
				10.161			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			55			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	10		SATPOL PP	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	34			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	63			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	47			APBD
Keg. Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	100			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	250			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.248			
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	887		SATPOL PP	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	50			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	285			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Bula	25			APBD
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			74			
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dalam dan Luar Daerah	74		SATPOL PP	APBD
Prog. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				6.400			
Keg. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				6.400		SATPOL PP	APBD
Prog. Pemeliharaan Kamtrantibmas				215			
Keg. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah				215		SATPOL PP	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			461			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		BPBD	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			36			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			34			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			APBD
Keg. Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			350			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			398			
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			76		BPBD	APBD
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			133			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			63			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			125			APBD
Prog. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35			
Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35		BPBD	APBD
Prog. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				772			
Keg. Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana				70			APBD
Keg. Penyediaan Alat dan Peralatan Logistik Penanggulangan Bencana				202			APBD
Keg. Pendistribusian Bufferstock ke Lokasi Bencana				40			APBD
Keg. Pengkajian dan Verifikasi Pasca Bencana				189			APBD
Keg. Bulan Pengurangan Risiko Bencana				15			APBD
Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dampak Bencana				256			APBD
				10.556			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			326			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan			46		DINAS SOSIAL	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			81			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			30			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			150			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			39			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			11			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28		DINAS SOSIAL	APBD
Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya				4.667			
Keg. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran			450		DINAS SOSIAL	APBD
Keg. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin				804			APBD
Keg. Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				2.400			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Peningkatan Kualitas Pelayanan Beras Sejahtera (RASTRA)				291			APBD
Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri (KMM)				722			APBD
Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.523			
Keg. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS				1.274		DINAS SOSIAL	APBD
Keg. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan				861			APBD
Keg. Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usian				480			APBD
Keg. Transport Buffer Stock Bencana Alam				2.908			APBD
				2.040			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			189			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			36		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			80			APBD
Prog. Peningkatan Kesempatan Kerja				161			
Keg. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah				33		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			90			APBD
Keg. Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Dengan Pola Pendampingan				38			APBD
Prog. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				64			
Keg. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				57		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	APBD
Keg. Pembentukan Lembaga Ketenagakerjaan				7			APBD
Prog. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				1.501			
Keg. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan				48		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	APBD
Keg. Pengembangan Jaringan Distribusi Listrik dan Komponen Instalasi Listrik				1.452			APBD
Prog. Pengembangan Wilayah Transmigrasi				150			
Keg. Peningkatan SDM Anak-Anak				150		DINAS TENAGA KERJA	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Transmigrasi						DAN TRANSMIGRASI	
3.003							
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			343			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10		DINAS KETAHANAN PANGAN	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			31			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			250			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			33			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25		DINAS KETAHANAN PANGAN	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Prog. Peningkatan Kesejahteraan				945			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Petani							
Keg. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis				945		DINAS KETAHANAN PANGAN	APBD
Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)				1.681			
Keg. Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat				118		DINAS KETAHANAN PANGAN	APBD
Keg. Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan				266			APBD
Keg. Penanganan Daerah Rawan Pangan				107			APBD
Keg. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif				519			APBD
Keg. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah				670			APBD
				1.449			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			38			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			APBD
Prog. Pengembangan Pengelolaan Persampahan				1.211			APBD
Keg. Jasa Pengelolaan Persampahan				1.211		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				200			
Keg. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan				200		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Persampahan							
Prog. dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut				50			
				1.776			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			447			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			49		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			112			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			40			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			31			APBD
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			189			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			102			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan			50		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan					PENCATATAN SIPIL	
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			37			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Prog. Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.226			
Keg. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			150		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Keg. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			164			DAK
Keg. Pelayanan Dokumen Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			307			DAK
Keg. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			369			DAK
Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			DAK
Keg. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			218			DAK
				1.736			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			649			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			26		DINAS PEMBERDAYAAN, PEMERINTAHAN DESA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			26			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			34			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			514			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			81			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27		DINAS PEMBERDAYAAN, PEMERINTAHAN DESA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			54			APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Perlombaan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		DINAS PEMBERDAYAAN, PEMERINTAHAN DESA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			650			
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			150		DINAS PEMBERDAYAAN, PEMERINTAHAN DESA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	APBD
Keg. Rapat Koordinasi Teknis Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			500			APBD
Prog. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				350			
Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan				259		DINAS PEMBERDAYAAN, PEMERINTAHAN DESA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	APBD
Keg. Pameran Hasil Kerja Perempuan Dibidang Pembangunan				91			APBD
				6.376			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			79			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			97			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	APBD
Keg. Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			44			APBD
Prog. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling				97			
Keg. Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Kerja				97		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK)				1.627			
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				607		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DAK
Keg. Pembangunan Gedung Kantor				981			DAK
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				37			DAK
Prog. Keluarga Berencana				4.481			
Keg. Pelayanan KIE				183		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DAK
Keg. Pembinaan Keluarga Berencana				2.523			DAK
Keg. Balai Penyuluhan Keluarga				1.544			DAK



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Berencana							
Keg. Pembinaan Stunting				230			DAK
Prog. Pelayanan Kontrasepsi				32			DAK
Keg. Pendistribusian Alat Kontrasepsi				32		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DAK
				3.482			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			525			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		DINAS PERHUBUNGAN	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			38			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			70			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			24			APBD
Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			340			APBD
Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			186			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			150			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			36			APBD
Prog. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				127			
Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan				2.321			
Keg. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya				100		DINAS PERHUBUNGAN	APBD
Keg. Pengadaan Sarana Angkutan Laut Pedesaan				2.221			APBD
Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				320			
Keg. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal				320		DINAS PERHUBUNGAN	APBD
				615			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			235			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Peningkatan Pelayanan			21			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Sumber Daya Air dan Listrik	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			150			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			164			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			54		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	APBD
Keg. Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			110			APBD
Prog. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			110			APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			110			APBD
Prog. Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi				104			APBD
Keg. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi				30			APBD
Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi				74			APBD
				3.208			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			358			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			78		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			216			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			126			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			105		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			11			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			375			
Keg. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			375		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam			873			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah						
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			283		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Keg. Penguatan Modal Usaha Bagi Koperasi dan UKM	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			590			APBD
Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				195			
Keg. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa				177			APBD
Keg. Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah				18		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			630			
Keg. Pelaksanaan Pasar Murah	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			283		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			649			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian Daerah			349		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	APBD
Keg. Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian Daerah			250			APBD
Keg. Identifikasi Potensi Unggulan	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktivitas Perekonomian Daerah			50			APBD
				578			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			232			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8		PTSP	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			59			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			136			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan			97			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			17		PTSP	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			55			APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14			
Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14		PTSP	APBD
Prog. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			58			
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			58		PTSP	APBD
Prog. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			95			
Keg. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya			95		PTSP	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah						
Prog. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			80			
Keg. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berbudaya dalam Mendukung Aktifitas Perekonomian Daerah			57		PTSP	APBD
2.923							
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			308			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			255			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan	Peningkatan Pelayanan			127			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prasarana Aparatur	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			47			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Pengadaan Sewa Gedung	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			65			APBD
Prog. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah				41			
Keg. Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah				41		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	APBD
Prog. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				2.446			
Keg. supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat				46		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	APBD
Keg. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah				12			APBD
Keg. Pelayanan Perpustakaan Keliling				41			APBD
Keg. Pembangunan Gedung Perpustakaan				2.346			DAK
URUSAN PILIHAN							
6.596							
Prog. Pelayanan Administrasi	Peningkatan Pelayanan			240			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Perkantoran	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			173			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			68			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			48			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Prog. Pengembangan Budidaya Perikanan				100			
Keg. Penyusunan Data Statistik Budidaya Perikanan				100		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap				2.328			
Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap				2.164		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				64			APBD
Keg. Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap				100			APBD
Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				530			
Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran				128		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	APBD
Keg. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Cold Storage				402			APBD
Prog. Pemberdayaan Usaha Masyarakat				3.329			
Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan				3.189		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DAK
Keg. Sosialisasi dan Pendataan Administrasi Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan				64			APBD
Keg. Gerakan Gemar Makan Ikan				75			APBD
URUSAN PARIWISATA				4.032			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran				381			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55		DINAS PARIWISATA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				20			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor				20			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah				270			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				25		DINAS PARIWISATA	APBD
Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata				93			
Keg. Sosialisasi Sadar Wisata				93		DINAS PARIWISATA	APBD
Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata				2.679			
Keg. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata				100		DINAS PARIWISATA	APBD
Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata				10			APBD
Keg. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata				2.569			DAK
Prog. Pengembangan Kemitraan				853			
Keg. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata				300		DINAS PARIWISATA	APBD
Keg. Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata				116			APBD
Keg. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata				116			APBD
Keg. Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selam				320			APBD
URUSAN PERTANIAN				5.479			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			177			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			34		DINAS PERTANIAN	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			128			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60		DINAS PERTANIAN	APBD
Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)				235			
Keg. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering				235		DINAS PERTANIAN	APBD
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan				395			
Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna				395		DINAS PERTANIAN	APBD
Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				64			
Keg. Pengembangan Bibit Unggul				64		DINAS PERTANIAN	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Pertanian/Perkebunan							
Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				1.429			
Keg. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan				329		DINAS PERTANIAN	APBD
Keg. Pengembangan Demplot di Lahan Pertanian/Perkebunan				1.100			APBD
Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1.180			
Keg. Pengembangan Agribisnis Peternakan				1.180		DINAS PERTANIAN	APBD
Prog. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian				1.998			APBD
Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani				100			APBD
Keg. Pembangunan Jaringan Air Permukaan				1.898			DAK
UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH							
SEKRETARIAT DAERAH				5.471			
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				14.897			
Keg. Pembangunan Rumah Jabatan				438		BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	APBD
Keg. Pembangunan Rumah Dinas				167			APBD
Keg. Pembangunan Gedung Kantor				90			APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				950			APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				1.438			APBD
Keg. Pengadaan Mebeleur				1.220			APBD
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan				606			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				986			APBD
Prog. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			550			
Keg. Belanja Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			105			APBD
Keg. Belanja Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Belanja Sewa Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			100			APBD
Keg. Sewa Sarana Mobilitas Darat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			120		BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	APBD
Keg. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			75			APBD
Keg. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			100			APBD
7.016							
Prog. Peningkatan Pelayanan Keagamaan				6.421			
Keg. Pelayanan Aparatur Dalam Bidang Keagamaan				546		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	APBD
Keg. Pembinaan Pelayanan Keagamaan				4.862			APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				747			APBD
Keg. Monitoring dan Evaluasi				265			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Pembangunan							
Prog. Pendidikan Keagamaan				594			
Keg. Pembinaan Pimpinan TPA/TPQ				594		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	APBD
ORGANISASI				1.175			
Prog. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah				289			
Keg. Penyusunan Tapkin				75		BAGIAN ORGANISASI	APBD
Keg. Penyusunan LAKIP				214			APBD
Prog. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				885			
Keg. Penyusunan Tata Naskah Dinas				297		BAGIAN ORGANISASI	APBD
Keg. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah				500			APBD
Keg. Penyusunan Uraian Tugas				87			APBD
1.004							
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			
Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19		BAGIAN HUKUM	APBD
Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			250			
Keg. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			250		BAGIAN HUKUM	APBD
Prog. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			521			
Keg. Penyusunan Rancangan	Peningkatan Pelayanan			321		BAGIAN HUKUM	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Peraturan Perundang-Undangan	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			200			APBD
Prog. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			213			
Keg. Penyuluhan Hukum	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			57			
1.346							
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			120			
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			120		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	APBD
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			81			
Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			51		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	APBD
Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			30			APBD
Prog. Kehumasan dan Protokol				513			
Keg. Pendampingan Kunjungan Kerja KDH dan Wakil KDH				513		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	APBD
Prog. Kerjasama Informasi dengan Media Massa				631			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah				631		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	APBD
EKONOMI PEMBANGUNAN				1.346			
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan				136			
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			136			APBD
Prog. Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah				526			
Keg. Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan UKM				51			APBD
Keg. Penyusunan Laporan Pembangunan Tahunan				135			APBD
Keg. Monitoring dan evaluasi pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			265			APBD
PENGADAAN BARANG DAN JASA				270			
Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				112			
Keg. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			112		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	APBD
Prog. Layanan Pengadaan Barang/Jasa				157			
Keg. Layanan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa				157		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	APBD
PEMERINTAHAN				563			
Prog. Penataan Daerah Otonomi Baru				155			
Keg. Penomoran Kode Wilayah				55		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pembukuan Nama Ruba Bumi				100			APBD
Prog. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				408			
Keg. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				308		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	APBD
Keg. Penyelesaian Masalah Pemerintahan				100			
SEKRETARIAT DPRD				22.921			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.538			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			490		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Keg. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			22			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			23			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			552			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			198			APBD
Keg. Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			110			APBD
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Peningkatan Pelayanan			50			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Peraturan Perundang-Undangan	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			42			APBD
Keg. Belanja Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			854			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.754			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			390			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2.712			
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			74		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Keg. Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.647			APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			127			APBD
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			550			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			90			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil	Peningkatan Pelayanan			155			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Jabatan	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			67			APBD
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			487			
Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			487		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			217			
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			217		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Prog. Peningkatan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			32			
Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			13		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.932			
Keg. Reses	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.718		SEKRETARIAT DPRD	APBD
Keg. Kunjungan Kerja Pimpinan dan	Peningkatan Pelayanan			6.052			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Anggota DPRD Dalam Daerah	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			262			APBD
Keg. Penunjang Pelaksanaan Tugas DPRD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.899			APBD
UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN				4.662			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			965			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			78			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			180			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			70			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan			510			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			412			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			97		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35			APBD
Keg. Pengadaan Mebeleur				195			
Prog. Pengembangan Data/Informasi				550			
Keg. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan				350		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Penyusunan Profil Daerah				200			APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh				181			
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			181		BAPPEDA LITBANG	APBD
Prog. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				131			
Keg. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan				131			APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan			1.799			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Daerah	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyusunan Rancangan RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			303		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			486			APBD
Keg. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			163			APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			300			APBD
Keg. Penyusunan KUA dan PPAS APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			297			APBD
Keg. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			249			APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			283			
Keg. Perencanaan Pengembangan Potensi Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Penyusunan Indeks Kemiskinan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			96			APBD
Keg. Penyusunan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			176			APBD
Prog. Perencanaan Sosial dan Budaya				539			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya				254		BAPPEDA LITBANG	APBD
Keg. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pemerintah dan Pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana Pedesaan				3			APBD
Keg. BAPPEDA Na Dudu Wanu (Bappeda Masuk Kampung)				282			APBD
KEUANGAN				3.772			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.220			
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			210		BPKAD	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oparasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			351			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			105			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			95			APBD
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			85			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan	Peningkatan Pelayanan			361			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			158			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			112		BPKAD	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35			APBD
Keg. Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			33			APBD
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			380			
Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			155		BPKAD	APBD
Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			225			APBD
Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3.772			
Keg. Penyusunan Standar Satuan Harga	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50		BPKAD	APBD
Keg. Penyusunan Rancangan	Peningkatan Pelayanan			210			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Peraturan Daerah tentang APBD	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			162			APBD
Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			188			APBD
Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			224			APBD
Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			103			APBD
Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			137			APBD
Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			160			APBD
Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			130			APBD
Keg. Pekan Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			80			APBD
Keg. Inventarisasi dan Lebelisasi Aset/Barang Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			188			APBD
Keg. Penataann Administrasi Manajemen Barang Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			76			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Pemerintahan						
Keg. Penunjang Sistem Penggajian Pegawai	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			52			APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			134			APBD
Keg. Inventarisasi Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD dan PBB-P2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			38			APBD
Keg. Penyusunan Perda dan Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			24			APBD
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.321			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			425			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		BKPSDM	
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			65			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			280			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				109			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50		BKPSDM	APBD
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Prog. Pendidikan Kedinasan				155			
Keg. Rapat Kerja Bidang Kepegawaian				155		BKPSDM	APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur				2.079			
Keg. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS				2.079		BKPSDM	APBD
Prog. Pembinaan				694			
Keg. Seleksi Penerimaan CPNS				350		BKPSDM	APBD
Keg. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah				2			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas				80			APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				71			APBD
Keg. Pelantikan Sumpah Jabatan Struktural dan Fungsional				25			APBD
Keg. Penyelesaian Berkas Kenaikan Pangkat dan Karpeg PNS				108			APBD
Keg. Penyelesaian Berkas Pensiun				56			APBD
UNSUR PENGAWASAN	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.351			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			724			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			16		INPEKTORAT DAERAH	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			95			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			414			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.075			
Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			75		INSPEKTORAT DAERAH	APBD
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			402			APBD
Keg. Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			93			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			60			APBD
Keg. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			430			APBD
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			99			
Keg. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			48		INSPEKTORAT DAERAH	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			51			APBD
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			55			
Keg. Sosialisasi Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			55		INSPEKTORAT DAERAH	APBD
Prog. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				617			
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			617		INSPEKTORAT DAERAH	APBD
Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.780			
Keg. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				1.534		INSPEKTORAT DAERAH	APBD
Keg. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				113			APBD
Keg. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				69			APBD
Keg. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara				57			APBD
Keg. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi				56			APBD
Keg. Reviu Pengelolaan Anggaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa				20			APBD
Keg. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)				97			DAK
Keg. tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APB				50			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
UNSUR KEWILAYAHAN				2.873			
KECAMATAN				131			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			101			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1		KECAMATAN BULA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			46			APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			11			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8		KECAMATAN BULA	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD
Program Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10		KECAMATAN BULA	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		KECAMATAN BULA	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			106			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		KECAMATAN BULA BARAT	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			81			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		KECAMATAN BULA BARAT	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15		KECAMATAN BULA BARAT	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			119			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		KECAMATAN TELUK WARU	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			74			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		KECAMATAN TELUK WARU	APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			14		KECAMATAN TELUK WARU	APBD
Prog. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			
Keg. Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan				6		KECAMATAN TELUK WARU	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6		KECAMATAN TELUK WARU	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			110			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15		KECAMATAN TUTUK TOLU	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			64			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		KECAMATAN TUTUK TOLU	APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20		KECAMATAN TUTUK TOLU	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15		KECAMATAN TUTUK TOLU	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			216			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			13		KECAMATAN KIAN DARAT	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		KECAMATAN KIAN DARAT	APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			23			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			162			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		KECAMATAN KIAN DARAT	APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			24			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			24		KECAMATAN KIAN DARAT	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7		KECAMATAN KIAN DARAT	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			116			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3		KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	APBD
Kjeg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			96			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	APBD
Prog. Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18		KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12		KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			146			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1		KECAMATAN WERINAMA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			94			APBD
Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		KECAMATAN WERINAMA	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20		KECAMATAN WERINAMA	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6		KECAMATAN WERINAMA	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			181			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		KECAMATAN SIWALALAT	APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			20			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			38			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			103			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1		KECAMATAN SIWALALAT	APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			30			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			30		KECAMATAN SIWALALAT	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			156			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8		KECAMATAN PULAU PANJANG	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			112			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28		KECAMATAN PULAU PANJANG	APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4		KECAMATAN PULAU PANJANG	APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			247			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			19		KECAMATAN PULAU GOROM	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			40			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			163			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			32			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28			APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			12			APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			136			
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		KECAMATAN GOROM TIMUR	APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			18			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			95			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			
Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			28			APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Prog. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				7			
Keg. Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan				7			APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			187			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1		KECAMATAN KILMURI	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			7			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			17			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan	Peningkatan Pelayanan			10			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Penggandaan	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			116			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			10			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			21			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			21			APBD
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			
Keg. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			8			APBD
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			158			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		KECAMATAN KESUI WATUBELA	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Peningkatan Pelayanan			3			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Sumber Daya Air dan Listrik	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			3			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			11			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			9			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			23			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			102			
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			15			APBD
Prog. Pelayanan Administrasi	Peningkatan Pelayanan			150			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
Perkantoran	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			2		KECAMATAN TEOR	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			4			APBD
Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			6			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			121			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5			APBD
Prog Perencanaan Pembangunan				27			
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			27			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.537			
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			411			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			5		BADAN KESBANGPOL	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			56			APBD
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			40			APBD
Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			35			APBD
Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			250			APBD
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			135			
Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			50		BADAN KESBANGPOL	APBD
Keg. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan			25			APBD
Keg. Penyediaan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan			60			APBD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Pagu Indikatif (milyar rupiah)	Perkiraan Maju (2021)	OPD Penanggung Jawab	Sumber Dana
2	3	4	5	12	13	15	16
	Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				395			
Keg. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				320		BADAN KESBANGPOL	APBD
Keg. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				73			APBD
Prog. Pengembangan Wawasan Kebangsaan				43			
Keg. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa				43		BADAN KESBANGPOL	APBD
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				43			
Keg. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat				43		BADAN KESBANGPOL	APBD
Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)				45			
Keg. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba				45		BADAN KESBANGPOL	APBD
Prog. Pendidikan Politik Masyarakat				464			
Keg. Penyuluhan Kepada Masyarakat (Pilkada Serentak Tahun 2020)				91		BADAN KESBANGPOL	APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				65			APBD
Keg. Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu				308			APBD



BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolannya.

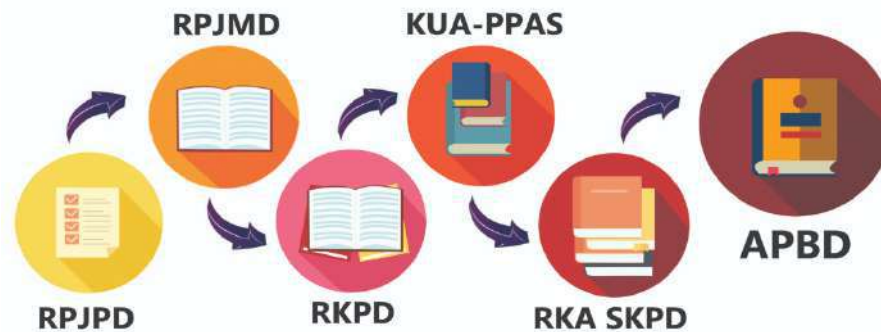
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD itu sendiri terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan Desentralisasi Fiskal.



Tahap pertama awal perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah berakan cermin dari efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang prestasi desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan sangat baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD jadiakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas :

- 1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;
- 3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hubungan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pasca Pandemi Covid-19 terjadi perubahan signifikan terhadap kebijakan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Regulasi yang dimaksud Ramlan antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta Permendagri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberlakuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90/2019 memerlukan perhatian serius dari sumber daya aparatur pemerintahan yang berkenaan dengan implementasinya mengingat belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, yang mana pelaksanaan pencairan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2021 di beberapa daerah mengalami keterlambatan. Begitu juga dengan Permendagri 90/2019 membuat daerah kelimpungan untuk menyesuaikan dan memadupadankan menu program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD. Selain itu, apabila tidak disiasati dengan baik, keberadaan Permendagri 90/2019 terkesan membatasi ruang inovasi daerah. "Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya mengatur sangat ketat kode dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan."

Permendagri yang mengatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah membutuhkan konsentrasi, kemampuan, dan *skill* yang memadai. Namun demikian masih terlihat pendampingan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dari pusat dan provinsi belum sepenuhnya berjalan maksimal, salah satunya soal SIPD, yang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pada bagian lain, SIPD belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sehingga harus kembali menginput secara manual perencanaan pembangunan ke dalam SIKD.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, yang kemudian

perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Pendapatan Transfer; dan (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	%	+ / (-)
1	2016	930.792.234.521,00	875.069.778.063,84	94,01%	(55.722.456.457,16)
2	2017	943.343.596.646,00	1.031.283.290.039,00	109,32%	87.939.693.393,00
3	2018	942.160.576.431,00	898.219.492.103,00	94,63%	(43.941.084.328,00)
4	2019	1.014.791.806.028,00	1.002.511.389.923,00	98,79%	(12.280.416.105,00)
5	2020	905.328.179.780,00	979.878.253.453,00	108,23%	74.550.073.673,00

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel III.2 berikut:



**Tabel III.2 Rincian Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah Tahun 2016			
	a. PAD	17.114.669.288,00	17.977.693.562,11	105,04%
	b. Dana Perimbangan	787.507.330.233,00	727.422.099.879,00	92,37%
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	126.670.235.000,00	129.669.984.622,73	102,37%
	Jumlah	930.792.234.521,00	875.069.778.063,84	94,01%
1	Pendapatan Daerah Tahun 2017			
	a. PAD	19.220.822.667,00	20.691.996.202,00	107,65%
	b. Dana Perimbangan	779.069.068.970,00	743.096.482.632,00	95,38%
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	145.053.705.009,00	267.494.811.205,00	184,41%
	Jumlah	943.343.596.646,00	1.031.283.290.039,00	109,32%
2	Pendapatan Daerah Tahun 2018			
	a. PAD	27.659.669.288,00	18.538.366.474,00	67,02%
	b. Dana Perimbangan	753.858.289.000,00	716.912.200.966,00	95,10%
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	167.683.607.178,00	162.768.924.663,00	97,07%
	Jumlah	949.201.565.466,00	898.219.492.103,00	94,63%
3	Pendapatan Daerah Tahun 2019			
	a. PAD	35.679.632.850,00	26.425.725.664,00	74,06%
	b. Dana Perimbangan	785.003.424.000,00	784.826.648.963,00	99,98%
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	194.108.749.178,00	191.259.015.296,00	98,53%
	Jumlah	1.014.791.806.028,00	1.002.511.389.923,00	98,79%
4	Pendapatan Daerah Tahun 2020			
	a. PAD	21.675.961.040,00	23.161.146.275,00	106,85%
	b. Dana Perimbangan	683.410.812.006,00	758.731.811.000,00	111,02%
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	200.241.406.734,00	197.985.296.178,00	98,87%
	Jumlah	905.328.179.780,00	979.878.253.453,00	108,23%

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seram Timur untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada table berikut.

B. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam table berikut.

3.1.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA). SiLPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 (lima) tahun mendatang akan disajikan dalam sub bahasan yang berbeda.

3.1.2.1. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka

penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

1. Tahun 2016 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 924.915.783.682,00
2. Tahun 2017 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.075.227.923.179,55
3. Tahun 2018 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 942.160.576.431,00
4. Tahun 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.029.386.231.269,00
5. Tahun 2020 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 982.878.217.453,00

Belanja operasi diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan, Belanja Modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Berdasarkan realisasinya, belanja operasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar %, dan realisasi belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi. Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah, akan disajikan dalam Tabel tentang Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) dan Tabel tentang Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Kabupaten Seram Bagian Timur Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir (2016-2020).

Selanjutnya untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, sesuai yang diminta oleh dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja nilai rata-rata pertumbuhannya relatif selang tinggi, terutama untuk belanja bantuan keuangan. Disisi lain, jika dilihat pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, BPKPD, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Kabupaten agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran

pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021, mengingat adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

3.1.2.2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel III.3 yang merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel III.3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					Rata Rata Per tumbuh an
	2016	2017	2018	2019	2020	
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000,00	2.750.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	22%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00	2.750.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	22%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-

3.1.2. 3. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi

mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah, dapat dilihat pada table perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun terakhir.

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik).

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DIMASA LALU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD

selama 5 (lima) tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Seram Bagian Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 8,03% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 4,96%, meski tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sangat optimis, yaitu rata-rata naik 18,44% dan 61,60% per tahun, dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan akibat adanya koreksi realisasi lebih bayar dari Pemerintah.

Begitu juga, pada pos Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar 11,93% juga sangat optimis. Belum lagi dengan adanya dampak krisis ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan pertahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif.

Penetapan angkapertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan.

Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 (dua) tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%-20% dari realisasi TA 2020. Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid-19 (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak.

Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi

wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran Pemerintah yang tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD. Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan:

1. Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
2. Perubahan alokasi; dan
3. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan

alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk:

a. Penanganan Kesehatan, antara lain:

- 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- 3) Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien COVID-19;
- 4) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 5) Penyemprotan desinfektan;
- 6) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- 7) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
- 8) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- 9) Penanganan jenazah korban positif COVID-19 dan Penanganan kesehatan lainnya.

b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:

- 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
- 2) Pemberian insentif berupa:
 - Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;

- Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.

- 3) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelakuUMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
- 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya.

c. Penyediaan social safety net / jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemda secara memadai kepada antara lain:

- 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
- 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemic COVID-19.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos. Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yang telah diperbarui dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Kedua aturan teknis di atas, kemudian dianggap masih belum memadai untuk Daerah melakukan perubahan anggaran disebabkan adanya aturan lain yang mengikat pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, dikeluarkanlah aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan yang tertuang dalam SKB Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.7/2020 yang mengatur antara lain:

1. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:
 - a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan

- b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai;
 - b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%;
 - c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja, digunakan untuk mendanai:
 - a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - b. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
4. Penggunaan belanja dilakukan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
 - b. Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Atas dasar hal tersebut maka untuk tahun dasar menggunakan data penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah diproyeksikan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah disajikan dalam tabel berikut terkait dengan Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Selama 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026)

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Untuk menentukan proyeksi belanja

tahun 2021, tidak dengan mengkalikan anggaran belanja tahun 2020 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara menggunakan data proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021.

Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan refocusing anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya wabah pandemic Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 (dua) tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan yang kemungkinan dari penyertaan modal, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.



III-267

**Tabel III.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026**

Uraian	Tahun Berjalan 2021	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah	16.888.233.572	17.732.645.251	18.619.277.513	19.550.241.389	20.527.753.458	21.554.141.131
Pajak Daerah	5.646.875.244	5.929.219.006	6.225.679.957	6.536.963.954	6.863.812.152	7.207.002.760
Retribusi Daerah	815.089.800	855.844.290	898.636.505	943.568.330	990.746.746	1.040.284.084
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.586.456.000	3.765.778.800	3.954.067.740	4.151.771.127	4.359.359.683	4.577.327.668
Lain-lain PAD Yang Sah	6.839.812.528	7.181.803.154	7.540.893.312	7.917.937.978	8.313.834.877	8.729.526.620
PENDAPATAN TRANSFER	927.694.497.178	974.079.222.037	1.022.783.183.139	1.073.922.342.296	1.127.618.459.410	1.183.999.382.381
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	914.729.954.000	960.466.451.700	1.008.489.774.285	1.058.914.262.999	1.111.859.976.149	1.167.452.974.957
Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.964.543.178	13.612.770.337	14.293.408.854	15.008.079.296	15.758.483.261	16.546.407.424
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.502.600.000	22.577.730.000	23.706.616.500	24.891.947.325	26.136.544.691	27.443.371.926
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	21.502.600.000	22.577.730.000	23.706.616.500	24.891.947.325	26.136.544.691	27.443.371.926
TOTAL PENDAPATAN	966.085.330.750	1.014.389.597.288	1.065.109.077.152	1.118.364.531.009	1.174.282.757.560	1.232.996.895.438
BELANJA						
BELANJA OPERASI	567.538.888.048	595.915.832.450	625.711.624.073	656.997.205.277	689.847.065.540	724.339.418.817
Belanja Pegawai	307.001.056.342	322.351.109.159	338.468.664.617	355.392.097.848	373.161.702.740	391.819.787.877
Belanja Barang dan Jasa	182.487.054.724	191.611.407.460	201.191.977.833	211.251.576.725	221.814.155.561	232.904.863.339
Belanja Subsidi	10.257.273.600	10.770.137.280	11.308.644.144	11.874.076.351	12.467.780.169	13.091.169.177
Belanja Hibah	40.324.604.544	42.340.834.771	44.457.876.510	46.680.770.335	49.014.808.852	51.465.549.295
Belanja Bantuan Sosial	27.468.898.838	28.842.343.780	30.284.460.969	31.798.684.017	33.388.618.218	35.058.049.129

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing



268

BELANJA MODAL	175.295.615.005	184.060.395.755	193.263.415.543	202.926.586.320	213.072.915.636	223.726.561.418
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.990.982.948	37.790.532.095	39.680.058.700	41.664.061.635	43.747.264.717	45.934.627.953
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.751.634.160	51.189.215.868	53.748.676.661	56.436.110.494	59.257.916.019	62.220.811.820
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.142.997.897	94.650.147.792	99.382.655.181	104.351.787.941	109.569.377.338	115.047.846.204
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	410.000.000	430.500.000	452.025.000	474.626.250	498.357.563	523.275.441
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.158.409.391	4.366.329.861	4.584.646.354	4.813.878.671	5.054.572.605	5.307.301.235
Belanja Tidak Terduga	4.158.409.391	4.366.329.861	4.584.646.354	4.813.878.671	5.054.572.605	5.307.301.235
BELANJA TRANSFER	219.092.418.306	230.047.039.221	241.549.391.182	253.626.860.741	266.308.203.779	279.623.613.967
Belanja Bantuan Keuangan	219.092.418.306	230.047.039.221	241.549.391.182	253.626.860.741	266.308.203.779	279.623.613.967
TOTAL BELANJA	966.085.330.750	1.014.389.597.288	1.065.109.077.152	1.118.364.531.009	1.174.282.757.560	1.232.996.895.438
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	0	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.830.000.000	5.071.500.000	5.325.075.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
Penyertaan Modal Daerah	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000	4.830.000.000	5.071.500.000	5.325.075.000	5.591.328.750	5.870.895.188
Pembiayaan Netto	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5(lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada table yang ada, ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan adanya perbaikan yang baik walaupun terjadi secara fluktuatif dan terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih dalam kondisi baik, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas riil pada tahun tahun sebelumnya akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 (dua) tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2024 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 (dua) tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas, sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2021 ini, baru pada tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan melampaui dari tahun anggaran 2019.

Kemudian, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk



memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- 2) Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- 3) Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.



III-271

**Tabel III.7 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026**

Uraian	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Penerimaan Pendapatan	905,328,179,780	950,594,588,769	998,124,318,207	1,048,030,534,118	1,100,432,060,824	1,155,453,663,865	1,213,226,347,058
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)	4,600,000,000	4,830,000,000	5,071,500,000	5,325,075,000	5,591,328,750	5,870,895,188	6,164,439,947
Total Penerimaan	909,928,179,780	955,424,588,769	1,003,195,818,207	1,053,355,609,118	1,106,023,389,574	1,161,324,559,052	1,219,390,787,005
Belanja Tidak Langsung	798,838,078,501	838,779,982,426	880,718,981,547	924,754,930,625	970,992,677,156	1,019,542,311,014	1,070,519,426,564
Pengeluaran Pembiayaan	4,600,000,000	4,830,000,000	5,071,500,000	5,325,075,000	5,591,328,750	5,870,895,188	6,164,439,947
Total Pengeluaran	803,438,078,501	843,609,982,426	885,790,481,547	930,080,005,625	976,584,005,906	1,025,413,206,201	1,076,683,866,511
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	106,490,101,279	111,814,606,343	117,405,336,660	123,275,603,493	129,439,383,668	135,911,352,851	142,706,920,494



III-272

**Tabel III.8 Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026**

Uraian	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Daerah Prioritas I	220,878,239,561.00	231,922,151,539.05	243,518,259,116.01	255,694,172,071.80	268,478,880,675.40	281,902,824,709.16	295,997,965,944.62
Belanja Daerah Untuk Membiayai Program Daerah	220,878,239,561.00	231,922,151,539.05	243,518,259,116.01	255,694,172,071.80	268,478,880,675.40	281,902,824,709.16	295,997,965,944.62
Belanja Daerah Prioritas II	107,112,351,854.00	112,467,969,446.70	118,091,367,919.04	123,995,936,314.99	130,195,733,130.74	136,705,519,787.27	143,540,795,776.64
Belanja Langsung OPD	107,112,351,854.00	112,467,969,446.70	118,091,367,919.04	123,995,936,314.99	130,195,733,130.74	136,705,519,787.27	143,540,795,776.64
Belanja Daerah Prioritas III	595,359,838,940.00	625,127,830,887.00	656,384,222,431.35	689,203,433,552.92	723,663,605,230.56	759,846,785,492.09	797,839,124,766.70
Belanja Pegawai	280,658,377,272.00	294,691,296,135.60	309,425,860,942.38	324,897,153,989.50	341,142,011,688.97	358,199,112,273.42	376,109,067,887.09
Belanja Hibah	54,956,000,000.00	57,703,800,000.00	60,588,990,000.00	63,618,439,500.00	66,799,361,475.00	70,139,329,548.75	73,646,296,026.19
Belanja Bantuan Sosial	19,128,000,000.00	20,084,400,000.00	21,088,620,000.00	22,143,051,000.00	23,250,203,550.00	24,412,713,727.50	25,633,349,413.88
Belanja Bantuan Keuangan	223,217,461,668.00	234,378,334,751.40	246,097,251,488.97	258,402,114,063.42	271,322,219,766.59	284,888,330,754.92	299,132,747,292.67
Belanja Tidak Terduga	17,400,000,000.00	18,270,000,000.00	19,183,500,000.00	20,142,675,000.00	21,149,808,750.00	22,207,299,187.50	23,317,664,146.88
Belanja Daerah	923,350,430,355.00	969,517,951,872.75	1,017,993,849,466.40	1,068,893,541,939.71	1,122,338,219,036.70	1,178,455,129,988.52	1,237,377,886,487.96

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu Strategis pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition* dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya permasalahan pembangunan, adalah kesenjangan (*gap expectation*) antara indikator capaian kinerja yang dapat dihasilkan pada akhir perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan target capaian yang direncanakan dan telah ditetapkan pada dokumen RPJMD. Timbulnya permasalahan pembangunan daerah, pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya, serta adanya peluang yang belum teridentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang belum dapat dipetakan sejak awal.

Untuk memberikan landasan fundamental yang kokoh dan akurat dalam perumusan strategi, arah kebijakan umum dan isu strategis untuk penetapan program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai daerah kepulauan, dengan berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dari kompilasi berbagai data, terutama data dalam 3 (tiga) tahun terakhir diperoleh kesimpulan, bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dapat dikelompokkan, antara lain kedalam (i) permasalahan pada perekonomian makro daerah; (ii) permasalahan sosial; (iii) permasalahan sumber daya manusia dan sumber daya alam;

(iv) permasalahan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan dasar; (v) pengelolaan keuangan daerah; (vi) penyusunan, implementasi dan penegakan regulasi daerah; (vii) kerjasama antar daerah dan dunia usaha (private sector); (viii) kerjasama internal penyelenggara pemerintahan dan DPRD; dan (ix) keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, selain akan diuraikan daftar permasalahan urusan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana telah diuraikan diatas, juga akan diuraikan berbagai permasalahan terkait dengan lingkungan strategis, baik dalam tataran lokal, provinsi, regional maupun nasional. Hal ini sangat penting, agar dari telaah dan analisis melalui pendekatan lingkungan strategis dimaksud, akan diketahui letak posisi Kabupaten Seram Bagian Timur dan konteks pembangunan baik dalam lingkup regional maupun nasional, sehingga perumusan kebijakan dan program yang ditetapkan dalam rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat menjawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memudahkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan pengelompokan permasalahan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Permasalahan Perekonomian Makro daerah dan Sosial.

Berdasarkan telaah dan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka permasalahan terkait dengan perekonomian Makro Daerah dan sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dikelompokkan menjadi, antara lain:

a. Perekonomian Makro Daerah.

Permasalahan pertumbuhan perekonomian makro daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, meliputi, antara lain :

- 1) Pertumbuhan PDRB;
- 2) Laju Inflasi;
- 3) PDRB Per Kapita;
- 4) Indeks Ketimpangan Regional; dan
- 5) Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

b. Sosial.

Permasalahan bidang sosial yang ada secara garis besar masih seputar pada pelayanan sosial dasar masyarakat yang masih terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jenis layanan dalam ruang lingkup sosial terdiri dari: pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya. Demikian juga pembangunan dibidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian dan sekaligus membuka wilayah yang masih terpencil, terisolir, terbelakang dan tertinggal.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, maka pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dapat difokuskan pada upaya mendorong tumbuhnya potensi sumber daya laut yang diharapkan dapat menjadi andalan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan karakteristik sebagai wilayah kepulauan, maka perumusan kebijakan dan program yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kedepan, diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk menjawab permasalahan pembangunan diwilayah kepulauan dan sekaligus dapat diselaraskan, serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat.

c. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.**1) Sumber Daya Manusia.**

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) rendahnya angka partisipasi murni; (ii) rendahnya angka partisipasi kasar; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kesekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkontribusi secara signifikan terhadap tumbuhnya pengangguran, perkembangnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (Pekot), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna Narkoba, pengemis dan gelandangan).

Data dan informasi terkait dengan permasalahan sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana terdapat pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026, selanjut disajikan sebagai data awal dan masukan untuk perumusan kebijakan dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam Rancangan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, serta penetapan target capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

2) Sumber Daya Alam.

Data yang ditelaah dan dianalisis sebagaimana terdapat pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, telah memberi informasi, bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Timur sangat beragam, mulai dari sumber daya alam didaratan, seperti pertanian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sagu, sayur mayur dan buah-buahan), tanaman perkebunan (seperti : kelapa, cengkeh, pala, karet, kopi, coklat dan jambu mete), serta peternakan (seperti : sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam dan itik).

d. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

Permasalahan yang muncul adalah: (i) pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iii) Keakuratan dan keabsahan data dasar untuk penyusunan jenis, kuantitas dan kualitas layanan dasar; (iv) pengembangan sistem inovasi daerah yang belum optimal; (v) belum tersedianya SOP untuk pelaksanaan pelayanan sosial dasar; dan (vi) belum tersedianya data dasar penerima manfaat pelayanan dasar.

e. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek

dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 394, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan ketertiban administrasi dalam pengelolaan asset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

f. Permasalahan Penegakan Regulasi Daerah.

Produktivitas kajian Peraturan Daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala Perangkat Daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain (DPRD), lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

g. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua Perangkat Daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen

anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat public (public hearing) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

h. Permasalahan Kepegawaian dan Penataan Organisasi.

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan desa agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

i. Permasalahan Manajemen Pelayanan.

Cakupan manajemen layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal.

Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Kesadaran masyarakat terhadap tertib pelaksanaan administrasi kependudukan masih kurang. Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan, seperti: kepemilikan KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian. Demikian pula, pengadministrasiannya belum dilakukan secara cermat dan terintegrasi.

j. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana.

Sebagai Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparatur yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas, dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan ditelaah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Hasil telaahan terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk

perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, yang secara rinci akan diuraikan dalam Bab-bab selanjutnya dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Perumusan kebijakan dimaksud akan berpedoman Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Rumusan teknis permasalahan pembangunan daerah dengan berpedoman atau mengacu pada analisis SWOT yakni *Strenght* atau Kekuatan, *Weaknes* atau Kelemahan, *Opportunities* atau Peluang dan *Threat* atau Ancaman yakni bahwa :

Faktor kekuatan (belum) secara maksimal dikelola dan dimanfaatkan secara optimal; Faktor kelemahan yang tidak diantisipasi atau diatasi secara dini (*preventiif/represif*) untuk mendapatkan solusi atau alternatif penyelesaian (*problem solving*); Faktor peluang yang (belum) secara maksimal diberdayakan atau didayagunakan dan dimanfaatkan secara maksimal; dan Faktor ancaman yang (belum) secara baik dipetakan atau diidentifikasi sejak awal untuk dapat diantisipasi

Beranjak dari pemaparan tersebut diatas, dengan berpedoman pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 s/d Tahun 2020 selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan pemetaan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur serta mengacu pada kinerja perangkat daerah, maka rumusan permasalahan pembangunan secara detail dapat disajikan sebagai berikut :

4.1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. PENDIDIKAN

Terhadap masalah pendidikan, (masih) terdapat sejumlah permasalahan diantaranya :

- 1.1. Kurang optimalnya implementasi kebijakan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkaitan dengan aspek

komunikasi dan sumber daya serta aspek pembangunan karakter anak yang belum berjalan dengan baik ;

- 1.2. Masih terdapat sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum memenuhi standar;
- 1.3. Masih terdapat Guru SD maupun SMP yang belum memiliki kompetensi dan sertifikasi, termasuk ratio guru terhadap siswa untuk beberapa sekolah yang berada pada wilayah pulau atau gugus pulau;
- 1.4. Masih kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan termasuk proses pendaftaran akreditasi dan/atau reakreditasi kelembagaan;
- 1.5. Penyelesaian pendidikan kesetaraan yang masih perlu ditingkatkan
- 1.6. Penguatan Digitalisasi Sekolah
- 1.7. Penguatan Assesmen Kopentensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kompetensi siswa membaca, sains, dan matematika
- 1.8. Reformulasi kebijakan DAK Fisik untuk fokus pada percepatan wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kebutuhan daerah afimasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;
- 1.9. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan;
- 1.10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah;
- 1.11. Peningkatan program Guru Penggerak;
- 1.12. Peningkatan Bantuan Sosial Pendidikan;
- 1.13. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi peningkatan kualitas sumber daya pendidik (Guru);

2. KESEHATAN

- 2.1. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil. Ibu nifas, bayi, balita dan anak yang perlu terus ditingkatkan sesuai dengan standar;
- 2.2. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah yang perlu terus ditingkatkan termasuk perumusan standar penyelenggaraan kesehatan daerah;

- 2.3. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap Pandemi Covid-19 untuk peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan;
- 2.4. Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

3. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 3.1. Masih perlunya pembenahan dan/atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
- 3.2. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana seperti halnya penyediaan air bersih, sanitasi dan untuk beberapa wilayah yang rentan bencana (banjir, abrasi dan gempa) untuk bangunan yang sesuai dengan standar bencana;
- 3.3. Meningkatnya potensi bencana alam dan proses alih fungsi lahan serta pemenuhan standar lingkungan permukiman terutama dikawasan konservasi (mangrove dan sepandan sungai/pantai);
- 3.4. Perlu adanya pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan kawasan sesuai dengan arahan dan pemanfaatan ruang dan kawasan sesuai dengan RTRW;

4. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 4.1. Masih belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan;
- 4.2. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang;
- 4.3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog;
- 4.4. Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah;
- 4.5. Belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan
- 4.6. Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.
- 4.7. Masih belum optimalnya pengaturan terhadap kawasan strategis cepat tumbuh

5. SOSIAL

- 5.1. Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
- 5.2. Ketersediaan data dan informasi terkait dengan PMKS

4.1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

- 1.1. Masih diperlukan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
- 1.2. Kurangnya soft skill tenaga kerja lokal dalam dunia kerja;
- 1.3. Perlunya mengantisipasi adanya PHK terutama sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19.

2. PENANAMAN MODAL

- 2.1. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah;
- 2.2. Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional;

3. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 3.1. Kurang meratanya sarana dan prasarana olah raga yang tersedia (dan dalam kondisi baik), terutama pada kampung kampung;
- 3.2. Perlunya peningkatan olah raga pendidikan dan prestasi serta pencarian bakat olah raga;
- 3.3. Perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya kepemudaan untuk peningkatan pendidikan karakter dan budaya lokal daerah;
- 3.4. Perlunya peningkatan program program pembinaan kepemudaan sesuai dengan karakter kebangsaan dan budaya lokal atau kearifan masyarakat.
- 3.5. Perlunya meningkatkan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda dalam program pemberdayaan masyarakat.
- 3.6. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok pemuda;
- 3.7. Pelibatan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam pengawasan dana desa.

4. KEBUDAYAAN

- 4.1. Perlunya identifikasi dan pengembangan kawasan sejarah/budaya yang ada di daerah;
- 4.2. Perlu adanya pengembangan kelompok seni budaya tradisional daerah;

- 4.3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan;
- 4.4. Perlunya penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even-even dan/atau festival daerah
- 4.5. Perlunya pemenuhan standar pelayanan dalam pengelolaan dan/atau pengembangan kawasan sejarah/budaya sebagai media/sarana edukasi bagi masyarakat, memperkuat jati diri bangsa dan budaya lokal masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4.6. Revitalisasi bangun dan/atau kawasan budaya sejarah masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. PERPUSTAKAAN

- 5.1. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat;
- 5.2. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *new normal*.

6. KEARSIPAN

- 6.1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan;
- 6.2. Implementasi pengelolaan arsip digital;

7. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 7.1. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendah minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi;
- 7.2. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal;
- 7.3. Perlunya peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan potensi unggulan lokal daerah;
- 7.4. Kurangnya penguatan terhadap entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki UKM/KM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

8. STATISTIK

- 8.1. Perlunya penguatan menuju implementasi Satu Data baik terhadap perencanaan maupun hasil pembangunan;
- 8.2. Perlunya validasi data dan akurasi data dan penggunaan digital data

9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 9.1. Masih kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan anak dan perempuan;
- 9.2. Pemberdayaan perempuan disektor ekonomi belum sepenuhnya optimal;
- 9.3. Perlunya peningkatan partisipasi perempuan.

10. PANGAN

- 10.1. Perlunya peningkatan ketahanan pangan masyarakat terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk pemanfaatan pangan lokal daerah;
- 10.2. Perlu peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH);
- 10.3. Perlu inventarisasi ahli fungsi lahan untuk implementasi program Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

11. PERTANAHAN

- 11.1. Penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan proses pengumpulan dan verifikasi data;
- 11.2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar papan, patok karena masih belum jelas batas dan kelengkapan administrasi lainnya;
- 11.3. Perlunya adanya koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan terkait dengan Hak Ulayat dan Penegasan Batas Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

12. LINGKUNGAN HIDUP

- 12.1. Masih diperlukan upaya mengoptimalkan ketersediaan dan/atau fungsi Ruang Terbuka Hijau;
- 12.2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R (system pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien);
- 12.3. Masih memerlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan;
- 12.4. Perlu adanya Manajemen Pengelolaan Lingkungan (Upaya Terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup);

13. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 13.1. Masih adanya penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan KK/KTP;
- 13.2. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
- 13.3. Perlunya pengawasan terhadap SOP dalam memproses dokumen administrasi kependudukan pada semua kecamatan;
- 13.4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk dukungan sarana dan prasarana dibidang pelayanan yang masih belum optimal (kuran).

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 14.1. Perlu adanya antisipasi terhadap dampak bonus demografi khususnya bagi kelompok usia produktif dan kelompok usia lanjut;
- 14.2. Perlunya peningkatan jumlah Kader KB yang berkualitas;
- 14.3. Perlunya penguatan program KB dan Keluarga Sejahtera bagi remaja dan siswa sekolah;
- 14.4. Perlunya adanya sosialisasi bagi pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan yang tidak terpenuhi kebutuhan KB.

15. PERHUBUNGAN

- 15.1. Perlu adanya peningkatan layanan di bidang perhubungan khususnya Terminal;
- 15.2. Perlunya pembentukan UPTD Terminal untuk memaksimalkan fungsi dan pelayanan bagi masyarakat;
- 15.3. Perlu adanya peningkatan fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 15.4. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan angkutan moda transportasi perairan dan/atau pulau;
- 15.5. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan/atau antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten.

16. KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- 16.1. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta jaringan utilitas untuk menjaga sistim informasi perkotaan

- 16.2. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data dan Satu Peta;
- 16.3. Perlunya mengalokasikan anggaran untuk membangun Aplikasi (Industri 4.0) yang dapat menampung data skala kabupaten yang hasil pengelolaannya biasa digunakan untuk berbagai kepentingan (informasi pembangunan daerah, investasi dan penanaman modal).

4.1.3. URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR

1. PARIWISATA

- 1.1. Perlunya inovasi untuk memaksimalkan potensi wisata lokal daerah dan mengantisipasi menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan Pandemi Covid-19;
- 1.2. Perlunya menguatkan dan/atau menggerakkan kembali Desa Wisata dan Desa Budaya;
- 1.3. Perlu menggairahkan kembali kegiatan kesenian dan budaya serta keagamaan yang menurun sebagai akibat Pandemi Covid-19;
- 1.4. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
- 1.5. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif;
- 1.6. Belum optimalnya pengembangan rumah rumah kreatif.

2. PERDAGANGAN

- 2.1. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya;
- 2.2. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal;
- 2.3. Masih diperlukan penerapan protokol kesehatan sector perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
- 2.4. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 3.1. Perlunya perlinfungan terhadap kawasan hutan manggrov yang ada dan tidak beralih fungsi;
- 3.2. Perlunya penyusunan road map pengembangan potensi perikanan di kefin pulau geser

- 3.3. Perlu perhatian terhadap pengembangan dan pengelolaan wisata pantai dan bahari;
- 3.4. Perlunya pembatasan waktu daerah tangkap terutama ikan julung julung yang ada pada wilayah pesisir;
- 3.5. Perlu menindak lanjuti kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di perairan kecamatan seram timur;
- 3.6. Perlu adanya manajemen terhadap sumber daya perairan;
- 3.7. Perlu pengembangan ekowisata di kecamatan seram bagian timur melalui RTRW Perairan terutama terkait dengan zona pengelolaannya (inti penyangga)
- 3.8. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM para tenaga pendamping/penyuluh dan nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk budidaya dan pengelolaan;
- 3.9. Pendampingan dan penguatan terhadap budidaya rumput laut serta usaha pengelolaannya
- 3.10. Optimalisasi dan peningkatan investasi dalam pengelolaan potensi perikanan
- 3.11. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan termasuk pengembangan wisata bahari;
- 3.12. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan serta belum optimalnya pengelolaan produk unggulan hasil perikanan;
- 3.13. Belum maksimalnya peranan kelembagaan perikanan;
- 3.14. Belum optimalnya pengembangan perencanaan pembangunan berbasis pulau/kepulauan dan/atau gugus pulau termasuk dalam menghadapi implementasi Lumbung Ikan Nasional.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 4.1. Masalah penguatan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa;
- 4.2. Penataan Desa dan Desa Adat;
- 4.3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengawasan terhadap dana desa;
- 4.4. Penguatan kerjasama dengan APH dan APIP dalam rangka pengawasan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa;
- 4.5. Mendorong percepatan dan penyelesaian Hak Hak Masyarakat Hukum Adat melalui konsolidasi pertanahan untuk hak hak ulayat dan petuanan;

- 4.6. Mendorong pemberdayaan masyarakat desa untuk penguatan ketahanan pangan dan produk unggulan desa;
- 4.7. Penguatan Desa Tanggap Darurat untuk penegakan disiplin protocol Covid-19 melalui kearifan lokal masyarakat termasuk mitigasi bencana berbasis partisipatif masyarakat desa;
- 4.8. Pembentukan Desa Wisata.
- 4.9. Penataan pemeritahan desa untuk penyiapan Desa Adat, Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Kreatif, Desa Sadar Hukum, Desa Keluarga Berencana (KB), Desa Literasi, dan Desa Tanggap Bencana
- 4.10. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan kepada desa dan perangkat perangkat desa;
- 4.11. Optimalisasi pengembangan potensi desa dan produk unggulan desa;
- 4.12. Peningkatan Indeks Pembangunan Desa;
- 4.13. Penguatan kapasitas aparatur (perangkat) desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

5. PERTANIAN

- 5.1. Perlunya verifikasi data untuk kepentingan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB);
- 5.2. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan terutama pada saat Pandemi Covid-19;
- 5.3. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- 5.4. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- 5.5. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

4.1.4. PENUNJANG URUSAN FUNGSI MANEJEMEN NON PELAYANAN DASAR

1. KEBIJAKAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

- 1.1. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
- 1.2. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
- 1.3. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas wilayah terutama akibat kondisi pandemi covid-19 karena diperlukan koordinasi intensif dan pengecekan lapangan bersama dengan masyarakat;
- 1.4. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat;
- 1.5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik sesuai standar;
- 1.6. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.

2. KEUANGAN

- 2.1. Masih belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
- 2.2. Belum optimalnya pendapatan dari dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah (refocusing).
- 2.3. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 karena dampak covid- 19.

3. PENGAWASAN

- 3.1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
- 3.2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
- 3.3. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

- 3.4. Perlunya peningkatan pengawasan internal pemerintah daerah (APIP) dalam kerangka pengawasan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3.5. Perlunya pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder pembangunan;
- 3.6. Peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum
- 3.7. Perlunya penguatan kapasitas APIP.
- 3.8. Perlunya penyusunan instrument pengawasan dan SOP pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

4. PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- 4.1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah;
- 4.2. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal;
- 4.3. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.
- 4.4. Perlunya melakukan reformulasi perencanaan daerah dengan mengacu pada perencanaan daerah berbasis kepulauan;
- 4.5. Peningkatan kapasitas sumber daya dan manajemen perencanaan daerah;
- 4.6. Perlu mempersiapkan sumber daya perencanaan menuju implementasi kenijakan Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
- 4.7. Penguatan dan optimalisasi system perencanaan dan informasi pembangunan daerah.

4.1.5. PENUNJANG URUSAN UNSUR MANEJEMEN NON PELAYANAN DASAR

1. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

- 1.1. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi kurang baik;
- 1.2. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang kurang sesuai pemenuhannya.

2. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 2.1. Masih belum terbangunnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan instansi pusat.

- 2.2. Belum optimalnya penerapan sistem merit dan pengisian jabatan JPT yang masih diisi oleh Pjs;
- 2.3. Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai;
- 2.4. Perlu adanya pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyusunan road map reformasi birokrasi.

4.2. ISU ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026

4.2.1. ISU STRATEGIS GLOBAL

1. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Menurunkan angka kematian anak;
- e. Meningkatkan kesehatan ibu;
- f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para Pimpinan Dunia, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan

pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan



Adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2016-2030 antara lain:

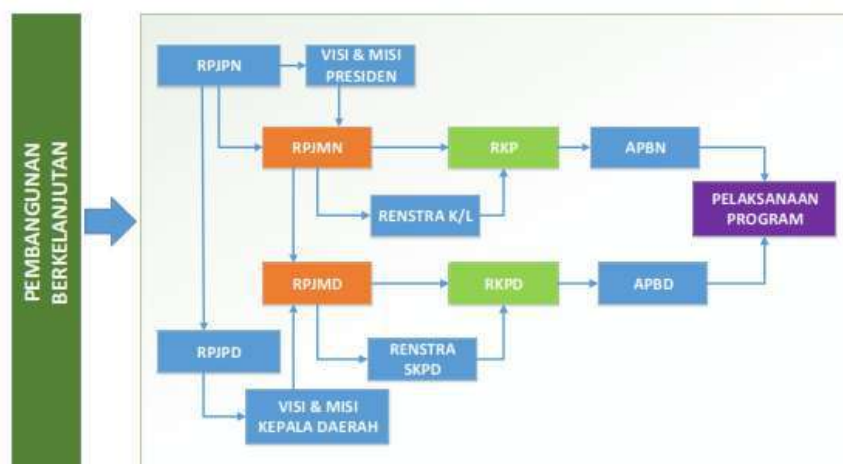
- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

a. Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

Gambar IV.1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Berikut adalah kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs, sedangkan uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan

dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi makro juga menjadi prasyarat untuk pengurangan kemiskinan yaitu stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan *stunting* dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) Intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepungdengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary HealthCare*).

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan

pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar wilayah; (5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan (6) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan; (2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; (3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; (4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan (5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah: (1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; dan (2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor riil, dan industrialisasi.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Memperkuat infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; (2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (3) Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; (4) Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; (5) Melaksanakan pembangunan rendah karbon; dan (6) Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mengentaskan kemiskinan; (2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (3) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan (4) Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; (2) Penanganan Limbah; (3) Pengembangan industri hijau; dan (4) Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi

pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; (2) Peningkatan tata kelola perikanan, dan (3) Revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; dan (3) Mengurangi laju degradasi hutan.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Konsolidasi demokrasi; (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola; (3) Penegakan hukum nasional; dan (4) Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Optimalisasi penerimaan negara; (2) Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran; (3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; (4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); (5) Penuntasan infrastruktur TIK; (6) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi; dan (7). Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

b. Penyusunan TPB/SDGs Tingkat Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2020-2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPd, dan Renja SKPD yang berlaku;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Maluku tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;

6. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019;
7. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2019 Kabupaten Seram Bagian Timur
8. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
9. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah; dan
10. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2020-2024, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

c. Langkah Langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1** : Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Keputusan Kepala Daerah/Kepala Bappeda untuk tingkat daerah;
- Langkah 2** : Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tatacara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Langkah 3** : Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (*output*) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.

- Langkah 4** : Melaksanakan pembahasan draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matriks) masing-masing pokja;
- Langkah 5** : Melaksanakan pleno konsolidasi lintas *goal* dan penyempurnaan draf oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja untuk menjadi draf II;
- Langkah 6** : Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik;
- Langkah 7** : Melakukan penyempurnaan draf final renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;
- Langkah 8** : Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh koordinator pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota ditingkat daerah; dan
- Langkah 9** : Melakukan sosialisasi dan diseminasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

d. Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Tabel IV.1. Jadwal Penyusunan RenaksiTPB/SDGs)

No	Kegiatan	BULAN TAHUN 2021					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Pembentukan Tim Penyusun Renaksi TPB/SDGs						
2	Sidang pleno pertama dan rapat <i>kick off</i> persiapan penyusunan draf Renaksi melibatkan seluruh pemangku kepentingan						
3	Rapat serial penyusunan RAN per <i>goal</i> dengan K/L dan nonpemerintah						
	a. Analisis situasi dan tantangan						
	b. Perumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator, dan keluaran (<i>output</i>)						
	c. Alokasi pagu indikatif dan indentifikasi pelaksana						
	d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan						
4	Penyelesaian draf I Renaksi TPB/SDGs oleh masing-masing pokja						
5	Pleno konsolidasi lintas <i>goal</i> dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja untuk menjadi draf II						
6	Konsultasi publik draf II Renaksi TPB/SDGs						
7	Penyempurnaan draf final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan hasil Konsultasi publik						
8	Sidang pleno pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas /Gubernur dan Bupati/Walikota)						
9	Publikasi, distribusi dan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs						

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

terdiri 319 indikator, yang terdiri dari 17 tujuan, 94 indikator global dan 319 indikator nasional. Berdasarkan kewenangan, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemetaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan jumlah 222 Indikator.

Gambar IV.2 Diagram Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur



1. KATEGORI CAPAIAN TPB DI SBT



Tabel IV.2 Capaian TPB di Kabupaten Seram Bagian Timur

1. KATEGORI CAPAIAN TPB DI SBT

Urusan/Dinas/OPD

25

- Sudah 18 (72,00%)
- Belum 7 (28,00%)



Sudah		Belum
1. Sosial	10. Kominfo	1. Keamanan, Trantib
2. Kesehatan	11. BPS	2. Tenaga Kerja
3. KB	12. Pariwisata	3. Lingkungan Hidup
4. PUPR	13. PMPTSP	4. Koperasi/UKM
5. Pendidikan	14. Perhubungan	5. Perindustrian
6. Dukcapil	15. Pemb. Masy. Desa	6. Kehutanan
7. ESDM	16. Perum Rakyat	7. Keuangan
8. Ketahanan Pangan	17. Balitbang Daerah	
9. Pemb. Perempuan	18. Perencanaan Daerah	

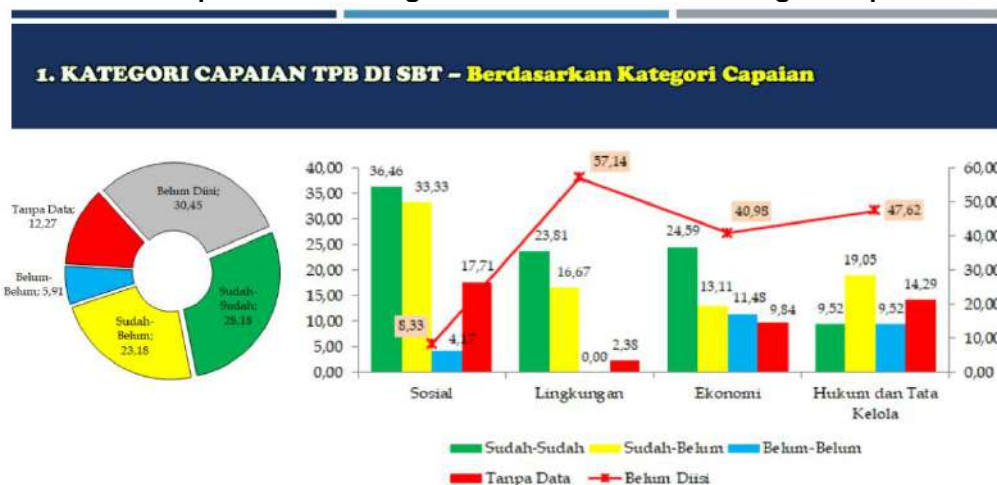
**Tabel IV.3 Kategori Capaian TPB di
Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan TPB**

1. KATEGORI CAPAIAN TPB DI SBT – Berdasarkan TPB						
Indikator TPB	Kategori capaian				Belum Diisi	Total
	SS	SB	BB	TD		
1. Tanpa kemiskinan	3	10	0	5	6	24
2. Tanpa kelaparan	4	4	0	2	1	11
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	12	10	2	10	0	34
4. Pendidikan berkualitas	9	3	0	0	1	13
5. Kesenjangan gender	7	5	2	0	0	14
6. Air bersih dan sanitasi	7	4	0	1	6	18
7. Energi bersih dan terjangkau	0	0	0	0	2	2
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	5	2	0	1	11	19
9. Industri, inovasi dan infrastruktur	3	0	5	0	5	13
1. KATEGORI CAPAIAN TPB DI SBT – Berdasarkan TPB						
Indikator TPB	Kategori capaian				Belum Diisi	Total
	SS	SB	BB	TD		
10. Berkurangnya kesenjangan	4	0	2	2	3	11
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan	3	3	0	0	7	13
12. Konsumsi yang bertanggungjawab	0	0	0	0	5	5
13. Penanganan perubahan iklim	0	0	0	0	2	2
14. Kehidupan bawah laut	0	0	0	0	0	0
15. Kehidupan di darat	0	0	0	0	4	4
16. Perdamaian dan keadilan	2	4	2	3	10	21
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	3	6	0	3	4	16
Jumlah	62	51	13	27	67	220

**Tabel IV.4 Kategori Capaian TPB
di Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Pilar**

1. KATEGORI CAPAIAN TPB DI SBT – Berdasarkan Pilar							
No.	Pilar	Jumlah indikator TPB	Kategori capaian				Belum Diisi
			Sudah-Sudah	Sudah-Belum	Belum-Belum	Tanpa Data	
1.	Sosial	96	35	32	4	17	8
2.	Lingkungan	42	10	7	0	1	24
3.	Ekonomi	61	15	8	7	6	25
4.	Hukum Tata Kelola	21	2	4	2	3	10
Jumlah		220	62	51	13	27	67

**Grafik IV.1 Kategori Capaian TPB di
Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kategori Capaian**



a. Pilar Sosial

Pilar Sosial budaya yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

b. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomimasyarakat secara berkesinambungan.

c. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan didalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan memastikan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

d. Pilar Lingkungan

Pilar Lingkungan yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjaga pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Seram Bagian Timur, kategori capaian TPB (Sudah-Sudah), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 62 indikator (28,18) persen dari 220 kewenangan kabupaten (sudah-sudah);
2. Berdasarkan pilar, capaian tertinggi indikator sudah-sudah (SS) ada pada pilar sosial; dan

3. TPB dengan jumlah indikator SS terbanyak adalah TPB 4 (pendidikan berkualitas), sebanyak 9 indikator (69,23) persen dari total 13 indikator.

Indikator tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan capaiannya. Selanjutnya untuk kategori capaian TPB Sudah-Belum (SB), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 51 indikator (23,18) persen dari 220 kewenangan kabupaten.
2. Berdasarkan pilar, indikator SB tinggi ada pada pilar sosial yakni sebanyak 32 indikator (62,75) persen.
3. TPB dengan indikator SB terbanyak adalah TPB 1 (tanpa kemiskinan), sebanyak 10 indikator (41,67) persen dari total 24 indikator.

Diperlukan usaha dari Pemerintah Daerah melalui perangkat organisasi terkait untuk dapat meningkatkan capaian semua indikator yang ada guna mencapai target nasional.

Pada bagian kategori capaian TPB Belum-Belum (BB) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 13 indikator (5,96) persen dari 220 kewenangan kabupaten.
2. Berdasarkan pilar, indikator BB tertinggi ada pada pilar ekonomi yakni sebanyak 7 indikator (53,85) persen.
3. TPB dengan indikator BB terbanyak adalah TPB 9 (industry, inovasi dan infrastruktur) sebanyak 5 indikator (38,46) persen dari 13 indikator.

Perlu upaya pelaksanaan indikator indikator ini melalui kerna nyata oleh para perangkat organisasi daerah.

Selain itu, terdapat juga kategori capaian TPB yakni Tanpa-Data (TD) yakni sebanyak 27 indikator (12,27) persen dari 220 kewenangan kabupaten. Berdasarkan pada pilar, indikator TD tertinggi ada pada pilar sosial sebanyak 17 indikator (62,96) persen. TPB dengan indikator terbanyak adalah pada TPB 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), yakni sebanyak 10 indikator (29,41) persen dari total 34 indikator.

Tabel IV.5 Kategori Capaian TPB Berdasarkan Urusan/Dinas/OPD di Kabupaten Seram Bagian Timur

2. CAPAIAN TPB TIAP URUSAN/DINAS/OPD DI SBT						
Urusan/Dinas/OPD	Sudah-sudah	Sudah-Belum	Belum-belum	Tanpa Data	Jumlah	Total Indikator
1. Sosial	2	3	2	8	15	15
2. Kesehatan	12	13	2	10	37	37
3. Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	3	5	0	1	9	9
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	8	0	1	19	19
5. Pendidikan	10	4	0	1	15	15
6. Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	0	0	4	4
7. Energi Sumber Daya Mineral	0	1	2	0	3	3
8. Keamanan dan Ketertiban	0	0	0	0	0	18
9. Ketahanan Pangan	1	2	0	1	4	4
10. Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	12
11. Pemberdayaan Perempuan	6	5	4	1	16	16
12. Komunikasi dan Informatika	6	2	0	1	9	9
13. Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	16
14. Badan Pusat Statistik	1	6	0	2	9	9
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	0	0	0	2
16. Pariwisata	3	0	0	1	4	4
17. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	0	0	2	2
18. Perhubungan	0	0	4	0	4	4
19. Perindustrian	0	0	0	0	0	4
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	0	0	1	4	4
21. Perumahan Rakyat dan Pemukiman	0	1	0	0	1	1
22. Kehutanan	0	0	0	0	0	1
23. Keuangan	0	0	0	0	0	10
24. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	0	0	0	1	1
25. Perencanaan	0	0	0	1	1	1
Total	62	52	14	29	157	220



**Tabel IV.6. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Sosial)**

NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	84,90	85,75	86,78	87,82	88,87	89,94	91,02	Pendidikan
			Persentase penduduk umur 0 sampai 7 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,64	78,42	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	Administrasi kependudukan dan Capil
		Pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	874	919	959	994	1034	1074	1109	Sosial
			Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	1	1	1	1	1	1	1	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	606	556	486	396	301	203	105	Kesehatan
			Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Ketahanan Pangan
		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun /balita	630	560	485	395	297	192	87	Kesehatan
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/ baduta	339	304	264	218	165	106	41	Kesehatan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	9	7	6	6	4	3	3	Kesehatan
		Pada tahun 2030 , mangakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan angka kematian balita 25 per 1000	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	7	6	5	5	5	4	4	Kesehatan
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	45	43	40	36	32	28	25	Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	54	48	45	37	32	28	20	Kesehatan
			Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, Tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	48	30	25	15	10	5	5
		Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria		1.74	3.31	4.96	7.44	9.67	11.60	13.92	Kesehatan
		Jumlah Provinsi dengan eliminasi Kusta		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Kesehatan
		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)		0	0	0	0	0	0	0	Kesehatan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	7	7	7	7	7	7	7	Kesehatan
		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strstegi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	11,031	11,531	12,031	12,531	13,031	13,531	14,031	Kesehatan
			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age Spesific Fertility Rate/ ASFR)	480	450	410	367	318	265	204	Kesehatan
			Total Fertility rate (TFR)	400	370	333	285	232	173	106	Kesehatan
		Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.	Proporsi kematian akibat keracunan	0	0	0	0	0	0	0	Kesehatan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh pada negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the Trips Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua	Persentasi ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan secara signifikan Pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	428	435	445	460	487	517	562	Kesehatan
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, © tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika.	79.90	83.90	88.09	92.49	97.12	101.97	107.07	Pendidikan
			Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	84.2	85.46	86.74	88.05	89.37	90.71	92.07	Pendidikan
			Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	80.50	81.71	82.93	84.18	85.44	86.72	88.02	Pendidikan
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih besar atau sama dengan 15 tahun	8.8	8.93	9.07	9.20	9.34	9.48	9.62	Pendidikan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses sama untuk semua tingkat pendidikan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI sederajat; (2) SPM/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat ; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	95.30	96.73	98.18	99.65	101.15	102.67	104.21	Pendidikan
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan integritas dan numerisasi	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	97.1	98.56	100.03	101.54	103.06	104.60	106.17	Pendidikan
		Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)	90.66	92.02	93.40	94.80	96.22	97.67	99.13	Pendidikan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	Presentase guru TK, SD, SMP, SMS, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	31.75	32.23	32.71	33.20	33.70	34.20	34.72	Pendidikan
		Mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dimanapun	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	29.00	29.44	29.88	30.32	30.78	31.24	31.71	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	2	2	2	2	2	2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET							SKPD/INSTANSI
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) megalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	7	5	5	3	3	3	3	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
		Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	3	3	3	3	3	3	3	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
			Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	10	8	8	8	6	6	5	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
		Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	30	30	30	30	30	30	30	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
		Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	3	3	3	3	3	3	3	Komunikasi dan Informatika



Tabel IV.7. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Lingkungan)

NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET						SKPD/INSTANSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	12.701	13.545	14.389	15.233	16.077	16.921	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (OPF) / Stop Buang Air Besar	3.250	3.500	3.800	4.100	4.400	4.700	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah Kabupaten /kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistim terpusat skala kota kawasan dan komunal	8	11	11	11	11	11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	2,66	3,83	3,96	4,75	5,70	6,84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	Jumlah kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	35	40	45	50	53	55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	17.606	19.439	21.272	23.105	24.938	26.771	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	13	17	21	26	30	35	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tabel IV.8. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Ekonomi)

NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET						SKPD/INSTANSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikrokecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin			1.865	2.015	2.215	2.365	Tenaga Kerja
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koperasi
		Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	3,36	3,61	3,88	4,27	4,69	5,16	Tenaga kerja
			Tingkat setengah pengangguran			0,78	0,86	0,94	1,04	Tenaga kerja
		Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	36.000.000	9.110.000					Pariwisata
			Jumlah wisatawan mancanegara	3.998	4.321	0	0	0	0	Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	36.980	37.876	9.711	15.211	21.211	27.711	Pariwisata
		Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor Bank 6 dan Mesin ATM 11 Unit	Jumlah kantor Bank 6 dan Mesin ATM 11 Unit	Jumlah kantor Bank 6 dan Mesin ATM 11 Unit	Jumlah kantor Bank 6 dan Mesin ATM 11 Unit	Jumlah kantor Bank 8 dan Mesin ATM 13 Unit	Jumlah kantor Bank 8 dan Mesin ATM 13 Unit	Penanaman Modal
			Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank Umum)	3 Kantor Dalam Pusat Kota dan 3 di luar Kota	3 Kantor Dalam Pusat Kota dan 3 di luar Kota	3 Kantor Dalam Pusat Kota dan 3 di luar Kota	3 Kantor Dalam Pusat Kota dan 3 di luar Kota	3 Kantor Dalam Pusat Kota dan 5 di luar Kota	4 Kantor Dalam Pusat Kota dan 5 di luar Kota	Penanaman Modal



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET						SKPD/INSTANSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proposinya di negara kurang berkembang	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur							
		Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	33.535	38.176	42.826	47.476	52.126	56.776	61.426
			Proporsi individu yang menguasai / memiliki telepon genggam	40.403	43.382	46.362	49.342	52.322	55.302	58.282
			Proporsi individu yang menggunakan internet	34.135	39.376	44.617	49.858	55.099	60.340	65.581



Tabel IV.9. Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola)

NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET						SKPD/INSTANSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100 orang	8	6	0	0	0	0	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	0	0	0	0	0	0	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Keuangan
			Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
			Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	85%	90%	90%	90%	90%	90%	Keuangan
			Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Keuangan



NO	TUJUAN	TARGET	INDIKATOR	TARGET						SKPD/INSTANSI
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentasi Instansi Pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementrian/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Keuangan
			Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementrian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Balitbang Daerah
		Pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	95%	95%	100%	100%	100%	100%	Administrasi kependudukan & Catatan sipil
		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	1,88	1,91	1,95	1,98	2,02	2,06	Keuangan
		Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi,	Proporsi Penduduk terlayani mobile broadband	42.817	47.458	52.099	56.740	61.381	66.022	Komunikasi dan Informatika
		Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Proporsi individu yang menggunakan internet	44.617	49.858	55.099	60.340	65.581	70.822	Komunikasi dan Informatika
		Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

2. Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (climate action) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati Roadmap untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan stake holders lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak roadmap disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Berdasarkan Roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat pengembangan

industri khususnya bidang pertambangan mineral yang sementara beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur bukan tidak mungkin dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan dampak terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kiranya penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ikut aktif dalam menyukseskan pelaksanaan aksi iklim terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepan.

3. Kesenjangan Global Dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan.

Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports, 2020*).

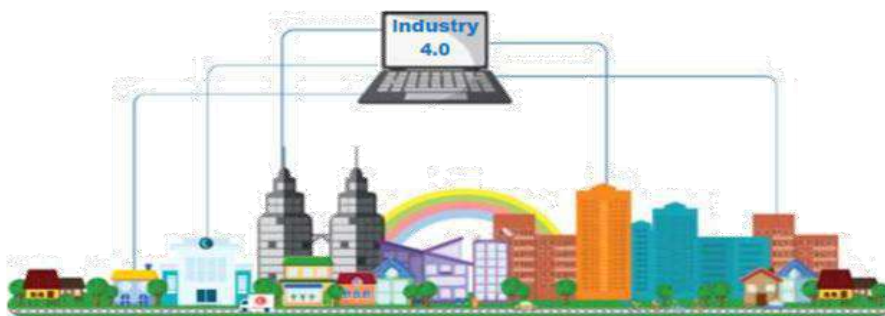
Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai Human Development Index (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di

Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global.

4. Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *finansialtechnology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.



Revolusi Industri 4.0, dirumuskan sebagai perubahan yang revolusioner berdasarkan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi yang sangat menonjol penerapannya adalah teknologi informasi (digital)

Di dalam revolusi industry ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan

menggunakan teknologi pintar (*smart*) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan *aplikasi internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu;

- 1) Interkoneksi yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP).
- 2) transparansi informasi dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Interkonektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas.
- 3) asistensi teknis yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya.
- 4) keputusan terdesentralisasi" yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek "disruption" industri di setiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial.

Pada **bidang ekonomi** pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru

yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cyber security*, *application designer*, *gene designer*, dan lain lain

Pada **bidang organisasi dan institusi publik**, ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada **bidang sosial kemasyarakatan** revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah "me-centered emergency" (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

5. Konflik Regional

Isu konflik regional menjadi penting tidak saja untuk diketahui namun demikian perlu untuk mendapat perhatian mengingat berbagai konflik

tersebut juga ikut memberikan dampak baik secara global maupun nasional dan regional. *Pertama*, Sengketa Wilayah di Laut China Selatan. Perkembangan kondisi di wilayah laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kedepan. Hal ini karena sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Selain itu Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, dan bahkan juga terlibat konflik teritori dengan China di wilayah kepulauan Natuna bagian utara. Oleh karena itu perkembangan kondisi di wilayah tersebut perlu dicermati dengan serius karena terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan juga terkait secara langsung dari sisi pertahanan keamanan karena keterlibatan langsung pemerintah Indonesia pada konflik teritori di wilayah kepulauan Natuna bagian utara.

Kedua, Perang dagang antara China dan Amerika. Pada 15 Januari 2020, tanda-tanda awal gencatan senjata mulai terlihat, ketika kedua belah pihak menandatangani apa yang dikenal dengan "Kesepakatan Fase Satu". Pada kesepakatan ini kedua belah pihak secara resmi menyetujui penurunan tarif, perluasan pembelian perdagangan, dan komitmen baru pada kekayaan intelektual, transfer teknologi, dan praktik mata uang. Meskipun demikian belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak pihak yang meragukan efektivitas "kesepakatan fase satu" ini. Bercermin dari kesepakatan kedua belah pihak pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka pada Juni 2019 dimana para pihak sepakat untuk mulai menurunkan tariff perdagangan diantara mereka serta Amerika Serikat menghapus larangan investasi bagi perusahaan teknologi China dan sebaliknya China sepakat membeli produk pertanian Amerika Serikat lebih banyak lagi. Akan tetapi tidak lama kemudian perang dagang perlahan terjadi lagi, dimana Amerika Serikat menuduh China memanipulasi mata uang mereka yang bertujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan sebagian menetralkan efek tarif. Dari sisi China, perusahaan-perusahaan China dilaporkan berhenti membeli produk pertanian dari Amerika Serikat. Kemudian kedua negara segera mulai bertukar ancaman untuk menaikkan tariff perdagangan. Puncaknya adalah ketika China, pada gilirannya, memprakarsai kasus WTO ketiga terhadap AS dengan mempertanyakan alasannya untuk memberlakukan tarif. Mengabaikan hasil KTT G20 AS memperkenalkan yang baru daftar tarif impor senilai \$ 125 miliar dari China. China kemudian memberlakukan tarif 5% untuk impor Minyak mentah AS dan barang lainnya senilai US \$ 75 miliar.

Belajar dari pengalaman sejarah, ketegangan antar dua negara adidaya ini sangat perlu tetap diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis Indonesia di Indonesia. Hal ini mengingat

bahwa baik Amerika Serikat maupun China adalah dua partner dagang Indonesia yang selama ini cukup penting. Baik Ekspor dan Impor Indonesia dari kedua negara tersebut selama ini cukup besar, oleh karena itu apapun yang terjadi di kedua negara tersebut, khususnya secara ekonomi, akan berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia.

4.2.2. ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL

1. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum

optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola
- kependudukan
- Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- Pemenuhan layanan dasar
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa

- Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
- Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
- Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
- Belum optimalnya peran keluarga
- Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
- Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
- Keselamatan dan keamanan transportasi
- Ketahanan kebencanaan infrastruktur
- Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
- Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
- Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
- Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
- Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - Pembangunan rendah karbon
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 - Konsolidasi demokrasi
 - Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - Penegakan hukum nasional
 - Reformasi birokrasi dan tata Kelola
 - Menjaga stabilitas keamanan nasional

2. KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG LUMBUNG IKAN NASIONAL

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku sesuai kondisi fisik daerahnya yang mencirikan wilayah kepulauan, menggunakan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP), Laut Pulau dan Pintu Jamak. Konsep Gugus Pulau mengakomodasi dinamika pembangunan wilayah di dalam Provinsi dan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota. Konsep Laut Pulau mengakomodasi konektivitas Provinsi Maluku dengan wilayah lain di sekitar, wilayah lain di Indonesia dan orientasi regional dan global, dengan dukungan pintu-pintu keluar sebagai manifestasi konsep Pintu Jamak. Orientasi konsep Laut Pulau dan Pintu Jamak adalah ekspor dengan daya saing yang tinggi.

Implementasi kebijakan pembangunan wilayah berbasis konsep Gugus Pulau melalui penetapan satu pusat utama atau Pusat Gugus Pulau. Untuk menentukan pusat Gugus Pulau digunakan beberapa pertimbangan antara lain tata jenjang pusat pelayanan dan jangkauannya, karakteristik kota dan wilayah sekitarnya, kebijakan yang terkait dan hasil analisis pola perwilayahan gugus pulau yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan pola perwilayahan di Provinsi Maluku mengacu pada faktor-faktor di atas sehingga diperoleh suatu pola yang optimal dan efisien, serta pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan. Provinsi Maluku telah menetapkan 12 Gugus Pulau (GP) sebagai bagian integral dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah. Setiap gugus pulau memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat-pusat gugus dan pulau pulau di sekitarnya, dan sesuai kriteria penetapan Gugus Pulau tersebut di atas.

Kebijakan pembangunan Indonesia merupakan suatu proses kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui perencanaan yang terintegrasi. Peran pemerintah pusat dalam memberdayakan pemerintahan daerah sangatlah besar. Luas sempitnya

atau tinggi rendahnya derajat kemandirian daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Pemberdayaan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah merupakan peran-peran pokok pemerintah pusat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah pusat merupakan faktor dominan dalam manajemen pembangunan secara umum maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga semua proses pembangunan yang di daerah merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu *sinergitas perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kerangka kelembagaan dan kerangka pengembangan wilayah* menjadi sangat penting.

Menjadikan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) bukan hanya suatu kebijakan nasional yang diungkapkan secara lisan (Tahun 2010), namun telah mendapat pengakuan melalui payung hukum dan kebijakan (*Regulatory Law*). Pentingnya Lumbung Ikan Nasional sebagai suatu kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak ditujukan untuk kepentingan Maluku semata tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Sebagai daerah dengan karakteristik berupa kepulauan, Kabupaten Seram Bagian Timur perlu untuk menyiapkan Roadmap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan kelautan terutama dalam menghadapi implementasi pemberlakuan kebijakan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. Perairan sekitar Pulau Keffing memiliki 3 ekosistem pesisir yang lengkap dan dalam volume yang besar. Ketiga ekosistem tersebut adalah ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Tiga ekosistem ini yang menjadi dasar melimpahnya sumberdaya perikanan di wilayah tersebut, karena ikan dan sumberdaya perikanan lainnya menjadikan ke tiga ekosistem tersebut sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah (*spawning ground*) dan membesarkan diri (*nursery ground*). Selain itu menjadi tempat hidup tetap beberapa jenis ikan selama masa hidupnya. Walaupun demikian bukan berarti bahwa sumberdaya perikanan di sana tidak akan habis, saatnya sumberdaya tersebut akan berkurang dan beberapa diantaranya lambat laun akan musnah jika ekosistemnya tidak terjaga atau terjadi pemanfaatan yang tinggi melebihi kemampuan pulih sumberdaya tersebut.

Untuk itu intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan dilandasi bukti ilmiah terkini sehingga sumberdaya tersebut tetap terjaga sebagaimana diamanatkan Code of Conduct for Fisheries (CCRF). Beberapa jenis sumberdaya perikanan yang sangat menonjol di perairan Pulau Keffing dan sekitarnya adalah ikan samandar, ikan julung-julung, teripang, laor dan berbagai jenis ikan demersal dan ikan karang. Dua jenis sumberdaya yang memiliki keunikan/kekhususan karena fenomenanya

jarang bahkan tidak ada di tempat lain adalah teripang dan laor. Sumberdaya perikanan yang dominan dengan pemanfaatan yang tergolong tinggi saat ini adalah pemanfaatan ikan julung-julung (*Hemirhamphus* sp) dan ikan samandar (*Siganus* sp). Sedangkan jenis-jenis ikan demersal dan ikan karang pemanfaatannya masih tergolong rendah.

3. DAMPAK Covid-19 dan KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG NORMAL BARU (NEW NORMAL)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada scenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid-19 akan mengarah ke lockdown putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global.

Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-

negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%. Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan.

Gambar IV.3 Dampak Covid-19 Terhadap Berbagai Sektor

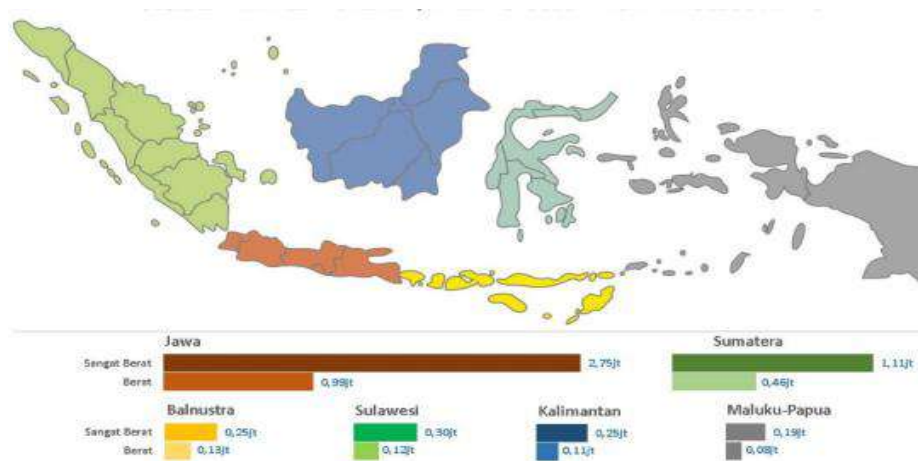
Eksposur Tinggi	- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum - Transportasi dan Pergudangan	- Industri Pengolahan - Jasa Penerbangan - Jasa Pembiayaan Kredit Motor
Eksposur Moderat	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Jasa Keuangan dan Asuransi - Pertambangan dan Penggalian	- Informasi dan Komunikasi - Jasa Perusahaan - Pembiayaan KPR
Eksposur Rendah	- Konstruksi - Real Estat - Pengadaan Listrik, Gas - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- Jasa lainnya - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial. Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di areakritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sector industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral

dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020)

Gambar IV.4 Sebaran Prakiraan Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Akibat Covid-19



Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi social sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya. Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait

upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (suply chain) dari pihak luar negeri yang belum recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

4.2.3. ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI MALUKU

1. RPJMD PROVINSI MALUKU

Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yaitu “ *Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan* ”. Selanjutnya, untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019 – 2024, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan dan Pengangguran

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Provinsi Maluku adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pemenuhan kebutuhan pangan terjangkau, layanan pendidikan dan kesehatan serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan yang cukup disebabkan oleh rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, terbatasnya akses permodalan, pasar dan produksi serta kurangnya ketrampilan. Di lain pihak, pengangguran masih merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan harus segera dituntaskan, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia pada Agustus 2018 setelah Provinsi Banten dan Jawa Barat, yaitu sebesar 7,27%.

2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya.

3) Sumber Daya Manusia.

Isu pendidikan dan kesehatan merupakan hal penting kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dinilai masih rendah. Terbatasnya sarana dan prasarana juga minimnya sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan yang berkompeten masih merupakan permasalahan di Provinsi Maluku.

Secara umum keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Provinsi Maluku mencapai angka 68,87 dan berada pada urutan ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Capaian IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta pada angka 80,47 dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan angka 60,06, sedangkan IPM Indonesia pada tahun sama berada pada angka 71,39. IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, pengetahuan yang diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Perkapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

4) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

5) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Sistem perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui

urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdayayang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.

Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang merupakan bagian integral Rencana Tata Ruang merupakan bentuk intervensi agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dan beresiko bencana, sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang.

6) Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agamamaupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragamanmulti dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya bersifat seremonial).

Investasi pun perlu terus ditingkat, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing didukung juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

7) Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Kmatau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (*terrestrial*) yang luasnya

hanya 54.184,96 Km atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparatif terhadap wilayah provinsi lainnya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya.

Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat 17,85 % penduduk Maluku yang merupakan masyarakat miskin dan terdapat 7,27% penduduk yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya daerah tertinggal dan daerah perbatasan juga menjadi problem.

Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia. Selanjutnya secara makro, pembangunan konektivitas dimaksud bukan semata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur lainnya yakni komunikasi dan informasi serta ketenagalistrikan.

4.2.4. ISU STRATEGIS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Maluku. Isu Strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada pencapaian visi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD.



Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing.

Konsep pembangunan manusia (*people development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan (*sustainable*). Berbagai variabel dan indikator yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain :

- 1.1. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- 1.2. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1.3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
- 1.4. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia;
- 1.5. Penguatan Karakter Sumber Manusia dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang berakhlak, berbudaya, religius dan berwawasan kebangsaan;
- 1.6. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- 1.7. Penuhkan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan;
- 1.8. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid-19.

Isu tentang peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, menjadi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur salah satunya berpengaruh terhadap aspek kinerja ekonomi daerah pasca Covid-19, dimana **penurunan pendapatan masyarakat dan dunia usaha**, yang berujung pada turunnya *outlook* penerimaan negara dan daerah dan peningkatan belanja dan pembiayaan sebagai dampak dari upaya penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional. Turunnya pendapatan masyarakat juga akan menurunkan tingkat tabungan yang sangat penting untuk investasi, yang pada gilirannya akan menurunkan kapasitas ekonomi nasional. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah memfokuskan anggaran 2020 pada tiga hal, yaitu: belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi. Fokus terhadap tiga hal tersebut terutama untuk mengatasi dampak Pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin, serta dunia usaha terutama UMKM.

Selain permasalahan pendapatan dan dunia usaha, juga penting untuk memperhatikan **tantangan demografi** lainnya adalah belum tercapainya *gender equality* (kesetaraan gender). Kesetaraan gender merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), mengingat hampir 50 persen dari populasi penduduk adalah perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu butir

dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keberadaan perempuan penting dan harus diperhitungkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan peningkatan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Pada bagian lain untuk lepas dari jebakan daerah berpendapatan menengah dan beralih segera menjadi daerah yang maju dan berdaya saing, pertumbuhan produktivitas harus dipacu, salah satunya yakni peningkatan sektor-sektor produksi yang merupakan kelompok usaha yang dapat menjadi bagian dari strategi industrialisasi jangka pendek. Langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain:

1. Mendorong dan mengembangkan pelaku usaha yang telah ada saat ini melalui fasilitasi peningkatan daya saing ekspor;
2. Menghilangkan regulasi yang menghambat investasi dan upaya ekspansi bisnis;
3. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas daya saing input, khususnya melalui perbaikan infrastruktur pendukung (logistik dan konektivitas).

Tingkat pendapatan suatu negara dan/atau daerah akan ditentukan oleh kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa yang tergambar melalui PDB yang sangat terkait dengan tingkat produktivitas.

2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan kontrakdisi dan dialami oleh seluruh kabupaten/kota akibat Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya membutuhkan adanya dukungan dan intervensi kebijakan ekonomi yang mampu untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 namun juga mampu menggerakkan sector sector ekonomi produktif dan meningkatkan ketahanan ekonomi termasuk ketahanan sosial masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Menjawab permasalahan dan isu strategis daerah dalam kaitan dengan Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, dan Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

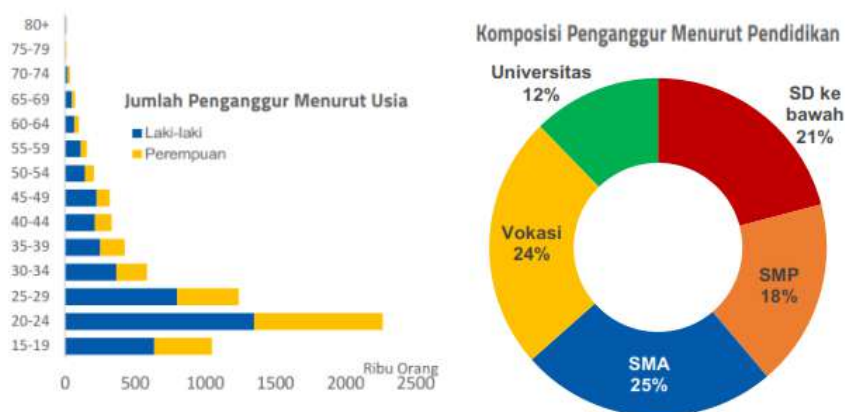
- 2.1. Membangun kemitraan dan kerjasama antar daerah dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 2.2. Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan daerah yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;

- 2.3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk local berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen;
- 2.4. Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian antara lain perikanan.
- 2.5. Peningkatan performa UMKM dan Koperasi sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- 2.6. Pengembangan pariwisata khususnya pariwisata bahari dan budaya yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
- 2.7. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis, industry kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

Isu tentang Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UMKM dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, dan Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, menjadi penting bagi perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, salah satunya adalah seiring dengan meningkatnya porsi kelas menengah produktif tersebut, juga munculantangan dari sisi ketenagakerjaan. Sektor informal masih mendominasi, dimana sekitar 57 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal. Tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah dan para pekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh jaminan sosial. **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja salah satunya adalah faktor pendidikan dan kualifikasimenjadi salah satu faktor penyebabnya.**

Grafik IV.2 Pengangguran Menurut Kelompok Usia dan Pendidikan Tahun 2019

Penganggur Menurut Kelompok Usia dan Pendidikan Tahun 2019



Oleh karena itu, fokus kebijakan terhadap peningkatan kinerja ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan **menyelesaikan permasalahan dan tantangan dari sisi ketenagakerjaan** dengan menggerakkan sektor sektor unggulan daerah khususnya pertumbuhan industri pengelolaan dan pertumbuhan UKM dan Ekonomi Kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain lapangan kerja baru yang berkualitas diperlukan guna menyerap kelas menengah produktif yang semakin besar dan berpendidikan. *Infant industries* dapat menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja baru tersebut, sehingga dukungan dalam mendorong pertumbuhan industri-industri ini sangat diperlukan. Selain itu, penting juga untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk **fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan**. Untuk bidang kesehatan selain masalah pelayanan kesehatan masyarakat, juga perlu untuk memperhatikan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam mewujudkan masyarakat **Seram Bagian Timur yang Sehat**. Di bidang pendidikan, fokus kebijakan adalah untuk peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) antara perempuan dan laki-laki pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Sejalan dengan strategi industrialisasi jangka panjang. Adapun langkah kebijakan yang berkaitan dengan isu Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing, maka strategi pengembangan industri industri pengelolaan dan pengembangan produk unggulan daerah dalam jangka panjang dilakukan, antara lain:

1. Menjadikan sektor produksi dengan dampak ekonomi tinggi sebagai target investasi terutama berbasis sumber daya lokal dan produk unggulan daerah, baik dengan impor teknologi maupun *Foreign Direct Investment* (FDI) guna membangun kapabilitas pengetahuan (*know-how*);
2. Menghilangkan regulasi yang menghambat proses investasi dan kemudahan berusaha;
3. Menyediakan infrastruktur (*enabling environment*) yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor industri baru, terutama aktivitas riset dan inovasi.

3. Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektivitas Antar Wilayah.

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten bahari dengan luas laut mencapai 14,877,771 km². Wilayah daratan terdiri dari Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Kilmury, Werinama dan siwalalat yang berada di Pulau Seram dan pulau pulau terpisah sebanyak

62 pulau. Selain itu, wilayah Seram Bagian Timur mempunyai 132 aliran sungai yang tersebar di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan kondisi yang demikian memberikan tingkat kesulitan geografis dan berdampak pembiayaan yang tinggi. Namun demikian, karakteristik geografis tersebut juga memiliki keunggulan dan potensi sumber daya alam yang potensial terutama sector perikanan dan kelautan. Pengembangan wilayah dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi isu meanstream pembangun ekonomi ke depan. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan senantiasa perlu dipacu guna meningkatkan daya saing daerah.

Sejalan dengan itu, tantangan terhadap aksesibilitas dan konektivitas wilayah perlu dilakukan antara lain :

- 3.1. Pengembangan blue print dan roadmap pengembangan wilayah dan penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan gugus pulau dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 3.2. Pengembangan perencanaan daerah berbasis gugus kepulauan dan penguatan pusat kegiatan kawasan yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas;
- 3.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi perhubungan laut antar pulau dan antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten;
- 3.4. Meningkatkan kerjasama antar daerah baik antar gugus pulau dalam Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi maupun antar Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya untuk penguatan konektivitas antar wilayah dan ekonomi;

Isu tentang Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektivitas Antar Wilayah tentunya juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah menjadi tantangan tersendiri mengingat hal tersebut berdampak pada tingkat kesulitan geografis dan menimbulkan masih besarnya faktor besarnya gap pembiayaan. Dengan demikian, pendalaman sektor keuangan merupakan hal yang mutlak untuk mengembangkan kapasitas pembiayaan infrastruktur yang berjangka panjang

Besarnya gap pembiayaan infrastruktur juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pendanaan. Jika sumber-sumber pembiayaan infrastruktur diperlukan untuk membangun fisik infrastruktur, maka sumber-sumber pendanaan infrastruktur dibutuhkan untuk memastikan bagaimana ketersediaan layanan infrastruktur dapat dibayar. Tersedianya opsi-opsi pembiayaan infrastruktur, melalui instrumen-

instrumen utang dan modal dari berbagai sumber, tidak menghilangkan kewajiban adanya sumber pendanaan yang hanya bersumber dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah dan pengguna layanan infrastruktur. Keterbatasan fiskal, baik karena kinerja penerimaan pajak yang rendah maupun batasan defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, menjadi penghambat keleluasaan Pemerintah memecahkan masalah pendanaan infrastruktur. Selain itu, kompetisi antar sektor dan antarpusat dan daerah atas alokasi dana anggaran juga menjadi penyebab kecilnya kapasitas anggaran dalam memecahkan masalah pendanaan infrastruktur.

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), responsif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

- 4.1. Design kebijakan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- 4.2. Pengembangan dan peningkatan Inovasi Daerah;
- 4.3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan internal pemerintahan;
- 4.4. Implementasi Zona Integritas bagi Aparatur Sipil Negara
- 4.5. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT)
- 4.6. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan;
- 4.7. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020) Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami bonus demografi, terutama untuk kelompok usia produktif yang tentunya menjadi modal dalam pembangunan daerah kedepan. Namun demikian, hal tersebut perlu juga diantisipasi dengan

berbagai pengaruh baik terkait dengan berbagai potensi perubahan sosial kemasyarakatan dan pengaruh pengaruh lainnya termasuk akibat dari Pandemi Covid-19 sehingga tidak memberikan dampak terhadap kamtibmas maupun keterpenuhan kondisi investasi daerah.

Pada bagian lain, Kabupaten Seram Bagian Timur, juga memiliki modal sosial yang tinggi, dengan beragam kekayaan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat tentunya menjadi kekuatan dalam pembangunan pilar kemandirian daerah. Berbagai budaya dan kearifan lokal masyarakat tentunya perlu untuk terus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan sesuai dengan nilai nilai kearifan, nilai nilai religious dan nilai nilai kebangsaan untuk dapat mewujudkan harmoni sosial, keamanan dan ketentraman serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat

- 5.1. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti-diskrimasi Sara, gotong royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
- 5.2. Menumbuh kembangkan dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan bentuk bentuk kerarifan lokal masyarakat serta pelembagaannya;
- 5.3. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti-diskrimasi Sara, gotong royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
- 5.4. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui kegiatan seni budaya dan penguatan kerukunan antar umat beragama;
- 5.5. Membangun sinergitas dan kerjasama antar instansi pemerintahan terutama dengan APH dengan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga/organisasi kemasyarakatan;

Isu tentang Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana kondisi yang diperlukan adalah terkait dengan (i) kepastian hukum, (ii) keamanan dan ketertiban; (iii) tata kelola dan reformasi birokrasi serta kemudahan berusaha (investasi dan perizinan). Dengan kondisi yang demikian, maka penguatan terhadap harmonisasi sosial untuk meningkatkan indeks rasa aman menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penguatan terhadap (i) pembangunan kebudayaan termasuk kearif



lokal masyarakat hukum adat dan (ii) penguatan wawasan kebangsaan menjadi factor utama.



Tabel IV.6. Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur, Isu Global, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Maluku, serta Isu Strategis KLHS

No	Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur	Isu Internasional (SDG's)	Isu/Kebijakan Nasional	Isu/Kebijakan Provinsi Maluku	Isu Strategis KLHS
1	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Sustainable Development Goals (SDG's)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kemiskinan dan Pengangguran	Penyediaan Pangan, sekalipun potensi jasa ekosistem masih sangat baik
2	Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.	Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Banjir : Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki sungai-sungai yang secara potensial terjadinya banjir yang besar terutama di musim penghujan
3	Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah.	Kesenjangan Global Dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia	Kekeringan : Debit banjir yang besar di musim penghujan akan berdampak pada kondisi kekeringan di musim kemarau
4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Revolusi Industri 4.0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing.	Abrasi : Adanya gelombang pasang yang tinggi di musim menyebabkan terjadinya abrasi pantai yang hebat
5	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	Konflik Regional	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	Sampah dan Pencemaran : Sampah yang dikelola di TPA masih sangat rendah, dibanding dengan yang dibakar dan dibuang di sungai. Perilaku masyarakat dengan membakar dan membuang ke sungai akan berdampak pada pencemaran udara dan badan air
6			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah	Konflik Sosial : Kondisi ini terjadi sebagai akibat adanya masalah-masalah akibat adanya masalah-masalah terkait batas-batas kepemilikan tanah
7			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah	



BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan aktualisasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi objektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kabupaten Seram Bagian Timur berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri, sekaligus berdaya saing sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya.

Penjabaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Timur, serta menyelaraskan, mensinergikan dan mengharmonisasikannya dengan sasaran dan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagai penjabaran dari NAWA CITA.

5.1. VISI



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Sumber Daya Lokal

Pernyataan rumusan **VISI** tersebut memiliki makna dan arti yang penting dan strategis untuk menatakelola pemerintahan melalui pembangunan daerah yang berkeadilan, berkebudayaan, nasionalis dan religius. Oleh karena itu, rumusan Visi tersebut secara eksplisit maupun implisit memiliki kandungan makna sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya**, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan digariskan dan ditetapkan menjadi landasan bagi arah dan kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan memaksimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dan bersinergi dengan seluruh stakaholder baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya untuk dapat mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat;
- 2. Sejahterah**, memiliki makna bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang religius, nasionalis dan berbudaya adalah merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Disamping itu dengan didukung oleh tata kelola pemeritahan yang bersih, profesional dan melayani serta dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Seram Bagian Timur. Pemaknaan terhadap konsep

kesejahteraan itu sendiri tentunya begitu luas dan kompleks sehingga indikator utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri antara lain *pertama*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *kedua*, keterpenuhan pelayanan sosial dan dasar bagi masyarakat; *ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana utamanya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah (pulau dan antar pulau) dan *keempat*, pemerataan dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Seram Bagian Timur dalam menikmati pembangunan itu sendiri;

3. **Mandiri**, memiliki makna bahwa dengan modal dasar yang dimiliki baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta keberagaman adat budaya serta kearifan lokal masyarakat, dengan demikian aspek kemandirian menitikberatkan pada aspek kemampuan dalam menata kelola kapasitas sumber daya manusia yang religius, nasionalis dan berbudaya sebagai fondasi pembangunan daerah termasuk didalamnya sumber daya aparatur birokrasi yang bersih, inovatif dan melayani serta kemampuan untuk menggerakkan seluruh potensi unggulan daerah dan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan daerah;
4. **Berdaya Saing**, memiliki makna bahwa arah dan kebijakan pembangunan yang terlaksana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selain dititik beratkan pada arah dan kebijakan strategis pembangunan itu sendiri tetapi juga menitikberatkan pada perubahan paradigma masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam segala aspek dan kepelbagaian kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan politik untuk senantiasa berinovasi dan menumbuhkan kreatifitas terutama dalam menghadapi berbagai ancaman dan krisis baik ekonomi maupun kesehatan dengan memaksimalkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan tentunya meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas seluruh kepentingan kelompok dan individu; dan
5. **Berbasis Sumber Daya Lokal**, memiliki makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menata kelola dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki terutama fokus pada pengembangan potensi sumber daya lokal dibidang perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Oleh karena itu pengembangan ekonomi masyarakat khususnya di Desa (termasuk pada Wilayah pesir dan pulau pulau) untuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya Manusia, dapat menjadi faktor pendorong bagi terciptanya iklim investasi,

peningkatan sumber pendapatan daerah dan kemampuan fiskal daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Beranjak dari rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas, memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 yaitu Seram Bagian Timur Maju, Mandiri dan Sejahtera". Hakekat dan makna filosofis dari konsep "*Masyarakat Seram Bagian Timur yang Sejahtera*" merupakan abstraksi dari komitmen pembangunan daerah dalam arti yang luas. Oleh karena itu, indikator utama untuk mewujudnyatakan kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur itu sendiri antara lain *pertama*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *kedua*, keterpenuhan pelayanan sosial dan dasar bagi masyarakat; *ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana utamanya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah (pulau dan antar pulau) dan *keempat*, pemerataan dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Seram Bagian Timur dan tentunya didasarkan dan dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian, kondisi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur yang dirumuskan dalam Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

Tabel V.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi Beserta Target Capaian
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;												
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	BB	B	B	B	B	B	A	A
				Angka	-	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	3,26 – 4,00	3,26 – 4,00
Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	BB	B	B	B	B	B	A	A	
			Angka	-	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	3,26 – 4,00	3,26 – 4,00	
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)		Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	IPK dan IRB	Skor	B	B	BB	BB	AB	AB	A	A
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN				Angka	-	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	2,51 3,25	3,26 – 4,00	3,26 – 4,00
MISI 2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;												
Pengembangan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,03	5,48	5,50	5,55	5,71	5,78	6,01	6,01
		Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	27,78	28,7	29,1	31.2	33,2	34,2	35,7	35,7
		Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	-	54,6	55,6	67,2	67,5	75,6	80,0	80,0
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah,		Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	0,06	1,02	1,50	2,00	2,20	2,70	3,00	3,00
		Meningkatkan ketahanan ekonomi	Indeks Kinerja	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		daerah dan kesejahteraan masyarakat	Investasi Daerah (IKID)									
		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wirausahaan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
MISI 3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;												
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat	Gini Ratio	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	-	60,6	57,4	69,5	75,8	87,6	90,2	90,2
		Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan										
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat										
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Sedang	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
		Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda		Persen	64,12	64,78	65,12	65,85	66,20	66,50	67,30	67,30
		Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas										
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	-	60,6	57,4	69,5	75,8	87,6	90,0	90,0
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan										



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
peningkatan disiplin dan penegakan protocol kesehatan												
MISI 4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;												
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	-	67,0 71,2	67,5 71,5	67,871, 8	77,0 81,0	77,3 81,5	77,5 81,5	77,5 81,5
		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	-	46,45	46,88	50,18	50,26	50,3	51,5	51,5
		Menguatkan perencanaan industr daerah	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	-0,06 150,54	1,76 152,5	1,85 153,17	1,93 154,22	1,98 154,86	2,5 155	2,30 156,64	2,30 156,64
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD										
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Demokrasi (ID)	Angka	90	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Rasa Aman (IRA)	Persen	80	83	85	88	90	93	95	95
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan		Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	45,7	50,1	52,5	54,5	55,1	55,5	60,0	60,0
	Presentase kerjasama	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya	Wirausahaan	Persen	8,5	9,2	9,5	10,1	10,5	10,7	11,0	11,0



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Manusia	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	54,5	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5	55,7	55,7
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks 25	35	50	75	100	125	150	150	
MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;												
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	42,5	40,2	39,8	39,5	38,7	38,5	39,4	39,4
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai										
		Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan										
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar										
Meningkatkan pelayanan tranportasi antar pulau dan/atau kepulauan		Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	Tingkat Aksesibilitas	Persen	-	50,1	52,5	54,5	55,1	55,5	60,0	60,0
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung		Skor	-	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT;												
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial	Presentase penduduk miskin	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi	IPKM, AHH, IKM, AHH Glni Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA,ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen (%)	1,95	2,25	3,15	4,50	5,02	6,25	6,50	6,50
					65,7	67,5	68,3	70,3	71,2	73,7	75,0	75,0
					30,5	55,2	55,5	55,8	56,4	56,8	60,0	60,0
					87,5	91,2	92,7	93,5	94,2	94,5	95,0	95,0
					1,2	2,5	2,7	3,5	3,7	4,5	5,0	5,0
					8	10	15	20	25	30	35	35



V-357

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
masyarakat secara berkeadilan		industri 4.0			3,5	5,6	6,2	6,7	7,3	7,5	8.0	8.0
					50	50	55	60	65	70	75	75

5.2. MISI

MISI merupakan rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan **VISI** melalui cara yang efektif, efisien, terukur dan sistimatis. Rumusa Misi menjadi sangat penting untuk menjadi indikator terhadap konsistensi kerja dan kinerja serta penjabaran umum kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur



1. Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi;
2. Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mendorong Peningkatan SDM Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif, Berkarakter, serta Bedaya Saing;
4. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal (keuangan) Daerah;
5. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah;
6. Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat

Untuk menuju pencapaian **MISI** diatas, maka pemaknaan terdapat rumusan misi tersebut antara lain :

1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;

Misi ini menjelaskan dan sekaligus menegaskan arah kebijakan serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memastikan terselenggarakannya reformasi dan tata kelola birokrasi melalui peningkatan layanan dan kualitas pelayanan publik serta profesionalitas ASN ; penataan manajemen kelembagaan melalui penyerasian birokrasi; dan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Kinerja Misi ke-1 yang hendak dicapai antara lain adalah :

- 1.1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan; dengan target capaian :
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - b. Rata-rata nilai SKP
 - c. Opini Laporan Keuangan BPK
 - d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- e. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)
 - f. Tingkat maturitas Sistim Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP); dan
 - g. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
- 1.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dengan target capaian :
- a. Persentase usulan masyarakat yang sesuai dengan Visi Misi dan Program Unggulan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan;
 - b. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; dan
 - c. Persentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu
- 1.3. Terciptanya pelayanan publik yang melayani, transparan, responsif, dengan target capaian :
- a. Rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) para setiap perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan public;
 - b. Presentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan / UPT /Kecamatan dan Desa) yang memiliki Website (aktif);
 - c. Ketersediaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - d. Manajemen dan tata kelola arsip daerah; dan
 - e. Manajemen dan tata kelola asset daerah
- 1.4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif, dengan target capaian :
- a. Kesiapsediaan data perencanaan lintas sektoral dan/atau bidang urusan pemerintahan yang terpadu, terintegrasi, sistimatis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Ketersediaan dukungan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan urusan pemerintahan dan/atau pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. Ketersediaan dokumen informasi perencanaan dan pembangunan daerah, perizinan dan pengawasan secara berkelanjutan; dan
 - d. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPAS, RAPBD dan Perda APBD.

2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;

Misi ini menjadi arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sektor sektor dan potensi unggulan daerah untuk penguatan ekonomi daerah yang terus mengalami kontradiksi akibat Pandemi Covid-19 dan menuju tatanan kehidupan baru (New Normal). Hal ini diwujudkan melalui upaya penguatan dan peningkatan inovasi daerah dan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM serta perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi daerah.

Capaian Kinerja Misi ke-2 yang hendak dicapai antara lain adalah :

2.1. Membangun kemandirian ekonomi, dengan target capaian :

- a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB (Nilai Tukar Pertani (NTP), Indeks Peningkatan Pelaku Usaha
- b. Meningkatkan industri pengelolaan terhadap PDRB
- c. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan serta pengelolaan rumah tangga

2.2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target capaian :

- a. Pengurangan angka kemiskinan di daerah secara bertahan dan berkelanjutan
- b. Meningkatnya kelompok usaha produktif
- c. Peningkatan kapasitas pemberdayaan potensi ekonomi desa
- d. Pengembangan potensi sumber daya dan potensi unggulan desa
- e. Peningkatan indeks partisipasi dalam pembangunan desa dan perdesaan

3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;

Misi ini merupakan penegasan terhadap kerangka bangunan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026 yang bertumpuh pada 3 (tiga) pilar yang berbasis pada penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan penguatan terhadap wawasan kebangsaan dan religious yang pada gilirannya akan mampu menghadirkan dan/atau menciptakan sumber daya

manusia yang kompetitif dan berdaya saing dengan memanfaatkan khazanah kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat

Capaian Kinerja Misi ke-3 yang hendak dicapai antara lain adalah :

- 3.1. Peningkatan dan pengembangan potensi pemuda dan/oraganisasi kepemudaan dan organisasi masyarkat, dengan target capaian adalah :
 - a. Insensitas kegiatan pemuda dan/atau kepemudaan;
 - b. Peningkatan partisipasi aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan daerah.
- 3.2. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat adat, dengan target capaian adalah :
 - a. Peningkatan kegiatan seni dan budaya lokal masyarakat;
 - b. Kepastian hukum dan perlindungan atas hak hak masyarakat hukum adat;
 - c. Perlindungan cagar budaya dan bangunan bangunan sejarah dan budaya masyarakat hukum adat;
 - d. Peningkatan festival budaya masyarakat hukum adat; dan
 - e. Penguatan Desa Adat berserta hak asal usul, Desa Budaya, Desa Tanggap Darurat, Desa Kreatif dan Desa Wisata.

4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan terhadap potensi sumber daya lokal baik kekayaan sumber daya alam, potensi unggulan daerah dan sektor sektor unggulan daerah perlu dikelola dan terkelola secara akuntabel, transparan dan partisipatif.

Capaian Kinerja Misi ke-4 yang hendak dicapai antara lain adalah :

- 4.1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan, dengan target capaian :
 - a. Meningkatnya kinerja investasi daerah
 - b. Kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDA
 - c. Realisasi investasi daerah
 - d. Pengembangan sektor unggulan dan potensi unggulan daerah
- 4.2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dengan target capaian :
 - 1.1. Rasio Pertumbuhan dan pengembangan UKM dan Ekonomi Kreatif
 - 1.2. Rasio Pertumbuhan dan pengembangan Koperasi
 - 1.3. Fasilitasi kemudahan investasi dan kemudahan berusaha serta perijinan

5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;

Misi ini bertujuan untuk mengimplemtasikan konsep pembangunan berbasis gugus kepulauan, dengan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk menimalisir kesenjangan antar wilayah di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Oleh karena itu aksesibilitas dan konektiftas akan difokuskan dan prioritaskan dalam kerangka pengembangan wilayah dan/atau kawasan strategis dan kawasan pengembangan serta mendorong pusat pusat pertumbuhan untuk menggerakkan sektor dan potensi unggulan daerah

Capaian Kinerja Misi ke-5 yang hendak dicapai antara lain adalah :

- 5.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur, dengan target capaian :
 - a. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik;
 - b. Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.
- 5.2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, dengan target capaian :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan daerah
 - b. Berkurangnya alhi fungsi lahan untuk ketersediaan lahan pangan berkelanjutan



- c. Presentasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Presentasi pusat pertumbuhan baru dengan dukungan saran dan prasarana
- e. Ketersediaan saran angkutan pulau dan/atau antar pulau.

6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peningkatan sumber daya manusia termasuk perwujudan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0

Capaian Kinerja Misi ke-5 yang hendak dicapai antara lain adalah :

- 6.1. Meningkatnya derajat kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan target capaian :
 - a. Mengurangi angka kematian ibu dan anak
 - b. Pelayanan Posyadu dan KB
 - c. Prevelesni Gizi Buruk
 - d. Peningkatan Disiplin terhadap Protokol Kesehatan Covid-19
 - e. Kualitas SDM bidang kesehatan
- 6.2. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, dengan target capaian :
 - a. Meningkatnya Guru Penggerak
 - b. Presentasi layanan sekolah untuk semua
 - c. Bantuan Sosial Pendidikan untuk siswa berprestasi dan siswa keluarga ekonomi tidak mampu
 - d. Penyelesaian pendidikan kesetaraan yang masih perlu ditingkatkan
 - e. Penguatan Digitalisasi Sekolah
 - f. Penguatan Assesmen Kopentensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kopetensi siswa membaca, sains, dan matematika
 - g. Peningkatan kopetensi dan sertifikasi Guru, termasuk ratio guru terhadap siswa untuk beberapa sekolah yang berada pada wilayah pulau atau gugus pulau;

- h. Kopentensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kopetensi siswa membaca, sains, dan matematika
 - i. Reformulasi kebijakan DAK Fisik untuk fokus pada percepatan wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kebutuhan daerah afrimasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;
 - j. Pengelola lembaga kursus dan pelatihan termasuk proses pendaftaran akreditasi dan/atau reakreditasi kelembagaan;
- 6.3. Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Dengan target capaian adalah :
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD
 - b. Pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD
 - d. Meningkatnya perluasan akses PAUD
 - e. Meingkatkan mutu satuan PAUD
 - f. Meningkatnya karakter peserat didik

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan Kebijakan Daerah dan Perangkat Daerah, sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati, tetapi secara langsung mencapai prioritas Perangkat Daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik Pembangunan Daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja "impact" yang saling terhubung. Dengan demikian, Indikator Tujuan Pembangunan representasi langsung keberhasilan pencapaian Pembangunan Daerah pada akhir periode Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Berikut ini disajikan table keterkaitan Kinerja Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Agar Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 lebih terarah, terpadu, terintegrasi dan sistimatis dalam pengejawantahan dan implementasinya kedepan, maka diperlukan operasionalisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam table sebagai berikut :



Tabel V.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	OPD
1	2	3	4	5
MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;				
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	- BKPSDM - BPPKAD - Bappeda Litbang - Inspektorat Daerah
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)		Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN		Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif		
			Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	
MISI 2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;				
Pengembangan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, PTSP - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Ketahanan Pangan - Badan Pemberdayaan, Pemerintahan,
		Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	OPD
1	2	3	4	5
				Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah		Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Dinas Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Semua OPD
		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wirausahaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
MISI 3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;				
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat	Gini Ratio	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat	Indeks Pembagunan Kebudayaan	- Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Pariwisata
		Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan		
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat		
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Badan Pemberdayaan, Pemerintahan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatan kualtias anak, perempuan dan pemuda		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	OPD
1	2	3	4	5
		Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningktan disiplin dan penegakan protocol kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan - RSUD Bula - RSU Pratama Pulau Gorom
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan		
MISI 4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;				
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Menguatkan perencanaan industir daerah	Pertumbuhan PDRB	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	Indeks Gini Rasio	Semua OPD
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat	Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Demokrasi (ID)	- Badan Kesbangpol - Dinas Satpol PP
			Indeks Rasa Aman (IRA)	
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Presentase kerjasama	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	Wirausahaan	Semua OPD
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	OPD
1	2	3	4	5
MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;				
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	Mewujudkan konektifitas antara wilayah Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	- Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat
Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau dan/atau kepulauan		Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	Tingkat Aksesibilitas	Dinas Perhubungan
MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT;				
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	Presentase penduduk miskin	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	IPKM, AHH, IKM, AHH Glni Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Semua OPD

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2021-2026 sebagai perodesasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga dapat sejajar dengan sumber daya manusia kabupaten/kota lainnya baik dilingkup Provinsi Maluku, maupun dilingkup kabupaten/kota lainnya ditingkat regional.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya terutama tentang keterkaitan Visi Misi dengan tujuan dan sasaran. Oleh karena itu strategi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Dalam kerangka **Menjalankan Agenda Reformasi Tata Kelola Birokrasi**, secara substansial berfokus pada akar permasalahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya terutama dalam hal dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja.

Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :

- 1.1. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
 - 1.2. Penataan administrasi asset daerah;
 - 1.3. Pembentukan karakter aparatur yang professional, jujur, bersih dan melayani, kreatif, inovatif dan berintegritas;
 - 1.4. Peningkatan kinerja aparatur (ASN) dalam proses pelayanan yang sederhana, responsive, adaptif, dan membuka ruang peran serta dan partisipasi publik;
 - 1.5. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan mutu pelayanan dan moral (mingsed) aparatur (ASN);
 - 1.6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan partisipatif dan berbasis teknologi informasi;
 - 1.7. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas aparatur (ASN);
 - 1.8. Penyusunan Grand design dan Road map reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Untuk **mendorong penguatan ekonomi daerah dan masyarakat**, yang dilakukan melalui strategi pengembangan ekonomi daerah, percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan daerah dan peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Selain itu, juga akan focus pada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan produktifitas serta pengelolaan sumber daya alam dan potensi local daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan adanya kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat serta peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis pada nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal serta wawasan kebangsaan dan nasionalis dalam bingkai NKRI.
- Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :
- 2.1. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten;
 - 2.2. Peningkatan promosi, pengembangan kerjasama daerah dan investasi serta pengembangan produk unggulan daerah;
 - 2.3. Pengembangan sentra ekonomi desa dan penguatan kawasan ekonomi perdesaan;
 - 2.4. Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan;
 - 2.5. Pengembangan usaha dan industri pengolahan berbasis atau berskala rumah tangga;
 - 2.6. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi;

- 2.7. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan local peningkatan industry pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan;
 - 2.8. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan; dan
 - 2.9. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan.
3. Dalam kerangka mendorong **peningkatan sumber daya manusia yang berbudaya, religius, nasionalis, kompetitif dan berdaya saing**, yang secara substansial bertujuan untuk membangun sumber daya manusia dan meningkatkan karakter kehidupan masyarakat dan nilai nilai kearifan lokal dan sosial budaya masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya berbasis nilai nilai budaya yang terkandung dalam Ita Wotu Nusa, serta penyelenggaraan dan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Terwujudnya akses dan layanan kesehatan yang bermutu dan merata.
- Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :
- 3.1. Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;
 - 3.2. Pengembangan senin budaya masyarakat Seram Bagian Timur dan nilai nilai keagamaan;
 - 3.3. Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;
 - 3.4. Pengembangan kawasan sejarah/budaya yang ada di daerah;
 - 3.5. Pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah;
 - 3.6. Penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan; dan
 - 3.7. Penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah.
4. Dalam kerangka **mendorong peningkatan investasi daerah dan penguatan fiskal daerah**, bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, penguatan dan peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, dalam kerangka memberikan dukungan kepada daerah yang melakukan *creative financing* dan instrument insentif melalui skema pendanaan yang terintegrasi (*integrated funding*). Untuk itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah telah melakukan kebijakan pengendalian inflasi, terutama dalam mengendalikan harga bahan pangan pokok. Keterjangkauan harga ditempuh melalui kebijakan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial baik dari

APBN maupun APBD yang dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, operasi pasar dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan komoditas pangan juga dilakukan untuk menjaga tingkat harga di konsumen. Untuk memenuhi ketersediaan pasokan, upaya ditempuh melalui pemenuhan kebutuhan logistik terutama daerah konsentrasi pandemi COVID-19 didukung dengan kebijakan pembatasan pembelian di tingkat retail modern dan langkah Bulog dalam melakukan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :

- 4.1. Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja
 - 4.2. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan ekonomi daerah
 - 4.3. Penguatan Inovasi daerah;
 - 4.4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
 - 4.5. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah; dan
 - 4.6. Pengembangan objek destinasi wisata, promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif.
5. Dalam rangka meningkatkan **pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**, pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus kepulauan, meningkatkan sarana dan prasarana wilayah untuk mewujudkan kemandirian wilayah serta konektivitas antar wilayah.
- Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :
- 5.1. Revitalisasi model perencanaan dan pembangunan daerah berbasis gugus kepulauan;
 - 5.2. Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai sektor unggulan daerah;
 - 5.3. Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
 - 5.4. Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar; dan
 - 5.5. Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.
6. Dalam kerangka **mendorong peningkatan layanan sosial dasar masyarakat**, hal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peningkatan sumber daya manusia termasuk perwujudan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0

Strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diantaranya :

- 6.1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan serta kualitas Guru;
- 6.2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- 6.3. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan; dan
- 6.4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah.



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VI-375

**Tabel VI.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah
 Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026**

MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI						STRATEGI
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				2021	2026	
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	BB	B	1. Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah daerah; 2. Meningkatkan inovasi birokrasi; 3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan apratur pengawasan internal pemerintahan; 4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; 5. Meningkatkan koordinasi administrasi dan kerjasama pemeritahan; dan 6. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
			Angka	2,51	3,25	
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	BB	B	
	Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif		Angka	2,51	3,25	
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	IPK dan IRB	Skor	B	B	
			Angka	2,51	3,25	



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**



VI-376

MISI 2 MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN MASYARAKAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	STRATEGI
				2020	2026	
Pengembangan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	25	150	1. Pengebangan UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten; 2. Peningkatan promosi, pengembangan kerjasama daerah dan invesatasi serta pengembangan produk unggulan daerah; 3. Pengembangan sentra ekonomi desa dan penguatan kawasan ekonomi perdesaan; 4. Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan; 5. Pengembangan usaha dan industri pengolahan berbasis atau berskala rumah tangga; 6. Peningkatan produksi, komsumsi dan distribusi; 7. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, diversifikasipangan local peningkatan industry pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan; 8. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan 9. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan.
	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Skor	KI	SI	
	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor		Persen	-	60,0	
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah,	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen (%)	-	80,0	
		Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen (%)	-	35,7	
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen (%)	-	51,5	
	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wirausahaan	Persen (%)	-	55,7	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VI-377

MISI 3 MENDORONG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	STRATEGI
				2020	2026	
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen (%)	-	52,50	1. Peningkatan dan Perbaikan Layanan Kesehatan Masyarakat; 2. Pengembangan kawasan sejarah/ budaya yang ada di daerah; 3. Pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah; 4. Penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan; 5. Penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah; 6. Percepatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular, pembudayaan perilaku hidup sehat; 7. Penguatan sistim kesehatan.
	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan					
	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat					
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM yang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	Sedang	Tinggi	
	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas					
	Meningkatan kualtias anak, perempuan dan pemuda					
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningktan disiplin dan penegakan protocol kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen (%)	1,95	6,50	
	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan					



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VI-378

MISI 4 MENDORONG PENINGKATAN INVASTASI DAERAH DAN PENGUATAN DISKAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	STRATEGI
				2020	2026	
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen (%)	-	81,5	- Memperkuat kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; - Mengembangkan dunia usaha dan ekonomi kreatif; - Peningkatan layanan dan tata kelola perizinan; - Peningkatan mutu layanan kemudahan berinvestasi dan kemudahan berusaha; - Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk kepentingan investasi; - Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui instrumen dan kelembagaan berbasis partisipatif dan kerarifan local; dan - Memperkuat kerjasama antar daerah dan membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan tinggi.
	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen (%)	-	51,5	
	Menguatkan perencanaan industri daerah		Persen (%)	-	50,2	
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio	Persen (%)	-0,06 150,54	2,30 156,64	
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Rasa Aman (IRA)	Angka	80	100	
		Indeks Demokrasi (ID)	Angka	90	100	
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Membangun SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen (%)	-	60,0	
	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	Wirausahaan		-	11,0	



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VI-379

MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH						STRATEGI
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				2020	2026	
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen (%)	-	89,7	1. Membangun dan merebilitasi infstruktur untuk mendukung pengembangan sector unggulan daerah 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan manajemen transportasi daerah 3. Optimaliasi UPT Pengelolaan Terminal 4. Meningkatkan pengembangan angkutan untuk dan menuju pusat kawasan dan pusat pelayanan ekonomi 5. Meningkatkan kualitas layanan transportasi 6. Meningkatkan layanan dan sarana infrastruktur dasar di daerah terpencil
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai					
	Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan					
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar					
Meningkatkan pelayanan tranportasi antar pulau dan/atau kepulauan	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	Tingkat Aksesibilitas	Persen (%)	-	52,6	
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung		Skor	C	A	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VI-380

MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT						STRATEGI
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				2020	2026	
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	IPKM, AHH, IKM, AHH Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	-	67,05 80,5	1. Menggerakan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peningkatan sumber daya manusia; 2. Meningkatkan layanan dan tatakelola pelayanan sosial dasar masyarakat; 3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat 4. Mendorong peningkatan kualitas.
			Skor	-	Tinggi/ Baik	
			Angka	-	100	
			Nilai	BB	A	

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun. Setelah sasaran dan target kinerja telah dapat dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun. Setelah isu strategis telah dapat diidentifikasi dan dirumuskan, langkah berikutnya yaitu merumuskan draft arah kebijakan, menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan langkah terakhir yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan adalah memutuskan arah kebijakan.



Lebih lanjut, kriteria suatu rumusan arah kebijakan, adalah (i) memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (ii) dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; (iii) membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan (iv) mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan jangka menengah sesuai Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 (lima) tahun mendatang periode 2021-2026, maka gambaran arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi prioritas dan fokus pembangunan tahunan dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional jangka menengah dan tahunan, adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan tahun 2021 merupakan tahun pertama periode RPJMD 2021-2026, pelaksanaan tahun pertama RPJMD periode 2021-2026 merupakan momentum yang penting untuk percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial terutama dalam menghadapi akibat pandemic Covid-19 sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah pada tahun 2021 dilaksanakan, dengan arah kebijakan yang meliputi :

- 1.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya masyarakat perdesaan dalam pengelolaan berbagai potensi unggulan di setiap desa;
- 1.2. Membangun kemitraan dan kerjasama daerah dalam mendukung investasi daerah dan kemudahan berusaha serta mendukung penguatan lembaga koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif;
- 1.3. Penataan layanan sosial dasar masyarakat dalam kerangka perlindungan sosial, sistem ketahanan bencana, peningkatan disiplin dan penegakan protocol kesehatan;
- 1.4. Memfasilitas penguatan pemerintahan desa dalam kerangka penyiapan pembentukan Desa Sehat, Desa Wisata, Desa Budaya dan Desa Siaga/Tanggap Bencana;
- 1.5. Penyiapan Agenda Wilayah Bebas Korupsi dan Zona Integritas dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- 1.6. Penyiapan dan penyusunan serta pelaksanaan launching Sistem Inovasi Daerah (Simda) dan Penandaan Pakta Integritas.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Pada tahapan kedua periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2022 meliputi :

- 2.1. Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah;
- 2.2. Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan;
- 2.3. Optimalisasi pengelolaan SDA dan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan;
- 2.4. Peningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis teknologi informasi;
- 2.5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2.6. Meningkatkan proporsi belanja langsung untuk mendorong kualitas pelayanan publik;
- 2.7. Mengintegrasikan pengelolaan pertanian dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam kerangka pengelolaan lahan pangan berkelanjutan serta penguatan ketahanan pangan; dan

- 2.8. Melakukan penataan terhadap tata ruang diperdesaan untuk mendukung aktifitas ekonomi perdesaan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pada tahapan ketiga periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2023 meliputi :

- 3.1. Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah;
- 3.2. Peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia menuju SBT yang sehat dan SBT yang Unggul;
- 3.3. Penataan desa dan penguatan budaya serta kearifan lokal masyarakat serta percepatan penyelesaian hak hak masyarakat hukum adat;
- 3.4. Peningkatan layanan sosial dasar masyarakat;
- 3.5. Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan;
- 3.6. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- 3.7. Memperkuat kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 3.8. Menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Pada tahapan keempat periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2024 meliputi :

- 4.1. Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah;
- 4.2. Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan;
- 4.3. Membangun kemitraan strategis untuk penguatan perencanaan daerah;
- 4.4. Membangun sistim informasi pembangunan daerah dan pengawasan terhadap program pembangunan daerah;
- 4.5. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dana desa dan peningkatan kapasitas serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 4.6. Mengembangkan sektor hilir perikanan melalui penguatan sektor pengelolaan dan pengembangan potensi wisata bahari.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pada tahapan kelima periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2022 meliputi :

- 5.1. Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah;
- 5.2. Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan;
- 5.3. Meningkatkan aksesibilitas perhubungan laut antar pulau/kepulauan;
- 5.4. Meningkatkan kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan pengembangan inovasi daerah;

- 5.5. Memperkuat kapasitas SDM serta kelembagaan daerah serta masyarakat hukum adat;
- 5.6. Penguatan layanan bantuan sosial pendidikan dan akses bagi pemenuhan layanan sosial dasar;
- 5.7. Peningkatan akses bagi pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan; dan
- 5.8. Meningkatkan layanan lembaga pendidikan dan pelatihan daerah.

6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Pada tahapan kelima periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2022 meliputi :

- 6.1. Pemantapan dan evaluasi Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
- 6.2. Pemantapan dan evaluasi Penyiapan Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
- 6.3. Pemantapan dan evaluasi Penyiapan peningkatan aksesibilitas perhubungan laut antar pulau/kepulauan dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
- 6.4. Pemantapan dan evaluasi Penyiapan peningkatan eningkatkan kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan pengembangan inovasi daerah dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
- 6.5. Pemantapan dan evaluasi Penyiapan untuk memperkuat kapasitas SDM serta kelembagaan daerah serta masyarakat hukum adat dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya;
- 6.6. Penguatan layanan bantuan sosial pendidikan dan akses bagi pemenuhan layanan sosial dasar dan peningkatan akses bagi pendidikan dan pelatihan serta ketrampilan; dan
- 6.7. Meningkatkan layanan lembaga pendidikan dan pelatihan daerah.



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal



VI-385

**Tabel VI.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026**

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif Dan Berdaya Saing	Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah	Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah,	Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat
1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi 2. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran 3. Peningkatan layanan Sosial Dasar	Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten;	Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Revitalisasi model perencanaan dan pembangunan daerah berbasis gugus kepulauan;	Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan serta kualitas Guru;
	Penataan administrasi asset daerah;	Peningkatan promosi, pengembangan kerjasama daerah dan invesatasi serta pengembangan produk unggulan daerah;	Pengembangan senin budaya masyarakat Seram Bagian Timur dan nilai nilai keagamaan;	Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan ekonomi daerah	Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai sektor unggulan daerah;	Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
	Pembentukan karakter apartur yang profesional, jujur, bersih dan melayani, kreatif, inovatif dan berintegritas;	Pengembangan sentra ekonomi desa dan penguatan kawasan ekonomi perdesaan;	Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;	Penguatan Inovasi daerah;	Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;	Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan;



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VI-386

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif Dan Berdaya Saing	Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah	Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah,	Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat
1. Kesejahteraan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan Infrastruktur Dasar 3. Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kinerja aparatur (ASN) dalam proses pelayanan yang sederhana, responsive, adaptif, dan membuka ruang peran serta dan partisipasi publik;	Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan; Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan;	Pengembangan kawasan sejarah/budaya yang ada di daerah;	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar;	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk
	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan mutu pelayanan dan moral (mingsed) aparatur (ASN);	Pengembangan usaha dan industri pengolahan berbasis atau berskala rumah tangga;	Pengembangan kelompok seni budaya tradisional daerah;	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;	Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”

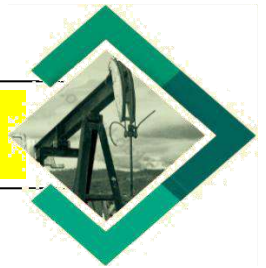


VI-387

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif Dan Berdaya Saing	Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah	Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah,	Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat
1. Peningkatan Layanan 2. Pemantapan Layanan Sosial Dasar 3. Penguatan Potensi Ungulan Daerah	Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan partisipatif dan berbasis teknologi informasi;	Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi;	Penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan;	Pengembangan objek destinasi wisata, promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif.	Penguatan daya dukung dan kapasitas lingkungan.	Pengautan layanan sosial dan kesehatan masyarakat
	Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas aparatur (ASN);	Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan;	Penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah.	Peningkatan investasi daerah dan penguatan inovasi daerah serta peningkatan PAD	Penguatan konektivitas antar wilayah wilayah pertumbuhan dan pengembangan strategis daerah	Peningkatan kapasitas dan daya dukung layanan sosial masyarakat
	Penyusunan Grand design dan Road map reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan	Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan.	Kemitraan dan pengembangan kerjasama antar daerah	Peningkatan infrastruktur pendukung strategis	Pengutan layanan kesehatan dan sosial masyarakat



BAB VII. KERANGGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



7.1. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan gambaran Keuangan daerah yang di jelaskan pada Bab III, proyeksi belanja tahun 2021-2026 di jelaskan pada table berikut :



VII-389

”
Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal
”

**Tabel VII.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA															Seluruh OPD
1	URUSAN PEMERINTAHANW AJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.100.000.000		2.400.000.000		2.450.000.000		2.500.000.000		2.550.000.000		2.550.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			55.500.000.000		57.100.000.000		57.300.000.000		57.500.000.000		57.800.000.000		57.800.000.000		
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			2.710.000.000		2.715.000.000		2.620.000.000		2.620.000.000		2.720.000.000		3.385.000.000		

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026

SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing



2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			4.000.000.000		4.100.000.000		4.150.000.000		4.200.000.000		4.210.000.000		4.210.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			60.000.000		65.000.000		67.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000	
			PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAA			500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3.685.000.000		3.710.000.000		3.735.000.000		3.735.000.000		3.760.000.000		18.625.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.000.000.000		4.200.000.000		4.250.000.000		4.300.000.000		4.350.000.000		4.350.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100.000.000.000		150.000.000.000		155.000.000.000		157.000.000.000		160.000.000.000		160.000.000.000	



1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			600.000.000		660.000.000		720.000.000		780.000.000		840.000.000		840.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN			1.300.000.000		1.430.000.000		1.560.000.000		15.600.000.000		1.820.000.000		1.820.000.000	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			300.000.000		330.000.000		260.000.000		390.000.000		420.000.000		420.000.000	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.600.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000	RSUD Bula
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			20.000.000.000		23.050.000.000		25.525.000.000		27.250.000.000		28.050.000.000		24.450.000.000	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia			139.509.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN			3.000.000.000		3.500.000.000		3.700.000.000		3.900.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	RSUD Pulau Gorom
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4.650.000.000		4.650.000.000		5.420.000.000		5.280.000.000		5.600.000.000		5.970.000.000	



1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.700.000.000		5.900.000.000		6.000.000.000		6.100.000.000		6.150.000.000		6.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jumlah rumah tangga terakses air bersih		7.100.000.000		7.500.000.000		7.600.000.000		7.700.000.000		7.500.000.000		7.500.000.000	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah rumah tangga terakses air bersih		8.395.085.900		9.362.652.518		9.300.000.000		9.500.000.000		9.700.000.000		10.000.000.000	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung SOPD		-		-		-		3.000.000.000		-		5.000.000.000	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi layak		1.904.119.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	



1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik		1.550.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.300.000.000		1.000.000.000		3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi		3.058.500.000		3.000.000.000		2.000.000.000		1.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang sesuai		-		25.000.000		27.000.000		30.000.000		-		35.000.000	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio tempat pemakaman umum per satuan		-		-		600.000.000		-		-		800.000.000	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi		61.476.717.409		69.148.998.000		70.462.734.000		76.082.734.000		77.632.734.000		77.632.734.000	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat		247.928.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW		230.000.000		250.000.000		260.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000	



1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			500,000,000		550,000,000		575,000,000		580,000,000		590,000,000		590,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			700,000,000		750,000,000		780,000,000		790,000,000		800,000,000		800,000,000	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			500,000,000		530,000,000		550,000,000		570,000,000		600,000,000		600,000,000	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			750,000,000		800,000,000		810,000,000		830,000,000		850,000,000		850,000,000	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, dan UTILITAS UMUM (PSU)			5,750,000,000		5,800,000,000		5,810,000,000		5,830,000,000		5,850,000,000		5,850,000,000	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			550,000,000		575,000,000		580,000,000		585,000,000		590,000,000		590,000,000	Satpol PP
1	05	02	Program Peningkatan Ketentrman dan Keteriban Umum			3,500,000,000		3,750,000,000		3,800,000,000		3,850,000,000		3,900,000,000		3,900,000,000	



1	05	04	Program Penanggulangan Kebakaran			500,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		700,000,000		700,000,000	Satpol PP
1	05	02	Program Penanggulangan Bencana			5,200,000,000		5,200,000,000		2,700,000,000		3,150,000,000		3,100,000,000		3,150,000,000	BPBD
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			500,000,000		550,000,000		570,000,000		580,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan			1,350,000,000		1,500,000,000		1,600,000,000		1,850,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial			700,000,000		750,000,000		760,000,000		790,000,000		800,000,000		800,000,000	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Program			1,200,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	
1	06	06	Program Penanganan Bencana			1,000,000,000		1,500,000,000		1,550,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			350,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga			770,000,000		770,000,000		850,000,000		1,000,000,000		1,010,000,000		1,130,000,000	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja			990,000,000		990,000,000		1,010,000,000		1,200,000,000		13,000,000,000		1,400,000,000	
2	07	05	Program Hubungan Industrial			230,000,000		230,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		400,000,000	



3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			800,000,000		800,000,000		500,000,000		500,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1,000,000,000		1,000,000,000		500,000,000		500,000,000		400,000,000		400,000,000	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)													
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			450,000,000		455,000,000		475,000,000		480,000,000		485,000,000		485,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			700,000,000		750,000,000		800,000,000		850,000,000		875,000,000		875,000,000	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			350,000,000		350,000,000		355,000,000		355,000,000		400,000,000		400,000,000	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA			550,000,000		560,000,000		580,000,000		600,000,000		610,000,000		610,000,000	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			700,000,000		850,000,000		1,100,000,000		1,300,000,000		1,450,000,000		1,700,000,000	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			500,000,000		550,000,000		575,000,000		580,000,000		590,000,000		590,000,000	



2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			800,000,000		850,000,000		860,000,000		865,000,000		870,000,000		870,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			550,000,000		570,000,000		575,000,000		580,000,000		590,000,000		590,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PRESENTASE PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	21.16	500,560,000	22.63	535,500,000	15.64	370,000,000	11.83	280,000,000	28.74	680,000,000	100.00	2,366,060,000	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PRESENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.09	581,580,000	22.74	2,600,000,000	23.18	2,650,000,000	23.18	2,650,000,000	25.81	2,950,000,000	100.00	11,431,580,000	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PRESENTASE PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	6.37	193,831,600	23.00	700,000,000	23.00	700,000,000	23.00	700,000,000	24.64	750,000,000	100.00	3,043,831,600	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PRESENTASE PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	13.00	269,000,000	21.75	450,000,000	21.75	450,000,000	21.75	450,000,000	21.75	450,000,000	100.00	2,069,000,000	



2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			500.000.000	530.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengembangan Ruang Terbuka Hijau		670.000.000	270.000.000		725.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH			1.200.000.000	1.250.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			135.000.000	135.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000		185.000.000	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI DAN PENCATATAN													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			1.000.000.000	1.200.000.000		1.250.000.000		1.255.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		500.000.000	520.000.000		550.000.000		560.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil		780.000.000	780.000.000		935.000.000		1.025.000.000		1.103.900.000		1.129.790.000	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan		75.000.000	80.000.000		83.000.000		85.000.000		90.000.000		90.000.000	



2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		50.000.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		75.000.000		80.000.000	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
			PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.100.000.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			550.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.100.000.000		2.150.000.000		2.400.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Peningkatan Pendapatan Keluarga	20%	1.930.400.000	20%	1.760.400.000	20%	2.180.400.000	20%	1.930.400.000	20%	2.030.400.000	20%	2.030.400.000	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
			PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.500.000.000		820.000.000		830.000.000		850.000.000		870.000.000		870.000.000	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			4.100.000.000		4.150.000.000		4.750.000.000		4.800.000.000		4.810.000.000		4.810.000.000	Dinas Perhubung an
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			300.000.000		310.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		325.000.000	
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			250.000.000		270.000.000		300.000.000		310.000.000		350.000.000		350.000.000	



2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
			PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			500.000.000		510.000.000		5.150.000.000		5.200.000.000		5.210.000.000		5.210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan informasi kepada		1.500.000.000		1.600.000.000		1.620.000.000		1.630.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	SKPD yang terkoneksi dalam jaringan Server Pemerintah		75.000.000		80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN														
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		5 Koperasi	100.000.000	5 Koperasi	100.000.000	5 Koperasi	100.000.000	5 Koperasi	100.000.000	5 Koperasi	100.000.000	25 Koperasi	100.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		5 Koperasi	150,000,000	5 Koperasi	150,000,000	5 Koperasi	150,000,000	5 Koperasi	150,000,000	5 Koperasi	150,000,000	25 Koperasi	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		2 Paket	1,150,000,000	2 Paket	1,150,000,000	2 Paket	1,150,000,000	2 Paket	1,150,000,000	2 Paket	1,150,000,000	10 Paket	1,150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		2 Paket	1,750,000,000	2 Paket	1,750,000,000	2 Paket	1,750,000,000	2 Paket	1,750,000,000	2 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		6 Kecamatan	500,000,000	3 Kecamatan	500,000,000	3 Kecamatan	500,000,000	2 Kecamatan	500,000,000	2 Kecamatan	500,000,000	16 Kecamatan	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		6 Kecamatan	250,000,000	3 Kecamatan	250,000,000	3 Kecamatan	250,000,000	2 Kecamatan	250,000,000	2 Kecamatan	250,000,000	16 Kecamatan	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	5 Paket	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		4 Paket	750,000,000	4 Paket	750,000,000	4 Paket	750,000,000	4 Paket	750,000,000	4 Paket	750,000,000	4 Paket	750,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		2 paket	150.000.000	2 paket	150.000.000	2 paket	150.000.000	2 paket	150.000.000	2 paket	150.000.000	2 paket	150.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI		2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	150.000.000	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal			150.000.000		150.000.000		310.000.000		150.000.000		310.000.000		150.000.000	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal			200.000.000		230.000.000		230.000.000		250.000.000		260.000.000		260.000.000	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan			350.000.000		350.000.000		370.000.000		410.000.000		450.000.000		450.000.000	
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan System Informasi			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			1.000.000.000		1.100.000.000		1.110.000.000		1.115.000.000		1.117.000.000		1.117.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		85%	200.011.000	85%	200.011.000	85%	200.011.000	85%	200.011.000	85%	200.011.000	85%	200.011.000	



2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		85%	64.664.000	85%	64.664.000	85%	64.664.000	85%	74.420.000	85%	74.420.000	85%	80.220.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip		85%	81.754.000	85%	81.754.000	85%	85.099.000	85%	85.099.000	85%	87.989.000	85%	87.989.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program perlindungan dan penyediaan arsip		85%	156.554.000	85%	156.554.000	85%	159.954.000	85%	150.954.000	85%	152.854.000	85%	155.854.000	
2	24	04	Program perijinan penggunaan arsip		20 Box	81.600.000	20 Box	81.600.000	10 OPD	71.600.000.000	15 OPD	40.800.000	15 OPD	40.800.000	20 OPD	40.800.000	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.250.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Hasil Tangkapan		8.100.000.000		8.150.000.000		8.155.000.000		8.160.000.000		8.170.000.000		8.170.000.000	
3	25	04	Program Pengelolaan			200.000.000		250.000.000		255.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil			650.000.000		770.000.000		900.000.000		2.375.000.000		1.050.000.000		5.645.000.000	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			400.000.000		450.000.000		455.000.000		460.000.000		465.000.000		465.000.000	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA			350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		370.000.000	Dinas Pariwisata



3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			150.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			150.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		200.000.000		200.000.000	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.500.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	Dinas Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan			5.750.000.000		5.750.000.000		6.550.000.000		7.900.000.000		8.750.000.000		13.550.000.000	
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan			13.300.000.000		13.300.000.000		14.650.000.000		14.700.000.000		20.000.000.000		23.950.000.000	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat			650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		1.300.000.000	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		1.500.000.000	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian			150.000.000		150.000.000		550.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
3	27	07	Program Penyuluhan			2.450.000.000		2.450.000.000		3.250.000.000		3.650.000.000		4.200.000.000		9.150.000.000	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01		SEKRETARIAT DAERAH														
4	01	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.900.000.000		15.910.000.000		15.920.000.000		15.930.000.000		15.950.000.000		15.950.000.000	Setda



4	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.000.000.000	4.200.000.000	4.250.000.000	4.300.000.000	4.350.000.000	4.350.000.000	Bagian Umum
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Bagian Tatapem & Otda
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			18.190.600.000	18.190.600.000	18.725.000.000	18.725.000.000	18.725.000.000	18.725.000.000	Bagian Kesra
4	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.550.000.000	1.600.000.000	1.610.000.000	1.620.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	Bagian Hukum
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Bagian Perekonomi an dan Sumber Daya Alam
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			500.000.000	520.000.000	550.000.000	570.000.000	600.000.000	600.000.000	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	Bagian Administrasi Pembangun an
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			130.000.000	150.000.000	155.000.000	160.000.000	170.000.000	170.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			500.000.000	520.000.000	550.000.000	570.000.000	600.000.000	600.000.000	



4	02		SEKRETARIAT DPRD													
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.500.000.000	7.100.000.000		7.300.000.000		7.500.000.000		7.550.000.000		8.000.000.000	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			20.000.000.000	23.941.316.400		25.335.448.040		26.868.992.844		28.555.892.128		28.555.892.128	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN													
5	01		PERENCANAAN													
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.500.000.000	1.600.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	Bappeda Litbang
5	01	02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			2.530.000.000	2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000		2.530.000.000	
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan			1.700.000.000	1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.500.000.000	1.700.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000	
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam			1.500.000.000	1.700.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000	
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan			1.500.000.000	1.700.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000	
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			200.000.000	250.000.000		270.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000	Bappeda Litbang
5	02		KEUANGAN													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.500.000.000	3.800.000.000		3.850.000.000		3.910.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			69.000.000.000	73.000.000.000		75.000.000.000		78.000.000.000		80.000.000.000		80.000.000.000	BPPKAD



5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			650.000.000		690.000.000		710.000.000		720.000.000		750.000.000		750.000.000	BPPKAD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			598.259.100		610.000.000		630.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000	
5	03		KEPEGAWAIAN														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			550.000.000		560.000.000		565.000.000		575.000.000		600.000.000		600.000.000	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.100.000.000		1.150.000.000		1.160.000.000		1.165.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			1.419.235.500		1.418.235.500		1.775.000.000		2.000.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000	BKPSDM
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01		INSPEKTORAT DAERAH														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			4.000.000.000		4.100.000.000		4.150.000.000		4.250.000.000		4.260.000.000		4.260.000.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.414.720.000		2.635.456.000		2.867.228.800		2.110.590.240		2.366.199.752		2.366.199.752	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			50.000.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		63.000.000		63.000.000	
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			250.000.000		255.000.000		258.000.000		260.000.000		265.000.000		265.000.000	Kecamatan Pulau Panjang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000	



7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000	Kecamatan Pulau Pangajene
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				80.000.000		100.000.000		120.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		90.000.000		150.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Sirtaun Wida Timur
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	



7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000		40.000.000		40.000.000		400.000.000		60.000.000		60.000.000	Kecamatan Tutuk Tolu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		80.000.000		85.000.000		85.000.000		120.000.000		120.000.000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			14.000.000		14.000.000		14.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000	Kecamatan Bula
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000	



7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Bula
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Wakate
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Teor



7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	Kecamatan Teor
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Bula Barat
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	



7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	Kecamatan Bula Barat
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Kilmuri
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Kian Darat



7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	Kecamatan Kian Darat
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Seram Timur
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	



7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Teluk Waru
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Pulau Gorom
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	



7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000	65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	Kecamatan Pulau Gorom
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000	90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000	30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Gorom Timur
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000	25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000	65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000	90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	



7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Werinama
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000				70.000.000		75.000.000		90.000.000	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000		130.000.000	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000		30.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		60.000.000	Kecamatan Siwalalat
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	



7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000		65.000.000			70.000.000		75.000.000		90.000.000	Kecamatan Siwalalat
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		130.000.000	130.000.000	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik													
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			50.000.000		100.000.000		150.000.000.000		150.000.000.000		150.000.000.000	200.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			40.000.000		-		45.000.000		50.000.000		55.000.000	60.000.000	



8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N			50.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			105.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			665.000.000		686.200.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Setelah Bupati dan Wakil Bupati menjabarkan janji-janjinya ketika kampanye kedalam visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk mencapai indikator targetkinerja visi dan misi diperlukan rumusan program yang akan menjadi acuan selama 5(lima) tahun kedepan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dantanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya setiap program prioritas yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah terkait, guna mendapatkan “sekumpulan”program prioritas yang inheren di setiap arah kebijakan, dibutuhkan kebijakan umum.

Rumusan program pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur kedalam program-program prioritas. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka program pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang 5 (lima) kedepan, meliputi antara lain :

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pendidikan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Pendidikan;
- c. Program Pengembangan Kurikulum;
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- f. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

2. Urusan Kesehatan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Sampahan Regional;
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- g. Program Pengembangan Permukiman;
- h. Program Penataan Bangunan Gedung;
- i. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
- j. Program Penyelenggaraan Jalan;
- k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Program Penanggulangan Bencana;
- d. Program Penanggulangan Kebakaran;

6. Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Sosial :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- d. Program Penanganan Bencana.

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.**1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Program Hubungan Industrial.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Program Perlindungan Perempuan;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- c. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI);
- c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- d. Program Pengelolaan Persampahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pendaftaran Penduduk;
- c. Program Pencatatan Sipil;
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- a. Program Penataan Desa;

- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengendalian Penduduk;
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. Program Pengelolaan Pelayaran;
- d. Program Pengelolaan Penerbangan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- c. Program Aplikasi Informatika.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik :

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian :

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan :

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Perpustakaan;
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan :

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- c. Program Perijinan Penggunaan Arsip.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.**1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pemasaran Pariwisata;
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- g. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi :

- a. Transmigrasi Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.**1. Sekretariat Daerah :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Program Administrasi Umum.

2. Sekretariat DPRD :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Layanan dan Administrasi Keuangan;
- c. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.**1. Perencanaan :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

2. Keuangan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Kepegawaian Daerah;

4. Pendidikan dan Pelatihan :

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Penelitian dan Pengembangan :

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

1. Inspektorat Daerah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

7.2.7. Unsur Kewilayahan.

1. Kecamatan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

7.3. PENYUSUNAN ALTERNATIF PROGRAM

a. Kriteria Penyusunan Alternatif Program

Penyusunan alternative program dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan disusun dengan dengan berdasarkan pada beberapa kriteria yang disepakati para pihak. Kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk disepakati para pihak dalam penyusunan alternative program tersebut adalah :

1. Proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya sendiri terhadap target nasional dan global
2. Daya dukung dan daya tampung 1 daerah;
3. Potensi, daya saing, dan inovasi daerah
4. Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah.

Penyusunan alternative program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan

sehingga dapat memenuhi target, baik target yang ditentukan dalam RPJMN ditahun 2019 dan target global yang telah disepakati dalam konsesi global pada tahun 2030 sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 serta target yang ditetapkan pada masa berlaku pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyusunan upaya tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan kepada kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan potensi atau peluang para pihak untuk turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Alternatif Program

Dalam penyusunan alternative program dilakukan dengan melakukan proyeksi kondisi pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan perkiraan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya sendiri dan/atau dengan upaya tambahan. Penyusunan proyeksi tersebut disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa atau jangka waktu dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya sendiri dilakukan dengan berdasarkan kepada kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur periode RPJMD sebelumnya. Sedangkan penyusunan upaya tambahan dilakukan dengan pertimbangan

1. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur
2. Proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya sendiri yang tidak tercapai pada tahun 2030 yang merupakan konsesi global dan tahun 2021 yang merupakan periode RPJMD.
3. Prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada visi dan misi serta Program unggulan Kepala Daerah terpilih.
4. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melaksanakan Kebijakan, Rencana, dan Program
5. Relevansi indikator program terhadap kebutuhan Kabupaten Seram Bagian Timur

Penyusunan alternative program yang dilakukan dengan berdasarkan pada kriteria yang disusun adalah sebagai berikut yakni :

1. Alternatif Program Terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- 1.1. Dampak Resiko Bencana
- 1.2. Indeks Resiko Bencana
- 1.3. Prevelensi Kecukupan Konsumsi Pangan

- 1.4. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/kapita/hari
- 1.5. Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Layak Minum
- 1.6. Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan, Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau Pulau
- 1.7. Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi
- 1.8. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 1.9. Kualitas Air Sungai dan Sumber Air Baku
- 1.10. Presentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani
- 1.11. Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang di Olah Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan (Sektor Industri)
- 1.12. Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang
- 1.13. Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001
- 1.14. Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

2. Alternatif Program Indikator TPB/SDGs Belum Tercapai

- 2.1. Presentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas
- 2.2. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Sederajat
- 2.3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
- 2.4. Prevelensi Sunting Pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita
- 2.5. Presentase Bayi Usia Kurang 6 (enam) Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif
- 2.6. Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Moderen
- 2.7. Presentase SD/MI Berakreditasi Minimal B
- 2.8. Presentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B
- 2.9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
- 2.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat
- 2.11. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau
- 2.12. Presentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan
- 2.13. Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

- 2.14. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan
- 2.15. Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

3. Alternatif Program Kebutuhan Daerah

- 3.1. Presentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
- 3.2. Presentase Penduduk Umur 0 s/d 17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Kelahiran
- 3.3. Presentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik (PLN dan Non PLN)
- 3.4. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
- 3.5. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
- 3.6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
- 3.7. Persentase merokok pada penduduk umur =18 tahun.
- 3.8. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
- 3.9. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- 3.10. Total Fertility Rate (TFR).
- 3.11. Unmet need pelayanan kesehatan.
- 3.12. Rata-rata lama sekolah penduduk umur = 15 tahun
- 3.13. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
- 3.14. Proporsi kredit UMKM terhadap total kreditProporsi individu yang menggunakan internet

7.4. PROGRAM UNGGULAN DAERAH

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode Tahun 2021-2026, menetapkan sejumlah program unggulan yang akan diarahkan sebagai wujud konkrit dari langkah langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur itu sendiri merupakan bagian dari penajaman Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga dipandang perlu untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan untuk di implementasikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan, diantaranya.

1. SATU DATA, SBT MEMBANGUN;

Program Unggulan **SATU DATA;SBT MEMBANGUN** merupakan salah satu program dari agenda rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur yakni “Mendorong Peningkatan Invesatasi dan Penguatan Fiskal Daerah (Misi ke-4)”. Dalam implementasi dan operasionalisasi program ini didukung oleh pelaksana urusan perencanaan pembangunan daerah dengan bersinergi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Timur.

Program SATU DATA;SBT MEMBANGUN selanjutnya menjadi program utama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam kerangka penyediaan dan penyajian data pembangunan daerah yang terintergrasi, terpadu dan berkelanjutan serta lintas sektoral untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Sasaran dari program ini adalah tersedianya data perencanaan daerah yang akurat, terpercaya, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni (i) peningkatan Indeks Perbaikan tata kelola data perencanaan pembangunan; (ii) Pertumbuhan PDRB; (iii) Indeks Gini Rasio

2. SBT SEHAT;

Program Unggulan **SBT SEHAT**, merupakan salah satu program dari agenda kerja dari rumusan Misi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur yakni “Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat (Misi ke-6)”. Dalam implementasi dan operasionalisasi program ini didukung oleh pelaksana urusan bidang kesehatan, dan sosial.

Program SBT SEHAT, selanjutnya menjadi program utama pembangunan layanan sosial dasar masyarakat khususnya dalam kerangka untuk menatakelola pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat utamanya dalam menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk upaya pencegahan berbagai penyakit menular lainnya melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni peningkatan (i) Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat (IPKM); (ii) Indeks Keluarga Sejahtera; dan (iii) Indeks Harapan Hidup.

Selain itu, program SBT SEHAT dalam pelaksanaannya juga didasarkan pad 3 (tiga) pilar utama yaitu (i) penerapan paradigma sehat; (ii) penguatan pelayanan kesehatan; dan (iii) jaminan dan perlindungan jaminan sosial dasar masyarakat. Program ini menjadi leading sector bidang urusan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. **SBT UNGGUL, UNGGUL, MAJU, BERBUDAYA dan BERINOVASI;**

Program Unggulan **SBT UNGGUL, MAJU, BERBUDAYA dan BERINOVASI**, merupakan salah satu program dari agenda kerja yang dirumsukan dalam Misi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2016 yakni

- a. Mendorong Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif, dan Berdaya Saing (Misi ke-3)
- b. Mendorong Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Misi ke 2)

Dalam implementasi dan operasionalisasi program dilaksanakan oleh yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang (i) kebudayaan; (ii) Koperasi dan UKMK; dan (iii) Pendidikan. Sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan karakter dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, berbudaya dan berkarakter. Program ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan daerah sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni peningkatan (i) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (ii) Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK); (iii) Indeks Inovasi Daerah (IID); (iv) Indeks Rasa Aman (IRA); (v) Indeks Resiko Bencana IRB); dan (vi) Indeks Demokrasi (ID). Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Koperindag Kabupaten Seram Bagian Timur.

4. **SBT MELAYANI;**

Program Unggulan **SBT MELAYANI**, merupakan salah satu program dari agenda kerja yang dirumuskan dalam Misi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni “ Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Birokarasi (Misi ke-1) ”.

Dalam implementasi dan operasionalisasi program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan. Sasaran dari program ini adalah untuk pembentukan apartur birokrasi yang melayani, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan public yang partisipatif dan responsif.

Program ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan daerah sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni (i) Indeks Presepsi Korupsi (IPK); dan (ii) Indeks Demokrasi.

5. **SBT TERAKSES dan TERLAYANI;**

Program dari agenda kerja yang dirumuskan dalam Misi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni “ Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah (Misi ke-5) ”. Dalam implementasi dan operasionalisasi program ini dilaksanakan oleh bidang

urusan tata ruang. Sasaran dari program ini adalah untuk menyelaraskan perencanaan wilayah yang terintegrasi dalam perencanaan daerah secara sistimatis, terencana dan terpadu serta berkelanjutan. Program ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan daerah sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni (i) Indeks Konektifitas Daerah (IKD) yang mencakup konektifitas dan aksesibilitas.



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**



SBT SATU DATA; SBT MEMBANGUN		
SASARAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran dari program ini adalah tersedianya data perencanaan daerah yang akurat, terpercaya, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni (i) peningkatan Indeks Perbaikan tata kelola data perencanaan pembangunan; (ii) Pertumbuhan PDRB; (iii) Indeks Gini Rasio	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (P2B2R).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Seram Bagian Timur PKK
SBT SEHAT		
SASARAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat utamanya dalam menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk upaya pencegahan berbagai penyakit menular lainnya melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni peningkatan (i) Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat (IPKM); (ii) Indeks Keluarga Sejahtera; dan (iii) Indeks Harapan Hidup.	Kampung Sehat Kampung Tanggap Darurat Bencana Kampung KB Gerakan Hidup Sehat dan Bersih	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan PKK

**SBT UNGGUL, UNGGUL, MAJU, BERBUDAYA dan BERINOVASI;**

SASARAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan karakter dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, berbudaya dan berkarakter. Program ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan daerah sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni peningkatan (i) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (ii) Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK); (iii) Indeks Inovasi Daerah (IID); (iv) Indeks Rasa Aman (IRA); (v) Indeks Resiko Bencana IRB); dan (vi) Indeks Demokrasi (ID). Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Koperindag Kabupaten Seram Bagian Timur	Kampung Budaya Kampung Wisata Kota Layak Anak Kampung Literasi Kampung Nelayan	Dinas Koperindag, Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga PKK

SBT TERAKSES DAN TERLAYANI

SASARAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran dari program ini adalah untuk menyelaraskan perencanaan wilayah yang terintegrasi dalam perencanaan daerah secara sistimatis, terencana dan terpadu serta berkelanjutan. Program ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan daerah sesuai dengan sasaran pokok Visi Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 yakni (i) Indeks Konektifitas Daerah (IKD) yang mencakup konektifitas dan aksesibilitas.	Desa Terkoneksi Desa Terlayani	Dinas PU dan PUPR PKK

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Kerangka Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Kerangka keberhasilan ini menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya.

Terukur, indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur.

Spesifik, dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya.

Terjangkau, Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

Realistis, indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai.

Masa Waktu, indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat rumpun atau pengelompokan urusan antara lain :

1. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Konstruksi kinerja pemerintah yang dibangun ke dalam sistem yang disebut dengan istilah "Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah". Di dalam arsitektur kinerja pembangunan daerah tersebut, kinerja daerah dapat diukur melalui tiga tingkatan (leveling indikator), yaitu:

1. Dampak (Impact); dimana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada keberhasilan pencapaian visi/misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dikarenakan yang diukur adalah keberhasilan visi/misi, tujuan dan sasaran daerah yang tidak lain berkaitan dengan perodesasai kepala daerah terpilih, maka dampak (impact) dikatakan berhasil atau tidak tentunya dengan melihat perubahan

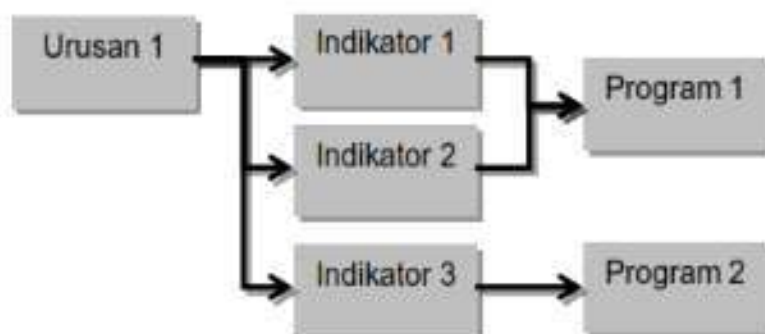
kondisi setelah lima tahun pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan kata lain indikator dampak (impact) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan yang memiliki area perubahan jangka menengah lima tahunan. Visi/misi kepala daerah terpilih dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan kondisi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sesuai dengan yang dijanjikan di dalam RPJMD.

2. Hasil (Outcome); dimana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada kemanfaatan rangkaian keluaran (output) yang dihasilkan oleh sebuah atau beberapa kegiatan. Indikator hasil seyogyanya diukur setelah seluruh keluaran (output) kegiatan selesai dicapai, artinya dapat dikatakan bahwa hasil (outcome) merupakan berfungsinya sebuah output dalam mencapai suatu kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena hasil berkaitan dengan keluaran suatu kegiatan, maka pengukuran hasil pun kemudian dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan keluaran (output) kegiatan yang ada. Dikarenakan hasil (outcome) merupakan capaian kondisi yang merepresentasikan keberhasilan fungsi dari serangkaian keluaran (output) kegiatan, maka hasil (outcome) ini menjadi kunci pokok pemerintah daerah dalam melihat pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka mencapai visi/misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain hasil (outcome) mendefinisikan sebuah kondisi yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu program.
3. Keluran (Output); dimana menekankan pada capaian suatu barang, jasa, atau kuantitas orang dari serangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator keluaran (output) menjadi domain kegiatan. Setiap kegiatan harus memiliki keluran (output) yang jelas yang dicapai melalui serangkaian proses kegiatan disertai sejumlah alokasi anggaran untuk menggerakkan sumberdaya yang diperlukan. Dalam hal ini proses perumusan anggaran berdasar prestasi kerja sangat diperlukan agar besaran alokasi anggaran dapat merepresentasikan proses kegiatan dalam mencapai output secara wajar



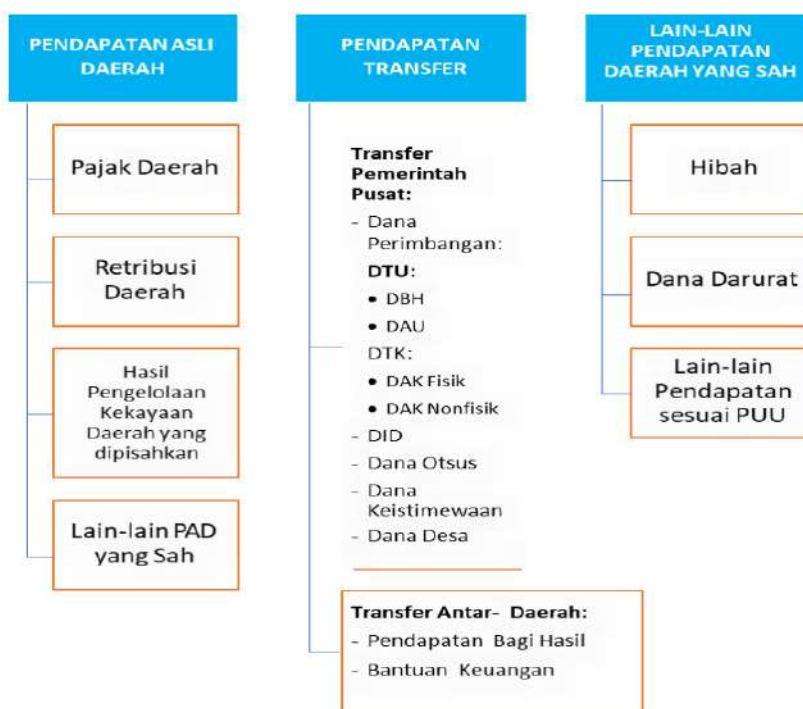
Pengukuran keberhasilan pembangunan di daerah dibagi ke dalam tiga tingkatan indikator (*leveling indicator*) yaitu level dampak (*impact*), level hasil (*outcome*), dan level keluaran (*output*). Pemisahan tingkatan indikator ini penting agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam implementasi setiap tahunnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban oleh masing-masing SKPD dan untuk kepentingan daerah. *Pertama*, dimulai dengan melihat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang telah dianalisis dimana telah dirumuskan secara runtut dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kedua, memetakan alat ukur keberhasilan urusan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Alat ukur tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perumusan indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah terpilih. Bahan penyusunan kerangka keberhasilan mengambil dari hasil studi pendahuluan yang disesuaikan dengan regulasi yang ada, kewenangan, perkembangan pembahasan isu strategis, dan indikator tambahan yang merupakan kebutuhan kebijakan daerah. *Ketiga*, perumusan program pembangunan dalam mencapai kerangka keberhasilan. *Ketiga*, perumusan program pembangunan dalam mencapai kerangka keberhasilan. Nomenklatur program sedapat mungkin menggunakan nomenklatur sebagaimana yang telah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hubungan urusan, indikator dan program pembangunan daerah dapat dilihat dalam gambar berikut:



Suatu indikator atau kerangka keberhasilan akan dicapai melalui program yang jelas oleh masing-masing SKPD, sehingga nantinya akan mudah dalam monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan SKPD setiap tahunnya. Ketika indikatornya tidak tercapai maka pemerintah daerah dengan mudah dapat menentukan program apa dan SKPD mana yang perlu untuk diintervensi melalui kebijakan percepatan pencapaian target. Penulisan

kerangka keberhasilan atau indikator tersebut berangkat dari masing-masing urusan hanya untuk memudahkan SKPD nantinya dalam menyusun indikator program yang akan dituangkan di dalam Renstra SKPD.



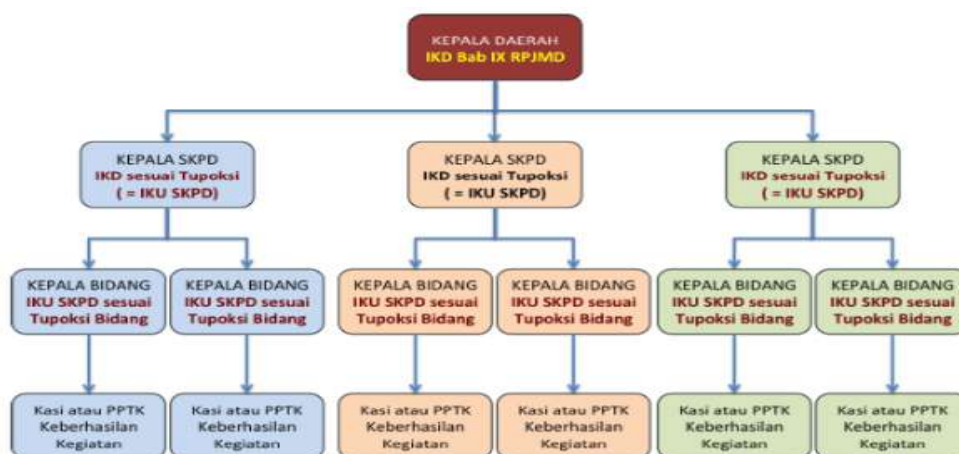
Indikator di tiap urusan sebagaimana gambar di atas hanya bersifat alat bantu semata karena indikator dampak (*impact*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya baru akan dirumuskan bersamaan dengan penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.



Kerangka keberhasilan dalam penetapan indikator kinerja dalam RPJMD merupakan alat ukur keberhasilan visi/misi kepala daerah selam lima tahun ke depan. Di setiap tahunnya, indikator kinerja daerah tersebut digunakan sebagai target tahunan yang direncanakan, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Di tingkat SKPD, indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD sebagai kepanjangan tangan kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Indikator Kinerja SKPD dapat digunakan sebagai indikator kinerja utama SKPD selama lima tahun. Kondisi hasil (*outcome*) tersebut akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Setiap tahunnya, kondisi ini menjadi bahan penyusunan Renja SKPD, masuk dalam DPA SKPD, bahan perjanjian kinerja SKPD, sampai dengan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan SKPD. Di tingkat personal, indikator kinerja utama SKPD itulah menjadi tanggung jawab kepala SKPD untuk mencapainya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, tentunya kepala SKPD dibantu oleh bidang-bidang yang menjadi struktur dibawahnya. Demikian juga indikator capaian yang menjadi kinerja kepala SKPD juga dibantu oleh keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kesesuaian indikator dengan program di tiap bidang nantinya menjadi tanggung jawab kinerja masing-masing kepala bidang (eselon III). Di tingkat eselon IV, maka kinerjanya diukur melalui kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Ketercapaian keluaran (*output*) kegiatan menjadi kinerja di tataran teknis.

Distribusi tanggung jawab inilah bahan perumusan kinerja pegawai di masing-masing organisasi di daerah. Gambaran mengenai distribusi tanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Pada aspek Kesejahteraan Masyarakat. Penentuan capaian target indikator kinerja tiap tahunnya meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Demikian pula dengan persentase laju inflasi setiap tahunnya sepanjang 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat ditekan sampai akhir periodisasi RPJMD yaitu tahun 2021. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya sepanjang kurun 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai penjabaran dari :

- a. Misi ke 2, yaitu "Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat"
- b. Misi ke 3, yaitu "Mendorong Peningkatan SDM yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif, Berkarakter, Serta Berdaya Saing:

2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan bersifat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan :

- a. Misi ke 1, yaitu "Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi"
- b. Misi ke 5 yaitu "Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah"

3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatan aspek-aspek



lainnya. Capaian aspek daya saing daerah dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal (i) Meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat; (ii) Mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran; (iii) Meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan (iv) Berkurangnya angka buta huruf dikarenakan semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah. Hal ini sebagai penjabaran :

- a. Misi ke 4, yaitu "Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal (Keuangan) Daerah"
- b. Misi ke 6, yaitu "Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat"



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**
”



VIII-440

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
1	2	3	4
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga Pemerintah Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-441

			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-442

			menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1,



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-443

			sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala Sekolah Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tandatamat pendidikan dan pelatihan calon kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**
”



VIII-444

2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhiskan, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar
		Persentase penderita DM yang pelayanan kesehatan sesuai standar mendapatkan Pelayanan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia
			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-445

		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standard Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standard
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (ha) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangankabupaten/kota (ha) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kabupaten/kota Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota



VIII-446

**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**

		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten /kota Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota Persentase panjang jaringan irigasiprimer dalam kondisi baik Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Persentase panjang jaringan irigasitersier dalam kondisi baik Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten /kota Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD-T Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berdasarkan Sumber Daya Lokal**



VIII-447

			pengolahan lumpur tinja Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik Fungsi Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung Penetapan Keputusan Bupati / Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota Panjang jalan yang Dibangun Panjang jembatan yg dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-448

		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi Panjang jembatan yang direhabilitasi Panjang jalan yang Dipelihara Panjang jembatan yang dipelihara Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten / kota Jumlah tenaga kerja operator / teknisi / analisis yang terlatih di wilayah kabupaten / kota Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi / analisis di wilayah kabupaten / kota Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data Termutakhir Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang termutakhir secara berkala Tersedianya data dan profil OPD sub- urusan jasa konstruksi kabupaten/kota Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-449

			yangmembidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikatpelatihan operator dan teknisi/analisis Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah kabupaten/kota Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha danTDUP yang disetujui Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatanusaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya Jumlah badan usaha yang memiliki UJKN di wilayah kab/kota Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten / kota Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah Kab/Kota Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-450

			badan usaha dan TDUP yang disetujui Jumlah pengawasan Terkait¹ ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan Pengawasannya Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksiyang menjadi kewenanganPengawasannya
4	SATUAN PAMONG PRAJA	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Presentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Tersedianya sarana prasarana minimal
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KLB sampai dengandinyatakan sah/legal Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman Bencana Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan sah/legal Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-451

		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan Persentase warga negara yang ikut Pelatihan Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat Bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian Bencana Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten / kota Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluaran/desa Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berdasarkan Sumber Daya Lokal**



VIII-452

5	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Pemadam Kebakaran Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket standar gizi Jumlah rumah singgah /shelter / tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-453

			Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan Sosial Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen Kependudukan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran Keluarga Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia
6	PEMUKIMAN DAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berdasarkan Sumber Daya Lokal**

PERUMAHAN RAKYAT	bencana	bencana dan bencana penanganannya Jumlah rumah yang terkena bencana alam terkena bencana alam Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH



VIII-455

**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**

		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh Jumlah rumah di kab/kota Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH Jumlah rumah tidak layak huni Jumlah rumah yang tidak dihuni Rasio rumah dan KK Jumlah rumah pembangunan baru Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU Jumlah pengembang yang tersertifikasi Jumlah pengembang yang teregistrasi Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan
7	KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja rencana tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenagakerja Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerjadi kabupaten/kota Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Rasio jumlah instruktur terhadap peserta Pelatihan Persentase LPK yang Terakreditasi Persentase LPK yang memiliki perizinan Jumlah penganggur yang dilatih Persentase lulusan bersertifikat pelatihan



VIII-456

**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**

		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase penyerapan lulusan Lulusan bersertifikat kompetensi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Data tingkat produktivitas total Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Persentase jumlah perusahaan yang Berselisih Jumlah mogok Kerja Jumlah penutupan Perusahaan Jumlah perselisihan Kepentingan Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan Jumlah perselisihan PHK Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**
”



VIII-457

8	PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten /kota yang telah dilatih PUG Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisisgender di tingkat kabupaten/kota Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan Pelatihan Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani



VIII-458

**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**

9	KETAHANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi Seimbang Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Tertanganinya kerawanan pangan Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tersedianya tanah untuk masyarakat Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee Dokumen Izin membuka tanah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota Penerbitan izin usaha pertanian Persentase prasarana yang digunakan Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-459

			Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualtas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten / kota Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dandampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani
12	KEENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP-el Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Penerbitan akta perkawinan Penerbitan akta Perceraian Penerbitan akta Kematian Penyajian data kependudukan
13	PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-460

			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Perintah Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara Elektronik Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**
”



VIII-461

14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	TFR (Angka Kelahiran Total) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	ketentuan peraturan perundang-undangan Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Provinsi V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**
”



VIII-462

16	KOMINFO	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	
17	KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Penerbitan ijin usaha Persentase fasilitas simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan kabupaten/kota Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk kopersidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pembiayaan Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupate/kota



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**
”



VIII-463

			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan
18	PENANAMAN MODAL (PTSP)	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal



VIII-464

**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**

			Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting Kegiatan pameran penanaman modal Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal Laporan realisasi penanaman modal Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Peningkatan prestasi olahraga	
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya buku profil daerah Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Persentase kelengkapan meta data kegiatan statistik sektoral
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kelengkapan meta data variabel sektoral Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**
”



VIII-465

			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, Pengkajian, penayaan keberagaman) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-466

			Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-467

			bahasa Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK
25	PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang Melakukan diversifikasi usaha RTP) Pelelangan Ikan yang operasional Presentase tempat pelelangan ikan yang operasional Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang Diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkas Sumber Daya Lokal**



VIII-468

			penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota Tingkat Hunian Akomodasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan Prasarana pertanian yang Digunakan Penerbitan izin usaha pertanian Persentase prasarana yang digunakan Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota
27	PERTANIAN	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Produktivitas pertanian per hektar per tahun	
28	URUSAN ENERGI	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana
	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berkbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-469

29		ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase kinerja pupuk Persentase alat –alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan, b. Toko swalayan Persentase penerbitan TDG Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahanberbaya di tingkat daerah Kab/Kota Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya Persentase koefisien variasi harga antar waktu Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun Berjalan Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku
30	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah Penetapan IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan



**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**



VIII-470

		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data Perusahaan Industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota
31	TRANSMIGRASI		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah satuan pemukiman yang dibina
32	INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Rasio PAD Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Opini Laporan Keuangan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal**
”



VIII-471

36	KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Asset Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	



”
Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal
”



VIII-472

**Tabel VIII.1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%							
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	%							
1.3	Laju Inflasi	%							
1.4	PDRB Perkapita	Rp.							
B	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	PENDIDIKAN								
1.1	Angka Melek Huruf	%							
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun							
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%							
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%							
1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%							
1.6	Angka partisipasi murni SD/MI	%	99.5	99.5	98	99	99	100	100
1.7	Angka partisipasi murni SMP/MTs	%	99.6	99.5	98	99	99	100	100
1.8	Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
2	KESEHATAN								
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	%	35	35	25	20	15	10	10
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.26	65.5	65.55	65.75	65.8	67	67



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-473

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	6.27	6.27	6.25	6.5	6	5	5
3									PERTANAHAN
3.1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Tanah Bersertifikat	%							
4	Ketenagakerjaan								
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	6.27	6.27	6.25	6.5	6	5	5
C	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga								
1									KEBUDAYAAN
1.1	Jumlah grup kesenian	Grup	11	11	15	206	206	206	
1.2	Jumlah gedung kesenian	Gedung	2	2	4	6	8	10	
2	Pemuda dan Olah Raga								
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	185	185	198	396	396	396	
2.2	Jumlah gedung olahraga	Gedung	1	1	4	6	8	10	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1									URUSAN PENDIDIKAN
1.1	Angka Melek Huruf	%	92.35	92.40	92.45	92.48	92.50		
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%							
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA	% % %							
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM)								



VIII-474

Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- SD/MI	%	99.5	99.5	98	99	99	100	100
	- SMP/MTs	%	99.6	99.5	98	99	99	100	100
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan								
	- SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	%	67.09	67.09	68	70	75	80	100
1.7	Jumlah guru dengan kualifikasi S1/D4	Guru	636	636	727	727	925	1136	100
1.8	Rasio sekolah / siswa								
	- SD/MI	%	0.88	0.88	0.76	0.72	0.67	0.50	0.5
	- SMP/MTS	%	0.95	0.95	0.87	0.84	0.73	0.61	0.6
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Rasio guru / siswa								
	- SD/MI	%	629,07	629,07	723	754	865	900	100
	- SMP/MTS	%	162.69	162.69	170.8	179	189	200	100
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Angka partisipasi PAUD	%	87	87	89	90	95	100	100
1.11	Angka Putus Sekolah								
	- SD/MI	%	6.20	6.2	6	5	4	2	2
	- SMP/MTS	%	87.36	87.3	50	45	40	30	30
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik (sarana dan prasarana lengkap)								
	- SD/MI	%	29.80	45.03	64.24	82.12	89.40	96.69	96.69
	- SMP/MTS	%	20.69	32.76	37.93	50.00	67.24	72.41	72.41
	- SMA/SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	91	92	93	95	97	99	100



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN KESEHATAN								
2.1	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	%	3	3	3	2	2	0	0
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	%	40	35	25	20	15	10	10
2.3	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	%	3	3	3	2	2	1	1
2.4	Angka Usia Harapan Hidup	%	65	65.5	65.55	65.75	65.8	67	67
2.5	Prosentase gizi buruk	%	62	6.25	6.25	6.5	6	5	5
2.6	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	74.5	77.4	77.4	78.3	79.2	80.3	85.5
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	46.3	55.8	55.8	63.3	64.6	67.4	68.5
2.8	Cakupan rumah tangga ber-pola hidup bersih dan sehat	%	70	75	75	85	85	85	100
2.9	Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar	%	46.8	73.5	73.5	74	75	76	76
2.10	Jumlah kunjungan rawat inap Rumah Sakit per hari (orang per hari)	%	4.96	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
2.11	Jumlah kunjungan rawat jalan Rumah Sakit per hari (orang per hari)	%	20.56	20	19.5	19	18.5	18	17.5
2.12	Jumlah kunjungan UGD per hari (orang per hari)		7.38	7	6.5	6	5.5	5	4.5
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM								
3.1	Persentase kondisi jalan dalam mantap.	%	71.53	73.84	76.16	78.48	80.79	83.11	83.11
3.2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap.	%	88.52	89.77	89.9	90.02	90.14	90.26	90.26
3.3	Panjang irigasi, rawa dan pengairan dalam kondisi baik.	M ²	589	789	989	1189	1389	1589	1589



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal



VIII-476

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Persentase pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh.	%	11.9	49.1	52.3	55.6	58.9	63.1	63.53
3.5	Persentase lingkungan kumuh di pedesaan.	%							
3.6	Tingkat ketersediaan infrastruktur daerah dalam kondisi baik.	%	75.55	66.1	71.1	76	75.4	78.4	90.51
4	PERUMAHAN								
4.1	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	85	763	1526	2289	3052	3819	3819
4.2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	63.91	66.41	69.61	73.01	76.53	80.33	80.33
4.3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu	%							
4.4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%							
4.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%							
4.6	Jumlah PKK aktif	Kelompok							
5	URUSAN PENATAAN RUANG								
5.1	Prosentase dokumen RDTR yang tersusun	%							
6	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Ya/tidak							
6.1	Ketepatan waktu penerbitan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda : - RPJPD;	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-477

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- RPJMD; - RKPD.	Ya/tidak Ya/tidak	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya	Ya Ya
6.2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.	%	2	2	2	2	2	2	10
6.3	Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya.	%	2	2	2	2	2	2	10
7	URUSAN PERHUBUNGAN								
7.1	Persentase pemasangan rambu-rambu (warning light, marka, guardrail)	%	50	55	65	75	80	85	
7.2	- Rambu- rambu	Buah	350	550	600	700	750	850	
7.3	- Warning Light	Unit	4	6	9	13	18	21	
7.4	- Marka	Meter	24.000	29.000	34.000	34.000	44.000	44.000	
7.5	- Guard Rail	Buah	0	5	10	15	20	22	
7.6	Panjang median jalan kondisi baik	Meter	245.500	295.870	346.240	396.610	446.980	497.350	
8	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
8.1	Persentase penanganan sampah/ Persentase sampah yang terangkut	%							
8.2	Persentase lingkungan hidup yang lestrasi.								
8.3	Persentase kawasan konservasi SDA.								
9	URUSAN PERTANAHAN								
9.1	Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan	Kali							
10	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
10.1	Penduduk ber KTP	%	85.5	85.7	85.8	86	86.1	86.3	



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-478

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3							
10.2	Bayi berakte kelahiran	%							
10.3	Pasangan berakte nikah	%							
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
11.1	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	26	30	40	50	60	70	
11.2	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	1.62	10	20	30	40	50	
11.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	14	20	30	40	50	70	
11.4	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	22	30	40	50	60	70	
12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
12.1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	%	41	51	62	74	86	100	100
13	Urusan Sosial								
13.1	Prosentase penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	%							
13.2	PMKS yang tertangani (orang)	%	2.63	3.09	3.26	3.36	3.48	3.61	3.61
13.3	Cakupan rumah bagi korban bencana alam dan PMKS.	Unit							
14	URUSAN KETENAGAKERJAAN								
14.1	Pencari kerja yang ditempatkan	%							
14.2	Keselamatan dan perlindungan	%							
15	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-479

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1	Usaha kecil dan menengah unggulan	%							
15.2	Koperasi Aktif	%							
16	URUSAN PENANAMAN MODAL								
16.1	Jumlah ijin yang diterbitkan	Buah	500 ijin	500 ijin	500 ijin	550 ijin	550 ijin	580 ijin	580 ijin
16.2	Jumlah Investor	PMA/PMDN	40,5 M	50 M	50 M	50,5 M	50,5 M	60 M	60 M
16.3	Perkembangan nilai realisasi PMDN	Rp.							
16.4	Perkembangan nilai realisasi PMA	US							
17	URUSAN KEBUDAYAAN								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	10	14	18	22	22
17.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	18	18	20	20	20	20	20
18	Urusan Pemuda dan Olahraga								
18.1	Jumlah organisasi olah raga yang aktif	Klub	11	11	11	14	16	18	18
18.2	Jumlah aktivitas dan pengembangan kepemudaan	Kali	9	9	12	14	16	18	18
18.3	Presentase olahraga berprestasi	%	12	12	16	20	24	28	28
19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI								
19.1	Jumlah pembinaan politik daerah	Parpol	70	70	0	0	70	0	70
19.2	Rasio Pos Siskamling yang aktif per jumlah desa/kelurahan	%							



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-480

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.3	Jumlah pembinaan politik terhadap LSM, Ormas OKP	kali	-	-	-	-	-	-	-
20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;								
20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	%							
20.2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	%							
20.3	Rasio pos siskamling per jumlah desa	%							
20.4	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%							
20.6	Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen.	jam							
20.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	%							
20.8	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WDP/WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.9	persentase Penegakan Perda	%							
20.10	Pengesahan Perda APBD tepat waktu (Desember Tahun ke n-1)	Ya/tidak							
20.11	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks 31 Januari) Tepat Waktu	%							



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.12	Persentase temuan audit yang ditindak lanjuti	%	78,56	70	60	50	40	30	
20.13	Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu	%							
20.14	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik	%							
20.15	Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	%							
20.16	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	0.72	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	100
20.17	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	%	43.44	55.02	53.60	55.29	56.79	58.08	100
20.18	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya/tidak							
20.19	Persentase peningkatan PAD	%							
21	URUSAN KETAHANAN PANGAN								
21.1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	Ton							
22	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
22.1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	20	30	40	55	60	80	
22.2	Jumlah aparatur desa yang mendapat pembinaan	orang	115	130	140	160	170	198	
22.3	Jumlah kelembagaan masyarakat /organisasi masyarakat pedesaan yang dibina	Unit	2	3	10	30	40	50	
23	URUSAN STATISTIK								
23.1	Buku KabupatenSeram Bagian Timur Dalam Angka	Buku	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	5 BUKU



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.2	Buku PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur.	Buku	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	1 BUKU	5 BUKU
23.3	Persentase keterisian SIPPD	%	5	20	40	60	80	100	100
24	URUSAN KERSIPAN								
24.1	Jumlah arsip yang dikelola	Berkas	2.039	200	200	200	200	200	1000
25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
25.1	SKPD yang terkoneksi dalam jaringan Sever Pemerintah Daerah	SKPD	7 SKPD	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	35 SKPD
25.2	Persentase peningkatan informasi kepada masyarakat.	%	15	17	20	40	66	100	100
25.3	Jumlah web/blog SKPD yang aktif (unit)	unit	4 unit	15 unit	20 unit	25 unit	30 unit	35 unit	35 unit
25.4	Persentase penyelesaian pengaduan (lempung dumas)	%	0	25	40	60	80	100	100
25.5	Media interpersonal sarasehan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26	URUSAN PERPUSTAKAAN								
26.1	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	8.062	200	200	200	200	200	1000
B	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1.1	Produksi berbagai jenis perikanan	Ton	20,134.32	21,169.41	22,317.87	23,625.64	25,031.41	26,540.86	26,540.86
1.2	Konsumsi Ikan	Kg	74.98	75.15	75.28	75.32	75.35	75.42	75.42
1.3	Pendapatan daerah dari sektor perikanan.	Rp.	70 Jt	75 Jt	80 Jt	95 Jt	105 Jt	120 Jt	120 Jt
1.4	Persentase pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir	%	4.12	4.14	4.16	4.21	5.01	5.15	5.15



”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-483

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Persentase pengelolaan potensi sumber daya kelautan	%	67.86	71.32	72.17	73.08	74.17	75.57	75.57
1.6	Cakupan hasil perikanan laut.	ton	21,559.76	22,674.87	23,532.24	24.693,16	26,531.31	28,365.62	28,365.62
1.7	Cakupan hasil perikanan tangkap.	ton	19.985.32	20,367.25	21,985.98	22,879.93	24,659.69	25,997.79	25,997.79
1.8	Cakupan lapangan kerja di sektor perikanan.	Orang	250	255	260	270	285	300	300
1.9	pengelolaan potensi kelautan di pulau-pulau kecil.	ton	16,532.21	16,932.37	17,132.54	17,213.43	17,532.32	18,352.89	18,352.89
2									URUSAN PERTANIAN
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rp.	102,43	103,23	103,55	103,70	104,20	105,43	106,55
2.2	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	%	2.914.080	3.059.784	3.212.773	3.373.412	3.542.082	3.719.187	4.091.105
2.3	Produktivitas padi dan jagung	(kw/ha)	3000	3500	4000	5000	6000	7000	28500
2.4	Produktivitas kedelai dan kedelai hitam	(kw/ha)		20	50	100	150	200	520
2.5	Cakupan herwan ternak sehat	%	26,75	40	53	60	70	100	100
2.6	Jumlah populasi sapi potong	Ekor	15.628						
2.7	Panjang jaringan irigasi, rawa dan pengairan dalam kondisi baik	km	10,570	20	30	40	100	200	400,570
2.8	Jumlah sarana/prasarana pertanian	unit	316	500	700	1000	1500	2000	6016
2.9	Jumlah ketersediaan pangan pokok masyarakat.	ton	80.247	88.272	97.099	106.809	117.490	129.239	619.155
2.10	Cakupan hasil pertanian yang dipasarkan	ton	100	150	300	450	500	600	2100
3									URUSAN KEHUTANAN
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Luas lahan kritis dan lahan tidak produktif yang tertanami	Ha	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Jumlah produksi kayu rakyat (jati dan	M ³	-	-	-	-	-	-	-



Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
Berbasis Sumber Daya Lokal



VIII-484

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 20 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%							
4.2	Cakupan kawasan pertambangan berkelanjutan.								
4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik.								
4.4	Persentase potensi geologi.								
5	Urusan Pariwisata								
5.1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	37,112	37,765	38,231	38,842	39,311	39,996	42,271
5.2	Ketersediaan fasilitas destinasi kepariwisataan	unit		3	6	9	12	16	20
5.3	Peningkatan promosi kepariwisataan	event	1	2	3	4	5	6	10
6									
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%							
6.2	Revitalisasi pasar tradisional								
7									
7.1	Pertumbuhan Industri	%							
8									
8.1	Persentase transmigrasi swakarsa	%							
III									
A	Fokus Kemampuan Ekonomi daerah								
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,								



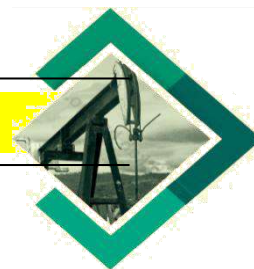
”
**Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur
 Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing,
 Berbasis Sumber Daya Lokal**
 ”



VIII-485

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.								
2	Pertanian								
B									
1	Perhubungan								
2	Penataan Ruang								
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	3.21	10.15	35.15	55.45	75.25	85.55	25.35
2.2	Luas wilayah produktif	Ha	13.76	1,426.92	16,111.56	18,518.51	23,907.80	37,037.02	68.80
2.3	Luas wilayah industri	Ha	68.26	25.26	35.12	46.75	58.36	85.71	95.21
2.4	Luas wilayah banjir	Ha	5.15	4.091	12.273	36.819	54.059	66.605	51.50
3	Fasilitas Bank dan Non Bank								
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang								
3.2	jumlah perusahaan asuransi dan cabang								
3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran								
3.4	jumlah penginapan/hotel								
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Pencemaran Status Mutu Air								
5	Komunikasi dan Informatika								
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik								
5.2	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp		26	40	45	50	60	75	75
C	Fokus Iklim Investasi								
1	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan								

BAB IX. PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021–2026 merupakan satu kesatuan dari system Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 138) akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2016-2021. Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 atas nama Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur, SE.

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi dan misi dan disisi lain, melalui RPJMD tersebut juga akan menjadi dasar dalam perumusan

dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten Seram Bagian Timur.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan dan agenda kerja pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka ditetapkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal daerah Kabupaten/Kota sedang melakukan proses penyusunan RPJMD, Penyusunan RPKD Tahun 2021 mengacu pada:
 - a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD provinsi, program prioritas nasional dalam RKP.
 - b. Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah.
 - c. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
2. Bahwa dalam penyusunan Rancangan RPKD, Pemerintah Daerah juga :
 - a. Melakukan pemetaan, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal tersebut tidak merubah target dan indikator dalam RPJM dan hasil pemetaan dimuat dalam Berita Acara dan disampaikan ketika fasilitasi RPKD.
 - b. dalam hal proses pemetaan terdapat program dan kegiatan RPKD Tahun 2021 yang belum sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, dilakukan pemutahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - c. Pemutahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka focus pembangunan diarahkan kepada:
 - a. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
 - b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 - c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
 - d. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

9.3. PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan didasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMD menyajikan input teknokratik bagi penyusunan RPJMD 2021-2026 sebelum ditetapkannya kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur hasil pemilihan 9 Desember 2020.

Rancangan teknokratik RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan perspektif teknokratik bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 pasal 44 menegaskan, rancangan teknokratik RPJMD disusun dengan sistematika setidaknya yang memuat 4 hal, yaitu: (1) pendahuluan; (2) gambaran umum kondisi Daerah; (3) gambaran keuangan Daerah; dan (4) permasalahan dan isu strategis Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bagian bab berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Pada bagian bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Pada bagian bab ini akan menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bagian bab ini akan diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bagian bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab IX Penutup

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, pedoman dan kaidah pelaksanaan perencanaan transisi.

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 ini juga menyediakan framework yang relative komprehensif, bagi kepala daerah untuk menyusun program kerja yang dapat dicapai (*achievable*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) di masa jabatan mendatang. Dokumen ini telah mengidentifikasi gambaran umum Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan cakupan urusan pemerintah, dan ditambahkan penjelasan ringkas dampak Covid-19 bagi masyarakat, dengan disertai gambaran keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dijelaskan secara lebih utuh. Dengan demikian, identifikasi isu strategis dan agenda kebijakan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat disusun secara lebih tepat. Aspek kemiskinan, ketersediaan air baku, layanan kependudukan, pendidikan, dan pengembangan industri yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan dan pengembangan kapasitas SDM menjadi titik penting yang perlu di tekankan dalam pembangunan. Tentu saja, penyusunan RPJMD ini masih memerlukan perlu tindak lanjut berupa pembahasan dengan stakeholder terkait untuk mempertajam isu strategis, tujuan dan sasaran serta indikator dan target kinerja yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur.



Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuat sebagai dokumen perencanaan daerah yang digunakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi pedoman pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat tercapai sesuai yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
ABDUL MUKTI KELIBAS